langkah cerdas
menuju perbaikan kinerja

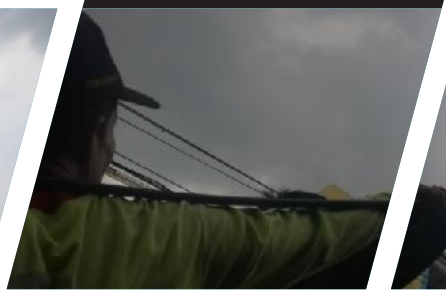
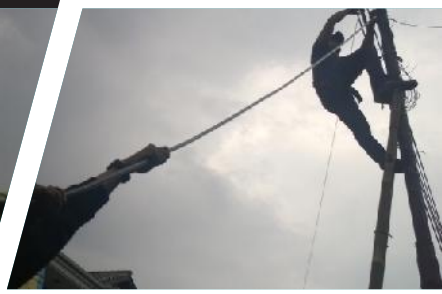

smart steps
to improve our performance

LAPORAN TAHUNAN
2014
annual report

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

LAPORAN TAHUNAN
2014
annual report

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Langkah cerdas menuju perbaikan kinerja

Smart steps to improve our performance

Di tahun 2014, PT INTI (Persero) berhasil mendapatkan beberapa kontrak kerja dengan nilai yang menggembirakan. Namun demikian, kinerja perusahaan menurun dengan mengalami kerugian komprehensif yang cukup besar. Hal ini tak lepas dari hambatan eksternal, dampak krisis global, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan hambatan-hambatan lainnya di lapangan. Menghadapai hal tersebut, PT INTI (Persero) berusaha keras untuk lebih fokus dan konsisten dalam menjalankan kegiatan usaha, menyusun strategi perusahaan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, inovasi produk, mengkaji dan mengembangkan potensi pasar, guna menghadapi tantangan ke depan.

Memasuki tahun 2015, INTI siap mengambil langkah cerdas menuju perbaikan kinerja perusahaan.

In 2014, PT INTI (Persero) managed to get some work contracts with a value that is encouraging. Nevertheless, the company's performance declines with comprehensive experience sizable losses. It is not separated from the external barriers, the impact of the global crisis, fluctuations in the exchange rate against foreign currencies, and other obstacles on the ground. Faced with this, PT INTI (Persero) strive for a more focused and consistent in carrying out business activities, the company strategy to optimize its resources, product innovation, assess and develop the potential of the market, in order to face the challenges ahead. Entering 2015, INTI ready to take smart steps towards improving the performance of the company.

Ringkasan Eksekutif

Executive Brief

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh perjuangan dalam sejarah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), selanjutnya disebut sebagai INTI. Di awal tahun 2014 dengan kontrak yang sudah diperoleh yang cukup besar membuat optimis akan membuat langkah awal baru bagi INTI. Fokus perusahaan berada pada proyek berskala nasional dengan nilai saldo kontrak per 1 Januari 2014 sebesar Rp. 6,49 triliun. Peroleh kontrak yang sudah diperoleh ini didominasi oleh pekerjaan Proyek pembangunan Jaringan pita lebar menggunakan teknologi Fiber To The Home (FTTH) dengan skema bisnis Trade In Trade Off (TITO)Telkom (selanjutnya disebut Proyek TITO) dan Proyek Sistem Monitoring & Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMP BBM) Pertamina. Nilai kontrak Proyek TITO yang sudah didapat diawal tahun 2014 sebesar Rp. 1,93 triliun. Sedangkan peroleh kontrak dari SMP BBM sebesar Rp. 4,39 triliun untuk 5 (lima) tahun kontrak. Sehingga semua sumber daya yang dimiliki perusahaan terfokus pada dua proyek besar ini, baik sumber daya manusia, financial, maupun material.

2014 was a year full of struggle in the history of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), hereinafter referred to as INTI. At the beginning of 2014 with a contract that has gained a sizable make optimistic will create a new starting point for INTI. The company's focus is on national projects with the balance of the contract value per January 1, 2014 amounted to Rp. 6.49 trillion. Obtain a contract that has been obtained is dominated by job broadband network development project using technology Fiber To The Home (FTTH) with business scheme Trade In Trade Off (TITO) Telkom (hereinafter called Project TITO) and Project of Fuel Monitoring & Control Systems (SMP BBM) of Pertamina. TITO project contract value which has been obtained at the beginning of 2014 amounted to Rp. 1.93 trillion. While the contract of SMP BBM obtained Rp. 4.39 billion for the five (5) year contract. So that all resources owned company focused on two major projects, both human resources, financial, and material.

Akan tetapi, rencana yang sudah disusun perusahaan ini mengalami beberapa perubahan baik dari regulasi maupun situasi bisnis telekomunikasi di Indonesia. Proyek TITO dengan PT Telkom, yang semula menjadi tumpuan pendapatan perusahaan, tetapi dengan kondisi eksternal dan internal perusahaan tidak dapat mencapai target pendapatan dari proyek tersebut. Perubahan teknologi dari Fiber to The Curb (FTTC) ke teknologi FFTH menyebabkan proses pelolosan kabel tembaga menjadi terhambat. Pada teknologi FTTC, INTI tidak berhubungan langsung dengan masyarakat karena fiber hanya ditarik ke rumah kabel milik Telkom. Dengan Teknologi FTTH kabel ditarik sampai ke rumah-rumah pengguna layanan Telkom. Proses perijinan dan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai teknologi FTTH ini menjadi penghambat utama dalam eksekusi penyelesaian proyek. Sehingga dari perolehan kontrak sebesar total sebesar Rp. 2,65 triliun rupiah dengan target sebesar penjualan Rp 1,77 triliun di tahun 2014 hanya tercapai sebesar Rp 467,74 miliar atau 26,4% dari target.

However, plans are already prepared the company is experiencing some kind of regulatory changes and the situation of the telecommunications business in Indonesia. TITO project with PT Telkom, which became the foundation of the company's revenue initially, but with the external and internal conditions can not achieve the target revenue of the project. Technological change of Fiber to the Curb (FTTC) technology to FFTH cause the passage of copper wires to be blocked. In FTTC technology, INTI does not deal directly with the public because only fiber cable is pulled into the house owned by Telkom. With a retractable cord FTTH technology to homes Telkom service users. The permitting process and the lack of public understanding of FTTH technology is becoming a major obstacle in the execution of project completion. So from the acquisition contract for a total of Rp. 2.65 trillion rupiah with sales target of Rp 1.77 trillion in 2014 only reached Rp 467.74 billion, or 26.4% of the target.

Proyek SMP BBM Pertamina diharapkan dapat menjadi kurva kedua setelah Proyek TITO PT Telkom. Solusi yang ditawarkan disebut dengan SMP BBM yaitu dengan penerapan teknologi informasi di SPBU Pertamina yang memiliki kemampuan mendaftar konsumen (kendaraan), mencatat transaksi pembelian BBM, melakukan proses komputasi pembatasan pembelian BBM, mengirimkan ke Data Center, dan membuat pelaporan. INTI harus mengintegrasikan 4.987 SPBU menjadi sistem SMP BBM yang tersebar di 34 Provinsi serta memasang RFID di 100 juta kendaraan. Pada fase awal pembangunan difokuskan di daerah DKI Jakarta. Pembangunan untuk wilayah DKI Jakarta hingga di bulan Mei 2014 sudah berhasil mengintegrasikan 181 SPBU menjadi SMP BBM dan sebanyak 374.401 kendaraan yang sudah dipasang RFID. Namun demikian seiring dengan perubahan kondisi ekonomi global yang berubah seperti suku bunga meningkat kurs Rp/USD : 9700,- menjadi 12.000, -Inflasi 6% menjadi 8,79% Suku bunga pinjaman 5,25% menjadi 7,25% maka proses pendanaan menjadi terhambat karena project SMP BBM ini menjadi tidak feasible. INTI sudah melakukan komunikasi dengan PERTAMINA untuk amandemen kontrak yang menyangkut harga, waktu dan perubahan lingkup pekerjaan. Tetapi karena ada perubahan kebijakan mengenai BBM bersubsidi dari Pemerintah dan perubahan top manajemen di Pertamina proses amandemen kontrak menjadi berlarut-larut. Hal ini yang menyebabkan proyek ini menjadi tertunda dan terancam putus lebih awal.

Pertamina's SMP BBM project is expected to be the second curve after TITO Project of PT Telkom. The solution offered is called the SMP BBM is the application of information technology in Pertamina gas station that has the ability to register the consumer (vehicle), noting the purchase of fuel, the process of computing fuel purchase restrictions, send to the Data Center, and reporting. INTI must integrate 4987 SPBU (Fuel Retail outlet) into an SMP BBM system spread over 34 provincial and install RFID in 100 million vehicles. In the initial phase of development is focused in the area of Jakarta. Development for Jakarta area until in May 2014 was successfully integrated 181 SPBU into SMP BBM and as many as 374 401 vehicles already installed RFID. However, due to changes in global economic conditions change such as rising interest rates exchange rate of Rp / USD: 9700 to 12,000, inflation 6% to 8.79%, loan interest rate of 5.25% to 7.25%, the funding process becomes hampered because this project becomes feasible. INTI has to communicate with Pertamina for contract amendments concerning the price, time and changes in the scope of work. But because there is a change of policy regarding subsidized fuel from government and top management changes at Pertamina contract amendment process be protracted. This causes the project to be delayed and the danger of dropping out early.

Oleh karena penyelesaian proyek mengalami kemunduran, cash flow perusahaan juga terkena imbasnya. Pembiayaan proyek melalui dana pihak ketiga merupakan salah satu dari akar penyebab kerugian perusahaan dimana beban pendanaan naik sebesar Rp 73,83 miliar dari tahun sebelumnya menjadi Rp 96,29 miliar atau 328,65% dari periode yang sama

Therefore the completion of the project suffered a setback, the company's cash flow is also affected. Project financing through third-party funding is one of the root causes of the loss which the company financing costs increased by Rp 73.83 billion from the previous year to Rp 96.29 billion or 328.65% from the same period last year. Debt to Equity Ratio (DER) has reached a point

pada tahun lalu. Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan telah mencapai poin 885,94% dan cash ratio hanya 3,13%. Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat memprihatinkan bagi INTI yang mengalami degradasi dari segi keuangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan mengalami rugi komprehensif sebesar Rp 265,85 miliar dari total Rp 817,89 miliar penjualan yang berhasil dicapai.

885.94% and the cash ratio is only 3.13%. 2014 was a year of very concern for INTI degraded financially. For the first time in the history of the company suffered a comprehensive loss of Rp 265.85 billion from Rp 817.89 billion in total sales are achieved.

Memasuki tahun 2015, total saldo kontrak per 1 Januari 2015 termasuk kontrak SMP BBM adalah sebesar Rp. 6,61 triliun. Nilai saldo kontrak selain SMP BBM adalah sebesar Rp. 2,22 triliun dan sebesar Rp. 2,17 triliun berasal dari saldo kontrak TiTo Telkom. Tagihan bruto kepada pemberi kerja sebesar Rp. 971,56 miliar. Belajar dari pengalaman di 2014, strategi perusahaan di tahun 2015 difokuskan pada operasional ekselen, menciptakan bisnis baru, pengelolaan modal kerja dan peningkatan produktifitas. Saldo kontrak dari 2014 diharapkan dapat menjadi cash in yang dapat membiayai perusahaan di tahun 2015 ini. INTI juga akan fokus kepada pemasaran produk-produk baru ber-brand “Smart” antara lain: Inti Smart Transportation, Inti Smart Converter Kit Gas, Inti Smart Reader, Inti Smart Meeting dan Inti Smart Light. Diharapkan dari saldo kontrak 2014, peroleh kontrak baru yang dapat menjadi penjualan di tahun 2015, program operasional ekselen dan pengelolaan modal kerja ditambah dengan pelaksanaan manajemen resiko, Good Corporate Gorvenance (GCG) dan penerapan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang lebih baik akan dapat mendongkrak performance perusahaan.

Entering 2015, the total balance of the contract per January 1, 2015 including SMP BBM contract is Rp. 6.61 trillion. The balance of the contract in addition to SMP BBM is Rp. 2.22 trillion and Rp. 2.17 trillion comes from the balance of the contract TITO of Telkom. Gross invoice to the employer Rp. 971.56 billion. Learning from the experience in 2014, the company's strategy in 2015 focused on operational excellence, creating a new business, working capital management and increased productivity. The balance of the contract of 2014 is expected to be able to finance the cash in the company in 2015's. INTI also will focus on the marketing of new products Air-brand "Smart" among others: INTI Smart Transportation, INTI Smart Converter Kit Gas, INTI Smart Reader, INTI Smart Meeting and INTI Smart Light. Expected from the balance of the contract in 2014, earned a new contract that can be sales in 2015, the operational excellence program and working capital management coupled with the implementation of risk management, Good Corporate Gorvenance (GCG) and the application of Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) better be able to boost company performance.

Selain strategi-strategi di atas, INTI juga berusaha untuk kembali menjadi manufaktur perangkat telekomunikasi dan komponen perangkat telekomunikasi. Diharapkan peran perusahaan sebagai agen perubahan dan lokomotif industri manufaktur produk dan komponen perangkat telekomunikasi untuk kemandirian industri nasional menjadi lebih signifikan. Melalui strategi-strategi perusahaan ini, perusahaan optimis performansi perusahaan di tahun 2015 akan menjadi lebih baik.

In addition to the above strategies, INTI is also trying to get back into the manufacturing of telecommunications equipment and telecommunications equipment components. It is expected the company's role as an agent of change and locomotive manufacturing industry products and components telecommunications device for the independence of the national industry becomes more significant. Through the company's strategies, the company is optimistic performance of the company in 2015 will be better.

Ikhtisar Keuangan Lima Tahun
Five Years Financial Highlights

KEUANGAN (Dalam Juta Rupiah)	2014	2013	2012	2011	2010	FINANCIAL (In Million Rupiah)
LAPORAN LABA RUGI						**INCOME STATEMENT**
Pendapatan	817,889.8	1,466,790.3	1,227,699.7	723,117.0	647,815.0	Revenue
Total Beban	790,849.9	1,245,678.4	1,185,222.2	701,823.0	618,642.0	Cost of Sales
Laba Kotor	27,039.9	221,111.9	182,007.3	122,428.0	107,046.0	Gross Profit
Laba Usaha	(191,605.1)	75,167.8	42,477.5	21,294.0	29,173.0	Operating Income
Laba Tahun Berjalan	(265,846.1)	4,300.4	16,688.8	10,429.0	4,763.0	Profit Current Period
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada:						Profit Current Period Atributable to:
Pemilik Entitas Induk	(265,959.7)	4,074.5	16,331.7	10,226.0	4,586.0	Owner the Parent Company
Kepentingan non Pengendali	113.6	225.9	357.1	203.0	177.0	Non Controlling Interest
Laba per Saham (dalam rupiah penuh)	759,560.3	11,539.1	47,682.	29,797.1	13,608.6	Earning per Share (full amount)
ASET						**ASSETS**
Aset Lancar	1,520,342.1	1,639,138.3	978,230.5	922,334.3	579,791.6	Current Assets
Penyertaan Jangka Panjang	21,443.0	21,443.0	12,343.0	11,743.0	2,964.2	Investment in Shares of Stock
Aset Tetap (Bersih)	31,949.6	40,601.3	41,040.4	36,188.7	32,260.8	Property, Plan & Equipment (Net)
Aset Lain-lain (Bersih)	153.148.1	138,148.0	38,618.2	30,740.4	22,923.9	Other Assets
Jumlah Aset	1,704,869.6	1,822,663.4	1,070,232.1	1,001,006.4	637,941.6	Total Assets
LIABILITAS DAN EKUITAS						**LIABILITIES AND EQUITY**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,460,138.8	1,317,434.5	584,578.4	538,304.9	180,307.4	Total Short Term Debt
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	68,406.1	63,058.1	47,633.3	39,917.9	41,661.9	Total Long Term Debt
Kepentingan Non Pengendali	3,790.1	3,676.5	3,450.6	3,113.9	3,039.4	Non Controlling Interests
Jumlah Ekuitas	176,324.6	442,170.7	434,569.8	419,669.7	412,932.0	Total Stockholders' Equity
Jumlah Liabillitas dan Ekuitas	1,704,869.6	1,822,663.4	1,070,232.1	1,001,006.4	637,941.6	Total Liabilities & Equity
RASIO KEUANGAN						**FINANCIAL RATIO**
Laba Kotor Terhadap Penjualan	3.3	15.1	14.8	16.9	16.5	Gross Profit to Sales
Current Ratio	104.1	128.3	167.3	171.3	321.6	Current Ratio
EBITDA Margin	(9.88)	4.4	7.2	7.2	6.1	EBITDA Margin
Return on Assets (ROA)	(15.6)	0.2	1.5	1.0	0.7	Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)	(60.1)	1.0	4.0	2.5	1.1	Return on Equity (ROE)
PAJAK DAN DEVIDEN						**TAX AND DIVIDEND**
Pajak	79,747.2	96,281.0	160,830.6	89,777.0	67,156.0	Tax
Deviden *)	*	-	-	1,023.0	459.0	Dividend

*) Deviden akan ditentukan pemegang saham pada RUPS Pertanggungjawaban Kinerja 2014
Dividends will be determined shareholders at the GMS of 2014 Performance Accountability

Pendapatan
Revenue

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

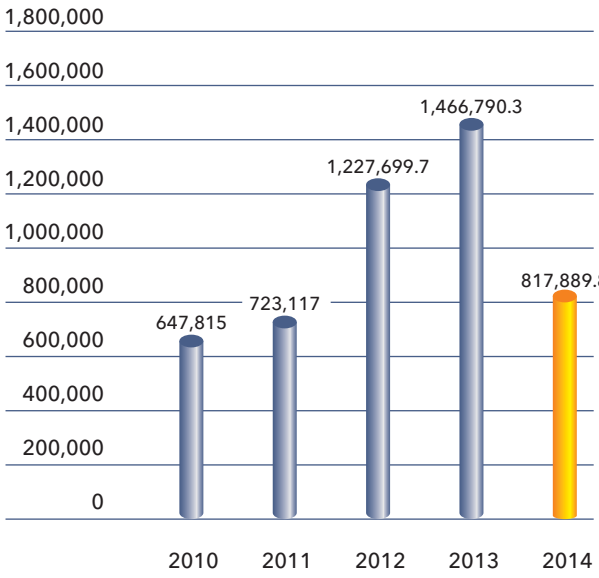

Laba Tahun Berjalan
Profit Current Period

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

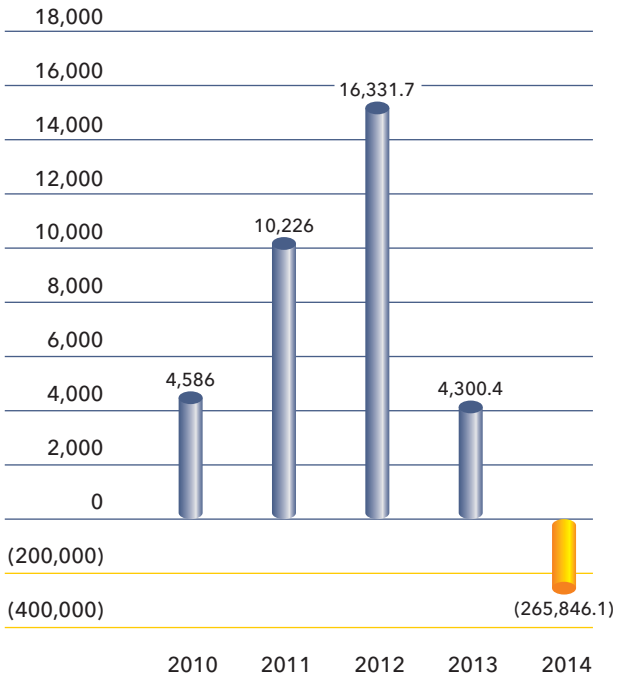

Jumlah Aset
Total Assets

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

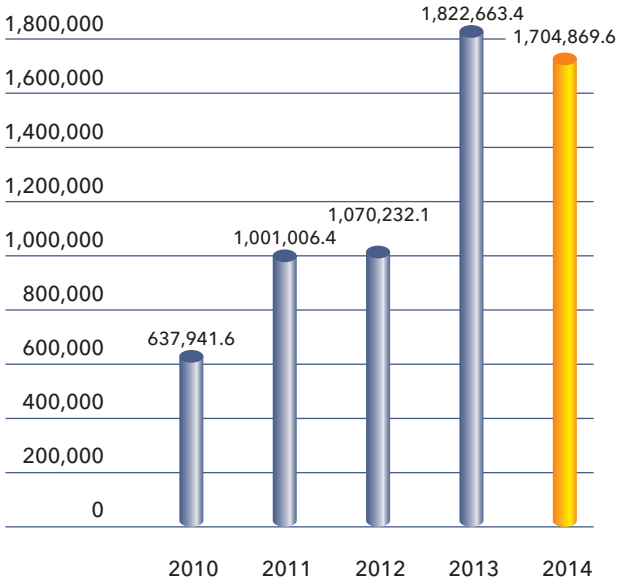

Pajak dan Deviden
Tax and Dividend

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

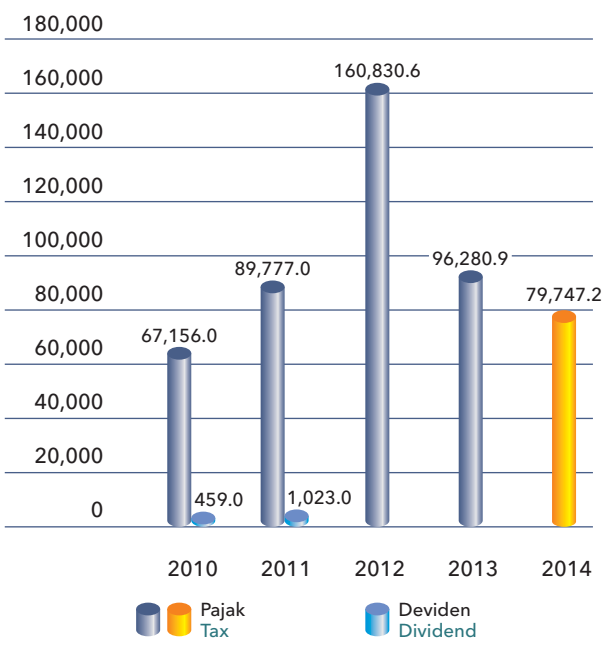

Ikhtisar Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Highlights

Berdasarkan Self-Assessment atas penerapan praktik-praktik GCG, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada perusahaan mencapai predikat kategori "Baik", dengan Skor 78,55. Capaian Skor masing-masing aspek governance terinci sebagai berikut:

Based on The Self-Assessment of the application of corporate governance practices, it can be concluded that the conditions for the application of the GCG in the company earned a predicate of "Good" category, score is 78.55. Achievement scores of each aspect of governance detailed as follows:

No.	Aspek Governance	Bobot value	Capaian score	Presentase percentage	Govenance Aspect
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,18	88,22	Commitment to implementation of Good Corporate Governance Sustainably
II	Pemegang Saham dan RUPS	9	8,06	89,50	Shareholders and RUPS (GMS)
III	Dewan Komisaris	35	26,92	76,93	Board of Commissioners
IV	Direksi	35	31,42	89,77	Board of Directors
V	Pengungkapan Informasi danTransparansi	9	5,97	66,37	Disclosure of Information and Transparency
	Sub Total	95	78,55		Sub-total
VI	Aspek lainnya	5	0		Other aspects
	TOTAL	100	78,55		TOTAL

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

ISO 9001:2008
berlaku
sampai dengan
14 November 2014
valid to Nov. 4, 2014

Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
berlaku
sampai dengan
Agustus 2016
valid to August 2016

ISO 14001:2004
berlaku
sampai dengan
22 Mei 2015
valid to May 22, 2015

Audit Sistem BUMN marketing Award 2014
kategori
strategic marketing
dan
tactical marketing
strategic and tactical marketing categories

Penghargaan Kecelakaan Nihil
Kementerian
Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
RI
Zero Accident
Awards

Best Customer Appreciation
PT Telkom, Tbk.

CIQS 2000:2009
Berlaku
sampai dengan
11 Juli 2017
valid to July 11, 2017

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
kategori BUMN,
Komisi Informasi
Pusat RI
Appreciation for Disclosure to The Public

Peristiwa penting 2014
Significant events during 2014

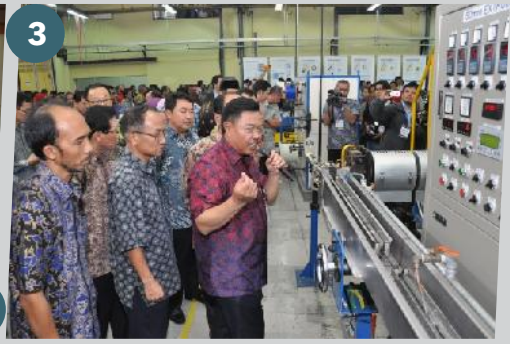

1. Kunjungan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, 5-2-2014
   Visit SOEs Minister Dahlan Iskan
2. MOU INTI - BPPT, 21-8-2014
3. Peresmian IGOC, 28-2-2014
   IGOC Inauguration
4. MOU INTI - KAI, 29-1-2014
5. UCL GARANSI, 1-7-2014
6. UCL GARANSI, 14-9-2014
7. Sertijab Direksi, 21-3-2014
   Handover Position of Directors
8. Kunjungan Lemhamnas, 21-5-2014
   Visit Lemhamnas
9. Ritech Expo, 9-8-2014
10. Penandatanganan MTN 2, 14-2-2014
    Signatory MTN

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11. MOU INTI - Jamkrindo, 19-5-2014
12. Kunjungan Kementerian Pertahanan, 29-12-2014
    Visit Ministry of Defence
13. Peresmian Fasprod INTI, 28-2-2014
    Inauguration of INTI's Production Facilities
14. Workshop Manajemen Risiko, 3-6-2014
    Risk Management Workshop
15. Kunjungan DPR, 20-11-2014
    VISIT Parliament
16. Marketing BUMN Days, 21-8-2014
17. UCL System PLC, 2-7-2014
18. Indodefence 2014, 5-11-2014
19. Launching ATM Kesehatan, 10-11-2014
    ATM of Health Launching

Daftar Isi
Table of Content

1 Ringkasan Eksekutif
Executive Summary

4 Ikhtisar Keuangan Lima Tahun
Five Years Financial Highlights

6 Ikhtisar Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Highlights

7 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

8 Peristiwa Penting 2014
Significant Events During 2014

10 Daftar Isi
Table of Content

12 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

12 Identitas Perusahaan
Company Identity

12 Sekilas PT INTI (Persero)
PT INTI (Persero) in brief

14 Perjalanan INTI
INTI's Journey

17 Bidang Usaha
Business Fields

19 Produk dan Layanan
Product and Services

27 Daftar Entitas Anak
List of Subsidiaries

29 Struktur Organisasi
Organization Structure

30 Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan
Vision, mission and values

32 Prospek Usaha
Prospects

32 Analisa Faktor Eksternal dan Internal
Analysis of External and Internal Factors

33 Strategi Perusahaan
The Company Strategy

36 Informasi Pemegang Saham
Information on Shareholders

37 LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
Report to The Shareholders

38 Laporan Dewan Komisaris
Report From The Board of Commissioners

42 Profil Dewan Komisaris
Commissioners Profile

44 Laporan Direksi
Report From The Board of Directors

51 Profil Dewan Direksi
Directors Profile

54 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas Laporan Tahunan
Statement Letters of The Member of The Board of Commissioners and Board of Directors

55 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN
Management's Discussion and Analysis over The Company's Performance

56 Tinjauan Pemasaran
Marketing Overview

65 Tinjauan Operasional
Operational Review

82 Tinjauan SDM
HR Overview

92 Tinjauan Keuangan
Financial Overview

94 Analisis Kinerja Keuangan
Analysis of Financial Performance

96 Analisis Posisi Keuangan
Analysis of Financial Position

102 Arus Kas
Cash Flow

104 Kemampuan Membayar Utang
Solvency

105 Kolektibiltas Piutang
Collectibility of Receiveables

105 Bahasan Mengenai Kegiatan Yang Material Untuk Investasi Barang dan Modal
Review of The Material Investment Commitments Capital Goods

106 Pencapaian Target 2014
Target Achievement 2014

107 Informasi dan Fakta Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Keuangan
Information and material facts occurring after the date of the financial statements

107 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi.
Information Material Transactions which Contain Conflict of Interest and / or Transactions Dith a Afiliates.

107 Uraian Mengenai Kebijakan Akuntansi
Description of The Change of Accounting Policy

108 Perbandingan Tingkat Profitabilitas
Comparison of Profitability Level

109 Kebijakan Akuntansi Terpenting
The Important Accounting Policy

115 Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi
Disclosure of Related Party Transaction

117 Pengungkapan Yang Berhubungan Dengan Aset Tetap
Disclosures Relating to Fixed Assets

117 Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya
Recents Development on Financial Accounting Standards and Other Regulations

118 Uraian mengenai Kebijakan Dividen
Description about Dividen Policy

119 TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

120 Pendahuluan
Preliminary

122 Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

124 Implementasi GCG
GCG Implementation

129 Deskripsi Dewan Komisaris
Description of The Board of Commssioners

142 Deskripsi Dewan Direksi
Description of The Board of Directors

156 Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan
Description of the duties and functions of the Secretary of the Company

160 Uraian Mengenai Unit Audit Internal
Description of Internal Audit Unit

165 Akuntan Perseroan
Corporate Accountant

165 Uraian Manajemen Risiko Perusahaan
Description of Company Risk Management

172 Analisa Peningkatan Pelayanan Pelanggan
Analysis of Customer Service Improvement

172 Mekanisme Penanganan Keluhan Pelanggan
Customer Complaints Handling Mechanism

173 Garansi Produk
Product Waranty

173 Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan
Important matters that are being faced by companies, entities, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who served during a period of annual report

174 Akses informasi dan data perusahaan
Access to information and corporate data

174 Bahasan Mengenai Kode Etik
The Discussion of The Ethics Code

181 Pengungkapan mengenai whistleblowing system
Disclosure about Whistle Blowing System

196 TANGGUNG JAWAB SOSIAL & PERUSAHAAN
Corporate social responsibility

196 Pendahuluan
Preliminary

198 Realisasi Program CSR/ PKBL
CSR/ PKBL Realization

195 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Consolidated of Financial Statements

Identitas Perusahaan
Company identity

Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan
Company Name and Full Address:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri T elekomunikasi Indonesia
Limited Liability Company (Persero) PT Industri T elekomunikasi Indonesia

Kantor Pusat
Headquarters:
Jl. Moch. T oha No. 77 Bandung 40253
Tlp : (62-22) 5201501 (10 Saluran)
Fax : (62-22) 5202444
E-mail : info@inti.co.id
http://www.inti.co.id

Kantor Cabang Jakarta
Jakarta Branch Office:
Gedung Setiabudi 2, Lantai 2, Suite 201
Jl. H.R. Rasuna Said Kav . 62 Kuningan
Jakarta 12920
Tlp : (62-21) 52900829
Fax : (62-21) 52900826

Sekilas PT INTI (Persero)
PT INTI (Persero) in brief

Perusahaan didirikan sebagai evolusi dari kerja sama PN Telekomunikasi dan Siemen AG pada tahun 1966. Kerja sama ini berlanjut pada pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) sebagai Bagian dari LPP Postel pada tahun 1968. Pada tahun 1974, bagian ini dipisahkan dari LPP Postel menjadi sebuah Perseroan Terbatas yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Pendirian Perusahaan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 34 tahun 1974 tanggal 23 September 1974 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: Kep-1771/MK/IV/12/1974 tanggal 28 Desember 1974 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan. Anggaran Dasar Perusahaan dibuat oleh Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Nomor: 30 tanggal 19 Juli 2012, dan telah mendapat persetujuan

The company was founded as the evolution of cooperation PN Telecommunications and Siemens AG in 1966. This cooperation continues to the formation Factory Telephone and Telegraph (PTT) as part of the LPP Postel in 1968. In 1974, this part of the LPP Postel separated into a Limited Liability Company under the auspices of the Directorate General of Post and Telecommunication. The company is based on the establishment of the Indonesian Government Regulation No: 34 of 1974 dated 23 September 1974 concerning remittance of capital for the establishment of the Republic of Indonesia (Persero) in the Telecommunications Industry and the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.: Kep-1771/MK / IV/12/1974 dated December 28, 1974 on the Establishment of the Company's capital. Articles of Association of the Company made by a Deed in Lieu Warda Alurmei Sungkar, S.H., No. 322 dated December 30, 1974 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: YA5/273/10 dated August 1, 1975, as amended several times, most recently by Deed notary Muhammad Hanafi, S.H., No. 30 dated July 19, 2012, and was approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of

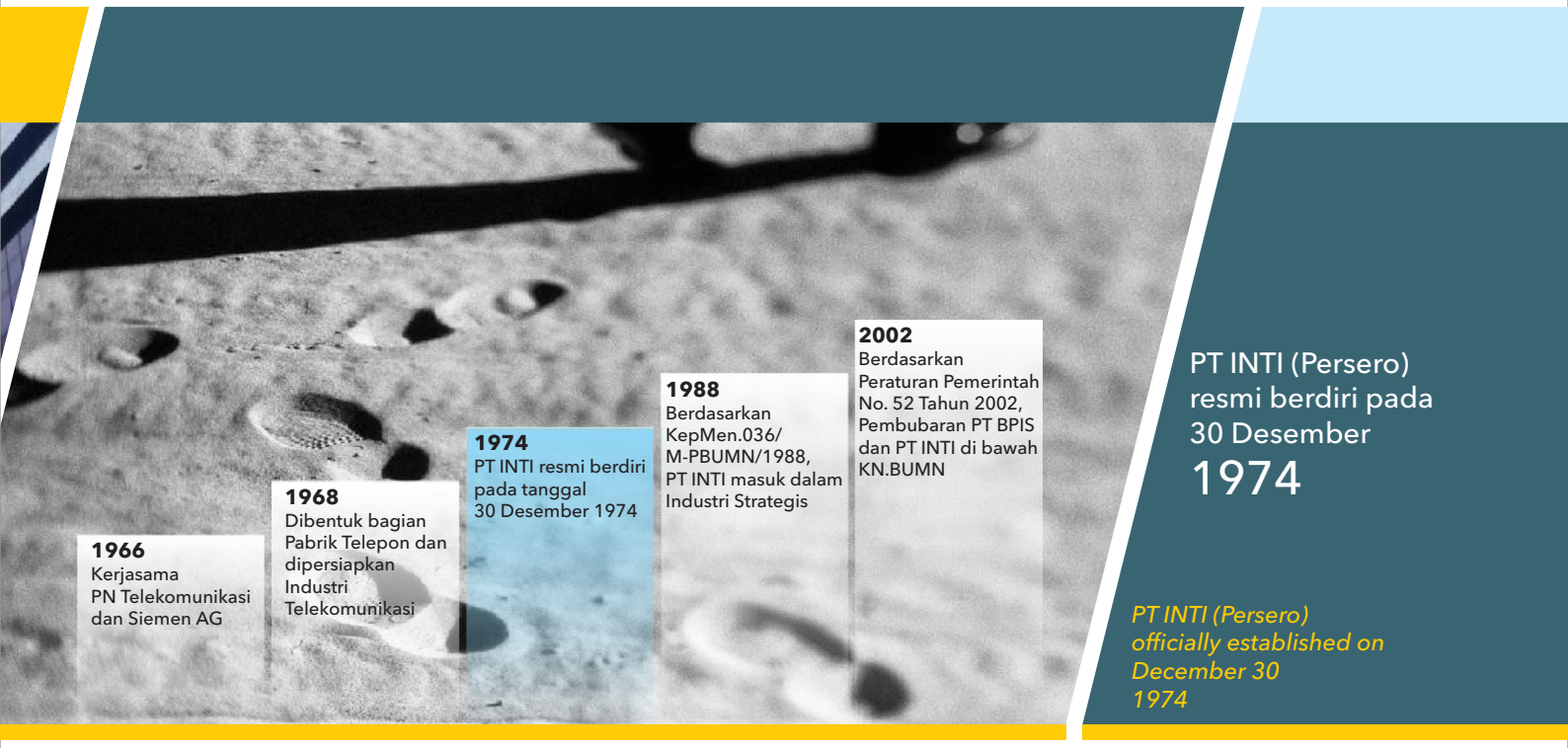

PT INTI (Persero) resmi berdiri pada 30 Desember **1974**

PT INTI (Persero) officially established on December 30 1974

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40994.A.H.01.02, Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: 036/MPBUMN/ 1988, PT INTI (Persero) dimasukkan ke dalam kelompok Industri Strategis. Pada tanggal 17 Januari 1998 dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 12 tahun 1998 yang menghilangkan peran departemen teknis dalam mengelola BUMN. Sebagai tindak lanjutnya, pembinaan INTI beralih ke Kementrian Negara Pendayagunaan BUMN. Pada tahun yang sama BPIS beralih status menjadi sebuah holding company dengan nama PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) atau PT BPIS dan sepuluh BUMN strategis di bawahnya menjadi anak perusahaan. Kondisi ini berakhir pada tahun 2002, dimana PT BPIS dibubarkan pada bulan Maret 2002 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2002. Selanjutnya pengelolaan INTI beralih kembali ke Kementrian Negara Pendayagunaan BUMN.

Indonesia No. AHU-40994.AH01.02, Year 2012 dated July 27, 2012.

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No.: 036/M-PBUMN/1988, PT INTI (Persero) is inserted into the Strategic Industry groups. At the date of January 17, 1998 issued a Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 12 of 1998 which eliminates the role of the technical department in managing SOEs. As a follow up, guidance INTI switch to the Ministry of State Owned Enterprises Reform. In the same year BPIS switch status to a holding company under the name of PT Bahana Pakarya Strategic Industries (Persero) PT BPIS and ten or strategic SOEs under it became a subsidiary. This condition ended in 2002, where PT BPIS disbanded in March 2002 as the Government Regulation Number 52 of 2002. Furthermore INTI management reverts back to the Ministry of State Owned Enterprises Reform.

Perjalanan INTI
INTI's journey

1974 - 1984
PT INTI (Persero) resmi berdiri pada tanggal 30 Desember tahun 1974, Bidang usaha INTI meliputi produk-produk radio sonde, radio High Frequency (HF), radio Very High Frequency (VHF), pesawat telepon dan stasiun bumi untuk Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Produk stasium bumi yang disebut terakhir ini mencatatkan sejarah dalam perkembangan INTI dengan memberikan kontribusi pada prestasi penjualan tertinggi di periode ini, yaitu sebesar 24,3 milyar rupiah di tahun 1981.

Fasilitas produksi yang dimiliki INTI pada periode ini antara lain:
- Pabrik Perakitan Telepon
- Pabrik Perakitan Peralatan Transmisi
- Pabrik Mekanik dan Plastik
- Laboratorium Software Komunikasi Data (PACKSATNET) bekerjasama dengan Logitech.

Kerjasama Teknologi yang pernah dilakukan pada era ini antara lain dengan Siemens AG, BTM, PRX, JRC. Pada era tersebut produk Pesawat Telepon Umum Koin (PTUK) INTI menjadi standar Perumtel (sekarang Telkom).

1985 - 1998
Diawali oleh rencana pemerintah untuk melakukan digitalisasi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dan menunjuk INTI sebagai pemasok tunggal Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) yang dilaksanakan berdasarkan Technical and Business Cooperation Agreement (TBCA) dengan Siemens AG. Fasilitas produksi terbaru yang dimiliki INTI pada masa ini, disamping fasilitas-fasilitas yang sudah ada sebelumnya, antara lain Pabrik Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) pertama di Indonesia dengan teknologi produksi Trough Hole Technology (THT). Pabrik STDI berkapasitas 150.000 Satuan Sambungan Telepon (SST) ini dibangun pada tahun 1984 dan produksi pertamanya sebesar 10.000 SST diluncurkan pada tahun 1985. Di kemudian hari kemampuan pabrik ini dilengkapi juga dengan teknologi produksi Surface Mounting Technology (SMT). Produk STDI ini berkontribusi sangat signifikan bagi pertumbuhan penjualan dan laba INTI. Walaupun pada tahun 1990 pemerintah membuka persaingan dengan mengijinkan dua pemasok sentral digital lainnya, yaitu AT&T dan NEC, namun sampai dengan tahun 1998 INTI masih tetap menjadi market leader dalam hal pangsa pasar infrastruktur telekomunikasi, yaitu sebesar 60% dari total pasar nasional.

Dengan memanfaatkan fasilitas pabrik ini pula, ruang lingkup produk INTI dilengkapi oleh Pulse Code Modulation (PCM), Private Automatic Branch Exchange (PABX), dan pesawat telepon meja INTI 111 yang

1974 - 1984
PT INTI (Persero) was officially established on December 30, 1974, INTI business line includes products radio sonde, Radio High Frequency (HF), Very High Frequency Radio (VHF), telephone and satellite earth station for Domestic Satellite Communication System (SKSD) Palapa. Product Stasium earth the latter recorded in the history of the development of INTI with contributing to achievement of the highest sales in this period, which amounted to 24.3 billion rupiah in 1981.

INTI owned production facilities in this period include:
- Phone Assembly Plant.
- Transmission Assembly Plant Equipment
- Mechanical and Plastic Factory
- Laboratory Data Communications Software (PACKSATNET) in collaboration with Logitech.

Technology collaboration ever undertaken in this era, among others, with Siemens AG, BTM, PRX, JRC. In that era products Coin Public Telephone (PTUK) INTI became standard PERUMTEL (now Telkom).

1985 - 1998
Initiated by government plans to undertake digitization of telecommunications infrastructure in Indonesia and appointed as sole supplier INTI Digital Telephone Central Indonesia (STDI) carried out by the Technical and Business Cooperation Agreement (TBCA) with Siemens AG. Latest production facilities owned by INTI at this time, in addition to the facilities already existing, such as Factory Digital Telephone Central Indonesia (STDI) in Indonesia with production technology Trough Hole Technology (THT). Plant with a capacity of 150,000 STDI Phone Line Unit (SST) was built in 1984 and first production of 10,000 SST was launched in 1985. In later capability is also equipped with factory production technology Surface Mounting Technology (SMT). This STDI products contribute significantly to the growth in sales and profits INTI. Although in 1990 the government opened the competition by permitting two other digital central supplier, namely AT & T and NEC, however, until the INTI 1998 still remains the market leader in terms of market share of the telecommunications infrastructure, amounting to 60% of the total national market.

By utilizing this same plant facility, the scope of INTI products complemented by Pulse Code Modulation (PCM), Private Automatic Branch Exchange (PABX), and INTI 111 table telephones which are all licensed product

semuanya merupakan produk lisensi dari Siemens AG. Disamping itu INTI juga memproduksi perangkat-perangkat hasil pengembangan sendiri seperti Stasiun Bumi Kecil (SBK), High Frequency (HF) Radio, Digital Microwave Radio (DMR), Sistem Telepon Kendaraan Bergerak (STKB), Pesawat Telepon Umum Coin Box dan Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS). Sejak tahun 1989, produk INTI dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
1. produk sentral;
2. produk transmisi; dan
3. produk terminal atau CPE.

Kerjasama Teknologi yang pernah dilakukan pada periode ini antara lain :
- Bidang sentral dengan Siemens AG
- Bidang transmisi dengan Japan Radio Company
- Bidang CPE dengan Siemens AG, BTM, Tamura, Syapura, dan Tatung TEL

Dari ketiga kategori produk tersebut, produk yang memberikan kontribusi terbesar dalam penjualan INTI adalah produk sentral.

Pada era ini, INTI memiliki reputasi dan prestasi yang signifikan, yaitu :
- Menjadi pionir dalam proses digitalisasi sistem dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.
- Bersama Telkom telah berhasil dalam proyek otomatisasi telepon di ensio seluruh ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada periode ini, tepatnya tahun 1988, Berdasarkan KEPMEN 036/M-PBUMN/1988, PT INTI (Persero) masuk ke dalam Industri Strategis. Bisnis Terbesar pada periode ini adalah Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI). Pada periode ini pula PT INTI (Persero) berhasil mengembangkan produk SBK 3 kanal dan Sentral Telepon Digital Indonesia Kecil (STDI-K).

1998 - 2002

Dengan berakhirnya TBCA dengan Siemens AG, INTI mengukuhkan diri sebagai penyedia solusi engineering, terutama sebagai system integrator untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, tidak terkecuali pembangunan infrastruktur telekomunikasi seluler. Tidak kurang dari 2000 BTS telah dibangun oleh INTI di seluruh penjuru Indonesia. Pada periode ini aktivitas manufaktur dipersiapkan untuk dipindahkan kepada anak perusahaan PT INTI (Persero).

Pada tahun 2002, Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2002, Pembubaran PT. BPIS dan PT INTI di bawah KN. BUMN. Bisnis terbesar pada periode ini adalah pembangunan jaringan seluler.

from Siemens AG. Besides, INTI also manufactures the devices themselves as development proceeds Small Earth Stations (SBK), High Frequency (HF) Radio, Digital Microwave Radio (DMR), Telephone System Moving Vehicle (STKB), Public Telephone Box and Coin Public Telephone self (PTUS). Since 1989, INTI products are grouped into three, namely:

1. the central product;
2. transmission products, and
3. terminal products or CPE.

Technology collaboration ever undertaken in this period include:
- The central field with Siemens AG
- Field of transmission with the Japan Radio Company
- Field CPE with Siemens AG, BTM, Tamura, Syapura, and Tatung TEL

Beetwen the three product categories, the one that gives the biggest contribution in sales INTI is the central product.

In this era, INTI has a reputation and a significant achievement, namely:
- Being a pioneer in the digitization process systems and telecommunications networks in Indonesia.
- Together with Telkom has been successful in telephone automation projects in almost all the capital of the district and subdistrict centers throughout Indonesia.

In this period, precisely in 1988, Based KEPMEN 036/MPBUMN/ 1988, PT. INTI (Persero) into the Strategic Industries. The biggest business in this period is the Digital Telephone Central Indonesia (STDI). At this period also PT INTI (Persero) successfully develop products SBK 3 channels and Small Digital Telephone Central of Indonesia (STDI-K).

1998 - 2002

By the end of TBCA with Siemens AG, INTI established itself as a provider of engineering solutions, especially as the system integrator for the development of telecommunications infrastructure in Indonesia, not least the development of mobile telecommunications infrastructure. Not less than 2000 base stations have been built by INTI throughout Indonesia. In this period of manufacturing activity is prepared to be transferred to its subsidiary PT INTI (Persero).

In 2002, Based on Government Regulation Number 52 of 2002, Dissolution PT. BPIS and PT INTI under KN. SOEs. Largest business in this period is the development of cellular networks.

2003 - 2008

Pada era ini kerjasama teknologi tidak lagi terkonsentrasi pada Siemens, tetapi dilakukan secara berimbang (multi principal) dengan beberapa perusahaan multinasional dari Eropa dan Asia. Aktivitas manufaktur tidak lagi ditangani sendiri oleh INTI, tetapi secara spin-off dengan mendirikan anak-anak perusahaan dan usaha patungan, seperti :

- Bidang CPE, dibentuk anak perusahaan bernama PT.INTI PISMA International yang bekerja sama dengan JITech International, bertempat di Cileungsi Bogor
- Bidang mekanik dan plastik, dibentuk usaha patungan dengan PT PINDAD bernama PT.IPMS, berkedudukan di Bandung, yang resmi berdiri di bulan Juli 2004.
- Bidang-bidang switching, akses dan transmisi, dirintis kerja sama dengan beberapa perusahaan multinasional seperti SAGEM, MOTOROLA, ALCATEL, Ericsson, Samsung.

Bisnis terbesar pada periode ini adalah CDMA. RMJ (regional metro junction) dan jaringan akses fiber optic dan Out Site Plant (OSP), digital microwave link, pembangunan tower nasional, CME dan power supply serta indoor coverage.

2009 - Sekarang

PT INTI (Persero) memantapkan langkahnya untuk memasuki bisnis solusi Engineering, system integrator dan pengembangan produk-produk genuine. Beberapa produk genuine unggulan PT INTI antara lain: Smart PBX, General Purpose Agent (INTI Power Utilities Monitoring & Control, Flood Forecasting and Warning System) I-PERISALAH dan KWH Meter. Pengembangan untuk produk produk genuine INTI lainnya masih berlanjut, seperti Converter Kit untuk BBM ke Gas, Smart meter untuk Gas dan Air, EDC berbasis USSD dengan Telkomsel, Pembaca KTP Elektronik, kerja sama pengembangan dan produksi untuk system transportasi dengan PT KAI dengan produk Garansi (Pencegahan Pelanggaran Sinyal). Sebagai sistem integrator, PT INTI (Persero) memfokuskandiri pada segmen pasar TELCO, CELCO dan Private Enterprise. Untuk pasar TELCO, PT INTI (Persero) menginisiasi ide Modernisasi Jaringan akses tembaga milik PT Telkom, Tbk di seluruh Indonesia menjadi jaringan akses fiber optic dengan menggunakan teknologi MSAN, GPON dan FTTH (Fiber To The Home) dengan pola Trade In Trade Off atau lebih dikenal dengan nama proyek TITO. Melalui Proyek TITO ini telah modernisasi jaringan akses lebih dari 400 ribu sambungan di 8 STO pada akhir tahun 2012. Dan melalui proyek ini PT INTI (Persero) kembali membangun kemampuan di dalam industry telekomunikasi antara lain:
Fiber Termination Management (FTM), Optical Splitter, Fiber Optic Accesoris, Optical Network Termination (ONT), Optical Dropp Cable, Fiber Management System (FMS).

2003 - 2008

In this era of technology cooperation is no longer concentrated at Siemens, but done in a balanced (multi-principal) with several multinational companies from Europe and Asia. Manufacturing activity is no longer handled by the INTI, but the spin-off by setting up subsidiaries and joint ventures, such as:

- CPE, formed a subsidiary named PT.INTI Pisma International in collaboration with JITech International, located in Cileungsi, Bogor
- Mechanics and plastic, formed a joint venture with PT PINDAD named PT.IPMS, based in Bandung, which was officially established in July 2004.
- Fields of switching, access and transmission, pioneered cooperation with some multinational companies such as SAGEM, MOTOROLA, ALCATEL, Ericsson, Samsung.

The largest business in this period is CDMA. RMJ (regional metro junction) and fiber optic access network and Out site plant (OSP), a digital microwave link, tower construction nationwide, CME and power supply and indoor coverage.

2009 - Present

PT INTI (Persero) established steps to enter the business of engineering solutions, system integrators and development of genuine products. Some products featured genuine PT INTI, among others: Smart PBX, General Purpose Agent (INTI Power Utilities Monitoring & Control, Flood Forecasting and Warning System) I-perisalah and KWH Meter. Product development for other INTI genuine products continues, as Conversion Kit for Fuel to Gas, Smart meters for gas and water, USSD-based EDC with Telkomsel, Electronic ID card reader, cooperation for development and production of the transport system with PT KAI with product warranty (Abuse prevention Signal). As a systems integrator, PT INTI (Persero) focusing on market segments TELCO, CELCO and Private Enterprise. For TELCO market, PT INTI (Persero) initiated the idea Modernization copper access network owned by PT Telkom, Tbk., become fiber optic access network by technology of MSAN, GPON and FTTH (Fiber To The Home) with patterns Trade In Trade Off or More known as TITO project. Through this project TITO has access network modernization over 400 thousand connections at 8 STO at the end of 2012. And through this project PT INTI re-build capabilities in the telecommunications industry, among others:
Fiber Termination Management (FTM), Optical Splitter, Fiber Optic Accesoris, Optical Network Termination (ONT), Dropp Optical Cable, Fiber Management System (FMS).

Di sektor CELCO, PT INTI (Persero) menginisiasi proyek Rural BTS untuk PT Indosat, membangun OSP (outside plant) fiber optic backbone untuk BTS untuk PT. Telkomsel dan PT. XL Axiata, serta menyediakan antena untuk operator selular tersebut. Untuk segmen pasar Private & Enterprise, PT INTI (Persero) menyediakan solusi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk PT. PLN, menyediakan layanan pengelolaan perangkat IT PT. Telkom dengan pola seat management yang berupa pengelolaan sekitar 35.000 seat (meliputi komputer, laptop, printer maupun proyektor) dari mulai instalasi, application management, dan dismantle. Selain itu, PT INTI (Persero) memiliki solusi Smart Clinic yang diperuntukkan bagi pengelola layanan kesehatan seperti rumah sakit maupun poliklinik.

In CELCO sector, PT INTI initiated Rural BTS project for PT Indosat, build OSP (outside plant) fiber optic backbone for the BTS to PT. Telkomsel and PT. XL Axiata, as well as providing an antenna for the cellular operator. For Private and Enterprise market segments, PT. INTI provides solar solutions (Solar Power) for PT. PLN, providing IT service management tools PT. Telkom with a management seat pattern around 35,000 management seats (including computers, laptops, printers and projectors) from starting the installation, application management, and dismantle. In addition, PT. INTI has a solution call Smart Clinic which intended for managing of health services such as hospitals and polyclinics.

Bidang Usaha
Business Fields

INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

INTI telah memiliki track record yang panjang dalam penyelesaian proyek-proyek di bidang Industri Telekomunikasi. Sebut saja produk Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) yang merupakan produk andalan pada masanya. Seiring perjalanan waktu dimana pesawat telepon telah tergantikan oleh telepon genggam sehingga provider telekomunikasi beralih dari jaringan tembaga ke fiber optik untuk mendapatkan kapasitas penyampaian data yang lebih besar. Hal inilah yang ditangkap oleh INTI sebagai peluang bisnis.

a. Sistem Integrator

Melalui lini bisnis Sistem Integrator, perusahaan

TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY

INTI has a long track record in the completion of projects in the field of Telecommunication Industry. Call it the product of Digital Telephone Central of Indonesia (STDI) which is the flagship product of its time. With the passage of time in which the phone has been replaced by a mobile phone so that telecommunications providers to switch from copper to fiber-optic network for data delivery capacity greater. This is captured by INTI as a business opportunity.

a. System Integrator

Through business lines of Systems Integrator, the

menghasilkan jasa sebagai berikut:
- Out Site Plan
- In Site Plan
- Trade in Trade off (TiTo)
- Fiber To The Home (FTTH)
- Regional Metro Junction (RMJ)
- Antenna Tongyu
- Rectifier & Battery
- Outdoor/Indoor
- Data Collection

b. Manufacture
- Fiber optic melalui anak perusahaan PT Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS)

ELEKTRONIKA
a. Sistem Integrator
- Rectifier

b. Genuine Product
- Garansi
- General Purpose Agent (GPA)
- Flood Forcasting & Warning System (FFWS)

c. Maintenance dan Manage Service
- Manage service Papua
- Maintenance

INFORMATIKA
Sesuai dengan perkembangan teknologi dewasa ini, INTI mulai merambah ke bisnis informatika.

a. Sistem Integrator
- MSC Installation

b. IT & Service, Seat Management
- Seat Management PT Telkom
- Seat Management PT KAI
- SMP BBM Pertamina
- Sistem Pengelolaan Frekuesi Radio (SPFR)

c. Mobile Device and Content melalui anak perusahaan PT INTI KONTEN INDONESIA (INTENS)

d. Maintenance dan Manage Service
- Sparelog Management System (SPMS)

e. Genuine Product
- Smart PBX
- i-Perisalah

KELISTRIKAN
Pertengahan tahun 2011, sesuai dengan MP3EI tahun 2011 – 2025 dimana anggaran investasi pemerintah di bidang energi dan kelistrikan sebesar Rp 669 triliun, INTI melihat hal tersebut sebagai peluang bisnis baru.

a. Sistem Integrator
- PLTS wilayah Bangka Belitung

company produces the following services:
- Out Site Plan
- In Site Plan
- Trade in Trade offs (TITO)
- Fiber To The Home (FTTH)
- Regional Metro Junction (RMJ)
- Antenna Tongyu
- Rectifier & Battery
- Outdoor / Indoor
- Data Collection

b. Manufacture
- Fiber optic through its subsidiary PT Inti PINDAD Mitra Sejati (IPMS)

ELECTRONICS
a. System Integrator
- Rectifier

b. Genuine Product
- Garansi
- General Purpose Agent (GPA)
- Flood Forcasting and Warning System (FFWS)

c. Maintenance and Manage Service
- Manage service in Papua
- Maintenance

INFORMATICS
In keeping with today's technology development, INTI began venturing into business informatics.

a. System Integrator
- MSC Installation

b. IT & Service, Seat Management
- Seat Management PT Telkom
- Seat Management PT KAI
- Pertamina's junior
- Radio Frekuesi Management System (SPFR)

c. Mobile Device and Content through its subsidiary PT INTI KONTEN INDONESIA (INTENS)

d. Maintenance and Manage Service
- Sparelog Management System (SPMS)

e. Genuine Product
- Smart PBX
- i-Perisalah

ELECTRICAL
Mid-2011, according to the MP3EI years 2011 to 2025 in which the government's investment budget in the field of energy and electricity amounted to Rp 669 trillion, INTI see it as a new business opportunity.

a. System Integrator
- PLTS Bangka Belitung region

b. Manufacture
- kWh meter
- Fiber optic melalui anak perusahaan PT Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS)

c. Genuine product
- Meter listrik prabayar

OPTIMALISASI SUMBER DAYA

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN untuk melakukan optimalisasi sumber daya, maka salah satu sumber pendapatan lain-lain INTI yakni dengan melakukan optimalisasi aset berupa menyewakan ruangan yang kurang dioptimalkan oleh perusahaan.

b. Manufacture
- kWh meters
- Fiber optic through its subsidiary PT Inti PINDAD Mitra Sejati (IPMS)

c. Genuine Product
- Prepaid electricity meters

OPTIMIZATION OF RESOURCES

In accordance with the directives of the Minister of SOEs to optimize resources, then one of the other revenue sources of INTI ie by optimizing assets such as renting out a room that is less optimized by the company.

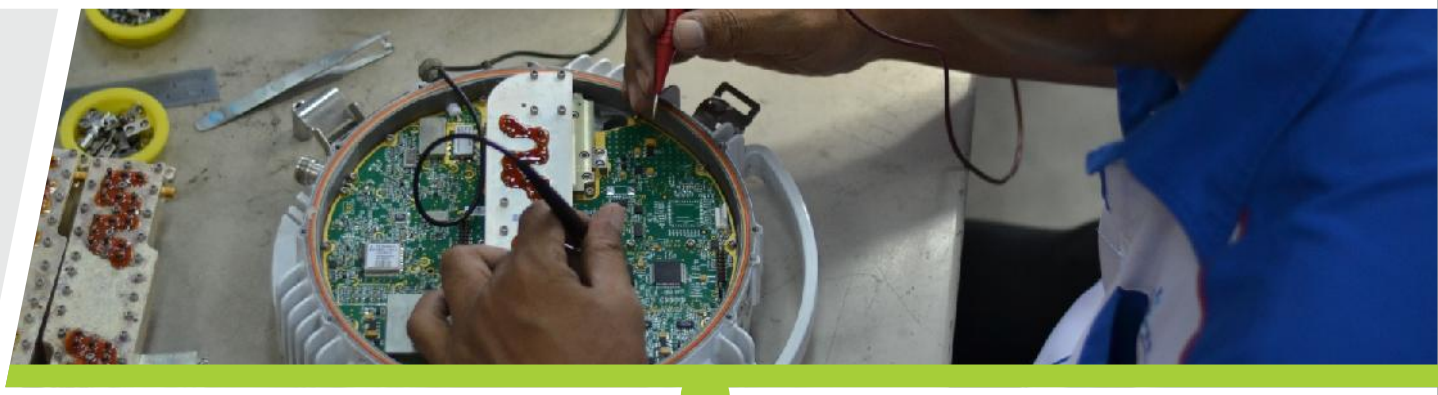

Produk dan Layanan

Product and services

Produk dan layanan PT INTI (Persero) dikembangkan dari 4 pilar utama yaitu ICT-E (Information System, Content, Telecommunication System dan Electronic). Dari core competency ini, kemudian diturunkan ke dalam lini bisnis INTI sebagai berikut:
A. Sistem Integrator
B. Maintenance/Managed Services
C. IT & Services, Seat Management
D. Mobile Device & Content
E. Genuine Product
F. Manufacturing

Bisnis Model berdasarkan Lini Bisnis PT INTI (Persero) dapat digambarkan sebagai berikut:

INTI products and services developed from the 4 main pillars of ICT-E (Information System, Content, Telecommunication System and Electronic). From this core competency, then lowered into the INTI business lines as follows:
A. System Integrator
B. Maintenance / Managed Services
C. IT & Services, Seat Management
D. Mobile Device and Content
E. Genuine Product
F. Manufacturing

Business models based on INTI Business Line can be described as follows:

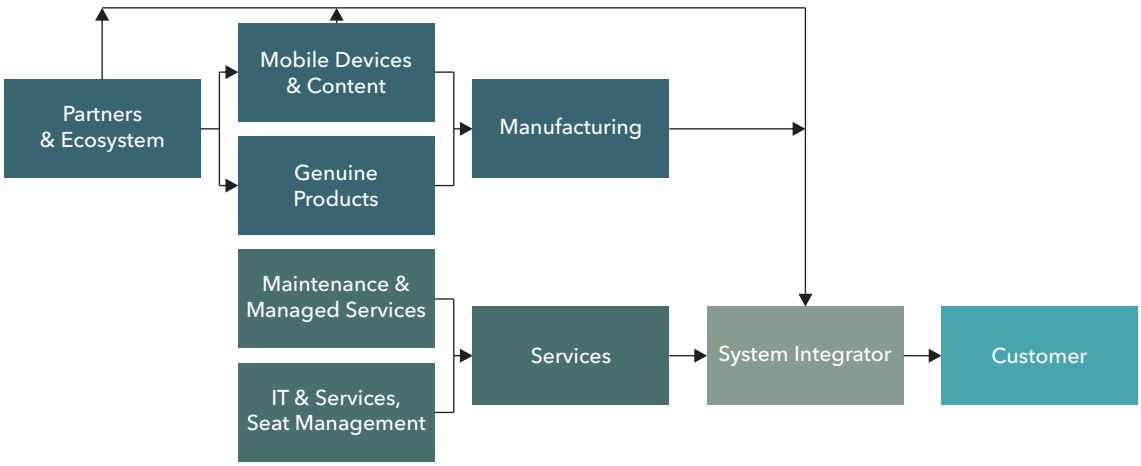

A. SISTEM INTEGRATOR

Sistem Integrator merupakan kompetensi utama PT INTI (Persero) sejak berdiri di tahun 1974 dengan memberikan solusi berupa desain dan engineering, pengadaan, manajemen proyek sampai uji terima proyek. Saat ini, solusi dan layanan yang diberikan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, diantaranya;

1. Telco

Penyediaan dan pembangunan teknologi berbasis fiber optic mulai dari penyediaan dan pembangunan perangkat GPON (Gigabit Passive Optical Network) yang meliputi OLT (Optical Line Termination) dan ONT (Optical Network Termination), FTTH (fiber to the home), MSAN (Multiservice Access Node), FTM (Fiber Termination Management), ODC (Optical Distribution Cabinet) maupun ODP (Optical Distribution Point). Selain perangkat, PT INTI (Persero) menyediakan layanan berupa engineering, material procurement, manajemen proyek maupun integrasi ke sistem yang sudah ada.

2. Celco dan Energi

Di sektor ini, PT INTI (Persero) menyediakan produk dan layanan penyediaan radio Microwave SDH/PDH, antenna BTS, indoor coverage menggunakan wifi, maupun penyediaan alat komunikasi dan navigasi untuk pertahanan. Untuk bidang energi PT INTI (Persero) membangun PLTS untuk beberapa lokasi seperti di Oxybil (Papua) dengan kapasitas 300KW, maupun PLTS di lokasi Bangka Belitung.

3. Private Enterprise

PT INTI (Persero) menyediakan solusi edukasi berupa TIK (Teknologi Informasi dan Komputer) sekolah, aplikasi smart clinic untuk rumah sakit dan klinik, maupun pembangunan jaringan ICT. Lingkup Pekerjaan Kemampuan PT INTI (Persero) sebagai sistem integrator meliputi: Analisis dan perancangan proses bisnis, perancangan dan implementasi hardware/ jaringan maupun perancangan dan implementasi software. Secara detail, lingkup pekerjaan Sistem Integrator meliputi:

1. Perencanaan dan Perancangan Sistem
   - Desktop study
   - Site Survey
   - Design & planning
   - Optimasi kinerja jaringan
2. Implementasi Proyek
   - Site & acquisition (Sitac) & perijinan
   - Procurement & Material delivery
   - Instalasi dan test ensiononal.
   - Tes interkoneksi dan interoperabilitas
   - System upgrade
   - Acceptance test

A. SYSTEM INTEGRATOR

System Integrator is a key competencies of PT. INTI since its foundation in 1974 to provide solutions in the form of design and engineering, procurement, project management until project acceptance testing. Currently, solutions and services that is focused to meet the needs and desires of customers, including;

1. Telco

Provision and development of fiber optic-based technologies ranging from the provision and development of the GPON (Gigabit Passive Optical Network) which includes the OLT (Optical Line Termination) and ONT (Optical Network Termination), FTTH (fiber to the home), MSAN (Multiservice Access Node) , FTM (Fiber Termination Management), ODC (Optical Distribution Cabinet) and ODP (Optical Distribution Point). In addition to the device, PT. INTI provides services such as engineering, material procurement, project management and integration into existing systems.

2. Celco and Energy

In this sector, PT. INTI provides products and services in the radio Microwave SDH / PDH, BTS antennas, indoor coverage using wifi, as well as providing a means of communication and navigation for defense. For the energy sector PT. INTI build PLTS for some locations such as in Oxybil (Papua) with a capacity of 300KW, as well as the location of PLTS in Bangka Belitung.

3. Private Enterprise

PT INTI provide educational solutions in the form of ICT (Information and Computer Technology) school, clinic smart applications for hospitals and clinics, as well as the development of ICT networks. Scope of Work of INTI as a system integrator capabilities include: Analysis and design of business processes, the design and implementation of hardware / network design and implementation as well as software. In detail, the scope of work of System Integrator include:

1. Planning and Designing Systems
   - Desktop study
   - Site Survey.
   - Design and Planning.
   - Optimization of network performance.
2. Project Implementation
   - Site & acquisition (SITAC) & licensing
   - Procurement & Material delivery
   - Installation and commissioning test.
   - Interconnection and interoperability tests
   - System upgrades
   - Acceptance test

3. Manajemen Proyek
- Persiapan proses-proses rencana proyek.
- Penyusunan prosedur dan petunjuk kerja
- Rencana Proyek dan Jadwal Kerja
- Pengelolaan konsultan dan sub-kontraktor selama durasi kontrak.
- Laporan kemajuan proyek

Proyek Unggulan
Beberapa project unggulan yang ditangani antara lain:
1. Project TITO (Trade In, Trade Off): barter scrap kabel tembaga dengan fiber optic network dan modernisasi jaringan, PT. Telkom
2. Project FTTH: pembangunan fiber optic sampai ke rumah pelanggan PT. Telkom
3. Projek Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM

Kekuatan dan Nilai Kunci
Agar produk maupun solusi sebagai system integrator dapat berkompetisi dan memenangkan persaingan pasar kekuatan dan key value yang diangkat adalah sebagai berikut:
1. Menekankan aspek QDC (Quality, Delivery and Cost)
2. Management Proyek yang kuat didukung system pengelolaan berbasis SAP
3. Hubungan solid dalam kemitraan

B. JASA PEMELIHARAAN DAN MANAGED SERVICES

Solusi dan layanan dalam bisnis maintenance dan managed service merupakan layanan bagi pelanggan dalam pengelolaan aset yang dimilikinya. Dengan adanya layanan ini, memungkinkan pelanggan untuk mengurangi biaya operasionalnya dengan menyerahkan pengelolaan asetnya kepada PT INTI (Persero).

Untuk mendukung aktifitas maintenance dan managed Services ini, PT INTI (Persero) membangun kompetensi sebagai berikut:

1. Sistem Manajemen Logistik Suku Cadang
adalah layanan manajemen warehouse untuk mendukung para operator seluler dalam memelihara aset jaringan secara efisien. Dengan dukungan sparepool yang berada di lebih dari 50 kota besar di Indonesia, PT INTI (Persero) mampu melayani penggantian suku cadang dan ension 24/7 dengan cepat, nyaman dan efisien.

2. Pusat Pemeliharaan dan Perbaikan
Sebagai salah satu produsen sentral telepon utama di Indonesia sejak tahun 1980-an dan didukung kompetensi dalam teknologi circuit switching, PT INTI (Persero) mampu memberikan layanan yang handal di bidang reparasi dan pemeliharaan peralatan circuit switching, baik untuk jaringan telekomunikasi tetap maupun jaringan telekomunikasi seluler. Pekerjaan

3. Project Management
- Preparation of project planning processes.
- Preparation of procedures and work instructions
- Project Plan and Work Schedule
- Management of consultants and subcontractors during the duration of the contract.
- Progress report of the project

Featured Project
Several flagship projects which addressed, among others:
1. Project TITO (Trade In, Trade Off): barter scrap copper cable with fiber optic network and network modernization, PT. Telkom
2. FTTH project: the construction of fiber optic to customers PT Telkom Home
3. Fuel Monitoring and Controling System Project

Strength & Key Value
In order for products and solutions as a systems integrator can compete and win the competition and market forces raised key value is as follows:
1. Emphasize aspects of QDC (Quality, Delivery and Cost)
2. Strong project management supported SAP based management system
3. Strong Partnership relations

B. MAINTENANCE AND MANAGED SERVICES

Solutions and services in maintenance and managed services business is a service for customers in the management of their assets. With this service, enabling customers to reduce operational costs by handing over the management of its assets to INTI.

To support the maintenance and Managed Services activities, INTI has developing competencies as follows:

1. INTI Sparelog Management System
is a warehouse management services to support the domestic mobile operators in maintaining network assets efficiently. With the support sparepool located in more than 50 major cities in Indonesia, INTI able to serve replacement parts and logistics 24/7 with fast, convenient and efficient.

2. Maintenance & Repair Center
As one of the main telephone exchange in Indonesia since the 1980s and supported competence in circuit switching technology, INTI is able to provide reliable services in the field of repair and maintenance of circuit switching equipment, both for fixed telecom munications networks and mobile telecommunications networks. Jobs never done such care and make

yang pernah dilakukan diantaranya merawat dan melakukan perbaikan perangkat STDI PT. Telkom, maupun repair & maintenance terhadap produk radio Sagem.

3. Managed Services
Layanan managed service INTI antara lain: Penyediaan infrastruktur telekomunikasi, pengelolaan proyek, serta pemantauan dan pemeliharaan sistem, jaringan, perangkat, maupun aplikasi/ konten. Dalam bidang ini, salah satunya, PT INTI (Persero) turut berkontribusi pada pengembangan operasi bisnis dan managed service penyedia Layanan Seluler di kawasan Indonesia Timur.

Proyek Unggulan
Beberapa proyek unggulan yang ditangani antara lain:
- Managed Services pengelolaan BTS XL di Papua
- Sparelog Management System untuk NSN dan Telkomsel
- Maintenance & Repair Radio Microwave Telkom Maintenance

Kekuatan dan Nilai Kunci
Agar produk maupun solusi dalam bidang maintenance dan managed services dapat berkompetisi dan memenangkan persaingan pasar kekuatan dan key value yang diangkat adalah sebagai berikut:
- Customer relation & intimacy
- Repair & maintenance center facility
- Spare pool dan service center di beberapa titik lokasi di seluruh Indonesia
- Trained & skilled expertise

C. IT & SERVICES, SEAT MANAGEMENT
Solusi dan layanan dalam bisnis IT & Services, Seat Management merupakan layanan bagi pelanggan dalam kepemilikan perangkat IT. Dikarenakan kecenderungan investasi pada perangkat IT relatif mahal dan usia teknologinya yang relatif pendek, sehingga kecenderungan pelanggan lebih ingin melakukan sewa perangkat IT. Adapun beberapa perangkat IT yang dapat disewakan adalah: Laptop, desktop, printer, proyektor, server, aplikasi, dll

Proyek Unggulan
Beberapa proyek unggulan yang ditangani antara lain:
- Seat management III PT. Telkom
- Seat management PT. KAI

Kekuatan & Nilai Kunci
Agar produk maupun solusi dalam bidang IT & Services, Seat Management dapat berkompetisi dan memenangkan persaingan pasar kekuatan dan key value yang diangkat adalah sebagai berikut:
- Single point of Contract
- Product life cycle management
- Trend updated IT product.

improvements device STDI PT. Telkom, as well as repair and maintenance of the radio Sagem products.

3. Managed Services
The managed services of INTI are include: Provision of telecommunications infrastructure, project management, monitoring and maintenance of systems, networks, devices, and applications / content. In this field, one of which, INTI also contribute to the development of business operations and managed services provider of Mobile Service in Eastern Indonesia.

Featured Project
Several flagship projects which addressed, among others:
- Managed Services XL BTS management in Papua
- Sparelog Management System for NSN and Telkomsel
- Microwave Radio Maintenance & Repair Maintenance Telkom

Strength and Key Value
In order for products and solutions in the areas of maintenance and managed services can compete and win the competition and market forces raised key value is as follows:
- Customers' relations and intimacy
- Repair and maintenance center facility
- Spare pool and service centers in several locations across Indonesia
- Trained and skilled expertise

C. IT & SERVICES, SEAT MANAGEMENT
Business solutions and services in the IT & Services, Seat Management is a service for customers in the ownership of IT equipment. Due to the trend of investment in IT devices are relatively expensive and the technology is the relatively short age, so the trend of more customers want to lease IT equipment. As for some IT devices that can be leased are: Laptops, desktops, printers, projectors, servers, applications, etc.

Featured Project
Several flagship projects which addressed, among others:
- Seat management III PT. Telkom
- Seat management of PT. KAI

Strength and Key Value
In order for products and solutions in the field of IT & Services, Seat Management can compete and win the competition and market forces raised key value is as follows:
- Single Point of Contract
- Product life cycle management
- Trend updated IT product.

D. MOBILE DEVICES & CONTENT

Lini bisnis mobile device & content merupakan solusi untuk end customer dalam rangka mengenabler infrastuktur IT yang sudah dibangun melalui konten dan aplikasi yang dibutuhkan oleh end user. Konten dan aplikasi ini umumnya dikembangkan dalam platform smartphone seperti android dan fokus pada masalah edukasi, kesehatan maupun entertainment. Dalam implementasinya aktifitas pengembangan produk maupun pasar untuk mobile device & content ditangani oleh PT INTI Konten Indonesia (INTENS).

Beberapa produk unggulannya antara lain:
- Smart clinic
- Mobile data services
- Voice message/mail system
- Android games & edukasi

Proyek Unggulan
Beberapa projek unggulan yang ditangani antara lain:
- Mobile Data Services untuk XL Axiata
- Penyediaan aplikasi smart Clinic

Kekuatan & Nilai Kunci
Strength point dan key value solusi mobile device & content ini antara lain:
- INTI memiliki partner dan dukungan ekosistem yang kuat
- Akses kepada komunitas developer
- Teknologi yang up to date

E. PRODUK GENUINE PT INTI (PERSERO)

PT INTI (Persero) memiliki produk baik yang dikembangkan sendiri (in-house development) maupun hasil kerja sama pengembangan dengan mitra R&D eksternal. Beberapa produk yang sudah dikembangkan dan menjadi produk unggulan PT INTI (Persero) diantaranya:

1. iPerisalah
iPerisalah merupakan produk yang memiliki kemampuan dalam mentranslasikan pembicaraan (rapat, pidato, diskusi) ke dalam teks dan meresumekannya. iPerisalah akan mendigitalisasikan suara, mengkuantisasi, merekam suara dan meresumekan serta membuat laporannya.

D. MOBILE DEVICES & CONTENT

Device mobile business lines and content is a solution in order to end customer clicking enabler IT infrastructure that has been built through the content and applications that are needed by the end user. Content and applications are generally developed in platforms such as Android smartphones and focus on issues of education, health and entertainment. In the implementation of development activities and market products and content for mobile devices is handled by PT. INTI Konten Indonesia (INTENS).

Some of its leading products include:
- Smart Clinic
- Mobile Data services
- Voice message / mail system
- Android games and education

Featured Project
Several flagship projects which addressed, among others:
- Mobile Data Services for XL Axiata
- Provision of smart applications Clinic

Strength and Key Value
Strength point and the key value of mobile devices and content solutions include:
- INTI has a partner and a strong ecosystem support
- Access to the developer community
- Technology is up to date

E. PT INTI (PERSERO) GENUINE PRODUCT

INTI has developed a good product alone (in-house development) and development collaboration with external R & D partners. Some products that have been developed and become the flagship product of INTI include:

1. iPerisalah
iPerisalah is a product that has the ability to translate conversations (meetings, speeches, discussions) to the text and meresumekannya. iPerisalah will digitize voice, quantizing, sound recording and meresumekan and make a report.

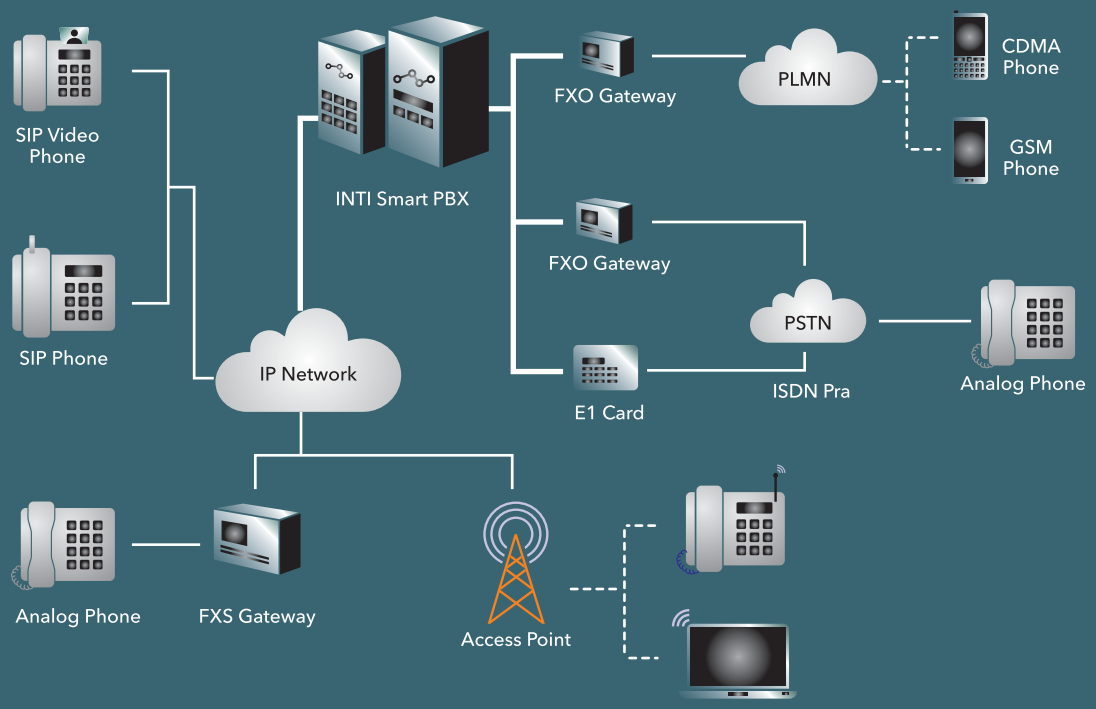

2. Smart PBX
Smart PBX merupakan platform komunikasi berbasis teknologi IP, sehingga mudah diintegrasikan dengan berbagai teknologi komunikasi yang ada, serta memberikan kemudahan untuk dapat berkomunikasi dari manapun dengan media apapun.

2. Smart PBX
Smart PBX is a communications platform based on IP technology, so it is easily integrated with existing communication technologies, as well as provide convenience to be able to communicate from anywhere with any media.

3. SCA (Smart Controller Agent)
SCA adalah perangkat kontrol dan monitor berbasiskan SNMP (Simple Network Management Protocol) yang dapat digunakan sebagai interface antara NMS dengan perangkat yang akan dimonitor atau dikontrol. Perangkat ini dapat dikembangkan ke untuk aktifitas lain seperti: IPMS (INTI Power Management System) dan FFWS (Flood Forecasting and early Warning System).

3. SCA (Smart Controller Agent)
SCA is a device-based control and monitor SNMP (Simple Network Management Protocol) which can be used as an interface between the NMS device to be monitored or controlled. This device can be expanded to other activities such as: IPMS (INTI Power Management System) and FFWS (early Flood Forecasting and Warning System).

Smart Control Agent

ISRA, Indonesia Surveillance Radar

5. Indonesian Surveillance Radar (ISRA)
ISRA merupakan surveillance radar untuk daerah pantai. Perangkat radar ini merupakan produk kerjasama dengan LIPI dengan mayoritas komponen sudah diproduksi di dalam negeri.

6. Turbin Arus Laut
Turbin Arus Laut adalah perangkat generator berbasiskan tenaga arus laut. Perangkat pembangkit ini memiliki kemampuan untuk supply 10 kW dengan velocity sampai 0.5 m/s.

5. Indonesian Surveillance Radar (ISRA)
ISRA is a surveillance radar for coastal areas. The radar device is a product of cooperation with LIPI with the majority of components are manufactured in the country.

6. Marine Current Turbine
Marine Current Turbine-based power generator is the ocean currents. This generation devices have the ability to supply up to 10 kW with a velocity 0.5 m/s.

Marine Current Turbine

F. MANUFAKTUR
Manufacturing merupakan aktifitas produksi dari mulai desain produk, pengadaan material, inserting komponen sampai final assembly dan pengetesan produk. Quality control memegang peranan penting untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. PT INTI (Persero) berperan sebagai lead integrator dengan komponen maupun subsistem di-supply oleh anak perusahaan PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS).

Fasilitas yang ada di PT INTI (Persero) adalah kemampuan untuk fleksibel manufacturing dimana fasilitas dan kemampuan SDM-nya mampu memproduksi berbagai produk sesuai dengan perkembangan teknologi dan bisnis. Beberapa produk yang diproduksi di PT INTI (Persero) antara lain: mobile

F. MANUFACTURE
Manfacturing a production activity of the starting product design, material procurement, inserting components to final assembly and testing of products. Quality control plays an important role to maintain the quality of the resulting product. INTI serves as lead integrator with components or subsystems in-supply by a subsidiary of PT. INTI PINDAD Mitra Sejati (IPMS).

Existing facilities at INTI is the ability for flexible manufacturing facilities and capabilities where their human resources capable of producing a variety of products in accordance with developments in technology and business. Some of the products manufactured at INTI include: mobile phone (smart

phone (smart phone), KWH meter, home gateway maupun RFID tag. Adapun beberapa produk yang diproduksi di anak perusahaan diantaranya: fiber optic cable, fiber termination, splitter FO, material plastik, mekanik, tower, dll.

phone), KWH meter, home gateway and RFID tags. As for some of the products manufactured in subsidiaries including: fiber optic cable, fiber termination, FO splitter, plastic materials, mechanics, tower, etc.

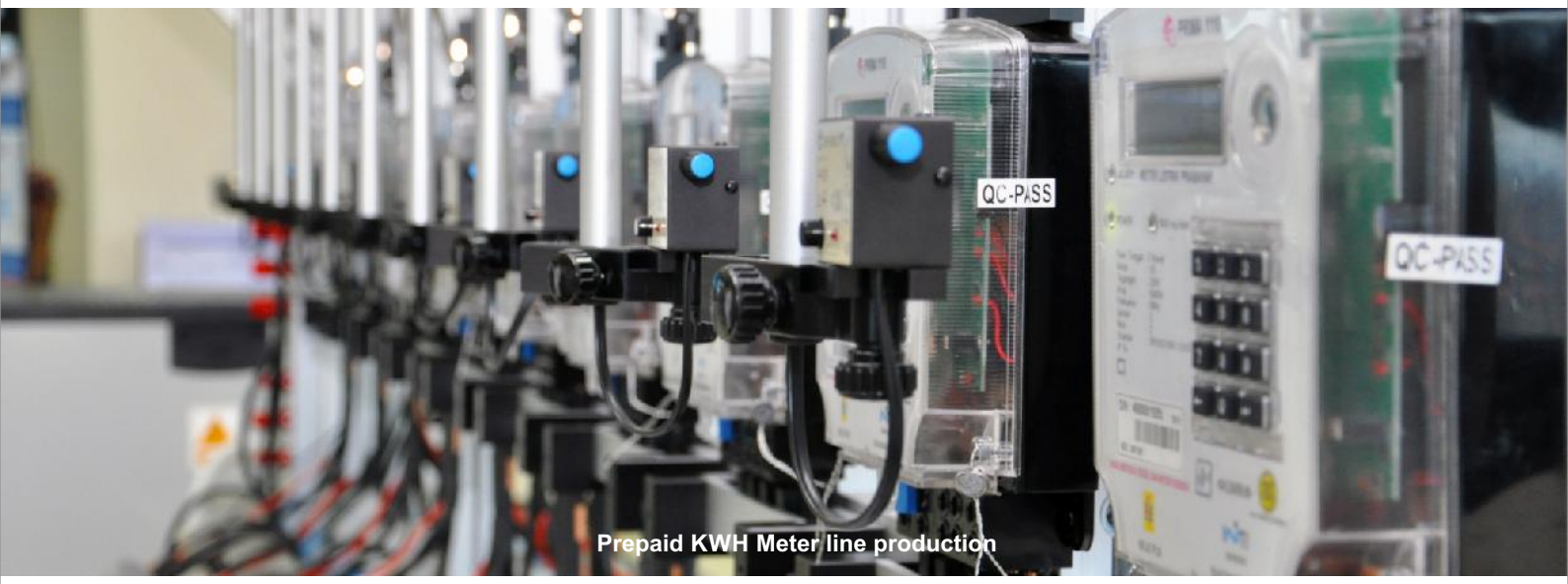

Prepaid KWH Meter line production

Proyek Unggulan
Proyek unggulan yang ditangani antara lain penyediaan KWH Meter untuk PT. PLN

Kekuatan & Nilai Kunci
Dengan menerapkan konsep fleksibel manufacturing, layanan manufacturing PT INTI (Persero) dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan internal pengembangan produk perusahaan, namun dapat ditawarkan kepada perusahaan lain, seperti manufacturing handphone merk IMO. Beberapa value dari layanan ini antara lain:

- Fasilitas manufaktur
- Manajemen rantai persediaan terintegrasi
- Quality control
- Product testing
- Sumber Daya Manusia terlatih dan memiliki keahlian
- Time to market

Featured Project
Flagship projects which addressed, among others KWH Meter Provision for PT. PLN

Strength & Key Value
By applying the concept of flexible manufacturing, manufacturing services INTI can be used not only for internal product development company, however, can be offered to other companies, such as mobile phone manufacturing brands IMO. Some value from this service include:

- Manufacturing facilities
- Integrated supply chain management
- Quality control
- Product testing
- Well trained and skilled human resources
- Time to market

Mobile phone line production

Daftar Entitas Anak
List of Subsidiaries

I. PT INTI PINDAD MITRA SEJATI (PT. IPMS)

1. Bidang Usaha
   Produksi Plastik, Produksi Logam, SITAC, Civil Mechanical Electrical (CME) dan Telecom Implementation OSP.
   Kondisi Perusahaan : Beroperasi,

2. Komposisi Saham :
   - PT. INTI (Persero) 86,15% = Rp.16.800.582.000,-
   - PT. Pindad (Persero) 13,85% = Rp.2.700.000.000,-

   Jumlah 100% = Rp. 19.500.582.000,-

3. Alamat
   Jl. Jenderal Gatot Subroto no. 517
   Bandung 40284
   Telp : +62-22-7302892
   Fax : +62-22-7309766
   www.ipms.co.id

II. PT INTI KONTEN INDONESIA (PT INTENS)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INTI KONTEN INDONESIA dengan Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn Nomor 52, tanggal 11 Mei 2010 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010, tanggal 9 Pebruari 2010.

A. Bidang Usaha : Jasa Pelaksana Teknologi
1) Out Site Plan;
2) CME
3) Jasa Instalasi Perangkat
4) Maintenance dan Manage Service
5) Software Development
6) Content Management
Kondisi Perusahaan: Beroperasi

B. Komposisi Saham :
Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 20 Miliar, terbagi atas 20 juta lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), dengan komposisi :

- PT INTI sebanyak 19.999.999 lembar saham = Rp.19.999.999.000,-
- PT WBI sebanyak 1 lembar saham Rp. 1.000

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 50% atau sejumlah Rp. 10 Miliar.

C. Alamat
Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero), lantai 2 sayap utara
Jl. Moh. Toha no. 77 Bandung, 40253
www.intens.co.id

I. PT INTI PINDAD MITRA SEJATI (PT IPMS)

1. Line of Business
   Production of Plastic, Metal Production, SITAC, Civil Mechanical Electrical (CME) and Telecom Implementation OSP.
   Company Condition: Operates,

2. Composition of shares
   - PT. INTI (Persero) 86.15% = Rp.16,800,582,000.-
   - PT. Pindad Persero 13.85% = Rp.2,700,000,000.-

   Total 100% = Rp. 19,500,582,000.-

3. Address:
   Jl. Jend. Gatot Subroto no. 517
   Bandung 40284
   Tel: +62-22-7302892
   Fax: +62-22-7309766
   www.ipms.co.id

II. PT INTI KONTEN INDONESIA (PT ITENS

Based on the Deed of Company Limited PT INTI KONTEN INDONESIA by Notary Humberg Lie, SH, SE, Mkn No. 52, dated May 11, 2010 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-10.AH.02.02-Year 2010, dated February 9, 2010.

A. Line of Business: Implementing Technology Services
1) Out Site Plan;
2) CME
3) Hardware Installation Services
4) Maintenance and Manage Service
5) Software Development
6) Content Management
Company Condition: Operates

B. Composition of shares
Company's authorized capital of Rp. 20 billion, divided into 20 million shares, each share nominal value of Rp. 1,000.- (one thousand Rupiah), with the composition:

PT INTI many as 19,999,999 shares = Rp.19,999,999,000.-
PT WBI as much as 1 share = Rp. 1,000.

Of the authorized capital has been subscribed and paid up by 50% or Rp. 10 Billion.

C. Address:
Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero), lantai 2 sayap utara
Jl. Moh. Toha no. 77 Bandung 40253
www.intens.co.id

Struktur Grup Perusahaan
Stucture of Company Group

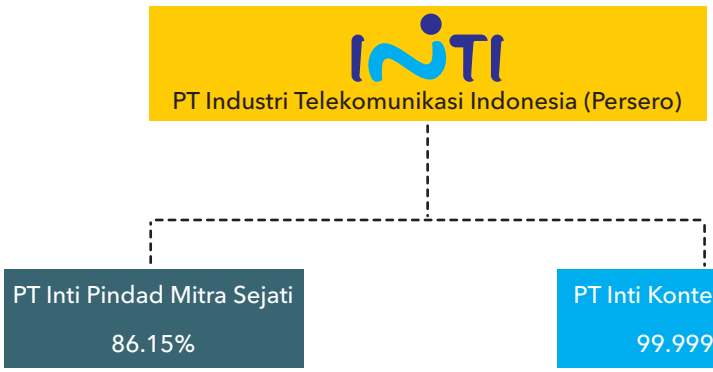

Gedung Pusat Teknologi (Fas-Prod INTI)

Struktur Organisasi
Organization Stucture

Visi, Misi dan Tata nilai perusahaan
Vision, Mission and Corporate Values

Visi
Vision

PT INTI (Persero) bertujuan menjadi pilihan pertama bagi pelanggan dalam mentransformasikan Mimpi menjadi Realita.

PT INTI (Persero) aims to become the first choice for customers in transforming the dream into reality

Misi
Mission

1. Fokus bisnis tertuju pada kegiatan jasa engineering yang sesuai dengan spesifikasi dan permintaan konsumen.
2. Memaksimalkan value (nilai) perusahaan serta mengupayakan growth (pertumbuhan) yang berkesinambungan.
3. Berperan sebagai prime mover (penggerak utama) bangkitnya industri dalam negeri.

1. The focus of business activities focused on engineering services in accordance with the specifications and demands of consumers.
2. Maximize the value of the company and seeking growth is continuous.
3. Serve as a prime mover the rise of the domestic industry.

Tata nilai perusahaan
Corporate Values

1. Integritas
Konsisten dalam tindakan maupun ucapan dengan berdasarkan pada norma-norma, nilai moral, etika profesi dan bisnis yang berlaku, selalu jujur dan terbuka.

2. Network
Membangun, memelihara dan memanfaatkan jaringan kerja yang luas dan mendayagunakan kontak bisnis yang luas demi kepentingan organisasi.

3. Trust
Kemampuan untuk bisa mempercayai orang lain termasuk kepercayaan pada prosedur dan aturan main.

4. Teamwork
Bekerja dengan kooperatif dan menempatkan diri dan kelompok secara sinergi sebagai bagian perusahaan.

5. Inovatif
Menemukan atau menciptakan ide, pemikiran dan cara baru yang lebih baik dari sebelumnya.

1. Integrity
Consistent in action and speech based on the norms, moral values, professional ethics and applicable business, always honest and open.

2. Network
Build, maintain and utilize the extensive network and business contacts empowerment in the interests of the organization.

3. Trust
The ability to be able to trust others, including reliance on the procedures and rules of action.

4. Teamwork
Working with cooperative where put yourself and the group in synergy as part of the company.

5. Innovative
Finding or creating ideas, new ways of thinking and better than ever.

Prospek Usaha
Prospects

Dengan melihat penetrasi penyediaan infrastruktur ICT yang saat ini sudah menyebar hampir di seluruh wilayah tanah air, dan jumlah pengguna dari infrastruktur ICT tersebut yang jumlahnya berkembang setiap tahunnya, bidang industri ICT di Indonesia masih merupakan industri yang sangat menarik. Hal ini didukung juga dengan pesatnya perkembangan teknologi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi ini mengarahkan masyarakat kepada gaya hidup yang menuntut fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, sehingga bermunculan peluang bisnis untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat.

Faktor lainnya adalah perkembangan internet, e-commerce, social media, dan media elektronik yang semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, persaingan yang tinggi dari raksasa-raksasa teknologi, serta semakin mudahnya akses kepada teknologi tersebut, membuat masyarakat menjadi fasih dalam menggunakannya.

By looking at the penetration of ICT infrastructure provision are now spread in almost all regions of the country, and the number of users of the ICT infrastructure are growing in number each year, the field of ICT industry in Indonesia is still a very attractive industry. This is supported also by the rapid development of technology throughout the world, including Indonesia. The development of this technology to direct people to the lifestyle that demands high flexibility and mobility, so that the emerging business opportunities to meet the lifestyle needs of society.

Another factor is the development of Internet, e-commerce, social media, and electronic media are increasingly widespread use by the people of Indonesia. Technological development is so rapid, high competition from the giants of technology, as well as easier access to these technologies, making people become fluent in using it.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ICT, maka keadaan tersebut dilihat sebagai prospek usaha yang besar bagi Perusahaan untuk melakukan inovasi cerdas yang dapat menjawab segala kebutuhan yang muncul akibat perubahan perilaku dan budaya telekomunikasi tanah air.

As one of the companies engaged in the field of ICT, the situation was seen as a great business prospects for the Company to make smart innovations that can answer all the needs that arise as a result of changes in behavior and telecommunications culture homeland.

Analisa Faktor Eksternal dan Internal
Analysis of External and Internal Factors

Analisis lingkungan usaha dilakukan sebagai studi dan interpretasi dari peristiwa dan tren politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang berperngaruh terhadap bisnis, industri, atau bahkan total pasar yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan. Pendekatan yang dipilih dalam melakukan analisis lingkungan usaha adalah analisis PEST, yang terdiri dari analisis faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.

Penetrasi penyediaan infrastruktur ICT di Indonesia saat ini sudah menyebar hampir di seluruh wilayah tanah air. Sampai dengan akhir tahun 2013 telah tergelar infrastruktur ICT berupa sistem komunikasi pita lebar tetap (fixed broadband) yang layanannya digunakan oleh 5% populasi di Indonesia, dan mobile broadband yang digunakan oleh sekitar 12% populasi di Indonesia. Target pembangunan infrastruktur ICT nasional tahun 2019 adalah 30% populasi di Indonesia sudah menikmati layanan akses fixed broadband dan 100% populasi untuk mobile broadband di area urban.

Penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Business environment analysis as a study and interpretation of events and political trends, economic, social, and technological which impact on the business, industry, or even the total market relating to the Company's business. The chosen approach in analyzing the business environment is PEST analysis, which consists of the analysis of political, economic, social, and technological.

Penetration of ICT infrastructure provision in Indonesia today has spread to almost all regions of the country. Until the end of 2013 have been presented in the form of ICT infrastructure as fixed broadband whose services are used by 5% of the population in Indonesia, and mobile broadband is used by approximately 12% of the population in Indonesia. National ICT infrastructure development targets in 2019 is 30% of the population in Indonesia has enjoyed a fixed broadband access service and 100% of the population for mobile broadband in urban areas.

The Internet usage in Indonesia have been having a high increase in recent years. With the ever-increasing growth

Dengan pertumbuhan yang terus meningkat dari angka 13% per tahun, diperkirakan bahwa pengguna internet retail dan rumah tangga di Indonesia akan mencapai 139 juta pengguna di tahun 2015.

Pembangunan ICT tentunya tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tapi juga pada pembangunan konten. Pembangunan konten ICT meliputi berbagai bidang, mulai dari sistem monitoring dan pengendalian, real-time software, aplikasi sistem informasi, sampai kepada konten-konten kreatif seperti games, advertizing, ataupun film animasi. Pembangunan informasi dan konten ICT mempunyai peran penting dalam menghilangkan information divide ataupun knowledge divide sehingga tingkat pembangunan dapat merata dan pencapaian Indonesia sebagai bangsa yang maju, mandiri, adil, dan makmur dapat dirasakan secara nyata dan merata di seluruh wilayah tanah air.

Dengan melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ICT dan ekonomi berpeluang besar, dimana inovasi produk dan/atau layanan ICT memiliki ruang yang luas untuk tumbuh dan berkembang. Pengalaman bertahun-tahun di industri telekomunikasi, kompetensi dalam inovasi pengembangan produk yang smart, networking yang luas, serta proses bisnis yang terintegrasi menjadi modal Perusahaan untuk mengambil peluang di industri ini.

of 13% per year, it is estimated that the retail Internet users and households in Indonesia will reach 139 million users in 2015.

ICT development is certainly not limited to the development of infrastructure, but also on the development of the content. Development of ICT content covers a wide range of fields, ranging from monitoring and control systems, real-time software, application information system, to the creative content such as games, advertizing, or animated films. Development of information and content ICT has an important role in eliminating the divide information or knowledge divide so that the level of development can be uneven and the achievement of Indonesia as a developed nation, independent, fair, and can be perceived as a real prosperous and equitable throughout the country.

By looking at these conditions, it can be said that the ICT and economic growth has a great opportunity, which the innovation of products and ICT services has ample scope to grow and thrive. Years of experience in the telecommunications industry, innovation competency in smart product development, extensive networking, and integrated business processes into the Company's capital to take the opportunity in this industry.

Strategi perusahaan
Corporate strategy

Strategi Perusahaan disusun dalam rangka mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi cerdas bagi peningkatan kehidupan yang lebih baik.

Corporate Strategy drafted in order to realize sustainable growth through intelligent innovation for the improvement of a better life.

Strategi Perusahaan terdiri dari 2 strategi utama yaitu:

1. **Strategi produktifitas**; dilakukan dengan meningkatkan contribution margin atau menurunkan harga pokok penjualan yang dicapai melalui peningkatan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, serta penyediaan modal kerja dengan biaya yang paling menguntungkan bagi Perusahaan untuk percepatan perputaran kas.

2. **Strategi pertumbuhan**; dilakukan dengan mempertahankan bisnis perusahaan yang

Corporate strategy consists of two main strategies:

1. **Strategy productivity**; done by increasing the contribution margin or lowering the cost of sales achieved through increased productivity, efficiency, and effectiveness, as well as the provision of working capital at a cost that is most favorable to the Company to accelerate cash turnover.

2. **The growth strategy**; done by maintaining high-margin enterprise business and increasing revenues

bermargin tinggi dan meningkatkan pendapatan perusahaan melalui pengembangan portofolio bisnis perusahaan.

through the development of the company's business portfolio.

Strategi perusahaan dilakukan dalam perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Strategi perusahaan dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan strategi perusahaan yang bersifat jangka panjang. Strategi dalam perspektif ini dilakukan dengan melakukan pembangunan human capital, information capital, dan organization capital. Pembangunan tersebut dilakukan untuk menunjang strategi perusahaan dalam perspektif internal, yaitu dengan melakukan pengembangan dan penyempurnaan dalam proses pemasaran, proses operasi dan teknologi, proses keuangan, proses inovasi, dan proses regulasi dan sosial.

The company's strategy is done in the financial perspective, customer perspective, internal, and learning and growth perspective. The company's strategy in the learning and growth perspective is a corporate strategy that is long-term. The strategy in this perspective is done by developing human capital, information capital, and organization capital. Construction is done to support the company's strategy in the internal perspective, namely by developing and perfecting the process of marketing, operations and technology processes, financial processes, process innovation, and social and regulatory processes.

Strategi perusahaan untuk proses pemasaran adalah dengan melakukan pengembangan portofolio pasar dan produk pada bisnis eksisting maupun bisnis baru, dan inovasi pemasaran untuk membangun image sebagai innovation leading company. Strategi perusahaan untuk proses operasi dan teknologi dilakukan dengan pembangunan rantai pasokan yang baik, kemitraan strategis dengan pemilik teknologi, peningkatan kualitas pengelolaan proyek (untuk QCD), dan dengan pengendalian resiko operasi secara konsisten. Strategi perusahaan untuk proses keuangan adalah dengan melakukan pengendalian arus kas, penyediaan modal kerja secara efektif dengan biaya modal yang paling menguntungkan bagi perusahaan, dan pengendalian risiko keuangan secara konsisten. Strategi perusahaan untuk proses inovasi adalah dengan melakukan pengembangan portofolio produk baru melalui sinergi inovasi produk dan model bisnis, serta dengan melakukan inovasi untuk peningkatan kualitas proses internal. Strategi perusahaan untuk proses regulasi dan sosial adalah dengan melakukan bina lingkungan dan Corporate Social Responsibility (CSR), pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, serta keberlangsungan ketenegakerjaan yang sesuai dengan perundangan yang berlaku.

The company's strategy for the marketing process is to develop and market a portfolio of products in the existing business and new business, and marketing innovation to build an image as a leading innovation company. The company's strategy for the operation and technological process carried out with a good supply chain development, strategic partnerships with the owner of the technology, improving the quality of project management (for QCD), and the risk control operations consistently. The company's strategy for the financial process is to do a cash flow control, provision of working capital effectively with the most favorable cost of capital for the company, and the financial risk control consistently. The company's strategy for the innovation process is to develop a portfolio of new products through the synergy of innovative products and business models, as well as the innovations for improving the quality of internal processes. The company's strategy for regulatory and social processes is to conduct environmental development and Corporate Social Responsibility (CSR), the implementation of health and safety, and sustainability ketenegakerjaan accordance with the applicable legislation.

Strategi perusahaan dalam perspektif internal tersebut dilakukan untuk menunjang dalam perspektif pelanggan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Hal ini dilakukan diantaranya dengan menciptakan solusi cerdas yang inovatif untuk pelanggan, total biaya yang kompetitif, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, project engagement excellent, menjalin kemitraan yang baik dengan pelanggan, menjaga image perusahaan, dan mengarahkan perusahaan untuk menjadi innovation leading company.

The company's strategy in the internal perspective is done to support the customer's perspective is done with the aim to enhance the company's reputation. This is done such as by creating innovative intelligent solutions for customers, the total cost competitive, providing high quality products, excellent engagement project, establish a good partnership with customers, maintain the image of the company, and directed the company to become a leading innovation company.

Dengan terbentuknya reputasi perusahaan yang baik, maka perusahaan dapat menjalankan strategi perusahaan dalam perspektif finansial dengan baik.

With the formation of the good reputation of the company, then the company can execute the company's strategy in the financial perspective well. The company's

Strategi perusahaan dalam perspektif tersebut adalah dengan peningkatan contribution margin, percepatan perputaran kas, mempertahankan bisnis bermargin tinggi, dan meningkatkan pendapatan melalui pengembangan portofolio bisnis.

strategy in this perspective is to increase the contribution margin, accelerating cash turnover, maintain a high margin business, and increase revenue through the development of its business portfolio.

Fokus perusahaan adalah pengembangan pasar dan produk dalam portofolio bisnis perusahaan dengan pasar dan produk yang bersifat high value melalui inovasi produk dan bisnis yang cerdas. Portofolio bisnis Perusahaan terdiri dari 6 (enam) lini bisnis yang meliputi ICT Infrastructure, Smart System, Smart Application, Smart Services, ICT Consumer, dan Smart Defense.

The focus of the company is a market and product development in the company's business portfolio with the market and the products that are of high value through product innovation and smart business. The company's business portfolio consists of six (6) lines of business which include ICT Infrastructure, Smart System, Smart Application, Smart Services, ICT Consumer, and Smart Defense.

Lini bisnis ICT Infrastructure merupakan lini bisnis Perusahaan dalam bentuk penyediaan sistem dan/atau perangkat ICT untuk pasar sektor telekomunikasi yang dideliver kepada pelanggan baik dalam bentuk barang ataupun dengan nilai tambahnya yang dapat berupa jasa survey dan desain, instalasi, test and commisioning, migrasi, sampai dengan layanan purna jual. Model bisnis dalam lini bisnis ini dapat berupa progress payment, turn-key project, atau Trade-In Trade-Off.

ICT Infrastructure business line is a line of business of the Company in the form of the provision of a system and / or ICT devices for delivery via telecommunications sector market to customers in the form of goods or the value added services that can be in the form of survey and design, installation, testing and commissioning, migration, until with after-sales service. The business model in this line of business can be a progress payment, turn-key project, or Trade-In Trade-Off.

Lini bisnis Smart System merupakan lini bisnis Perusahaan yang berisikan produk-produk kustomisasi dengan basis sistem monitoring dan pengendalian (monitoring and controlling system), diantaranya adalah : Sistem Pencegah Pelanggaran Sinyal (Garansi), Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) BBM, Smart Metering, Smart Grid, Smart City, dan Smart Light. Model bisnis yang diterapkan dalam lini bisnis ini dapat berupa produk dagang, operation managed services berdasarkan pencapaian service level, ataupun revenue sharing berdasarkan jumlah transaksi.

Smart Systems business line is a line of business of the Company which contains product customization with the base system of monitoring and control (monitoring and controlling system), which are: Signal Abuse Prevention System (Garansi), Fuel Monitoring and Control System (SMP BBM), Smart Metering, Smart Grid, Smart City, and Smart Light. The business model is applied in this line of business can be a trade products, operation of managed services based on the achievement of service levels, or revenue sharing based on the number of transactions.

Lini bisnis Smart Applications merupakan lini bisnis Perusahaan di bidang penyediaan sistem aplikasi berbasis kompetensi di bidang enterprise resource plan (ERP), assets, management software, data warehousing, data mining, business intelligent, dan kompetensi lainnya terkait kecenderungan perkembangan teknologi ICT menuju era big data. Lini bisnis Smart Services merupakan lini bisnis Perusahaan yang mendeliver engineering services kepada pelanggan. Termasuk di dalamnya adalah jasa repair, maintenance, dan seat management.

Smart Business Line Applications in the Company's line of business is the provision of a competency-based application system in the field of enterprise resource plan (ERP), assets, management software, data warehousing, data mining, business intelligent, and other competencies related to ICT technological trends to the era of big data . Smart business lines Corporate Services is a business line that delivers engineering services to customers. This includes repair services, maintenance, and seat management.

Lini bisnis ICT Consumer adalah lini bisnis Perusahaan di bidang ICT yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penyerahan barang dan/atau jasa kepada pelanggan akhir (end customer) dapat bersifat B2B (business to business) maupun B2C (business to customer). Termasuk dalam lini bisnis ini diantaranya smartphone, film animasi, games, mobile applications, dan mobile device manager. Lini bisnis Smart Defense adalah lini bisnis Perusahaan yang berisikan produk dan/atau jasa yang terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan negara, diantaranya radar, integrated communication

Consumer ICT business line is the line of business of the Company in the field of ICT which is consumed by the public. The delivery of goods and / or services to end customers (end customer) can be B2B (business to business) and B2C (business to customer). Included in this line of business including smartphones, animated movies, games, mobile applications, and mobile device manager. Smart Defense is a business line of our business lines containing products and / or services related to the field of defense and security of the state, including radar, integrated communication system,

system, encryption algorithm and system, dan cyber defense.

Strategi lain perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi cerdas bagi peningkatan kehidupan yang lebih baik adalah dengan melakukan parenting strategy. Parenting strategy dikembangkan Perusahaan untuk memberdayakan secara optimal sumber daya dan kapabilitas perusahaan bagi pembangunan nilai setiap lini bisnis perusahaan dan sekaligus pula menghasilkan sinergi diantara berbagai lini bisnis tersebut. Strategi ini fokus pada kompetensi inti (core competencies) perusahaan induk (parent corporation) dan pada nilai yang diciptakan dari hubungan antara induk dan unit-unit bisnisnya.

encryption algorithms and systems, and cyber defense.

Another strategy of the company to achieve sustainable growth through intelligent innovation for the improvement of a better life is to do a parenting strategy. Parenting strategy developed optimally empower the Company to the resources and capabilities of the company for the development of the value of each business line and at the same company also produces synergies among the various business lines. This strategy focuses on core competencies (core competencies) parent company (the parent corporation) and the value created from the relationship between the parent and business units.

Informasi Pemegang Saham
Information on Shareholders

Pemerintah Republik Indonesia
Government of The Republic of Indonesia
100%

Komposisi Kepemilikan Saham
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Non Listed sehingga baik masyarakat, direksi, maupun dewan komisaris PT INTI (Persero) tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT INTI (Persero). Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%.

Kronologis Pencatatan Saham
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Non Listed sehingga belum tercatat dalam Bursa Efek dan tidak menjual sahamnya kepada publik. Oleh sebab itu, informasi kronologis pencatatan saham dan jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham tidak tersedia.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Non Listed sehingga tidak menjual sahamnya kepada publik. Oleh sebab itu, informasi kronologis pencatatan efek lainnya dan jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya tidak tersedia.

Anggota Direksi, Komisaris, maupun keluarganya, tidak memiliki Saham di Perusahaan lain.

Composition of Share Ownership
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) constitutes a Non-Listed Company so that the community, the board of directors and the board of commissioners of PT INTI (Persero) do not have a share ownership over PT INTI (Persero). All of its shares are owned 100% by the Government of the Republic of Indonesia.

Chronology of Share Listing
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) constitutes a Non-Listed Company so that it has yet been listed on the Stock Exchange and does not sell its shares to public. Therefore, the information on the chronology of share listing and the type of corporate actions which cause any changes to the number of shares is not available.

Chronology of Other Share Listing
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) constitutes a Non-Listed Company so that it does not sell its shares to public. Therefore, the information on the chronology of other share listing and the type of corporate actions which cause any changes to the number of other shares is not available.

Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or their families, do not have shares in another company.

LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
Report to Shareholders

Laporan Kepada Pemegang Saham
Report to The Shareholders

Laporan Dewan Komisaris
Report from The Board of Commissioners

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan dan bukan tahun yang menggembirakan bagi kondisi perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian global yang mengalami pelemahan sehingga berdampak pada perekonomian domestik. Secara garis besar, sampai dengan akhir tahun 2014, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai titik terendah sebesar 5,1 persen atau jauh di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P 2014) yang dipatok sebesar 5,5 persen.

Dinamika kondisi ekonomi yang cukup fluktuatif ini juga didominasi oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp. 11.878 perdolar Amerika Serikat (AS) rata-rata setahun atau terdepresiasi Rp. 278 per dolar AS dibanding asumsi APBN-P 2014 sebesar Rp. 11.600 per dolar AS.

Berbeda kondisi ekonomi makro, perkembangan dunia Information and Communication Technology (ICT) masih sangat prospektif. Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia pun akan menuntut "demand" terhadap infrastruktur ICT yang serba canggih, terutama layanan infokom berbasis "broadband and internet protocol". Menghadapi kebutuhan pasar seperti ini, Dewan Komisaris yakin PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) siap dengan berbagai infrastruktur dan produk "genuine" yang prospektif dan dapat diandalkan.

Dengan mengucapkan syukur kepada tuhan Yang Maha Esa, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sampai akhir tutup tahun 2014 telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, walaupun output kinerja perusahaan belum tercapai maksimal.

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja perusahaan tahun 2014 telah menjalankan program strategis yang telah dicanangkan di awal tahun, dan seluruh jajaran PT INTI (Persero) berupaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2014. Namun, Perusahaan belum berhasil mencapai target-target tersebut yang mana penjualan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan jumlah penjualan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 44.24 %. Kondisi yang kurang menggembirakan bagi kinerja Perusahaan dikarenakan pengaruh tingkat kesulitan/kompleksitas pelaksanaan proyek-proyek strategis di lapangan sangat tinggi sedangkan kemampuan laba menurun. Selain itu, secara teknis adanya penurunan dari harga LME yang semula seharga US$8000/ton menurun

Dear Shareholders and Stakeholders,
2014 was a year full of challenges and not exciting year for Indonesia's economy. Global economic conditions weakened so the impact on the domestic economy. Broadly speaking, until the end of 2014, the national economic growth reached a low of 5.1 percent, far below the target of the State Budget Amendment (APBN-P 2014) which is pegged at 5.5 percent.

Dynamics of fluctuating economic conditions is also dominated by the weakening rupiah against the US dollar is Rp. 11,878 per USD per year, or an average of depreciates of Rp. 278 per USD compared to the revised 2014 budget assumption of Rp. 11,600 per USD.

Different in macroeconomic conditions, the development of Information and Communication Technology (ICT) is still very prospective. Indonesian society lifestyle changes will require "demand" for sophisticated ICT infrastructure, especially information and communication services based "broadband and internet protocol". Faced with such market needs, BOC believe that PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) prepared with various infrastructure and genuine products prospective and reliable.

By giving thanks to God the Almighty, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) to the end cap 2014 has been able to complete the task well, although the output performance of the company has not reached the maximum.

Board of Commissioners considered that the company's performance in 2014 has been running the strategic programs that have been implemented at the beginning of the year, and the whole range of PT INTI (Persero) seeks to achieve the targets set out in RKAP 2014. However, the Company has not succeeded in achieving these targets which the sales in 2014 when compared with the number of sales in 2013 decreased by 44.24%. Unfavorable conditions for the performance of the Company due to the influence of the level of difficulty / complexity of the implementation of strategic projects in the field is very high while profit decreased ability. In addition, it is technically a decrease from the original LME price at US $ 8,000 / ton decreased to US $ 5,000 / ton, and along with the increase in the exchange rate so

menjadi US$ 5000/ton, dan bersamaan dengan kenaikan kurs sehingga berpengaruh pada biaya material sehingga Harga Pokok Penjualan (HPP) tinggi.

Untuk itu, Dewan Komisaris menilai bahwa direksi perlu menunjukan dan mengambil langkah-langkah strategis dan operasional untuk peningkatan kinerja yang lebih baik. Direksi harus mampu mengevaluasi kembali strategi-strategi Perusahaan yang ada untuk mencapai target RKAP 2015. Adanya faktor eksternal dan internal mempengaruhi strategi tersebut sehingga tidak berjalan dengan optimal.

Kedepan, Dewan Komisaris memiliki harapan besar bahwa perusahaan mampu menanamkan pondasi yang kuat untuk pencapaian yang lebih baik di tahun yang akan datang atas RKAP 2015 yang telah disusun, terutama mengenai pencapaian target laba yang telah ditetapkan. Untuk itu, Perusahaan selalu mengedepankan semangat serta antusias dengan melakukan perbaikan dan peningkatan pola hubungan kerja sama melalui check & balance serta menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam pengelolaan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Direksi juga harus mampu memanfaatkan dan melaksanakan produk-produk unggulan yang telah ditetapkan guna mendukung program Pemerintah pada sektor transportasi, sektor perikanan, dan sektor jasa lainnya. Dengan demikian, Direksi perlu mempersiapkan strategi secara matang untuk menghadapi pelaksanaan produk-produk unggulan, selain juga mengantisipasi potensi kendala faktor internal maupun faktor eksternal.

Sesuai dengan semangat dan antusias PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) untuk menjadi Perusahaan yang ditata kelola dengan baik, maka peran Dewan Komisaris menjadi sangat penting dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik melalui pengawasannya.

Untuk itu, Kinerja Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris yang saat ini adalah Komite Audit bertugas membantu dalam pengawasan Dewan Komisaris. Dan, organ lainnya yaitu sekretaris Dewan Komisaris sebagai organ yang mengadministrasikan segala kegiatan Komisaris. Dewan Komisaris memandang bahwa organ-organ yang berada di bawah Dewan Komisaris, Komite Audit dan sekretaris Dewan Komisaris, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Walaupun berada ditengah kondisi yang penuh tantangan, berdasarkan lampiran Komite Audit bahwa perusahaan masih dapat menjaga komitmen kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, aktivitas operasional juga berhasil dijalankan dengan tingkat indepedensi dan objektivitas yang tinggi yang didukung dengan menunjukan

that the effect on the cost of the material so that the Cost of Goods Sold (COGS) is high.

To that end, the Board considered that the directors need to show and take steps to improve the strategic and operational performance better. Directors should be able to re-evaluate the Company's strategies for achieving the target of 2015. The presence of external and internal factors affecting the strategies that are not running optimally.

In the future, the Board has high hopes that the company is able to instill a strong foundation for the better achievement in the years to come on CBP in 2015 that had been developed, especially regarding the achievement of predetermined profit targets. To that end, the Company has always put forward the spirit and enthusiasm to make improvements and enhancement pattern of cooperation through check and balance as well as respecting the duties and authority of the Board of Directors in the management of the Company in accordance with the Laws and Articles of Association of the Company.

Directors should also be able to utilize and implement superior products that have been established to support the Government in the transport sector, fisheries, and other service sectors. Thus, the Board of Directors must prepare a strategy carefully to face execution superior products, as well as to anticipate potential obstacles to internal factors and external factors.

In accordance with the spirit and enthusiasm PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) to be the company that well-governed, so the role of the Board of Commissioners to be very important in the implementation of the principles of good corporate governance through oversight.

To that end, Committee performance under the Board of Commissioners who is currently in charge of the Audit Committee assists in the supervision of the Board of Commissioners. And, other organs are the secretary of the Board of Commissioners as an organ which administers all activities of the Commissioner. Board of Commissioners considers that the organs that are under the Board of Commissioners, Audit Committee and secretary of the Board of Commissioners, has carried out its duties and responsibilities well. Although located amid challenging conditions, based on appendix of Audit Committee that the company is still able to maintain the commitment of compliance with the legislation in force. In addition, operational activities also managed to run with the level of independency and high objectivity supported by showing the highest

komitmen tertinggi untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan.

Dewan Komisaris juga terus memastikan bahwa kualitas tata kelola Perusahaan terus-menurus ditingkatkan guna memastikan kecukupan dan efektivitas mekanisme kontrol resiko internal dan eksternal, bersamaan juga tetap melakukan pemantauan dan perbaikan secara terus menerus Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan melalui laporan yang disampaikan Direksi dan Komite Audit

Atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan karyawan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atas etos kerja dan kinerja yang telah ditunjukan dengan penuh semangat untuk tetap berjuang dengan sebaik-baiknya untuk berusaha mencapai target-target yang telah ditetapkan pada RKAP 2014. Dewan Komisaris juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para Pemegang Saham dan juga Pemangku Kepentingan serta Mitra Usaha yang telah memberikan kepercayaannya kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ditengah kondisi yang penuh tantangan. Dewan Komisaris berharap bahwa pengalaman di tahun 2014 bisa menajadi pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

commitment to ensure that Corporate Governance is applied.

The Board also continued to ensure that the quality of governance of the Company to continue to be enhanced to ensure the adequacy and effectiveness of internal control mechanisms and external risks, simultaneously also keep monitoring and continuous improvement of the Board of Commissioners to monitor and evaluate the implementation of the strategic policy of the Company through the reports submitted by the Board of Directors and Audit Committee

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to thank the Board of Directors and employees of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) on work ethic and performance have shown vigorously to keep fighting as well as possible to try to achieve the targets that have been set in the 2014 RKAP. The Board also express deepest appreciation to the Shareholders and Stakeholders and Partners who has given confidence to PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) around challenging conditions. BOC hope that the experience in 2014 could be valuable lessons to be better in the future.

Bandung, Februari 2015
Dewan Komisaris PT INTI (Persero)
Board of Commissioners

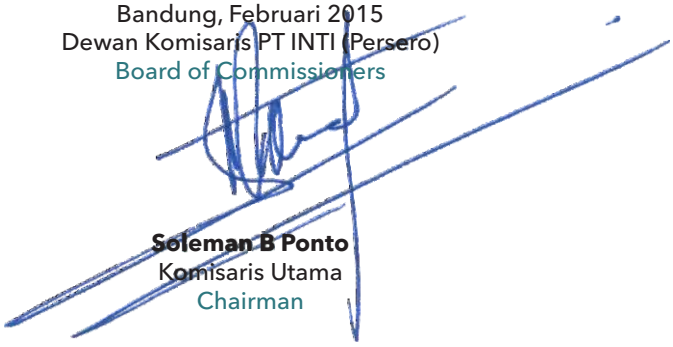

Soleman B Ponto
Komisaris Utama
Chairman

Profil Dewan Komisaris
Commissioners' Profile

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor : KEP-49/MBU/2011 tanggal 23 Februari 2011, SK-179/MBU/2012 tanggal 30 April 2012 dan SK-142/MBU/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, maka susunan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) sebagai berikut:

Soleman B. Ponto, Komisaris Utama
Lahir di Sangir, Sulawesi Utara 6 November 1955, memulai karir militer di TNI AL melalui Akabri laut tahun 1978, dengan jabatan terakhir Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI. Menjalani masa pensiun yang dimulai pada tahun 2013. Gelar Sarjana Teknik Industri di dapat pada tahun 1996 dari fakultas Teknik Industri Universitas WR Supratman, Surabaya, dan gelar Magister Hukum didapat pada tahun 2012 dari fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Beliau telah menulis 2 buku yang berjudul "TNI dan Perdamaian di Aceh" serta "Jangan Lepas Papua".

Soleman B. Ponto, Chairman.
Born in Sangir, North Sulawesi 6 November 1955, began his military career in the Navy through the AKABRI AL (The Military Academy for Navy Seal) in 1978, with last position Head of Badan Inteligen Strategis (BAIS - Strategic Intelligence Agency) TNI. Retirement that began in 2013. Bachelor's degree in Industrial Engineering in 1996 from the faculty of Industrial Engineering, Universitas WE Supratman, Surabaya, and obtained a Master degree in Law in 2012 from the Faculty of Law, Universitas Pancasila, Jakarta. He has written two books entitled "TNI dan Perdamaian di Aceh" and "Jangan Lepas Papua".

Slamet Effendy Yusuf, Komisaris
Lahir di sebuah desa kecil, Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada tanggal 12 Januari 1948. Menjalani masa kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta pada 1968. Melanjutkan ke jenjang pendidikan Strata II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Ketua DPP Partai Golkar dan Ketua Pelaksana Harian Panitia Konvensi Partai Golkar, saat ini menjadi Ketua PBNU (2010-2015) serta Ketua MUI (2009-2014).

Slamet Effendi Yusuf, Commissioner
Born in a small village, Lesmana, Ajibarang, Purwokerto, Banyumas, Central Java, on January 12, 1948. Undergoing a period of study at the Faculty of Sharia IAIN Sunan Kalijaga in Yogyakarta in 1968. Continuing education to Strata II at the Faculty of Social Sciences and Political Sciences (Social) at the Universitas Indonesia. Once the Golkar Party Chairman and Chief Executive of the Golkar Party Convention Committee, is currently the Chairman of the NU (2010-2015) and Chairman of the MUI (2009-2014).

Composition of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia by the Statement of Minister of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. KEP-49/MBU/2011 dated February 23, 2011, SK-179/MBU/2012 dated April 30, 2012 and SK-142/MBU/2013 dated February 14, 2013 on Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, the composition of the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) as follows:

Djoko Agung Harijadi, Komisaris
Sosok Djoko Agung Harijadi yang lahir di Kediri, 17 Mei 1956, adalah seorang Insinyur Teknik Industri lulusan Institut Teknologi Bandung dan Magister Manajemen Universitas Padjajaran Bandung serta masih menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika di Kementrian Komunikasi & Informatika, dan kini menjabat sebagai Staff Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi & Informatika.

Djoko Agung Harijadi, Commissioner
Djoko Agung Harijadi who was born in Kediri, May 17, 1956, is an Industrial Engineer who has graduate from the Institut Teknologi Bandung and Master Management of Universitas Padjadjaran, Bandung, and still serving as Secretary General of Telematics Applications Directorate at the Ministry of Communications & Information Technology, and now serves as Expert Staff of Social, Economic and Cultural Ministry of Communications & Information Technology.

Nuning Sri Rejeki Wulandari, Komisaris
Nuning, lahir di Bogor 6 Juli 1963. Sarjana Pertanian lulusan Fakultas Pertanian,Institut Pertanian Bogor, tahun 1987. Kemudian pernah mengikuti Pre-MBA Preparation Program, San Diego State University, California, USA, 1992, dan mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA), University of Detroit, Michigan, USA, 1994, Major in Finance. Pada tahun 2011-2012 menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN. Tahun 2012 - 2013 Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Perum LKBN Antara dan sekarang masih menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Nuning Sri Rejeki Wulandari, Commissioner
Nuning, born July 6, 1963 in Bogor. Agricultural Bachelor graduates from the Faculty of Agriculture, Institut Pertanian Bogor, 1987. Then attended the Pre-MBA Preparation Program, San Diego State University, California, USA, 1992, and received a Master of Business Administration (MBA), University of Detroit, Michigan, USA, 1994, Major in Finance. In 2011-2012 served as Personnel Assessment Restructuring, privatization, and the effectiveness of State Assets Separated, DJKN. In 2012 - 2013 he worked as the Supervisory Board of Perum LKBN Antara and still served as a Policy Harmonization Assessment, Directorate General of State, Ministry of Finance.

Laporan Dewan Direksi
Report from The Board of Directors

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak karunia kepada kita semua. Sepanjang perjalanan lima tahun sejak 2008, Perusahaan telah membukukan tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan gabungan tidak kurang dari 13,9%, yaitu dari pencapaian penjualan sebesar Rp 762,4 Milyar di tahun 2008 hingga mencapai Rp 1.466,8 Milyar di tahun 2013. Pekerjaan modernisasi jaringan akses dengan pola trade-in trade-off atau dikenal sebagai Proyek TITO, dengan Telkom sebagai pemberi kerja, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap portofolio pendapatan Perusahaan sehingga pendapatan total Perusahaan di tahun 2012 dan 2013 secara berturut-turut mencapai Rp. 1.227,7 Milyar dan Rp. 1.466,8 Milyar. Sebuah capaian pendapatan yang sangat menggembirakan dibandingkan capaian pendapatan yang telah berhasil diraih di tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan ini disertai pula oleh kinerja laba bersih Perusahaan yang sangat baik. Sejak mengalami kerugian sebesar Rp. 15,3 Milyar di tahun 2008, Perusahaan telah membukukan laba bersih secara berturut-turut dalam lima tahun setelahnya, dan bahkan merealisasikan pencapaian laba bersih tertinggi sebesar Rp. 16,7 Milyar di tahun 2012. Tentunya, capaian kinerja positif tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak, baik karyawan maupun Direksi Perusahaan serta para pemangku kepentingan lainnya, tidak terkecuali Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham yang senantiasa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program strategis Perusahaan.

Namun demikian, dalam pencapaian tersebut belum disertai keberlanjutan yang positif di tahun berikutnya. Sejumlah faktor eksternal dan internal Perusahaan mengakibatkan kinerja Perusahaan kurang menggembirakan di tahun 2014. Pencapaian pendapatan Perusahaan di tahun 2014 sebesar Rp. 817,9 Milyar hanya merupakan capaian 34,9% dari target yang dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan Tahun 2014 (RKAP-P 2014) sebesar Rp. 2.342,8 Milyar. Perubahan rancangan teknologi menjadi jaringan kabel optik berbasis teknologi Fiber To The Home (FTTH) yang wajib diimplementasikan dalam Proyek TITO telah menimbulkan kerumitan teknis dan non-teknis dalam implementasi proyek. Kerumitan ini sudah semestinya dapat dipahami mengingat pemanfaatan teknologi FTTH ini mengharuskan Perusahaan untuk melakukan modernisasi jaringan akses telekomunikasi optik sampai ke instalasi di rumah pelanggan. Sebuah kompleksitas yang tinggi dibandingkan implementasi berbasis teknologi Multi Services Access Network (MSAN) yang digunakan di awal Proyek TITO, dimana

Dear Shareholders and Stakeholders,
Thank God we pray to the Almighty God, who has given many gifts to us all. Throughout the course of the five years since 2008, the Company has recorded a compound annual growth rate of income of not less than 13.9%, from the sales of Rp 762.4 billion in 2008 to reach Rp. 1,466.8 billion in 2013. The network modernization work Access to the pattern of trade-in trade-offs or known as Project TITO, with Telkom as an employer, has contributed significantly to the Company's portfolio income that the Company's total revenue in 2012 and 2013 respectively to Rp. 1227.7 billion and Rp. 1466.8 billion. A very encouraging revenue performance compared to the revenue performance has been achieved in previous years. This revenue growth accompanied by the Company's net profit performance is excellent. Since a loss of Rp. 15.3 billion in the year 2008, the Company has posted a net profit respectively in five years thereafter, and even realize the highest net profit of Rp. 16.7 billion in 2012. Of course, the achievement of positive performance is the result of hard work from all parties, both employees and directors of the Company as well as other stakeholders, not least the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) as a shareholder who continues to provide support the implementation of strategic programs of the Company.

However, in the achievement of sustainability has not been accompanied by a positive in the next year. A number of external factors and internal company less encouraging results in the Company's performance in 2014. The achievement of the Company's revenue in 2014 amounted to Rp. 817.9 billion is only a 34.9% achievement of the target set in the Work Plan and Budget Amendments of 2014 (RKAP-P 2014) of Rp. 2342.8 billion. Changes in technology design into technology-based fiber optic network Fiber To The Home (FTTH), which shall be implemented in TITO Project has raised the complexity of technical and non-technical in project implementation. This complexity it should be understood considering the use of FTTH technology requires the Company to make the modernization of optical telecommunication access network to the installation at the customer's home. A high complexity compared to the implementation of technology-based Multi Services Access Network (MSAN) used in early TITO Project, where optical telecommunication access network modernization just installed up to the house wiring and installation next to

modernisasi jaringan akses telekomunikasi optik hanya diinstalasi sampai ke rumah kabel dan selanjutnya instalasi sampai ke rumah pelanggan masih menggunakan jaringan akses tembaga eksisting. Kompleksitas ini sangat dirasakan dampaknya di tahun 2014 dimana progres implementasi proyek mulai didominasi oleh aktivitas instalasi kabel rumah sehingga progres proyek secara keseluruhan mulai melambat dan berdampak pada pencapaian pendapatan yang rendah.

the customer's home is still using the existing copper access network. This complexity is perceived impact in 2014 in which the progress of implementation of the project began to be dominated by the home wiring installation activities so that the progress of the project as a whole began to slow down and have an impact on the achievement of a low income.

Rendahnya capaian pendapatan Perusahaan pada akhirnya mengakibatkan capaian laba kotor Perusahaan yang rendah. Meningkatnya beban pendanaan yang dipicu oleh melambatnya progres penyelesaian pekerjaan mengakibatkan tekanan paling kuat terhadap kemampulabaan Perusahaan, di samping tekanan lainnya yang diakibatkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar mengingat sebagian perangkat untuk Proyek TITO adalah material impor, serta melemahnya harga tembaga dunia mengingat salah satu komponen pendapatan dari Proyek TITO adalah pendapatan dari penjualan scrap tembaga yang penetapan nilainya mengacu pada harga tembaga menurut London Metal Exchange (LME) untuk pengiriman 3 bulan ke depan. Faktor-faktor tersebut secara dominan memberikan tekanan kuat terhadap kemampulabaan Perusahaan sehingga secara keseluruhan Perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar Rp. 265,8 Milyar di tahun 2014, jauh di bawah target laba bersih Rp. 11,7 Milyar yang dicanangkan dalam RKAP-P 2014.

The low performance in the end resulted in the Company's revenue performance lower gross profit company. Increased financing costs triggered by slowing the progress of completion of the work resulted in the strongest pressure on the profitability of the Company, in addition to other pressures caused by the weakening of the rupiah against the US dollar since most devices for TITO project is imported materials, as well as the weakening of the world copper price considering one TITO income component of the Project is the income from the sale of scrap copper determination of value refers to the price of copper in the London Metal Exchange (LME) for delivery the next 3 months. These factors are dominant, strong pressure against the Company so that the overall profitability Company had a net loss of Rp. 265.8 billion in 2014, far below the target of net profit. 11.7 billion, announced in RKAP-P, 2014.

Tekanan terhadap kemampulabaan Perusahaan juga diakibatkan oleh belum adanya kepastian atas kelanjutan Proyek Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMP BBM) Pertamina setelah perubahan kebijakan Pemerintah atas pengendalian subsidi BBM, sehingga manajemen Perusahaan secara konservatif melakukan pembebanan penurunan nilai aset yang telah dibangun untuk pengoperasian sistem monitoring dan pengendalian ini di tahun 2014. Diharapkan nilai aset ini akan terpulihkan pada saat diperoleh kepastian atas kelanjutan Proyek SMP BBM dari Pertamina, termasuk opsi penghentian proyek yang tidak merugikan Perusahaan.

Pressure on company profitability is also caused by the lack of certainty over the continuation of the Project of Fuel Monitoring and Control Systems (SMP BBM) of Pertamina after the change in government policy on fuel subsidy control, so that the Company's management conservatively perform loading impairment of assets that have been built for the operation of the system monitoring and control in 2014. It is expected that the value of this asset will be recovered at the time of certainty is obtained on the continuation of SMP BBM Project from Pertamina, including project termination option that is not harmful to the Company.

Pencapaian tahun 2014 ini merupakan momentum penting sebagai kelangsungan usaha Perusahaan ke depan. Oleh karenanya telah ditetapkan langkah-langkah ke depan yang akan diambil dalam waktu dekat untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan di masa mendatang.

Achievement of 2014. This is an important moment as the Company's future business continuity. Therefore predefined steps forward to be taken in the near future to sustain the Company's business in the future.

Pertama, penyelesaian Proyek TITO akan dilakukan dengan langkah-langkah percepatan penyelesaian dokumen yang diperlukan sebagai dasar uji terima sampai dengan rekonsiliasi dan penerbitan Berita Acara Serah Terima 1 (BAST-1) sehingga dapat dilakukan penagihan ke Telkom sesuai dengan ketentuan kontrak

First, TITO Project completion will be done by accelerating the completion of the steps necessary documents as the basis for the accepted test to the reconciliation and issuanced Handover 1 (BAST-1) that can be done to Telkom billing in accordance with the contract in order to finance the completion of the project

agar pembiayaan penyelesaian proyek dapat didanai oleh perputaran modal kerja yang optimal. Sementara itu penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan akan dituntaskan pada semester pertama 2015 sampai pada dilakukannya serah terima dan penagihan ke Telkom. Selanjutnya Proyek TITO ditargetkan akan terselesaikan secara total sampai pada pekerjaan IKR dan migrasi di akhir tahun 2015.

can be funded by the optimal working capital turnover. While the completion of the rest of the development work will be completed in the first half of 2015 to the handover and billing done to Telkom. Furthermore TITO project is targeted to be completed in total to the IKR employment and migration at the end of 2015.

Direksi memberikan perhatian yang sangat serius terhadap penyelesaian Proyek TITO agar perputaran modal kerja Perusahaan menjadi lebih baik. Pada tahun 2014, kinerja perputaran modal kerja Perusahaan kurang menggembirakan, tercermin dari aliran kas yang mengalami defisit selama tahun 2014. Direksi menyadari bahwa terdapat sejumlah tantangan agar perputaran modal kerja ini dapat diperbaiki. Namun demikian, Direksi memiliki keyakinan bahwa pada tahun-tahun mendatang, perputaran modal kerja Perusahaan akan mengalami perbaikan yang signifikan.

Directors give very serious attention to the completion of the project in order TITO working capital turnover for the better. In 2014, the Company's working capital turnover performance is less encouraging, reflected in the cash flow deficit for 2014. The Board of Directors realized that there are a number of challenges that working capital turnover can be improved. However, the Directors have confidence that in the coming years, the Company's working capital turnover will experience significant improvement.

Kedua, Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor: 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang di dalamnya antara lain mengatur tentang pengaturan atau penghapusan subsidi BBM, maka Perusahaan perlu melakukan langkah-langkah penyelesaian Proyek SMP BBM dengan tetap melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan SMP BBM pada SPBU yang telah dibangun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, menghentikan sementara pembangunan SMP BBM pada area lainnya, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan Pertamina agar dalam hal Pertamina menghentikan Proyek SMP BBM ini, opsi yang dipilih tidak akan berdampak pada kerugian Perusahaan.

Second, the connection with the issuance of Presidential Decree No. 191 of 2014 on the provision, distribution and retail prices of fuel oil in which, among others, set about setting up or removal of fuel subsidy, then the company needs to do the steps to resolve the SMP BBM Project to continue to implement operation and maintenance of SMP BBM in SPBU which has been constructed in accordance with the requirements set out in contract, suspended SMP BBM development in other areas, and coordinate closely with Pertamina that in SMP BBM stop this project, the selected option will have no effect the loss of the Company.

Ketiga, pengembangan usaha Perusahaan akan diprioritaskan pada enam lini bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015-2019 yang sedang dalam proses persetujuan dari pemegang saham dengan memprioritaskan produk-produk Perusahaan yang telah selesai dikembangkan dan siap dimonetisasi. Keenam lini bisnis dimaksud meliputi bisnis di bidang infrastruktur informasi dan telekomunikasi, sistem cerdas (smart systems), perangkat cerdas (smart devices), jasa di bidang informasi dan telekomunikasi, telekomunikasi pertahanan dan keamanan negara, serta perangkat IT konsumer. Keenam lini bisnis ini merupakan perwujudan dari visi Perusahaan. Visi dan portofolio bisnis ini menegaskan kesadaran dan pemahaman Perusahaan akan potensi pertumbuhan peluang-peluang bisnis di bidang informasi dan telekomunikasi yang dapat menjamin keberlangsungan pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang.

Third, the development of the Company's business will be prioritized in the Company's six business lines that have been set forth in the Company's Long Term Plan 2015-2019 which is in the process of approval of the shareholders of the Company to prioritize products that have been developed and ready to be monetized. The sixth line of business shall include the business in the field of information and telecommunications infrastructure, intelligent systems (smart systems), intelligent devices (smart devices), services in the field of information and telecommunications, defense and security telecommunications, and consumer IT devices. The sixth line of business is the embodiment of the vision of the Company. Vision and business portfolio confirms the awareness and understanding of the Company's growth potential business opportunities in the field of information and telecommunications which can ensure the sustainability of the growth of the Company in the future.

Keempat, peningkatan kinerja Perusahaan melalui program strategis Perusahaan akan terus dilakukan

Fourth, increase the performance of the Company through the Company's strategic program will continue

meliputi peningkatan operasional ekselen yang meliputi pengelolaan material (material management) yang lebih baik, pengelolaan proyek (project management) yang berkualitas, serta edukasi mitra usaha untuk peningkatan dan standarisasi kualitas hasil pekerjaan. Di samping itu, pengelolaan modal kerja yang baik disadari akan sangat membantu Perusahaan dalam mengantisipasi tekanan pendanaan. Oleh karenanya sejumlah langkah strategis telah dan akan tetap dipertahankan, termasuk percepatan perputaran modal kerja dengan menjaga perolehan proyek yang memiliki turnover yang baik, perbaikan payable turnover dan menjaga kolektibilitas pada tingkat yang menguntungkan, serta upaya-upaya perolehan sumber pendanaan yang menguntungkan Perusahaan baik dalam bentuk perbaikan pola pembayaran (term of payment) dan/atau pola-pola vendor financing sampai kepada alternatif penambahan penyertaan modal negara. Produktivitas karyawan juga akan terus ditingkatkan melalui program-program peningkatan kompetensi SDM, pembangunan budaya perusahaan, peningkatan kualitas proses dan sistem kerja, pemberdayaan teknologi informasi dalam proses bisnis Perusahaan, serta pembangunan mekanisme penyebaran pengetahuan melalui sistem knowledge management yang semakin ditingkatkan kualitasnya.

to be made include increased operational excellence covering material management (material management) better, project management (project management) quality, as well as the education business partners to increase and standardize the quality of the work. In addition, good working capital management will greatly assist the Company realized in anticipation of funding pressures. Therefore, a number of strategic actions have been and will be retained, including the acceleration of working capital turnover to keep the acquisition project has a good turnover, repair and maintain collectibilities payable turnover at a profitable level, as well as efforts to gain a lucrative source of financing company in the form of improvement of payment patterns (term of payment) and / or patterns of vendor financing to the additional investment of alternative country. Employee productivity will also be improved through programs to increase the competence of human resources, corporate culture development, quality improvement processes and work systems, empowerment of information technology in our business processes, and the development of a mechanism for disseminating knowledge through knowledge management systems are increasingly improved quality.

Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2014 telah selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja dan Suhartono pada tanggal 27 Februari 2015, dengan opini "wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material". Pencapaian ini tentunya akan menjadi modal berharga bagi Perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya dan menjalani transformasi menjadi Perusahaan yang inovatif dengan solusi-solusi cerdas di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang lebih baik.

Company Financial Statements 2014 has been completed audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja and Suhartono on February 27, 2015, with opinion "unmodified fair in all material respects". This achievement will certainly be a valuable asset for the Company to maintain its survival and undergo transformation into an innovative company with smart solutions in the field of information and telecommunications technologies that are beneficial to human life better.

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Perusahaan. Namun demikian kerja keras yang telah dilakukan telah menghasilkan beberapa prestasi penting termasuk pencapaian score 348,50 untuk evaluasi implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Pencapaian atas evaluasi yang mengadopsi dan mengadaptasi "Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence" ini menunjukkan potensi Perusahaan dalam menghadapi persaingan di dalam industri dan dengan peningkatan yang berkelanjutan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan Perusahaan dengan kinerja yang semakin baik.

2014 was a challenging year for the Company. However, the hard work that has been done has resulted in some notable achievements including the achievement of the implementation of the evaluation score of 348.50 for Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) conducted by the Ministry of SOEs. Achievement for evaluation adopt and adapt "Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence" This shows the potential of the Company in the face of competition in the industry and with the continuous improvement is expected to accelerate the growth of the Company with better performance.

Untuk mendukung tercapainya kelangsungan usaha dengan pertumbuhan yang sustain, di tahun 2014 Perusahaan juga telah dan tetap menjalin kerja sama strategis dengan pihak-pihak lain, baik principal pemilik teknologi maupun badan-badan atau lembaga penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan

To support the achievement of business continuity with sustained growth, in 2014 the Company also has been and remains to establish strategic alliances with other parties, both principal owner of the technology as well as agencies or research institutes such as the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) and the Agency for the

Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Perencanaan Teknologi (BPPT).

Assessment Planning and Technology (BPPT).

Sementara itu, kegiatan-kegiatan Perusahaan di tahun 2014 juga diarahkan untuk tetap menjaga retensi dan loyalitas pelanggan (customer) utama yang menjadi mitra Perusahaan seperti PT Telekomunikai Indonesia, PT Pertamina, PT XL Axiata Tbk., PT Telkomsel, PT Indosat dan pelanggan utama lainnya yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meanwhile, the Company's activities in 2014 also directed to maintain retention and customer loyalty are becoming major partners such as PT Telekomunikai Indonesian company PT Pertamina, PT XL Axiata Tbk., PT Telkomsel, Indosat and other major customers that with no disrespect can not be mentioned one by one.

Dalam rangka meningkatkan internal control, Direksi telah senantiasa melakukan perbaikan organisasi dan good corporate governance. Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang disesuaikan dengan bisnis utama Perusahaan, serta penetapan uraian tugas masing-masing unit di dalam struktur organisasi dengan selalu memperhatikan efisiensi dan efektivitas organisasi serta adanya segregation of duty untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip dasar GCG secara baik. Pada tahun 2014 Perusahaan telah melakukan self-assessment terhadap penerapan GCG di Perusahaan dengan pencapaian score 78,55. Sebuah pencapaian yang menggembirakan walaupun di sisi lain menjadi tantangan yang menarik bagi peningkatannya di tahun-tahun ke depan.

In order to improve internal controls, the Board of Directors has continually make improvements and good corporate governance organization. The Board of Directors has set the organizational structure tailored to the main business of the Company, as well as the determination of the job description of each unit in the organizational structure to always pay attention to the efficiency and effectiveness of the organization as well as the segregation of duty to ensure the application of the basic principles of GCG. In 2014 the Company has conducted a self-assessment of the implementation of GCG with achieving a score of 78.55. An encouraging achievement although on the other hand be an interesting challenge for the increase in the years ahead.

Penerapan manajemen risiko semakin ditingkatkan kinerjanya di tahun 2014 dengan telah dilakukannya penyempurnaan kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan risiko serta pembentukan satu unit khusus Manajemen Risiko. Dengan kebijakan dan unit organisasi baru ini diharapkan identifikasi risiko Perusahaan akan senantiasa diperbarui sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan serta analisis risiko sampai kepada rencana mitigasi dan monitoringnya akan senantiasa dilakukan oleh setiap fungsi organisasi untuk meminimalkan risiko Perusahaan.

Application of risk management was further enhanced in 2014 with the performance he has done improvements in the Company's risk management policies and the establishment of a special unit of Risk Management. With policies and new organizational unit is expected to identify the risks the Company will continue to be updated in accordance with the Company's business development and risk analysis to the mitigation and monitoring plan will continue to be done by any organization function to minimize the risk of the Company.

Selain berperan sebagai perusahaan yang berorientasi pada tujuan memaksimalkan keuntungan, sebagai perusahaan yang didirikan oleh induk perusahaan yang memiliki misi sebagai penggerak pertumbuhan industri dalam negeri, maka Perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral dalam turut serta membangun kemampuan industri dalam negeri. Oleh karenanya, dalam membangun pertumbuhan dan kelangsungan usaha Perusahaan, Direksi senantiasa membangun alignment anak-anak perusahaan dan sinergi dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri atau lokal lainnya, sehingga Perusahaan dapat berperan aktif dalam pembangunan kemampuan industri dalam negeri dengan tetap memperhatikan norma-norma bisnis yang berlaku secara universal.

In addition to acting as a company oriented to the goal of maximizing profits, as the company founded by the parent company that has the mission as a driver of growth in the domestic industry, the company also has a moral responsibility to participate in building the capacity of the domestic industry. Therefore, in building the growth and viability of the Company, the Board of Directors continues to build alignment subsidiaries and synergies with domestic firms or other local, so that the Company can play an active role in the development of the ability of the domestic industry with regard to the business norms universally applicable.

Sebagai penutup sambutan ini, Direksi menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan atas komitmen yang telah diberikan dalam

In closing remarks, the Board of Directors expressed thanks and appreciation to all employees for their commitment has been given in efforts to achieve the

upaya-upaya pencapaian kinerja Perusahaan tahun 2014. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Komisaris atas masukkan-masukkan dan dukungannya, serta terima kasih kepada para pemangku kepentingan lainnya, tidak terbatas pada pemegang saham, mitra usaha, pelanggan serta masyarakat luas atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Dengan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, Direksi yakin bahwa Perusahaan akan terus dapat meraih kinerja usaha yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Company's performance in 2014. Thanks are also extended to the Board of Commissioners for insert-insert and support, as well as thanks to stakeholders other interests, is not limited to shareholders, business partners, customers and the wider community for the trust and support given. With the commitment of all stakeholders, the Directors believe that the Company will continue to be able to achieve better business performance again in the years to come.

Bandung, Februari 2015
Atas nama Dewan Direksi PT INTI (Persero)
On behalf The Board of Directors

Tikno Sutisna
Direktur Utama
President Director

Profil Dewan Direksi
Directors' Profile

Susunan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-73/MBU/2009, tanggal 16 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: S-38/DEKOM-INTI/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perubahan Struktur Organisasi, serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor : SK-277/MBU/2012, tanggal 30 Juli 2012 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, serta berdasarkan SKD Nomor KN.014/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Struktur Organisasi, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-56/MBU/2014, tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, dan SKD No. KN 13/2014 tanggal 23 Juli 2014 mengenai Perubahan Struktur Organisasi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, maka susunan Direksi PT INTI (Persero) menjadi sebagai berikut :

Composition of Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia by virtue of Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-73 / MBU / 2009, dated March 16, 2009 and by virtue of the Board of Commissioners Number: S-38 / dekom-INTI / XII / 2011 dated December 14, 2011 of Change Organizational Structure, and by the Minister of State Enterprises As a General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Number: SK-277 / MBU / 2012, dated July 30 2012 on the Termination & Appointment Member of the Board of Directors Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, as well as by SKD Number KN.014 / 2013 dated July 1, 2013 on Organizational Structure, Based on the Decree of the Minister of SOEs Number: SK-56 / MBU / 2014, dated March 18, 2014 on Termination and Appointment of Members of Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, and SKD No. KN 13/2014 dated July 23, 2014 Changes in Organizational Structure of which has been approved by the Board of Commissioners, the Board of Directors of PT INTI (Persero) is as follows:

Tikno Sutisna
Direktur Utama
President Director

Pria kelahiran Tasikmalaya, 27 Oktober 1960 ini adalah sarjana lulusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung tahun 1985, dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dalam bidang Manajemen Teknologi dari Institut Teknologi Bandung tahun 1994. Sebelum menjabat Direktur Operasi dan Teknik PT INTI pada tahun 2009, penggemar golf ini pernah menjabat sebagai Manajer Rekayasa Produksi tahun 1996, Kepala Strategic Business Unit of Mobile Communication Network (MCN) tahun 2001-2003, Kepala Divisi Jaringan Telekomunikasi Seluler (JTS) tahun 2004 - 2006, Kepala Divisi Jaringan Telekomunikasi Private (JTP) tahun 2006-2007 dan Kepala Divisi Pusat Pengembangan Bisnis dan Produk tahun 2007- 2008. Pada tahun 2009-2011 menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik, dan periode awal tahun 2012 menjabat sebagai Direktur Corporate Service, dan menjabat Direktur Utama sejak Agustus 2012.

The man who was born in Tasikmalaya, October 27, 1960, is a Mechanical Engineering graduate of Bandung Institute of Technology in 1985, and earned a Master of Business Administration (MBA) degree in Technology Management from Institut Teknologi Bandung in 1994. Before becoming Director of Operations and Engineering PT INTI in 2009, he is the golf enthusiast who has served as Production Engineering Manager in 1996, Head of Strategic Business Units of Mobile Communication Network (MCN) 2001-2003, Head of Mobile Telecommunication Network (JTS) in 2004-2006, Head of Private Telecommunication Network (JTP) in 2006-2007 and Head of the Division of Business and Product Development Center in 2007-2008. In 2009-2011 served as Director of Operations and Engineering, and the period beginning in 2012 served as Director of Corporate Services, and served as President Director since August 2012.

Nilawati Djuanda
Direktur Keuangan
Director of Finance

Nilawati Djuanda resmi menjabat menjadi Direktur Keuangan PT INTI (Persero) sejak 18 Maret 2014. Wanita kelahiran Bandung, 29 September 1960 yang sempat menjabat sebagai Senior General Manager Maintenance Service Center PT Telkom (Persero) Tbk, Komisaris PT Pasifik Satelit Nusantara, dan Direktur Finance and Administration PT Indonusa Telemedia, serta Senior Advisor PT Multi Media Nusantara itu akan memegang tanggung jawab selama periode 2014-2019.

Lulusan Strata Satu Akuntansi Universitas Padjadjaran tahun 1984 dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Bandung tahun 2004 itu juga sempat dipercaya menjadi Wakil Ketua Satuan Tugas Portofolio dan Investment Evaluation PT Telkom (Persero) Tbk, Wakil Ketua Tim Cost Optimization PT Telkom (Persero) Tbk, Ketua Tim Kajian Bisnis Submarine Cable Maintenance PT Telkom (Persero) Tbk, serta Chairman of Indonesia Cabottage Ruling Working Group.

Pelatihan dan workshop yang pernah diikutinya antara lain, Transformation Drives Business Excellence yang diadakan di Phuket Thailand pada Desember 2010, Managing for Customer Satisfaction Organization PTT Telecom di Netherland pada tahun 1997, serta Effective Managerial Report yang digelar oleh Arthur Anderson pada tahun tahun 1997. Nilawati juga sempat mengikuti Investment Analysis Course yang diadakan oleh PT Price Waterhouse Sutanto pada Maret 1997 serta Purchasing and Procurement Matching Atlanta (American Software) pada tahun 1993.

Nilawati Djuanda formally served as Director of Finance of PT INTI (Persero) since March 18, 2014. Women born in Bandung, September 29, 1960, which had served as Senior General Manager of Maintenance Service Center PT Telkom (Persero) Tbk, Commissioner of PT Pasifik Satelit Nusantara, and Director of Finance and Administration of PT Indonusa Telemedia, and Senior Advisor to PT Multi Media Nusantara it would hold responsibility over the period 2014-2019.

Graduates of the Bachelor of Accounting Universitas Padjadjaran in 1984 and a Master of Management Sekolah Tinggi Manajemen Bandung in 2004 it also was trusted to be the Vice Chairman of the Task Force and Investment Portfolio Evaluation of PT Telkom (Persero) Tbk, Vice Chairman of the Cost Optimization PT Telkom (Persero) Tbk, Chairman Business study Team Submarine Cable Maintenance PT Telkom (Persero) Tbk, as well as Chairman of Indonesia Cabottage Ruling Working Group.

Training and workshops have ever attended, among others, Transformation Drives Business Excellence, held in Phuket Thailand in December 2010, Managing for Customer Satisfaction Organization PTT Telecom in the Netherlands in 1997, and Effective Managerial Report which was held by Arthur Anderson in 1997. Nilawati also had to follow the Investment Analysis Course held by PT Price Waterhouse Sutanto in March 1997 as well as Purchasing and Procurement Matching Atlanta (American Software) in 1993.

Adiaris
Direktur Operasi dan Teknik
Director of Operation and Technic

Lahir di Batang Serangan, sebuah kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 12 Maret 1967, Adiaris adalah Sarjana Elektronika lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tahun 1993. Adiaris mulai meniti karir di PT INTI pada tahun 1993, hingga akhirnya menjabat Direktur Pemasaran pada tahun 2009. Sebelumnya Adiaris pernah menjabat Manajer Sales Engineering Divisi Fixed Network Access tahun 2001 – 2003, Manajer Engineering Divisi Jaringan Telekomunikasi Tetap (JTT) tahun 2004-2005, Deputi Kadiv JTT tahun 2006, dan Kepala Divisi JTT tahun 2007. Beberapa pelatihan yang pernah diikutinya antara lain Teknik Negosiasi dalam Bisnis (LPPM), Strategi Pemasaran Efektif (STMPM) dan JTEC Marketing Training (JTEC Pty Ltd, Australia). pada tahun 2009-2012 menjabat sebagai Direktur pemasaran dan menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik hingga saat ini.

Born in Batang Serangan, Langkat, North Sumatra, March 12, 1967, he is an Electronics Engineer graduate from Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya in 1993. Adiaris began to pursue a career in PT INTI in 1993, and eventually served as Director of Marketing in 2009. Previously he served Engineering Sales Manager for Division of Fixed Network Access in 2001- 2003, Engineering Manager for Division of Fixed Telecommunication Network (JTT) in 2004-2005, Deputy Head of the JTT in 2006, and Chief Division of JTT in 2007. Some of the training he have ever attended are Negotiation Techniques in Business (LPPM), Effective Marketing Strategies (STMPM) and JTEC Marketing Training (JTEC Pty Ltd, Australia). In 2009-2012 served as director of marketing and served as Director of Operations and Technic until present time.

Tikno Sutisna
Direktur Pemasaran (Pjs.)
Marketing Director (Act.)

Selain menjabat sebagai Direktur Utama, Tikno Sutisna juga menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Pemasaran PT INTI (Persero) di tahun 2014.

In addition to serving as President Director, Tikno Sutisna also become Acting (Act.) Marketing Director of PT INTI (Persero) in 2014.

Surat Pernyataan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2014
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Statement Letter
Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors
Regarding Responsibility For Annual Report 2014
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We the undersigned declare that all the information included in the annual report 2014 of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) has been fully disclosed and we are responsible for the truthfulness of the content of the company's annual report. This is our declaration, which has been made truthfully.

Komisaris Utama
Chairman

Soleman B. Ponto

Komisaris
Commissioner

Slamet Effendy Yusuf

Komisaris
Commissioner

Djoko Agung Harijadi

Komisaris
Commissioner

Nuning Sri Rejeki Wulandari

Direktur Utama
President Director

Tikno Sutisna

Direktur Keuangan
Director of Finance

Nilawati Djuanda

Direktur Operasi dan Teknik
Director of Operation and Technic

Adiaris

(Pjs.) Direktur Marketing
(Act.) Director of Marketing

Tikno Sutisna

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

Management's Discussion and Analysis Over The Company's Performance

Tinjauan Pemasaran
Marketing Overview

INOVASI BISNIS PT INTI (PERSERO)

Perusahaan Perseroan Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) sebagai perusahaan teknologi senantiasa melakukan inovasi terhadap kegiatan bisnis dan solusi yang diberikan kepada pelanggan. Memperhatikan perkembangan trend dalam dunia teknologi informasi dan telekomunikasi, INTI menyadari bahwa saat ini era inovasi bisnis dan produk telah mengalami perubahan menuju generasi ke enam yang dikenal sebagai Sixth Wave Innovation Trend.

BUSINESS INNOVATION OF PT INTI (PERSERO)

Limited Liability Company Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) as a technology company continues to innovate on our business and solutions are provided to the customer. Attention to the development trend in the world of information technology and telecommunications, INTI realize that the current era of business innovations and products have changed to the sixth generation is known as the Sixth Wave Innovation Trend.

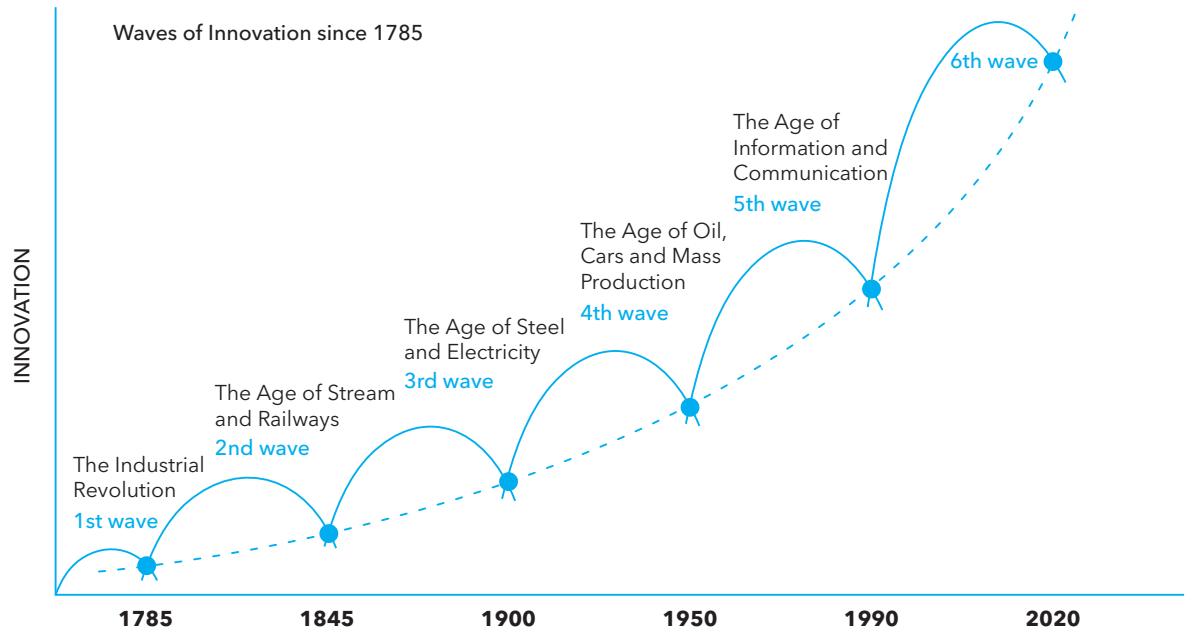

Sixth Wave Innovation Trend telah menunjukan bahwa era teknologi informasi dan telekomunikasi pada tahun 2020 akan segera bergerak menuju era efisiensi sumber daya (Resources Efficiency).

Tren inovasi menuju Resources Efficiency akan segera mempengaruhi setiap langkah pengembangan bisnis, produk, dan layanan yang dilakukan oleh PT INTI sebagai suatu kesatuan bisnis untuk dapat tetap bersaing dalam industri telekomunikasi.

Inovasi bisnis dilakukan oleh PT INTI sejak berdiri pada tahun 1974 sebagai perusahaan berbasis industri perangkat telekomunikasi, menjadi perusahaan berbasis integrasi sistem telekomunikasi (system integrator) pada tahun 2009.

Sixth Wave Innovation Trend has shown that the age of information technology and telecommunications in 2020 will soon be moving toward an era of resource efficiency (Efficiency Resources).

Resources Efficiency trends toward innovation will soon affect every step of business development, product, and service performed by PT INTI as a business entity to be able to remain competitive in the telecommunications industry.

Business innovation conducted by PT INTI since its establishment in 1974 as an industry-based telecommunications equipment company, a firm based telecommunication system integration (system integrators) in 2009.

SRATEGI PEMASARAN PRODUK

Persaingan bisnis dalam industri telekomunikasi menuntut PT INTI tidak hanya berinovasi namun juga memilih strategi pemasaran produk yang tepat. Pemilihan produk untuk pasar yang tepat, dan demikian sebaliknya akan sangat menentukan keberhasilan PT INTI meraih target penjualan yang telah dicanangkan.

Konsep strategi pemasaran produk yang digunakan oleh PT INTI melalui Ansoff's Matrix adalah sebagai berikut:

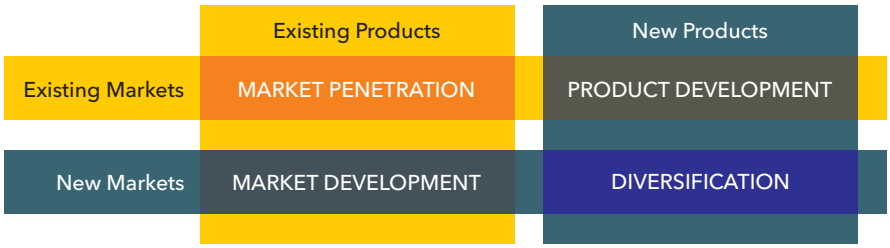

Implementasi kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh INTI berbasiskan strategi pemasaran yang dipilih ditunjukan melalui penjabaran strategi pemasaran sebagai berikut:

1. PENETRASI PASAR

Penerimaan produk PT INTI oleh kastemer telah menunjukan pertumbuhan yang positif melalui pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Optimalisasi penerimaan pasar terhadap produk PT INTI dilakukan melalui kegiatan penetrasi pasar dalam beberapa produk sebagai berikut:

a. FEWS (Flood Early Warning System)

Sejak 2010, perangkat SCU (Smart Control Unit) oleh PT INTI telah digunakan sebagai perangkat monitoring ketinggian permukaan air pada titik-titik potensial banjir di Indonesia. Melalui penetrasi pasar yang dilakukan, saat ini seluruh sistem SCU yang digunakan telah berhasil diimplementasikan sebagai alat bantu deteksi dini banjir di Indonesia bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tahun 2014, Pusair melakukan inisiasi produk ke BWS/BBWS seluruh indonesia dengan melakukan instalasi & workshop dengan harapan agar setiap BWS/BBWS dapat melakukan pengadaan telemetri system sesuai kebutuhan mereka sendiri.

Figure SCU on FEWS

STRATEGY OF PRODUCT MARKETING

Business competition in the telecommunications industry requires PT INTI to do more than just innovate but also choosing the right product marketing strategy. The selection of the right product to market, and vice versa will determine the success of PT INTI achieve sales targets which have been implemented.

The concept of product marketing strategies used by PT INTI through Ansoff's Matrix is as follows:

The implementation of INTI's marketing activities are base on selected marketing strategy is shown through the elaboration of a marketing strategy as follows:

1. MARKET PENETRATION

Product acceptance by the customer of PT INTI has shown positive growth through the company's sales growth from year to year. Optimization of market acceptance of products of PT INTI done through market penetration in several products as follows:

a. FEWS (Flood Early Warning System)

Since 2010, the SCU (Smart Control Unit) by PT INTI has been used as a device monitoring water levels at points of potential flooding in Indonesia. Through market penetration is done, the entire system is currently used SCU has been successfully implemented as a tool for early detection of floods in Indonesia together with the Ministry of Public Works. In 2014, Pusair initiated products to BWS / BBWS throughout Indonesia with the installation and workshops with the hope that each BWS / BBWS can procure telemetry system according to the needs of their own.

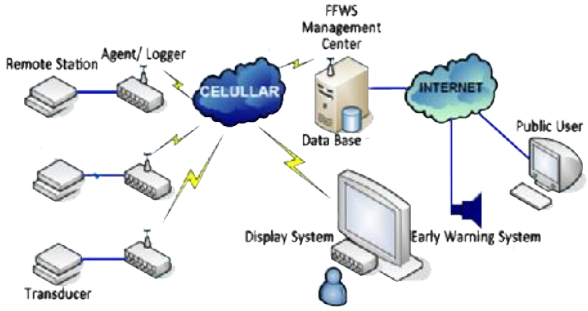

FEWS - Flood Early Warning System

b. Smart Meeting atau iPerisalah

Smart Meeting berbasis iPerisalah sebagai salah satu produk unggulan PT INTI mendapatkan respons yang cukup baik oleh pasar. Melalui penetrasi pasar yang dilakukan, saat ini salah satu pelanggan yang menggunakan iPerisalah adalah DPR, terdapat 17 ruang rapat pada gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang telah dilengkapi perangkat Smart Meeting untuk membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan rapat para anggota dewan.

b. Smart Meeting (iPerisalah)

Smart Meeting based iPerisalah as one of the flagship products of PT INTI get a pretty good response by the market. Through market penetration, is currently one of the customers who use iPerisalah is the Parliament (DPR), there are 17 meeting rooms in the Parliament Building which has been equipped with Smart Meeting device to help improve the effectiveness and efficiency of the activities of the members of the board meeting.

iPerisalah Figures

c. Smart Exchange (IP PBX)

Smart Exchange adalah perangkat PABX berbasis IP, dmana kelebihan dari penggunaan Smart Exchange adalah adanya fitur smart routing sehingga bisa meningkatkan efisiensi penggunaan telepon eksternal, juga jia sudah di support oleh jaringan VPN antar kantor cabang, maka akan membuat komunikasi antar kantor cabang menjadi lebih hemat. Saat ini pengguna dari Smart Exchange adalah PT Pindad, PT Pertamina dan PT Telkom.

c. Smart Exchange (IP PBX)

Smart Exchange is a software-based IP PBX, Dmana advantages of the use of the Smart Exchange is a feature of smart routing so as to improve the efficiency of the use of an external phone, also jia already supported by the VPN network between branch offices, it will make the communication between branch offices become more efficient. Currently users of Smart Exchange is Pindad, PT Pertamina and PT Telkom.

Figure Smart Exchange

d. Smart Meter – KWH Meter Digital

Smart Meter dalah hal ini aplikasi nyadalah KWH Meter Digital, INTI telah mengenmbangkan dan memproduksi serta telah menjualnya ke PLN, diproduksi sesuai dengan standard ISO 9001 dan memiliki spesifikasi IP 54 serta sesuai dengan standar STS (standard Transfer Spesification) untuk aplikasi Token 20 Digit pulsa prabayar.

d. Smart Meters - KWH Meter Digital

Smart Meters in the way the application nyadalah KWH Meter Digital, INTI has mengenmbangkan and produce and have sold to PLN, manufactured in accordance with ISO 9001 standards and has the specification and in accordance with the IP 54 standard STS (Standard Transfer Specification) for applications Token 20 digit prepaid .

Figure Smart Meter

2. PENGEMBANGAN PRODUK (PRODUCT DEVELOPMENT)

Selain melakukan kegiatan penetrasi pasar eksisting, PT INTI juga telah dipercaya untuk melakukan pengembangan produk untuk pelanggannya. Salah satu produk hasil pengembangan PT INTI yang telah dipercaya oleh pelanggannya adalah penerapan Sistem Pencegah Pelanggaran Sinyal (GARANSI) Kereta Api. GARANSI adalah sistem otomastis pengendali kecepatan kereta yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sinyal kereta api.

2. PRODUCT DEVELOPMENT

In addition to the activities of the existing market penetration, PT INTI also has been appointed to undertake the development of products for its customers. One of the results of the development of PT INTI products have been trusted by customers is the application of Signal Abuse Prevention System (sistem pencegah Pelanggaran Sinyal - GARANSI) Railway. GARANSI is Automatic speed control system of the train which aims to prevent violations of railway signal.

Figure GARANSI

Disamping pengembangan pada bidang transportasi seperti GARANSI, PT INTI juga terus mengembangkan teknologi yang menjadi bisnis utama perusahaan yaitu telekomunikasi. Kerjasama pengembangan bersama dengan operator terbesar di Indonesia, khususnya pada bidang komunikasi Machine-to-Machine (M2M) adalah salah satu bentuk pengembangan produk telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Besides the development in the field of transportation such as GARANSI, PT INTI also continue to develop the technology into the company's main business is telecommunications. Development co-operation with the largest operator in Indonesia, particularly in the field of communication Machine-to-Machine (M2M) is one form of development of telecommunications products in accordance with current technological developments.

Konsep teknologi Machine-to-Machine (M2M) diimplementasikan melalui pengembangan produk pendukung layanan perbankan yaitu perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan juga pengembangan fitur dan aplikasi layanan pada produk unggulan PT INTI yang telah dimanfaatkan oleh Pusat Sumber Daya Air (PUSAIR) yaitu Smart Control Unit (SCU).

Technological concepts Machine-to-Machine (M2M) is implemented through the development of banking services supporting product is the Electronic Data Capture (EDC) as well as features and application development services at PT INTI superior product that has been utilized by the Centre for Water Resources (PUSAIR) is Smart Control Unit (SCU).

EDC

SCU

Figure M2M

Untuk pengembangan produk lainnya yang dilakukan di tahun 2014 adalah sebagai berikut:

For the development of other products made in 2014 are as follows:

NO.	BIDANG Fields	PRODUK	PRODUCTS
1.	ENERGI Energy	a. Electric smart meter b. Prepaid Gas Meter c. Token Vending System untuk Prepaid Gas Meter d. Smart Fuel e. Energi Limiter sebagai perangkat pendukung pembangkit listrik tenaga surya	a. Electric smart meter b. Prepaid Gas Meter c. Token Vending System for Prepaid Gas Meter d. Smart Fuel e. Energy Limiter as a supporting device of solar power plants
2.	SMART CITY	a. Smart Street Light untuk monitoring, pengendalian, dan otomasi Penerangan Jalan Umum b. Smart Water untuk monitoring sistem pengairan di perkotaan c. Prepaid Water Meter untuk PDAM d. Smart Clinic e. Pembaca KTP Elektronik untuk layanan kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Daerah	a. Smart Street Light for the monitoring, control, and automation of street lighting b. Smart Water for irrigation in urban monitoring system c. Prepaid Water Meter for taps d. Smart Clinic e. Electronic ID card reader for settlement services and civil records of Local Government
3.	ICT	a. FFEWS: flood forecasting and early warning system (kerjasama dengan Puslitbang SDA PU) b. Smart Digital Signage (kerjasama dengan Telkomsel) c. Revenue Protection System untuk PLN d. Smart Meeting, kerjasama dengan BPPT	a. FFEWS: flood forecasting and early warning system (cooperation with Puslitbang SDA PU) b. Smart Digital Signage (cooperation with Telkomsel) c. Revenue Protection System for PLN d. Smart Meeting, cooperation with BPPT
4.	TRANSPORTASI Transportation	a. Vehicle Tracking, kerjasama dengan Telkomsel b. Converter Kit BBM ke BBG	a. Vehicle Tracking, cooperation with Telkomsel b. Converter Kit of Fuel to LPG

3. PENGEMBANGAN PASAR (MARKET DEVELOPMENT)

Selain melakukan pengembangan produk untuk pelanggannya, PT INTI juga melakukan upaya pengembangan cakupan pasar sebagai bagian dari strategi pemasaran yang telah ditentukan. Terdapat beberapa upaya pengembangan pasar untuk produk eksisting diantaranya adalah:

3. MARKET DEVELOPMENT

In addition to the development of products for its customers, PT INTI also undertake efforts to develop market coverage as part of a marketing strategy that has been determined. There are some efforts to develop markets for existing products are:

NO.	PRODUCT/ PROJECT	KONDISI PASAR & LATAR BELAKANG Market Condition & Background	POTENCIAL CUSTOMERS
1.	Smart Fuel	• SMPBBM sebagai pilot project telah memposisikan PT INTI sebagai lead integrator sistem M&C bahan bakar khususnya pada industri. SMPBBM as a pilot project has positioned PT INTI as the lead systems integrator M & C fuel system, especially in industry. • Adanya kebutuhan industri khususnya industri pertambangan dan mineral dalam melakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan bahan bakar. The need for the industry, particularly in the mining and minerals industry to improve efficiency and effectiveness in the use of fuel. • Subsidi bahan bakar berpotensi untuk ditiadakan dalam beberapa waktu kedepan. Fuel subsidies have the potential to be eliminated in future time. • Sistem dan topologi yang tidak universal digunakan dalam distribusi bahan bakar pada industri saat ini. System and topology are not universally used in the distribution of fuel in the industry today.	Perusahaan Energi Energy Company Perusahaan Pertambangan & Mineral Mining & Minerals Company Perusahaan Distribusi BBM Fuel Distribution Company Perusahaan Jasa Transportasi Transportation Services Company
2.	Smart Health	• Terdapat ketidakpuasan terhadap layanan sistem informasi yang saat ini umum digunakan. There is dissatisfaction with the service information system that is currently in common use. • Adanya kebutuhan jasa Credentialing yang disediakan oleh PB IDI. The need for Credentialing services provided by PB IDI. • Adanya kebutuhan jasa integrasi layanan IT berbasis Managed Care. The need for IT integration services on Managed Care. • Adanya kebutuhan layanan kesehatan promotif dan preventif sebagai pelengkap layanan program JKN. The need for health promotion and prevention services as complementary services of JKN program.	Penyelenggara Jasa Layanan Kesehatan Provider of Health Services Penjamin Jasa Layanan Kesehatan Health Services Insurances Pihak Swasta Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Private Party User of Health Services
3.	Smart Meeting	• Intansi - instansi pemerintahan saat ini sedang menyusun untuk pengunaan anggaran untuk tahun 2015. Intansi - government agencies are currently preparing for the use of the budget for 2015. • Adanya kebutuhan perangkat perisalah untuk mempersingkat waktu transkripsi rapat. There is a need to shorten the time perisalah devices meeting transcription. • Adanya kebutuhan perangkat perisalah yang dapat digunakan secara portable. The need perisalah device that can be used portably.	Lembaga Tinggi Negara State Agency Mahkamah Tinggi Negara State Supreme Court Pemerintahan Pusat Central Government Pemerintahan Daerah Local Government
4.	Smart Safety - GARANSI*	• Adanya kebutuhan untuk pengendalian kereta api dalam rangka peningkatan layanan perjalanan kereta api. There is a need to control the train in order to improve rail travel services.	PT Kereta Api Indonesia

NO.	PRODUCT/ PROJECT	KONDISI PASAR & LATAR BELAKANG Market Condition & Background	POTENCIAL CUSTOMERS
5.	Smart Control Unit	• Tahun 2014, Pusair melakukan inisiasi produk ke BWS/BBWS seluruh indonesia dengan melakukan instalasi & workshop dengan harapan agar setiap BWS/BBWS dapat melakukan pengadaan telemetri system sesuai kebutuhan mereka sendiri. In 2014, Pusair initiated products to BWS / BBWS throughout Indonesia with the installation and workshops with the hope that each BWS / BBWS can procure telemetry system according to the needs of their own. • Adanya kebutuhan monitoring dan pengendalian kondisi lingkungan sekitar. The need for monitoring and control of environmental conditions. • Adanya kebutuhan monitoring dan pengendalian banjir oleh Pemerintahan Daerah. The need for monitoring and flood control by the Regional Government.	BWS / BBWS seluruh indonesia BWS / BBWS throughout Indonesia BMKG Bureau of Meteorology, Climatology and Geophysics PU Provinsi Provincial Public Works Services Sumber Daya Air, Water Resources Perum Jasa Tirta, Public company Jasa Tirta Perusahaan pengelola bendungan Dam management company
6.	Smart PBX	• Adanya kebutuhan efisiensi biaya komunikasi pada baik perusahaan swasta ataupun BUMN The need for cost efficiency of communication in both private or state-owned company • Adanya kebutuhan efisiensi biaya komunikasi dan layanan komunikasi yang terintegrasi pada seluruh jaringan pemerintahan daerah The need for cost-efficiency of communication and integrated communications services to the entire network of local government	Perusahaan Kelas Menengah & Besar, Middle-Up Level Companies Lembaga Tinggi Negara, State Agency Pemerintahan Pusat, Central Government Pemerintahan Daerah Local Government
7.	e-KTP Reader	• Produk Perangkat E-KTP Reader ini dikhususkan pada Pemerintah Daerah (Pemda) ataupun instansi non-pemerintah daerah seperti perhotelan, perbankan, dan satlantas. Target pemasaran untuk tahun 2014 ini adalah sekitar 9.952 unit yang terdiri dari 34 Provinsi, 412 Kabupaten, dan 99 Kota yang mencakup instansi SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan Kecamatan Products E-ID card reader device is devoted to the Local Government (Pemda) or non-government agencies such as hospitality, banking, and Traffic. Marketing target for 2014 is approximately 9952 units consisting of 34 provincial, 412 district and 99 city include SKPDs agencies (Local Government Unit) and Kecamatan. • Selain itu pasar lain adalah Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan. In addition, other markets are Banking Institutions, Private and related to and not limited to Licensing, Business, Commerce, Banking Services, Insurance, Taxation and Land.	Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemda Tingkat 1 s/d tingkat kelurahan, Local Government Work Unit (SKPD) from Pemda Tingkat 1 to level of Kelurahan BPJS, State Health Care (BPJS) Perbankan, Banking Services Kepolisian, Police Department Pendidikan, Education Perdagangan, Commerce Asuransi, Insurance Perpajakan, Taxation Pertanahan, Land
8.	Smart Gas Meter	• Adanya kebutuhan perangkat Meter Gas yang berbasiskan "token entry" There is a need-based devices Gas Meters "token entry" • Adanya kebutuhan monitoring data pelanggan dengan Meter Gas yang berbasiskan "token entry"–Adanya kebutuhan efisiensi BBM pada Industri The need for monitoring of customer data with Gas Meter-based "token entry"Adanya needs fuel efficiency in Industry.	Operator Jargas BUMN dan swasta, Jargas SOEs and private operators, Pengembang / Kontraktor Properti Property Developer / Contractor

NO.	PRODUCT/ PROJECT	KONDISI PASAR & LATAR BELAKANG Market Condition & Background	POTENCIAL CUSTOMERS
9.	Converter Kits BBM to BBG	• Adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM kepada masyarakat Government policy to reduce fuel subsidies to public • Potensi pengguna BBG semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan teknologi konversi BBM kepada BBG Potential users of LPG increased along with the growth of the fuel into LPG conversion technologies • Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintahan pusat dan daerah Government policies to improve efficiency of central and local government budgets	Perusahaan Energi, Energy Company Perusahaan Pertambangan & Mineral, Mining & Minerals Company Perusahaan Distribusi BBM, Fuel Distribution Company Perusahaan Jasa Transportasi Transportation Services
10.	Smart Light	• Adanya kebutuhan monitoring dan pengendalian energi khususnya penerangan jalan umum The need for monitoring and control of energy especially street lighting • Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintahan pusat dan daerah Government policies to improve efficiency of central and local government budgets	Pemerintahan Pusat, Central Government Pemerintahan Daerah, Local Government Perusahaan Transportasi Transportation Company Perusahaan Penyelenggara Fasilitas Publik, Operator Company of Public Facilities Binamarga, Jasamarga
11.	Kwh Meter 3Phase - PLC Rev.Ass.	• Adanya kebutuhan monitoring dan pengendalian energi The need for monitoring and control of energy • Adanya kebutuhan penggunaan energi secara online dan tidak berbasiskan token khususnya pada pelanggan skala industri The need for energy use online and are not based token particularly on industrial scale customer • Adanya pengembangan layanan terbaru untuk monitoring dan pengendalian berbasiskan komunikasi real-time. The development of new service for monitoring and control based on real-time communication.	PLN Pusat & Distribusi, Central & Distribution of PLN Pemerintahan Pusat, Central Government Pemerintahan Daerah, Local Government Binamarga, Jasamarga

4. DIVERSIFIKASI (DIVERSIFICATION)

Melengkapi susunan strategi pemasaran produk yang dilakukan, PT INTI saat ini fokus untuk menjalankan strategi diversifikasi melalui pengembangan produk baru untuk wilayah pasar yang belum dijajaki sebelumnya.

Upaya diversifikasi yang dilakukan oleh PT INTI ditunjukan pada kuartal ke-4 tahun 2014, dimana salah satu produk unggulan PT INTI yaitu Smart Clinic telah berhasil diimplementasikan pada jaringan layanan kesehatan Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI AL III pada fasilitas kesehatan pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK-1). Smart Clinic adalah salah satu contoh upaya diversifikasi PT INTI untuk memsuki layanan pada bidang kesehatan dengan berkerjasama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) melalui implementasi perdana pada kuartal ke-1 tahun 2014 pada layanan kesehatan

4. DIVERSIFICATION (DIVERSIFICATION)

Completing the composition of the product marketing strategy undertaken, PT INTI is currently focused on a strategy of diversification through the development of new products for the market area that has not been previously explored.

Diversification efforts undertaken by PT INTI shown in the 4th quarter of 2014, where one of the flagship products of PT INTI is Smart Clinic has been successfully implemented on a network of health services Health Department of the Navy Main Base III on health facilities implementing the first-level health care (PPK -1). Smart Clinic is one example of an effort to diversify PT INTI to memsuki services in the field of health by working with the Executive Board of the Indonesian Doctors Association (PB IDI) through the initial implementation in the 1st quarter of 2014 on health care network Primary Cooperative Indonesian Doctors Association (Primkop

jaringan Koperasi Primer Ikatan Dokter Indonesia (Primkop IDI) yang berlokasi pada area bisnis JABABEKA.

IDI) located in the business area JABABEKA.

Figure Diversifications - Smart Clinic Applications

Diversifikasi produk dan pasar yang dilakukan oleh PT INTI adalah melalui joint development atau pengembangan produk bersama dengan mitra produk PT INTI. Pengembangan produk bersama dengan mitra membuka peluang diversifikasi pasar yang baru untuk PT INTI memperhatikan mitra kerjasama yang berasal dari Negara asing dengan cakupan pasar diluar Negara Indonesia.

Product and market diversification undertaken by PT INTI is through joint development or joint product development with product partners PT INTI. Product development together with partners opened a new market diversification opportunities for PT INTI attention to cooperation partners from foreign countries with market coverage outside of the State of Indonesia.

Saat ini, upaya diversifikasi produk dan pasar terus dilakukan oleh PT INTI berkerjasama dengan lembaga penelitian dan riset teknologi seperti BPPT, LIPI ataupun lembaga pengembangan teknologi lainnya melalui produk Pemilihan Umum secara Elektronik, pengawasan udara berbasis Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB) dan juga perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan tujuan untuk dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi Negara Indonesia melalui keuntungan perusahaan dan juga pengembangan ekosistem industri dalam negeri pada pasar baru yang belum pernah dijajaki sebelumnya .

Currently, product and market diversification efforts continue to be made by PT INTI collaboration with research institutes and research technologies such as BPPT, LIPI or other technology development agencies through the General Elections Electronic products, aerial surveillance of Automatic Dependent Surveillance Broadcast-based (ADSB) and also the reader Electronic identity Card with the purpose to be able to make greater contributions to the State of Indonesia through the company's profits and also the development of the domestic industry ecosystem in new markets that have never been explored before.

Tinjauan Operasional
Operational Review

Bisnis yang dikembangkan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau dikenal dengan INTI pada 2014 difokuskan pada pola business to business (B to B). Dengan demikian, target pembeli atau pengguna produk/jasa perusahaan meliputi operator jasa layanan telekomunikasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan/lembaga pemerintah, lembaga pertahanan, dan perusahaan swasta.

1. Bisnis Eksisting

Strategi pertumbuhan perusahaan dilakukan melalui pengembangan pasar dengan menggunakan strategi cost leadership, yaitu :

a. Memfokuskan diri sebagai System Integrator di bidang ICT untuk operator publik maupun privat, baik jaringan komunikasi tetap maupun bergerak, untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi dengan meningkatkan aktivitas pemasaran/ penjualan dan efisiensi di sisi operasi.
b. Pembenahan manajemen logistik dalam menghadapi ancaman dan melakukan modifikasi, serta membundel (bundling) produk/jasa eksisting untuk menangkap peluang pasar yang ada.
c. Memperkuat leadership para pimpinan di perusahaan untuk mengarahkan pada budaya yang inovatif, proaktif, dan kompetitif.
d. Mempertahankan kinerja basic fundamental perusahaan yang sudah baik secara terus menerus sehingga memberikan keunggulan bersaing yang tahan lama, serta melakukan upaya optimasi penggunaan dan pencarian dana eksternal untuk investasi baru, peremajaan dan peningkatan kapasitas produksi produk/ jasa.
e. Memperluas dan meningkatkan kualitas hubungan yang telah terjalin baik dengan pelanggan dalam rangka menempatkan perusahaan dalam sistem rantai nilai pelanggan, untuk memperoleh porsi Managed Services dan proyek dengan kendala marketing yang relatif kecil (dukungan kontrak kerjasama, memorandum of understanding/MOU, dan lainnya sudah terjadi)
f. Mengembangkan produk genuine yang sesuai kebutuhan pasar.

Developed business of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), known as INTI, in 2014 focused on the pattern of business to business (B to B). Thus, the target buyer or user of the product / service companies include telecommunication service provider, state-owned enterprises (SOEs), agency / government agencies, defense agencies, and private companies.

1. Existing Business

The company's growth strategy is done through market development using cost leadership strategy, namely:

a. Focusing as a system integrator in the field of ICT for public and private operators, both fixed and mobile communications networks, to meet the high market demand by increasing the activity of marketing / sales and efficiency in operations.
b. Improvement of logistics management in the face of threats and make modifications, as well as the bundle (bundling) products / services existing to capture market opportunities.
c. Strengthening leadership in the company leaders to drive the culture of innovative, proactive, and competitive.
d. Maintaining the basic performance of companies that have good fundamentals continuously so as to provide a durable competitive advantage, as well as optimization efforts and the use of external search for a new investment fund, rejuvenation and increased production capacity of products / services.
e. Expanding and improving the quality of existing ties with customers in order to put the company in the customer value chain system, to obtain a portion of Managed Services and projects with a relatively small marketing constraints (support the contract, memorandum of understanding / MOU, and others already happened)
f. Develop a genuine product that fit the needs of the market.

2. Bisnis baru

Merupakan peningkatan kualitas dan konten dari tahap sebelumnya yang diarahkan pada pertumbuhan dan penciptaan nilai dengan tujuan untuk keberlangsungan/ keberhasilan hidup perusahaan, melalui penciptaan produk atau jasa baru. Strategi yang digunakan adalah kombinasi strategi diferensiasi dan cost leadership, yaitu :

a. Melakukan ekspansi bisnis melalui proses pengembangan produk/jasa baru dan penciptaan nilai melalui diferensiasi dengan dukungan keunggulan teknologi yang dimiliki perusahaan/ mitra.
b. Meningkatkan jasa engineering dan desain terhadap produk eksisting.
c. Melakukan pengembangan lanjutan terhadap produk/jasa seperti Mobile Device & Content, IT & Services, serta Seat Management.
d. Memperluas hubungan dengan mitra/pemasok yang telah dibangun dengan baik dalam rangka membentuk sistem rantai nilai yang lebih efisien. Hal itu bisa direalisasikan dalam bentuk kedalaman proses operasi di perusahaan seperti perakitan, OEM, dan lainnya, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan.

Pada tahun 2014, perusahaan menjalankan sejumlah bisnis solusi Smart, sambil tetap fokus meningkatkan kinerja dari portofolio bisnis eksisting. Masih seperti tahun sebelumnya, pendapatan perusahaan didapat dari tiga kanal account, yaitu Telco, Celco, dan Private Enterprise. Realisasi perolehan Kontrak Penjualan 2014 terbukukan sebesar Rp. 910,45 miliar yang terdiri dari kontrak baru sebesar Rp 230,46 miliar dan amandemen kontrak sebesar Rp. 679,99 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

2. New business

An increase in the quality and content of the previous stage are aimed at growth and the creation of value for the purpose of sustainability / survival of the company, through the creation of new products or services. The strategy used is a combination of differentiation and cost leadership strategy, namely:

a. Doing business expansion through the process of developing new product / service and the creation of value through differentiation with the support of the company's technological superiority / partner.
b. Improving the engineering and design services to existing products.
c. Undertake further development of the products / services such as Mobile Devices & Content, IT & Services, and Seat Management.
d. Expanding relationships with partners / suppliers who have built properly in order to establish a system that is more efficient value chain. It can be realized in the form of depth in the company operating processes such as assembly, OEMs, and others, by utilizing the infrastructure of the company.

In 2014, the company runs a number of smart solutions business, while still focusing on increasing the performance of the existing business portfolio. Still like the previous year, the company's revenues come from three channels account, namely Telco, Celco, and Private Enterprise. Realized gains 2014 Sales Contract are correctly of Rp. 910.45 billion, consisting of new contracts amounting to Rp. 230.46 billion and contract amendment of Rp. 679.99 billion, with details as follows:

TABEL PEROLEHAN KONTRAK PENJUALAN
Table Sales Contract Achivement

(Rp. Juta)
(Rp. Million)

URAIAN Description	RKAP 2014 Target	REALISASI I Realization		% THD. RKAP %Target	% THD. REAL %Realization
		2013	2014		
TELCO	1.123.386,0	658,912,4	720.813,7	64,16	109,39
CELCO	514.898,0	257.003,6	168.385,4	32,70	65,52
PRIVATE ENTERPRISE	322.606,0	4.401.772,1	21.250,2	6,59	0,48
JUMLAH I The Amount	1.960.890,1	5.317.688,1	910.449,2	46,43	17,12

Posisi saldo kontrak penjualan per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp 6,61 triliun yang didominasi kontrak Proyek SMP BBM Pertamina sebesar Rp 4,38 triliun, kontrak Proyek TITO TELKOM sebesar Rp. 2,17 triliun, dan sisanya sebesar Rp 60 miliar berasal dari kontribusi proyek lainnya.

The position of the balance of the sales contract by December 31, 2014 amounted to Rp 6.61 trillion, which is dominated SMP BBM Project contracts of Pertamina to Rp 4.38 trillion, TELKOM TITO project contracts of Rp. 2.17 trillion, and the remaining Rp 60 billion in contributions from other projects.

TABEL SALDO KONTRAK PENJUALAN PER 31 DESEMBER 2014
Table Balance of Contract Sales to December 31, 2014

(Rp. Juta)
(Rp. Million)

URAIAN Description	BIDANG I Sector			JUMLAH The Amount
	TELCO	CELCO	PRIVATE	
Saldo Kontrak per 01-01-2014	1.934.521,52	81.743,13	4.478.217,24	6.494.481,89
Perolehan Kontrak 2014	40.823,71	169.028,86	21.734,82	231.587,38
Amandemen Kontrak	679.989,96	(643,50)	(484,61)	678.861,85
Jumlah Kontrak (A+B+C)	2.655.335,19	250.128,49	4.499.467,45	7.404.931,12
Penjualan 2014	483.037,36	194.969,20	118.476,39	796.482,95
Saldo Kontrak per 31-12-2014 (D-E)	2.172.297,83	55.159,29	4.380.991,05	6.608.448,17

Realisasi perolehan kontrak penjualan berdasarkan kastemer dan portofolio bisnis digambarkan sebagai berikut:

Realized gains sales contract by the customer and business portfolio is described as follows:

GRAFIK PEROLEHAN KONTRAK PENJUALAN TAHUN 2014 BERDASARKAN ACCOUNT
Charts Obtaining Contract Sales 2014 Based Account

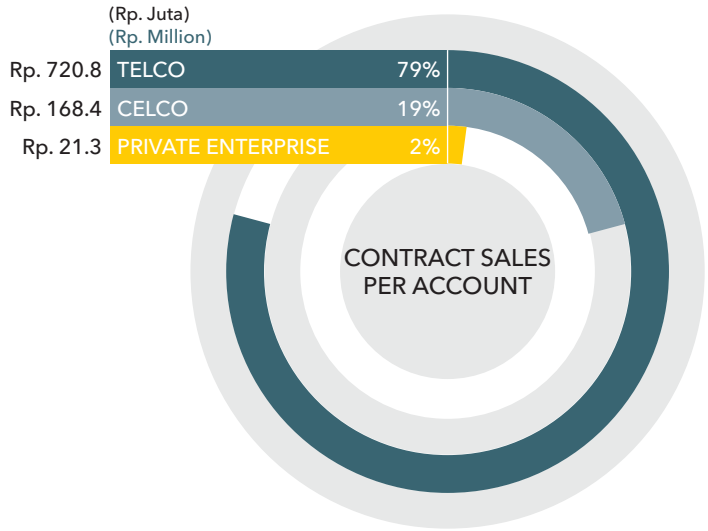

GRAFIK PEROLEHAN KONTRAK PENJUALAN TAHUN 2014 BERDASARKAN PORTOFOLIO BISNIS
Charts Obtaining Contract Sales 2014 Based Business Portfolio

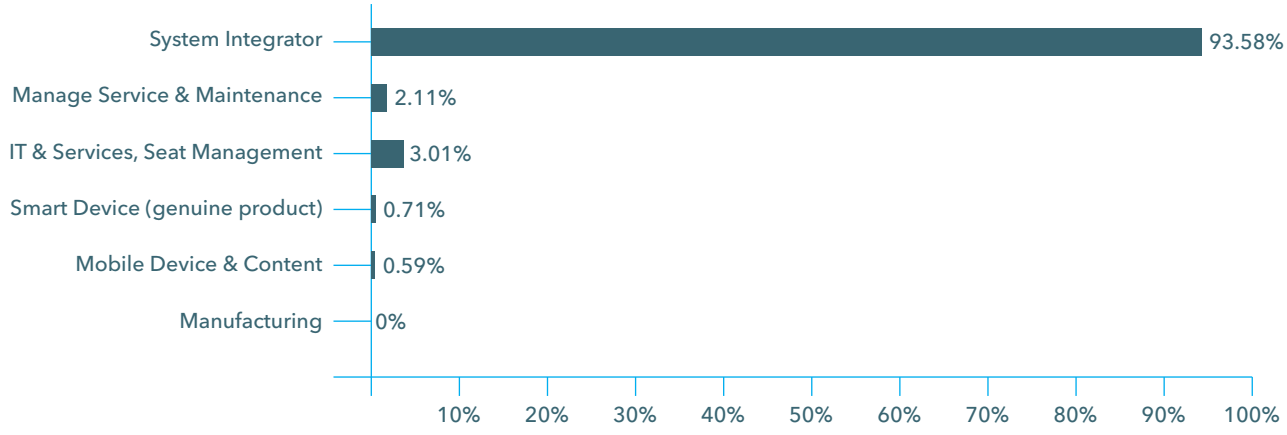

TABEL PENJUALAN TAHUN 2014 PER SEGMEN USAHA
Table Sales per Segment 2014

(Rp. Juta)
(Rp. Million)

URAIAN Description	RKAP 2014 Target	REALISASI Realization	% THD RKAP %Target
TITO & FTTH	1,783,339.14	467,742.99	26.2%
SYSTEM INTEGRATOR	257,655.03	238,494.18	92.6%
MAINTENANCE & MANAGE SERVICES	73,841.04	69,299.08	93.8%
SMART DEVICE (PRODUCT GENUINE)	209,028.10	7,059.87	3.4%
SMART FUEL AND RELATED BUSINESS	11,717.56	-	0.0%
SMART SERVICES	7,181.51	35,293.67	491.5%
JUMLAH I The Amount	2,342,762.39	817,889.79	34.9%

Realisasi penjualan tahun 2014 tercatat sebesar Rp 796,48 miliar atau 31,66% terhadap RKAP 2014. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 44,78% dibandingkan tahun lalu. Sementara berdasarkan segmen usaha, 93,58% penjualan 2014 berasal dari segmen usaha System Integrator.

Sales in 2014 amounted to Rp 796.48 billion, or 31.66% of RKAP 2014. This figure shows a decrease of 44.78% compared to last year. While the business segment, 93.58% of sales in 2014 came from the business segment System Integrator.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2012-2016 yang telah disahkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS), ada enam segmen usaha utama yang dijalankan perusahaan pada 2014, yaitu :

1. System Integrator
2. Maintenance/Managed Service
3. Produk Genuine
4. IT & Services, Seat Management
5. Mobile Device and Content
6. Manufacturing

Review of Operations by Business Segment

In accordance with the Company's Long-Term Work Plan (RJPP) 2012-2016, which was approved by the general meeting of shareholders (RUPS), there are six major business segments that run the company in 2014, namely:

1. System Integrator
2. Maintenance / Managed Service
3. Genuine Products
4. IT & Services, Seat Management
5. Mobile Device and Content
6. Manufacturing

PORSI PENJUALAN 2014 PER SEGMENT USAHA

The Portion of 2014 Sales per Business Segment

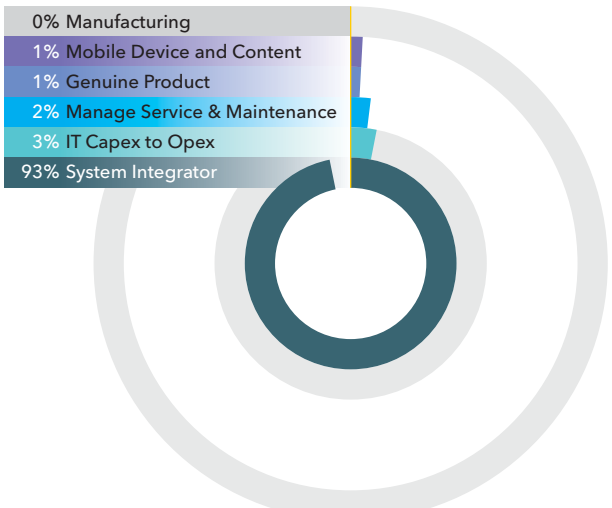

1. Segmen Usaha System Integrator

Segmen usaha System Integrator meliputi kegiatan usaha pembangunan infrastruktur di mana INTI menggunakan produk dari mitra ataupun produk dari mitra yang dikombinasikan dengan produk yang dibuat oleh INTI sendiri. Segmen usaha ini menjadi kontributor terbesar sejak dijalankan kembali pada 2010 dan dijalankan dengan meningkatkan performansi dan profesionalitas pelaksanaan proyek secara umum sekaligus memelihara hubungan dengan konsumen dan meningkatkan posisi INTI terhadap kompetitor.

1. Segment System Integrator

System Integrator business segment includes the operations of infrastructure development where INTI use of partner products or the products of partners combined with products made by INTI own. A business segment is the largest contributor since the run back in 2010 and is run by increasing the performance and professionalism of the implementation of the project in general as well as maintain relationships with customers and increase INTI position against competitors.

TABEL KONTRAK DAN REALISASI PENJUALAN SYSTEM INTEGRATOR
2009-2014

Table Sales Contract and Realization System Integrator
2009-2014

(Rp. Juta) (Rp. Million)	2009	2010	2012	2013	2014
KONTRAK PENJUALAN Sales Contract	TIDAK ADA Nothing	514,179.36	1,780,719.53	826,474.26	1.985.377,3
REALISASI PENJUALAN Realization of Sales	TIDAK ADA Nothing	431,711.33	972,205.60	1,286,224.10	745.348,7

Pada tahun 2014, ada beberapa proyek besar yang termasuk dalam segmen usaha System Integrator, yaitu :

- Proyek Modernisasi Jaringan Akses melalui Optimalisasi Aset Kabel Tembaga dengan Pola Trade-in Trade-off (TITO) untuk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM).
- Proyek Fiber to the Home (FTTH) Green Field (GF) untuk TELKOM.
- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

In 2014, there were several major projects included in the System Integrator business segments, namely:

- Access Network Modernization Project through the Asset Optimization of Copper Cable with Trade-in Trade-offs (TITO) for PT Telkom Indonesia, Tbk. (TELKOM).
- Project Fiber to the Home (FTTH) Green Field (GF) for TELKOM.
- Solar Power Project (SPP) for the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).

1.1 Proyek TITO

Proyek TITO untuk TELKOM dilakukan untuk memodernisasi jaringan akses milik TELKOM yang saat ini menggunakan teknologi kabel tembaga, untuk kemudian diganti dengan jaringan akses berteknologi kabel optik agar dapat mendukung layanan pita lebar (broadband) sehingga TELKOM dapat menciptakan sumber pendapatan baru melalui peningkatan layanan pita lebar ke pelanggannya. Proyek TITO dilaksanakan dengan skema bisnis trade-in trade-off di mana INTI membangun jaringan kabel optik yang baru dan TELKOM melakukan sebagian pembayaran dengan menyerahkan aset jaringan kabel tembaga yang sudah tidak digunakan lagi kepada INTI. Pola bisnis ini ditujukan untuk mengoptimalkan aset TELKOM sekaligus mengurangi biaya yang diperlukan untuk melakukan investasi jaringan baru.

1.1 Project TITO

TITO project to modernize TELKOM access network which currently uses copper cable technology, to then be replaced with an optical cable access network technology to support broadband services (broadband) and TELKOM can create new revenue sources through enhanced broadband services to customers. TITO project implemented by the business scheme trade-in trade-off in which INTI build a new fiber optic network and TELKOM perform partial payment by submitting a copper cable network assets that are not used anymore to INTI. Business pattern is intended to optimize the TELKOM assets while reducing the costs required to perform a new network investment.

Pada awalnya, pembangunan jaringan kabel optik Proyek TITO menggunakan teknologi Fiber-To-The-Curb (FTTC), yaitu pembangunan jaringan kabel optik mulai dari Sentral Telepon Otomat (STO) TELKOM hingga perangkat Multi Services Access Network (MSAN) berbentuk kabinet yang ditempatkan di sisi jalan (trotoar atau halaman bangunan). Dalam perkembangannya, teknologi FTTC pada proyek TITO diganti dengan teknologi FTTH di mana jaringan kabel optik dibangun hingga rumah pelanggan. Penggunaan teknologi FTTH ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan pita lebar yang dapat diberikan kepada pelanggan. Hingga akhir 2014, sebanyak 125.544 jaringan FTTH telah dipasang hingga rumah pelanggan dan 48.082 pelanggan telah dimigrasikan ke jaringan baru.

At first, the development of fiber optic networks use technology TITO Project Fiber-To-The-Curb (FTTC), namely the construction of fiber optic network from the Automatic Telephone Central (STO) TELKOM to the Multi Services Access Network (MSAN) shaped cabinet placed in side of the road (pavement or building pages). During its development, the project FTTC technology TITO replaced with FTTH technology in which the fiber optic network is built to the customer's home. The use of FTTH technology is intended to improve broadband services that can be provided to the customer. Until the end of 2014, a total of 125 544 FTTH network has been installed to house 48 082 subscribers and customers have been migrated to the new network.

Kegiatan dalam proyek TITO meliputi tahapan survei dan perencanaan, pembangunan, migrasi, pelolosan, dan pemeliharaan. Tahapan Survei dan Perencanaan proyek TITO meliputi kegiatan survei, desain, pembuatan as-plan drawing, design review meeting, penyusunan BoQ, dan penerbitan Surat Pesanan (SP) dari TELKOM pada INTI. Tahapan Pembangunan proyek TITO meliputi kegiatan survei persiapan implementasi, perijinan, pengadaan material dan jasa, instalasi Optical Line Termination (OLT) dan Fiber Termination Management (FTM), penggelaran jaringan kabel optik untuk sambungan feeder dan sambungan distribusi, instalasi Optical Distribution Cabinet (ODC) dan Optical Distribution Point (ODP), commissioning test, uji terima, rekonsiliasi hasil instalasi, dan penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST).

TITO project activities include survey and planning stages, development, migration, escape, and maintenance. Surveying and Planning Stages TITO projects include the surveying, design, manufacture as-plan drawing, design review meeting, preparation of BOQ, and the issuance of Order (SP) of TELKOM at INTI. Development Stages TITO project includes the preparation of the survey implementation, licensing, procurement of materials and services, installation of Optical Line Termination (OLT) and Fiber Termination Management (FTM), deployment of fiber optic network for connection feeder and distribution connections, installation Optical Distribution Cabinet (ODC) and Optical Distribution Point (ODP), commissioning test, test receipt, reconciliation installation results, and publishing Handover (BAST).

Tahapan Migrasi proyek TITO meliputi kegiatan validasi pelanggan, instalasi kabel optik dari ODP hingga ke rumah, pemasangan ONT, migrasi layanan, monitoring pasca migrasi, dan pembuatan Berita Acara Migrasi Pelanggan. Tahapan Pelolosan proyek TITO meliputi validasi kabel tembaga, pelolosan kabel tembaga dari duct kabel, pemotongan dan pengukuran kabel tembaga, pencatatan dan pembuatan Berita Acara Aset di lapangan, pengangkutan dan penyimpanan kabel tembaga, rekonsiliasi aset, pembuatan BAST Aset, serta penjualan aset yang telah diserahterimakan. Tahapan Pemeliharaan Proyek TITO meliputi kegiatan monitoring dan perbaikan, dalam jangka waktu 365 hari setelah BAST pembangunan ditandatangani jika diperlukan.

Stages Migration TITO project includes customer validation, installation of optical cable from ODP to the house, ONT installation, migration services, post-migration monitoring, and manufacturing Minutes Customer Migration. Stages escape TITO project includes validation of copper wires, copper wires for passage of the cable duct, cutting and measurement of copper cables, recording and making of Minutes of assets in the field, transport and storage of copper wires, reconciliation of assets, asset BAST manufacture, and sale of assets that have been handed over . Maintenance Phases TITO project includes monitoring and improvement activities, within 365 days after construction BAST signed if necessary.

Proyek TITO dimulai setelah kontrak nomor K.TEL.01/HK.810/DAC-A1000000/2011 ditandatangani oleh TELKOM dan INTI pada 30 Desember 2010 yang berlaku selama lima tahun. Sebagai pelaksanaannya, TELKOM menerbitkan SP ke INTI dan hingga saat ini telah terbit 11 SP yang mencakup pekerjaan di 40 STO tersebar di 11 kota di Sumatra dan Jawa. Sampai dengan akhir tahun 2014, terdapat tujuh SP yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu SP#4 hingga SP#10.

TITO project started after the contract number K.TEL.01 / HK.810 / DAC-A1000000 / 2011 signed by TELKOM and INTI on December 30, 2010 are valid for five years. For its implementation, TELKOM publishes SP to INTI and to date has published 11 SP which includes work on 40 STO spread across 11 cities in Sumatra and Java. Until the end of 2014, there are seven SP which are still in the process of completion, that's SP#4 to SP#10.

TABEL PEKERJAAN PROYEK TITO SP#1 HINGGA SP#11
Project Work Table of TITO SP # 1 to SP # 11

DESKRIPSI Description		NILAI AKHIR Final Rates		STATUS PROYEK Project Status
SP	NOMOR KONTRAK Contract Numbers	NILAI PEMBANGUNAN Development Value	NILAI ASET Assets Value	
SP#1	K.TEL.01/HK.810/DAC-A1000000/2011	138,547,238,115.00	117,880,140,597.00	Closed
SP#2	K.TEL.04/HK.810/DAC-A1000000/2011	66,062,590,741.96	36,331,348,070.00	Closed
SP#3	K.TEL.297/HK.810/DAC-A1000000/2011	285,976,991,982.70	139,679,842,529.00	Closed
SP#4	K.TEL.401/HK810/DAC-A1000000/2012	216,509,934,338.00	36,060,758,947.75	On progress. STO JIA & STO Perak closed
SP#5	K.TEL.701/HK.810/DAC-A1000000/2012	290,740,795,800.00	59,765,671,259.61	On progress. STO Grati, STO Pekalongan, & STO Purwokerto closed
SP#6	TEL.702/HK.810/DAC-A1000000/2012	273,750,059,385.00	46,115,094,997.80	On progress
SP#7	K.TEL.05/HK.810/DBB-A1000000/2012	325,072,203,226.00	98,750,527,794.67	On progress
SP#8	TEL.74/HK.810/DBB-A1000000/2012	420,732,391,594.00	144,952,495,282.96	On progress
SP#9	K.TEL.75/HK810/DBB-A1000000/2012	319,509,557,970.00	53,788,010,442.47	On progress
SP#10	TEL.22/HK.810/DBB-A1000000/2012	696,371,398,087.00	170,896,802,123.71	On progress
SP#11	K.TEL.1256/HK.820/DBB-A1000000/2013	3,339,941,244.00	123,272,480.00	Ulin closed

Hingga akhir tahun 2014, progress penyelesaian proyek TITO adalah sebagai berikut :

By the end of 2014, progress TITO project completion are as follows:

TABEL VOLUME PROYEK TITO SP#4 HINGGA SP#10
Table Volume of TITO Project SP#4 until SP#10

SPN	STO	Panjang Feeder (m) Feeder Length (m)	Panjang Distribusi (m) Distribution Length (m)	Jumlah ODP Total ODP	Jumlah ODC Total ODC	Jumlah US Total US	Jumlah Homepass Total Homepass
Grand Total		2846179	9701762	117708	1715	646054	1350636
SUMATERA	SUMATERA	620793	3147086	30051	440	156187	339208
SP#5	TALANG KALAPA	27829	115840	1146	14	5586	13416
SP#5	TANJUNG KARANG	52779	380453	3796	52	16993	47344
SP#6	PADANG CENTRUM	38046	269115	2861	45	19014	30496
SP#7	SIMPANG LIMUN	175937	487041	5249	65	20426	53000
SP#10	MEDAN CENTRUM	60269	321372	4355	74	37950	50440
SP#10	CINTA DAMAI	113320	604156	5468	69	23036	55160
SP#10	PEKANBARU	152613	969109	7176	121	33182	89352
JKT	JKT	787976	1805815	23606	352	127179	291028
SP#4	JIA	101000	101000	780	13	-	9548
SP#8	SEMANGGI 1	93766	52155	656	22	5934	7904
SP#8	CAWANG	175495	313320	3346	63	21307	51856
SP#8	KLENDER	169774	312898	4423	60	32113	53464
SP#8	PONDOK GEDE	123252	588732	7495	96	39418	94616
SP#10	BEKASI	124689	437710	6906	98	28407	73640
JABAR	JABAR	452919	1374344	17864	257	126393	225648
SP#4	RAJAWALI	106304	582123	6371	79	52509	91008
SP#7	GEGERKALONG	45430	212158	2138	34	14212	30560
SP#9	AHMAD YANI	263001	393858	6379	104	36991	68368
SP#9	BANDUNG CENTRUM	38184	186205	2976	40	22681	35712
JATENG	JATENG	737718	2648209	36493	498	165514	383784
SP#5	PEKALONGAN	19328	48934	497	15	3397	6392
SP#5	PURWOKERTO	35589	73784	426	16	3892	5472
SP#4	BOYOLALI	41413	-	-	4	-	-
SP#5	GLADAK	39731	274776	3272	48	19623	44344
SP#6	KERTEN	147600	507191	7195	75	27481	66480
SP#7	JOHAR	68064	316729	5171	85	29812	56600
SP#9	KOTABARU	75509	432132	5913	88	29873	59200
SP#10	TUGU	78924	413933	5959	68	24282	58432
SP#10	PUGERAN	231560	580670	8060	99	27154	86864
JATIM	JATIM	237434	726308	9694	168	70781	110968
SP#4	PERAK	7531	5182	56	4	352	664
SP#5	GRATI	14720	-	-	1	-	-
SP#6	GUBENG	65080	185318	2585	42	20715	32464
SP#7	RUNGKUT	61365	277786	4163	65	28046	43576
SP#7	JAGIR	88738	258022	2890	56	21668	34264
KALTIM	KALTIM	9339	-	-	-	-	-
ULIN	ULIN	9339	-	-	-	-	-

Kendala terbesar yang dihadapi oleh proyek TITO pada tahun 2014 antara lain adalah kendala perizinan, isu komunitas, perubahan desain, perbaikan jaringan, dan pendanaan operasional yang menyebabkan progres penyelesaian pembangunan jaringan kabel optik tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Akibatnya, proses instalasi kabel optik sampai ke rumah juga tidak berjalan dengan baik sehingga pelanggan dan layanannya tidak bisa dimigrasikan dari jaringan lama ke jaringan baru sesuai dengan rencana.

The biggest obstacle faced by TITO projects in 2014 include licensing constraints, community issues, design changes, tissue repair, and operational funding that led to the progress of completion of the construction of optical cable networks do not go as planned. As a result, the optical cable installation process up to the house is not going well so that the customer and the service can not be migrated from the old network to the new network in accordance with the plan.

Selanjutnya, keterlambatan proses instalasi kabel rumah dan migrasi pelanggan tadi kemudian menyebabkan keterlambatan dalam proses pelolosan kabel pada jaringan kabel tembaga yang sudah tidak digunakan lagi serta pembongkaran aset lainnya. Padahal, aset hasil pelolosan ini direncanakan untuk dijual untuk mendanai kegiatan operasional pelaksanaan proyek.

Furthermore, the delay in the process of home wiring installation and customer migration was then led to a delay in the passage of the cable in copper cable networks that are not used anymore and dismantling other assets. In fact, the result of passage of the assets is planned to be sold to fund the operations of the project.

Hal tadi pun berdampak pada pengurangan profitabilitas segmen usaha dan arus kas Perusahaan. Untuk mengurangi dampak negatif keterlambatan penyelesaian proyek TITO itu, perusahaan melakukan percepatan pekerjaan instalasi kabel optik ke rumah pelanggan dan migrasi layanan ke jaringan baru secara lebih terukur dan terkendali sehingga membuka peluang untuk masuk Tahap Pelolosan yang diharapkan dapat menambah percepatan penerimaan arus kas.

It had no impact on reducing the profitability of the business segments and cash flows. To reduce the negative impact of delays in TITO project completion, the company made an optical cable installation work to the customer's home and the migration to the new network services in a more measured and controlled so that the opportunity to enter the stage for passage of which is expected to add to the acceleration of receipt of cash flows.

1.2 Proyek FTTH GF

Proyek FTTH GF dilakukan untuk menambah kapasitas jaringan TELKOM yang dapat mendukung penyediaan layanan pita lebar untuk pelanggan baru. Proyek yang meliputi 571 lokasi dan 191.224 homepass ini dilaksanakan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan ini diimplementasikan melalui pembentukan konsorsium dengan Huawei dan enam perusahaan lokal lainnya. INTI bertindak selaku pemimpin konsorsium.

1.2 FTTH GF Project

FTTH GF project aims to increase the capacity of our network that can support the provision of broadband services to new customers. The project, which includes 571 locations and 191,224 passes was held in West Java, Central Java and Kalimantan is implemented through the establishment of a consortium with Huawei and six other local companies. INTI act as leader of the consortium.

Keterlambatan penyelesaian proyek FTTH GF terjadi karena kendala pembangunan seperti masalah perizinan baik dari pemerintah setempat maupun komunitas, perubahan desain, dan perbaikan hasil instalasi yang masih harus dilakukan pun membuat progres proyek tidak secepat yang ditargetkan. Proyek inipun mendapat kendala akibat perubahan kurs dan masalah pendanaan yang berdampak pada progres penyelesaian pekerjaan sehingga mengakibatkan penurunan profitabilitas segmen usaha dan juga berdampak negatif pada arus kas Perusahaan. Selain itu, proyek ini mengalami penurunan karena terdapat beberapa lokasi pekerjaan yang didrop atau dikembalikan pengerjaannya kepada Telkom. Akuisisi terhadap kontrak baru untuk bisnis inipun masih terkendala, mengingat hingga saat ini masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan.

FTTH GF project completion delays occur due to development constraints such as licensing issues from both the local government and the community, changes in the design, installation and repair results are still to be done was to make progress as soon as the project is not targeted. Even this project several problems due to changes in exchange rates and funding issues that impact on the progress of completion of the work, resulting in a decrease in the profitability of the business segments and also have a negative impact on cash flows. In addition, this project has decreased because there are several job sites dropped or workmanship returned to Telkom. Acquisition of a new contract for the business even this is still constrained, considering that there are still outstanding job.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif keterlambatan penyelesaian proyek

Several steps were taken to reduce the negative impact of delays in project completion FTTH GF with intense

FTTH GF dengan percepatan pekerjaan serta koordinasi intens dengan pihak pemilik proyek dan mitra, terutama terkait soal perubahan desain.

1.3 Proyek PLTS

Menjelang akhir 2014, INTI menyelesaikan proyek instalasi PLTS dari Kementerian ESDM. Proyek pembangunan PLTS yang terpusat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Riau itu dilaksanaka berdasarkan kontrak nomor : 12/SP/PF.III-17/PLTS-PEMDA/PPKF-L/DJE/IX/2014, tertanggal 12 September 2014 dan menjalani proses amandemen menjadi kontrak nomor: 28/SP/PF.III-17/PLTS-PEMDA/PPKF-L/DJE/IX/2014, tertanggal 10 Oktober 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Fisik lainnya Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dengan INTI.

Untuk pembangunan PLTS Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali tersebar di lima lokasi berikut,

- Lokasi Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
- Lokasi Desa Parang (P. Parang), Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- Lokasi Dusun Cok Pocok, Desa Sana Laok 1, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur.
- Lokasi Dusun Mataba, Desa Sana Laok 2, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur.
- Lokasi Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali.

Sementara untuk pembangunan PLTS area Provinsi Riau tersebar di empat lokasi berikut,

- Lokasi Desa Cipang Kiri Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
- Lokasi Desa Darul Aman (Pangkalan Durian), Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
- Lokasi Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- Lokasi Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

acceleration of work and coordination with the project owner and partners, particularly related matter of design changes.

1.3 PLTS Project

Towards the end of 2014, INTI completed the installation of PLTS projects from the Ministry of Energy and Mineral Resources. PLTS development projects are concentrated in the province of Central Java, East Java, Bali, and Riau that are done under the contract number: 12 / SP / PF.III-17 / SPP-LG / PPKF-L / DJE / IX / 2014, dated 12 September 2014 and undergo a process of amendment into the contract number: 28 / SP / PF.III-17 / SPP-LG / PPKF-L / DJE / IX / 2014, dated October 10, 2014 between Committing Officer (P2K) Other Physical Directorate General of New Energy , Renewable and Energy Conservation of the Ministry of Energy and Mineral Resources with INTI.

For the development of PLTS Central Java, East Java, and Bali spread over the following five locations,

- Location Dukuhbenda village, Kecamatan Bumijawa, Tegal, Central Java Province.
- Location Parang village (P. Parang), Kecamatan Karimunjawa, Jepara, Central Java Province.
- Location Dusun Cok Pocok, village Sana Laok 1, Kecamatan Waru, Pamekasan, East Java Province.
- Location Dusun Mataba, village Sana Laok 2, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, East Java Province.
- Location Tianyar Tengah village, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali Province.

As for PLTS development area of Riau Province in four of the following locations,

- Location Cipang Kiri Hulu village, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau Province.
- Location Darul Aman village (Pangkalan Durian), Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau Province.
- Location Teluk Lanus village, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau Province.
- Location Sungai Upih Village, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau Province.

TABEL PEKERJAAN PLTS JAWA - BALI
Work Table of PLTS Java - Bali

No.	LOKASI Location	KWp	RUMAH House	SOLAR PANEL	BATERE Battery	TIANG Pole	HPS (Rp.)
1.	Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijiwa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah	15	75	75	72	38	
2.	Desa Parang (P.Parang) Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	75	338	375	360	233	
3.	Desa Sana Laok 1, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur	15	71	75	72	58	17,194,772,472.
4.	Desa Sana Laok 2, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur	15	85	75	72	55	
5.	Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali	20	139	100	96	190	

TABEL PEKERJAAN PLTS RIAU
Work Table of PLTS Riau

No.	LOKASI Location	KWp	RUMAH House	SOLAR PANEL	BATERE Battery	TIANG Pole	HPS (Rp.)
1.	Desa Cipang Kiri Hulu, Kecamatan Rokan Koto IV Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau	15	66	75	72	59	
2.	Desa Darul Aman (Pangkalan Durian), Kecamatan Rupai, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	20	132	100	96	158	19,204,234,261.
3.	Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau	50	263	250	216	350	
4.	Desa Sungai Apih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau	75	465	375	360	514	

INTI melakukan instalasi solar panel sebagai pembangkit listrik tenaga surya serta jaringan penerangan di desa-desa pada area tersebut. Berikut progres pengerjaan PLTS hingga akhir 2014,

INTI installing solar panels as solar power and lighting networks in the villages in the area. Following the progress of PLTS workmanship until the end of 2014,

TABEL REALISASI PENYELESAIAN PROYEK PLTS PROVINSI JAWA TENGAH-JAWA TIMUR-BALI-RIAU
Realization Table of Project Completion of PLTS in Central Java - East Java - Bali - Riau

LOKASI Location		STATUS (PROGRES PEKERJAAN) Status (Work Progress)
PROVINSI Province	DESA / KECAMATAN Village / District	
Jawa Tengah	Dukuhbenda/Bumijawa	98,5%
Jawa Tengah	Parang/Karimunjawa	100%
Jawa Timur	Sana Laok 1/Waru	99,9%
Jawa Timur	Sana Laok 2/Waru	99,8%
Bali	Tianyar Tengah/Kubu	99,7%
Riau	Cipang Kiri Hulu/Rokan IV Koto	100%
Riau	Darul Aman/Rupat	100%
Riau	Teluk Lanus/Sungai Apit	98,5%
Riau	Sungai Upih/Kuala Kampar	93,1%

Mengingat bahwa Proyek TITO TELKOM, Proyek FTTH Greenfield TELKOM, dan Proyek SMP BBM Pertamina merupakan proyek-proyek yang berkontribusi besar pada target pencapaian tahun 2014, maka kendala yang dialami pada ketiga proyek tersebut sangat mempengaruhi pencapaian target perusahaan secara keseluruhan.

Considering to the project TITO TELKOM, TELKOM Greenfield FTTH Project, and SMP BBM Project of Pertamina are projects that substantial contribute to the achievement of the targets by 2014, then the constraints experienced in the three projects greatly affect the general achievement of the target of the company.

2. Segmen Usaha Maintenance/Managed Service

Segmen usaha ini dijalankan dengan terus memperkuat kompetensi pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan melalui peningkatan kerja sama dengan vendor, baik secara teknis maupun komersial. Kegiatan pengelolaan komponen dan suku cadang untuk jaringan telekomunikasi, perbaikan perangkat, serta pemeliharaan jaringan telekomunikasi masih mendominasi segmen usaha ini.

2.1 Proyek SPMS

Dalam kegiatan pengelolaan komponen dan suku cadang, INTI menerima dua proyek besar, yaitu Spare Part Management System (SPMS) untuk Nokia Siemens Network (NSN) senilai Rp 28,348 miliar dan Huawei dengan total penjualan sebesar Rp 20,541 miliar. Untuk memenuhi permintaan kastemer pada proyek SPMS ini, INTI mengoperasikan dua central warehouse (CWH) dan 86 satelit warehouse (SWH) yang tersebar di 75 kota di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengoperasian call center dan warehouse, pengiriman modul-modul pengganti, serta penarikan kembali modul-modul yang rusak. Kegiatan ini berlangsung selama 24 jam.

2. Segment Maintenance / Managed Service

A business segment is run by continuing to strengthen the competence of the operation, maintenance, and repair through increased cooperation with vendors, both technically and commercially. Management activities of components and spare parts for the telecommunications network, device repair, and maintenance of telecommunications networks still dominate this business segment.

2.1 Project SPMS

In the management of components and spare parts, INTI received two major projects, namely Parts Management System (SPMS) for Nokia Siemens Networks (NSN) worth Rp. 28.348 billion and Huawei with total sales of Rp 20.541 billion. To meet the customer demand on this SPMS project, INTI operates two central warehouse (CWH) and 86 satellite warehouse (SWH) spread 75 cities in Indonesia. Activities include the operation of the call center and warehouse, delivery of replacement modules, as well as the recall of defective modules. This activity lasts for 24 hours.

TABEL REALISASI PENJUALAN SPMS
Realization Table of SPMS Sales 2012 - 2014

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

TAHUN Year	2012	2013	2014
TOTAL TRANSAKSI Total Transaction	30,225,570,913	35,847,200,325	50,542,886,991

Peningkatan perolehan penjualan pada proyek SPMS ini dikarenakan peningkatan jumlah modul yang harus didistribusikan.

The increase in the sales of the project SPMS is because an increasing number of modules that have to be distributed.

2.2 Repair/Perbaikan Modul dan Perangkat Telekomunikasi

Untuk kegiatan perbaikan modul/perangkat telekomunikasi, INTI mengoperasikan repair center yang berlokasi di kantor pusat INTI di Bandung. Repair center ini dapat menangani perbaikan modul-modul sentral telepon dan antena dengan kapasitas 3500 (tahun 2012 total direpair 2688 modul) per tahun. Selama tahun 2014, INTI telah melaksanakan perbaikan modul sebanyak 548 unit dan perbaikan antena sebanyak (tidak melakukan repair antena) adanya repair radio microwave 440 unit.

2.2 Repair / Repair Module and Telecommunications Equipment

For repair activity modules / telecommunications equipment, INTI operate repair center located at its headquarters in Bandung. Repair centers can handle repair modules and antennas telephone exchange with a capacity of 3500 (in 2012 a total of 2688 repaired modules) per year. During 2014, INTI has implemented improvements as much as 548 units module and antenna repair as much (do not repair the antenna) the presence of microwave radio repair 440 units.

TABEL REALISASI PENJUALAN REPAIR
Realization Table of Repair Sales 2012 - 2014

TAHUN Year	2012	2013	2014
JUMLAH MODUL (dalam Unit) Total Modules (in Units)	2,688	2,062	548
TOTAL TRANSAKSI (dalam Rupiah) Total Transaction (in Rupiah)	10,848,693,402	13,047,865,329	1,889,992,171

Penurunan jumlah repair yang ditangani pada tahun 2014 lebih dikarenakan perubahan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh kastemer yang perbaikannya masih belum dapat ditangani oleh INTI.

Decrease the amount of repair are handled in 2014 is due to changes in telecommunications technology that is used by the customer that the repairs are still not able to be handled by INTI.

2.3 Pemeliharaan Out Side Plant (OSP)

Adapun untuk pemeliharaan jaringan telekomunikasi, INTI menangani pemeliharaan OSP sistem komunikas kabel laut (SKKL) milik PT Bina Nusantara senilai Rp. 19,391 miliar serta OSP PT Telkomsel senilai Rp. 2,372 miliar dan pemeliharaan OSP senilai Rp. 7,292 miliar. Kegiatan pemeliharaan meliputi penyediaan call center, penyediaan material cadangan, penggantian dan penyambungan kabel yang putus/rusak.

2.3 Maintenance Out Side Plant (OSP)

As for the maintenance of telecommunication networks, INTI handle maintenance OSP komunikas submarine cable system (SKKL) owned by PT Bina Nusantara worth Rp. 19.391 billion and OSP PT Telkomsel valued at Rp. 2.372 billion and maintenance OSP worth Rp. 7.292 billion. Maintenance activities include the provision of call center, providing backup material, and the replacement of a broken cable splicing / damaged.

3. Segmen Usaha Smart Device (Produk Genuine)

Untuk meningkatkan kontribusi produk genuine terhadap penjualan perusahaan, strategi yang dipilih antara lain sebagai berikut:

a. Memformalkan hubungan dengan pihak ketiga untuk pemasaran dalam bentuk keagenan dengan menggunakan sistim kuota.
b. Melibatkan semua karyawan untuk memasarkan.
c. Penanganan bisnis dilakukan oleh Product Manager.

Pada 2014, perolehan penjualan pada segmen usaha ini antara lain berasal dari produk Smart Meter senilai Rp. 2,073 miliar untuk PT PLN (Persero), penjualan perangkat Smart Meeting senilai Rp. 712,22 juta untuk PT Biofarma (Persero), dan penjualan perangkat Smart Control Unit sebesar Rp. 2,442 miliar untuk PT Global Indotama Teknologi. Segmen usaha ini sebenarnya diharapkan dapat menjadi unggulan dilihat dari porsi marjin yang cukup baik, namun demikian hingga saat ini sejumlah produk yang ditawarkan belum dapat mencatatkan volume penjualan yang memadai.

4. Segmen Usaha IT & Services, Seat Management

Perusahaan akan menjadi penyedia solusi dalam bidang information technology (IT) dengan fokus pada penyediaan alternatif bisnis IT model dari capital expenditure (capex) menjadi operational expenditure (opex). Langkah awal dilakukan dengan menciptakan diferensiasi harga beli melalui transaksi volume pembelian yang besar, pemberian solusi managed services, dan peningkatan kegiatan industri dalam negeri.

Untuk itu, perusahaan menjalin kerja sama hulu hingga hilir. Kerja sama hulu yang lebih intensif dimaksudkan untuk mendapatkan sumber produk terbaik dengan harga yang bersaing. Sementara kerja sama hilir dilakukan dengan rekanan lokal yang diarahkan pada kanal distribusi serta instalasi dan perawatan perangkat.

Ada dua proyek besar yang dilakukan di segmen usaha ini yaitu Proyek SMP BBM untuk Pertamina dan Proyek Seat Management untuk TELKOM dan KAI, dan penjualan total yang dihasilkan dari segmen usaha ini pada tahun 2014 sebesar kurang lebih Rp. 35,3 miliar.

3. Segment Smart Device (Genuine Products)

To increase the contribution to total sales of genuine products, the strategies chosen are as follows:

a. Formalize relationships with third parties for marketing in the form of agency by using the quota system.
b. Involving all employees to market.
c. Handling the business conducted by the Product Manager.

In 2014, gains on the sale of this business segment among others came from the Smart Meter products worth Rp. 2.073 billion to PT PLN (Persero), sales of Smart Meeting devices worth Rp. 712.22 million for PT Biofarma (Persero), and the Smart Control Unit sales of Rp. 2.442 billion for PT Global Indotama Teknologi. This business segment is expected to be featured in fact be seen from quite a good portion of the margin, however, until now a number of products offered have not been able to record a sufficient sales volume.

4. Segment IT & Services, Seat Management

The company will become a solution provider in the field of information technology (IT) with a focus on providing IT business alternative models of capital expenditure (capex) to operational expenditure (OPEX). The initial step is done by creating a purchase price differentiation through the purchase of a large volume of transactions, the provision of managed services solutions, and an increase in industrial activity in the country.

To that end, the company collaborates upstream to downstream. Cooperation more intensive upstream intended to source the best products at competitive prices. While cooperation downstream done with local partners who directed the distribution channels as well as installation and maintenance of the device.

There are two major projects undertaken in this business segment ie SMP BBM project to Pertamina and Seat Project Management for TELKOM and KAI, and generated total sales of this business segment in 2014 amounted to approximately Rp. 35.3 billion.

4.1 Proyek SMP BBM

Proyek SMP BBM untuk PT Pertamina (Persero) bertujuan untuk memonitor dan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi di masyarakat. Proyek ini dilaksanakan melalui pembangunan sistem monitoring dan pengendalian di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina serta memasang radio frequency identification (RFID) tag di kendaraan milik masyarakat, lembaga, dan pemerintah. Sistem ini mencatat setiap transaksi dan volume pengisian BBM di SPBU. Data yang terkumpul ini akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pembayaran pada INTI.

Sampai dengan akhir tahun 2014, instalasi sistem monitoring telah dilakukan di 181 SPBU di DKI Jakarta dan 374.401 RFID Tag telah dipasang di kendaraan masyarakat.

Proyek Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMP BBM) ini dipengaruhi kondisi ekonomi makro seperti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) serta bergantung pada regulasi terkait dengan monitoring penyaluran BBM Bersubsidi. Akibatnya, proyek ini mengalami kendala komersial. Sebab, perhitungan proyek pada awal penandatanganan kontrak tidak lagi layak secara bisnis (feasible). Apalagi, sebagian besar perangkat yang digunakan dalam proyek ini didatangkan secara impor dengan transaksi pembayaran yang dilakukan dalam mata uang USD sehingga pelemahan mata uang rupiah terhadap USD itu memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan proyek.

Untuk mengembalikan kondisi layak bisnis itu, pihak pemilik dan pelaksana proyek harus melakukan amandemen kontrak yang memang membutuhkan banyak pertimbangan dan kesepakatan. Paralel dengan hal itu, perusahaan mengejar target penyelesaian pekerjaan dengan terus mengaktifkan posko registrasi yang tersebar di sejumlah lokasi.

4.2 Proyek Seat Management

Proyek Seat Management meliputi penyediaan perangkat IT dan Alat Olah Data untuk kastemer dengan pola sewa untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan dalam proyek seat management meliputi pengadaan perangkat IT dan AOD, setup software, distribusi, maintenance, dan penarikan kembali perangkat yang telah habis masa sewanya.

Pada tahun 2014, INTI menangani seat management untuk TELKOM dan PT KAI dengan volume total kurang lebih 10.700 unit laptop/notebook, 15.200 unit PC, 2.800 unit printer (laser dan dot matrix) dan perangkat IT lainnya seperti scanner dan projector.

4.1 SMP BBM Project

SMP BBM Project for PT Pertamina (Persero) aims to monitor and control the distribution of subsidized fuel in the community. The project is implemented through the development of monitoring and control systems in public refueling stations (SPBU) Pertamina and installing radio frequency identification (RFID) tags on vehicles belonging to the community, institutions, and governments. This system records every transaction and fill volume of fuel at the pump. The data collected will be the basis for Pertamina to make payments on INTI.

Until the end of 2014, the installation of the monitoring system has been carried out in 181 SPBU in Jakarta and 374,401 RFID tags have been installed in public vehicles.

Project Monitoring System and Fuel Control (SMP BBM) is influenced by macro-economic conditions such as the weakening of the Rupiah against the US dollar (USD) and the increase in interest rates by Bank Indonesia (BI Rate) and subject to regulations related to the monitoring of the distribution Subsidized fuel. As a result, the project experienced commercial constraints. Therefore, the calculation of the project at the beginning of the signing of the contract is no longer viable business (feasible). Moreover, most of the devices used in this project brought in imports with payment transactions made in USD thus weakening rupiah against the US dollar that had a significant impact on project implementation.

To restore the business worth it, the owner and project implementers should amend contracts that do require a lot of consideration and agreement. Parallel to this, the company pursues a target completion of the work by continuing to activate the registration posts spread across a number of locations.

4.2 Seat Management Project

Seat Management Project includes the provision of IT equipment and Sporting Data for the customer to lease pattern for a certain period. Activities in the project management seat covers procurement of IT devices and the AOD, software setup, distribution, maintenance, and withdrawal of devices that have expired lease.

In 2014, INTI handle seat management for Telkom and PT KAI with a total volume of approximately 10,700 units of laptops / notebooks, PCs 15,200 units, 2,800 units of printers (laser and dot matrix) and other IT devices such as scanners and projectors.

Proyek Seat Management untuk TELKOM telah memasuki akhir masa sewa dan perangkat yang telah habis masa sewanya ditarik kembali dan dijual dengan perhitungan harga residunya. Proyek Seat Management untuk PT KAI masih berlangsung.

Dalam menjalankan proyek Seat Management ini, INTI bekerja sama dengan prinsipal perangkat IT dan lembaga keuangan non perbankan untuk investasi awalnya.

5. Segmen Usaha Mobile Device & Content

Segmen usaha ini dijalankan dengan mempertimbangkan kedekatan perusahaan dengan operator, dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan local application & content, pengalaman dalam bisnis informasi dan komunikasi (infokom), kemampuan sumber daya manusia dalam bidang IT, serta aset dan status sebagai BUMN. Modal inipun memberikan beberapa alternatif bagi perusahaan, yaitu:

a. Content aggregator
b. Produsen/developer/publisher
c. Investor, akuisisi, agen, subkontraktor
d. Kombinasi alternatif di atas

Dalam menjalankan bisnis ini, perusahaan akan menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya, pengalaman yang sangat terbatas, proses pendirian perusahaan/akuisisi yang akan memakan waktu yang lama, serta kompetensi perusahaan. Namun, berbekal tantangan ini, berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2012-2016, INTI dapat menjalankan sejumlah bisnis berikut :

a. Online Content
   - Portal (perkiraan pangsa pasar Rp 20 miliar)
   - Games (perkiraan pangsa pasar Rp 600 miliar)

b. Mobile Content (perkiraan pangsa pasar sekitar Rp 3 triliun)
   - Voice-based Application (Voice Music SMS, Voice SMS, Celebrity Greeting, Fun Voice,
   - Voice Mail, Voice Mail Broadcast)
   - SMS-based Application (Sports, Entertainment, Forecasting)
   - Application-based including games (Java Based, Brew Based, Blackberry Based, Smart
   - Phone Based)
   - 3G-based (Video RBT, Video SMS, Karaoke)

Pada 2014, segmen usaha ini lebih banyak difokuskan pada anak perusahaan, PT Inti Konten Indonesia (INTENS) yang berkontribusi sekitar Rp 858,9 juta terhadap realisasi penjualan induk.

Seat Management Project for TELKOM has entered the end of the lease and the lease expiring withdrawn and sold at a price calculation residue. Seat Project Management for PT KAI is still ongoing.

In carrying out this project Seat Management, INTI in collaboration with the principal IT devices and non-banking financial institutions to invest initially.

5. Segment Mobile Device & Content

A business segment is executed by considering the proximity of the company with the operator, the support of the local government to develop applications and content, experience in the business of information and communications (infocom), the ability of human resources in the IT field, as well as asset and status as a state. Even this capital provides several alternatives for the company, namely:

a. Content aggregator
b. Manufacturer / developer / publisher
c. Investors, acquisition, agents, subcontractors
d. The combination of the above alternatives

In this business, the company will face a number of challenges, among them, a very limited experience, the process of incorporation / acquisition that will take a long time, as well as the competence of the company. However, armed with this challenge, based on the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2012-2016, INTI can run a number of the following businesses:

a. Online Content
   - Portal (approximate market share of Rp 20 billion)
   - Games (approximate market share of Rp 600 billion)

b. Mobile Content (approximate market share of around Rp 3 trillion)
   - Voice-based Application (Music Voice SMS, Voice SMS, Celebrity Greeting, Fun Voice,
   - Voice Mail, Voice Mail Broadcast)
   - SMS-based Application (Sports, Entertainment, Forecasting)
   - Application-based Including games (Java Based, Based Brew, Blackberry Based, Smart
   - Phone Based)
   - 3G-based (Video RBT, Video SMS, Karaoke)

In 2014, this business segment more focused on the subsidiary, PT Inti Konten Indonesia (INTENS) which contributed approximately Rp. 858.9 million on parent sales realization.

6. Segmen Usaha Manufacturing

Segmen usaha Manufacturing dilakukan dengan melakukan investasi secara mandiri atau penyertaan modal pemerintah (PMP) yang pengelolaannya diserahkan pada anak perusahaan yang sudah ada dengan perluasan bidang bisnis anak perusahaan tersebut, atau mendirikan perusahaan patungan dengan menyertakan aset yang sudah dimiliki PT INTI (Persero).

Pada tahun 2014, segmen usaha manufakturing dijalankan di PT IPMS, anak perusahaan INTI, untuk produksi komponen logam dan plastik dengan volume bisnis kurang lebih Rp. 10,8 miliar. Hasil produksi mayoritas digunakan untuk memenuhi permintaan PT Pindad (Persero) dan PT KAI (Persero).

Pada 28 Februari 2014 telah diresmikan fasilitas produksi hasil kerja sama PT IPMS dengan perusahaan Korea yang berlokasi di area PT INTI (Persero) di Jalan Raya Dayeuhkolot No. 225 Bandung. Hal ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk terus menghidupkan manufaktur. Dalam menjalankan segmen usaha ini, perusahaan dihadapkan dengan sejumlah tantangan, di antaranya regulasi pemerintah yang belum mendukung terbentuknya komunitas bisnis dan pengenaan bea masuk tinggi, sehingga memberikan iklim bisnis yang kurang kondusif.

6. Segment Manufacturing

Manufacturing business segment was done by independent investment or government participation (PMP) the custody of the existing subsidiaries to expand the field of business of these subsidiaries, or set up a joint venture to include the assets already owned by PT INTI (Persero).

In 2014, manufacturing business segment run in PT IPMS, a subsidiary of INTI, for the production of metal and plastic components with a business volume of approximately Rp. 10.8 billion. The results of the majority of the production is used to meet the demand of PT Pindad (Persero) and PT KAI (Persero).

On February 28, 2014 has been inaugurated production facility results PT IPMS cooperation with Korean companies located in the area of PT INTI (Persero) in Jalan Raya Dayeuhkolot No. 225 Bandung. This is one way to continue the manufacturing company. In running this business segment, the company is faced with a number of challenges, including government regulations that do not support the formation of the business community and the imposition of high import duties, thus providing an unfavorable business climate.

Tinjauan SDM
HR Overview

Terus bertumbuhnya PT INTI membawa konsekuensi pada Perusahaan untuk menerapkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai asset perusahaan (human capital).

Penerapan Manajemen Human Capital merupakan landasan utama mewujudkan Visi menjadi pilihan pertama bagi pelanggan dalam mentransformasikan "mimpi" menjadi"kenyataan". Penerapan Manajemen Human Capital menjadi hal yang sangat penting mengingat keberadaan pegawai memiliki fungsi strategis bagi INTI, yaitu untuk memaksimalkan value (nilai) Perusahaan serta mengupayakan growth (pertumbuhan) yang berkesinambungan, sehingga INTI dapat berperan sebagai prime mover (penggerak utama) bangkitnya industri dalam negeri, dengan fokus bisnis tertuju pada kegiatan jasa engineering yang sesuai dengan spesifikasi dan permintaan konsumen. Dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen human capital senantiasa dibarengi pemenuhan kesejahteraan pegawai, programpengembangan karyawan termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan program remunerasi berbasis kinerja.

Continued growth of PT INTI have consequences on the Company to implement human resource management (HR) as the company's assets (human capital).

Human Capital Management Implementation is the main foundation realize the vision become the first choice for customers in transforming the "dream" into "reality". Application of Human Capital Management becomes very important to remember where employees have a strategic function for INTI, which is to maximize the value of the Company and seeking growth is continuous, so that INTI can act as a prime mover the rise of the domestic industry, with a business focus fixed on the activities of engineering services in accordance with the specifications and consumer demand. In practice, the implementation of human capital management is always accompanied by the fulfillment of employee welfare, programpengembangan employees including providing education and training, and performance-based remuneration program.

Human Capital Management
Human Capital Management

Untuk mencapai corporate objective ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu Process, People dan Technology. Fungsi HCM memiliki peran yang sangat penting di dalam pencapaian Objective perusahaan, baik yang menyangkut proses maupun di dalam merancang dan mengimplementasikan teknologi.

To achieve corporate objectives there are 3 things that must be considered, there are Process, People and Technology. HCM function has a very important role in the achievement of Objective companies, both concerning the process and in designing and implementing technology.

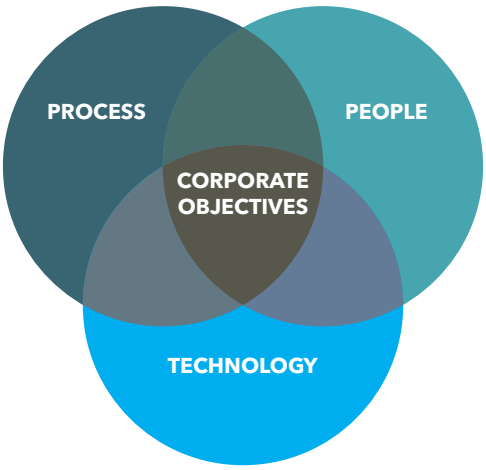

PROSES

Proses diperlukan untuk mentransformasikan knowledge menjadi output yang bermanfaat. Dalam perancangan dan implementasi proses, Perusahaan mengacu pada KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) yang terdiri dari: Approach, Deployment, Learning, Integration. Approach untuk memastikan, bahwa setiap aktivitas ada panduannya berupa pedoman/ prosedur, dimana pedoman/prosedur ini harus diimplementasikan (Deployment) dengan konsisten. Selama proses Deployment perlu dilakukan review secara berkala atas pedoman/ prosedur tersebut (Learning) dan dicatat hal-hal yang perlu diperbaiki atas prosedur tersebut sehingga terjadi continuous improvement. Proses tersebut akan lebih baik lagi apabila setiap pedoman/prosedur terintegrasi dengan pedoman/ prosedur di fungsi-fungsi lainnya.

PEOPLE

Performansi seorang karyawan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap hubungan dengan orang dan hubungan dengan tugas. Untuk memperoleh gambaran karyawan, maka dilakukan Pemetaan karyawan berdasarkan persepsi terhadap task dan people oriented.

Task Oriented

- Memperhatikan pekerjaan, penetapan tujuan, rencana yang jelas
- Fokus - Struktur, peran dan tugas
- Prioritas - Mencapai hasil yang memuaskan
- Jadwal ketat, rencana detil, sistem hukum / hadiah

People Oriented

- Memperhatikan interaksi, anggota kelompok serta komunikasi didalamnya
- Fokus - Hubungan, kesejahteraan, motivasi
- Prioritas - Hubungan positif
- Komunikasi, interaksi non-formal, meeting rutin

Hasil Pemetaan Karyawan yang dilakukan, telah mengelompokkan karyawan menjadi 4 Kategori yaitu : Ahli, Star, Manager dan Low Peformance.

PROCESS

The process required to transform knowledge to be useful outputs . According to design and implementation of process, the Company refers to KPKU (Superior Performance Assessment Criteria) which consists of: Approach, Deployment, Learning, Integration. Approach to ensure that every activity have a guide in the form of guidelines/ procedures, which should be implemented (Deployment) consistently. During the deployment process its have to periodically review to the above guidelines/ procedures (Learning) and get notice of the things that need to be fixed over the procedure resulting in continuous improvement. The process will be better if each guideline/ procedure is integrated over the guidelines/ procedures in other functions.

PEOPLE

An employee's performance is influenced by their perceptions of relationships with people and relationships with the task. To obtain a picture of the employee, the employee mapping done by the perception of the task and people-oriented.

Task Oriented

- Noting the work, setting goals, a clear plan
- Focus - The structure, role and tasks
- Priorities - Achieve satisfactory results
- Tight schedule, a detailed plan, the legal system / gift

People Oriented

- Noting interaction, and communication inside the group members
- Focus - Relationships, well-being, motivation
- Priority - Positive Relationships
- Communication, interaction of non-formal, regular meetings

Mapping results Employees who do, have been grouped into four categories, namely employees: Expert, Star, Manager and Low Peformance.

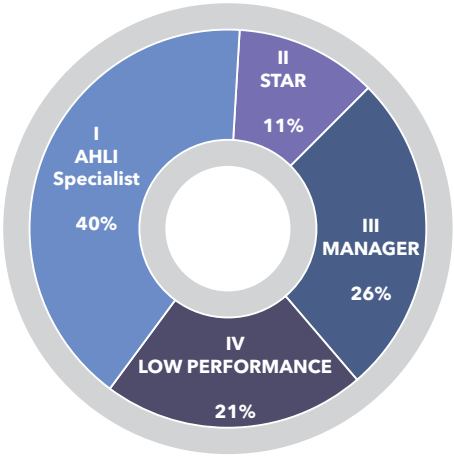

Berdasarkan kategori tersebut, maka dibuatlah Program-program perbaikan dan pelatihan untuk mengembangkan karyawan.

Based on these categories, then made improvements and programs to develop employee training.

DESCRIPTION		IMPROVEMENT	TRAINING
I. AHLI **Expert** • Fokus di bidang yang menjadi keahliannya, prosedural, detail Focus on areas of expertise, procedural, detail • Technical problem solver	TINGGI High	Diberikan tugas yang lebih menantang, target pencapaian yang lebih tinggi, diberikan kepercayaan untuk mengelola kelompok, diberikan penghargaan atas prestasi. Given more challenging tasks, target of achieving higher, given the trust to manage the group, was given the award for his achievements.	Soft Skill (Minimum Requirement: Communications, Motivation, Teamwork)
	SEDANG Average	Peningkatan Kualitas Improved Quality	Refreshing Training (Hard & Soft Skill)
	RENDAH Low	Dilibatkan dalam tim, melakukan komunikasi yang baik, Manajemen tim Involved in the team, good communication, team management	Effective Communication, Maximum Impact Presentation, Public Speaking, Building Team Performance
II. STAR • Dinamis, dapat menyelesaikan berbagai macam tugas Dynamic, can complete a variety of tasks	SUPERSTAR	Diberikan kesempatan mempresentasikan ide-ide, berinovasi dan menjadi Trainer atau Motivator Given the opportunity to present ideas, innovate and be Trainer or Motivator	Berdasarkan kebutuhan pekerjaan atau posisi Based on the needs of the job or position
• Pengambil keputusan cepat Fast decision maker • Berani mengambil tugas menantang dan penuh resiko Dare to take on the task of challenging and risky	STAR	Diminta meningkatkan kualitas tugas, daya analisa, dan pengambilan keputusan Asked to increase the quality of assignments, power analysis, and decision-making	Berdasarkan kebutuhan pekerjaan atau posisi (Task / People Training) Based on the needs of the job or position (Task / People Training)
III Manager • Mudah berbaur, team-player, delegator Friendly, team-player, delegator	TINGGI High	Diberikan tugas menantang dengan target waktu ketat A challenging task given the tight time targets	Time & Task Management
• Penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan Full consideration • Kurang berani mengambil resiko Less willing to take risks • Aktif, pemberi ide Active, ideas contributor	SEDANG Average	Tugas menantang dengan target waktu dan kualitas hasil yang pasti, diberikan kepercayaan untuk mengelola kelompok dalam jumlah besar Challenging task with a target time and quality of results are uncertain, given the confidence to manage groups in large quantities	Hard Skill, Focused Management Training (Telco, Marketing, IT, Supervisory, QC, Logistic, etc).
	RENDAH Low	Diberikan deadline tugas dengan prosedur, penilaian dan penghargaan yang jelas. Given deadlines with procedures, assessment and clear appreciation.	Hard Skill, Focused Management Training (Telco, Marketing, IT, Supervisory, QC, Logistic, etc).
IV Low Performance • Kaku, pasif, menahan diri, konvensional Rigid, passive restraint, conventional	SEDANG	Diberdayakan pada suatu tugas tertentu, Depth Assesment, Coaching & Counseling Empowered to a particular task, Depth Assessment, Coaching & Counseling	Motivasi Motivation
• Adaptasi diri lamban, orientasinya kurang jelas Sluggish self-adaptation, less clear orientation • Fokus pada suatu tugas ringan Focus on a light duty • Terkadang banyak ide, tetapi kurang mengerjakan atau tidak menyelesaikan Sometimes a lot of ideas, but lack of work or do not finish • Terlalu komunikatif tetapi kurang patuh Too communicative but less adherent	DEAD WOOD	Perbaikan di seluruh aspek, Depth Assessment, Counseling Improvements in all aspects, Depth Assessment, Counseling	Setelah dilakukan Depth Assessment; Training pada seluruh aspek yang masih mungkin diperbaiki After Depth Assessment; Training in all improvable aspects

TEKNOLOGI
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan proses dan people diperlukan peran teknologi informasi, dalam hal ini Perusahaan menggunakan aplikasi SAP module HR.

TECHNOLOGY
To improve efficiency and effectiveness in the management of processes and people is necessary to role of information technology, in which case the Company uses the HR module of SAP applications.

Profil Human Capital
Human Capital Profile

Human Capital merupakan aset penting bagi Perusahaan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan, oleh karenanya secara berkesinambungan dilakukan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada, yaitu dengan menerapkan sebuah sistem pengembangan standar yang ditujukan untuk menjadikan karyawan memiliki integritas, kualitas dan profesionalitas di bidangnya.

Human Capital is an important asset for a company to improve the performance of the company, therefore continuously conducted employee development to improve the quality of human resources, namely, by applying a standard development system aimed at making employees have integrity, quality and professionalism in their fields.

Pada saat ini profil karyawan PT INTI digambarkan dalam grafik di bawah ini:

At this time the employee profile PT INTI represented in the graphic below:

1. Jumlah Karyawan berdasarkan Jabatan
The Number of Employees by Position

JABATAN Position	2013		2014	
	JUMLAH The Amount	%	JUMLAH The Amount	%
PROJECT EXECUTIVE	2	0.28%	-	-
KEPALA DIVISI Chief of Division	19	2.63%	20	3%
KEPALA BAGIAN Manager	79	10.93%	65	8%
KEPALA URUSAN Supervisor	152	21.02%	117	15%
STAF Staff	471	65.15%	575	74%
TOTAL	723		777	

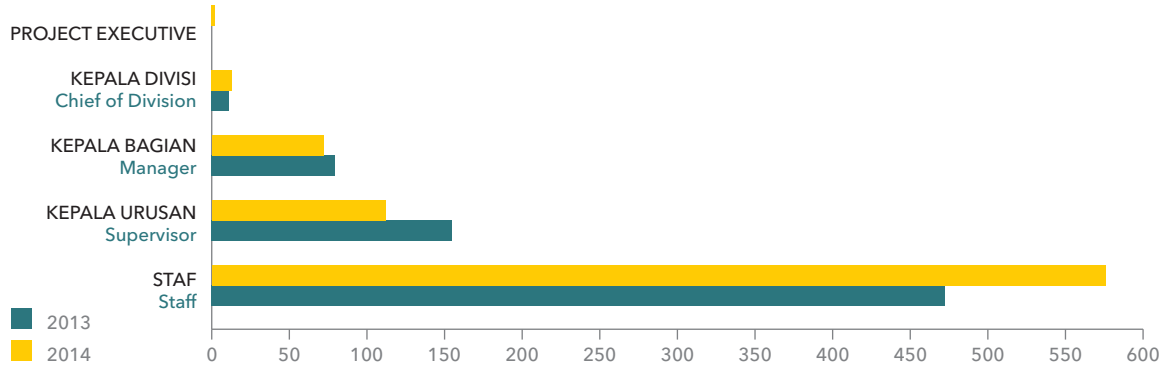

2. Jumlah Karyawan berdasarkan Pendidikan
The Number of Employees by Education

PENDIDIKAN Position	2013 JUMLAH The Amount	2014 JUMLAH The Amount
SLTA Senior High School	347	335
D3 / Akademi Diploma non-degree	53	61
S1 Bachelor Graduate	288	344
S2, S3 Master, Doctoral	35	37
TOTAL	723	777

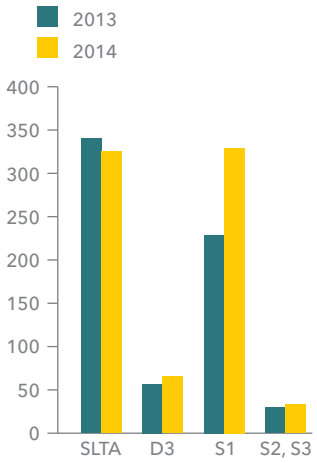

3. Jumlah Karyawan berdasarkan Usia
The Number of Employees by Age

USIA Age	2013 JUMLAH The Amount	2014 JUMLAH The Amount
<= 30	169	201
31 - 40	25	58
41 - 50	464	292
51 - 55	65	226
TOTAL	723	777

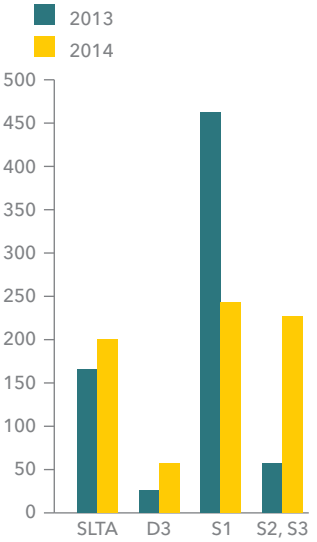

4. Jumlah Karyawan berdasarkan Jabatan Proyek
The Number of Employees by Project Position

JABATAN Position	2014 JUMLAH The Amount	2014 %
GENERAL PROJECT MANAGER	-	-
SENIOR PROJECT MANAGER	21	17.6%
PROJECT MANAGER	46	38.7%
PROJECT COORDINATOR	52	43.7%
TOTAL	119	

5. Profil Karyawan Per Sub-stream
Employees on Sub-stream

ACTIVITY	MAIN STREAM	SUB STREAM	JUMLAH KARYAWAN Number of Employee
PRIMARY ACTIVITIES	Sales & Marketing	Sales	25
		Marketing	19
	Operation & Project Management	Project Management	182
		Operation	176
	IT & Engineering	Telecommunication	18
		Electronic	15
		IT	45
		Energy	3
	Production	Production	26
	Business & Product Management	Product Management	10
		Business Development	8
	Logistic	Procurement & Logistic	46
SUPPORT ACTIVITIES	Finance	Finance	42
		Accounting	20
	General Affair	Human Capital Management	28
		Legal	8
		Building Management	15
		Corporate Secretary	22
		Administration	51
	Audit & Risk Management	Risk Management	1
		Audit	17
JUMLAH The Amount			777

DIAGRAM PROSENTASE KARYAWAN PER SUB-STREAM
Percentage Chart of Employee on Sub-stream

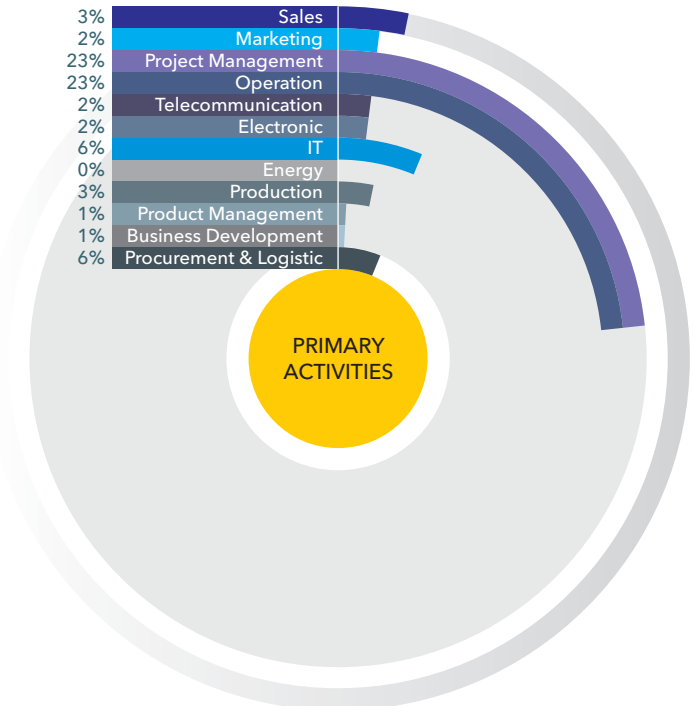

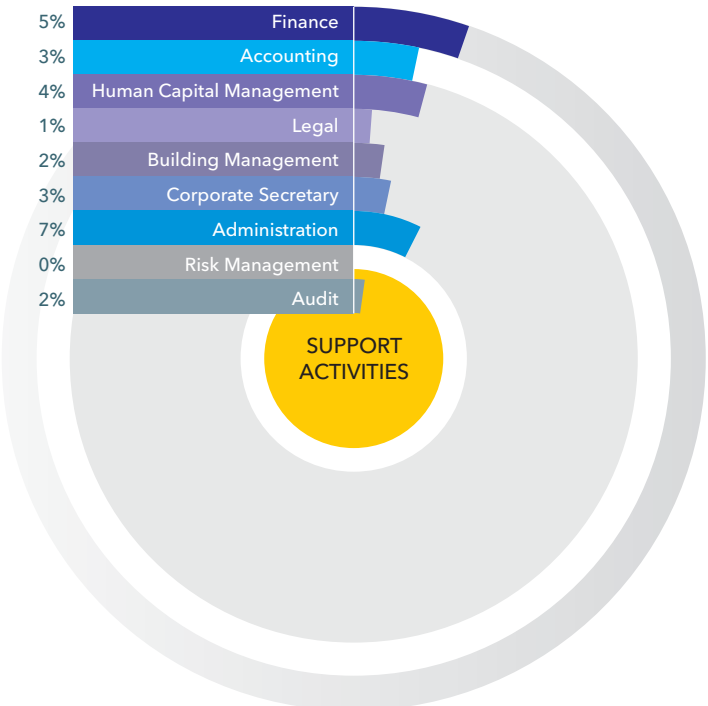

Rekrutment 2014
2014 Recruitment

Rekrutmen karyawan pada tahun 2014 adalah sebanyak 103 orang yang bertujuan untuk memenuhi Kebutuhan Kegiatan Proyek dan Pengembangan Produk:

Recruitment of employees in 2014 was as much as 103 people which aims to fulfill on supplies for Project Activity and Product Development:

KEBUTUHAN TENAGA KERJA Employees Needs	2014	
	DIVISI Division	JUMLAH The Amount
PENGEMBANGAN PRODUK Product Development	PENGEMBANGAN PRODUK Product Development	6
IT (TECHNICAL SUPPORT)	PEMBANGUNAN & OPERASI SMP BBM SMP BBM Operational & Development	8
TECHNICAL SUPPORT ENGINEER	PROJECT 1	24
TECHNICAL SUPPORT ENGINEER	PROJECT 2	26
SEKRETARIS Secretary	SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary	2
MANAGEMENT TRAINEE	SELURUH DIVISI All Division	37
TOTAL		103

- Adanya Penerimaan karyawan baru jalur MT sebanyak 37 orang.
- Adanya PKWT untuk tenaga proyek sebanyak 66 orang; yang terdiri dari:
  - Technical Support untuk Proyek SMP BBM sebanyak 8 orang.
  - Tenaga Proyek untuk Proyek TITO sebanyak 50 orang.
  - Tenaga IT Engineer untuk Pengembangan Produk sebanyak 6 orang.
  - Sekretaris sebanyak 2 orang.

- The existence of a new employee Acceptance by MT path as many as 37 people.
- The existence PKWT to project workers as many as 66 people; consisting of:
  - Technical Support for SMP BBM Project by 8 people.
  - Project Workers to TITO Project by 50 people.
  - IT Engineer for Product Development as many as 6 people.
  - Secretary by 2 people.

Pengembangan Karyawan melalui Pendidikan dan Pelatihan
Employee Development through Education and Training

PELATIHAN DI TAHUN 2014
Training in 2014

PELATIHAN Training	2012	2013	2014
JUMLAH JUDUL PELATIHAN Number of Training Title	78	81	73
JUMLAH PESERTA PELATIHAN Number of Training Members	595	750	874

PELATIHAN 2014 BERDASARKAN STREAM PELATIHAN

Pelatihan yang diadakan terutama untuk mendukung kegiatan proyek, meningkatkan kemampuan teknis, meningkatkan kemampuan Pemasaran.

TRAINING BY STREAM IN 2014

The training was held primarily to support the project activities, upgrading technical capabilities, and marketing improvement.

BIDANG PELATIHAN Training Field	JUMLAH PESERTA Members	TRAINING
AUDIT	22	AUDIT
FINANCE	22	FINANCE
HUKUM	2	LEGAL
MANAJEMEN	55	MANAGEMENT
MANAJEMEN PROYEK	121	PROJECT MANAGEMENT
MPP	13	MPP
GCG	378	GCG
PEMASARAN	97	MARKETING
PENGADAAN	10	LOGISTIC
SDM	3	HRD
TEKNIK	146	TECHNIC
K3	5	K3
TOTAL	874	

Pelatihan yang terkait dengan Teknologi di antaranya adalah:
- E-KTP- Reader
- Basic Training of Solar Power
- ITIL Language
- IT Project Management
- IT Smart Building
- LINUX Embedded System
- Microcontroller
- MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
- IT Masterplan & IT Governance

Training related to the technology which are:
- E-KTP- Reader
- Basic Training of Solar Power
- ITIL Language
- IT Project Management
- IT Smart Building
- Embedded LINUX System
- Microcontroller
- MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
- IT Masterplan & IT Governance

Pelatihan yang berhubungan dengan Manajemen Proyek di antara adalah:
- Manajemen Proyek
- Successful Project Management
- Perpindahan Material Project di SAP
- Pelatihan Pengawas Lapangan

Training related to Project Management which are:
- Project Management
- Successful Project Management
- Transfer of Material TProject in SAP
- Field Supervisor Training

Pelatihan yang berhubungan dengan Pemasaran di antara adalah:
- Strategic Marketing Plan
- Kelayakan Investasi
- Key Account Management
- Sales Supervisor Development Program

Training related to Marketing which are:
- Strategic Marketing Plan
- Investment Feasibility
- Key Account Management
- Sales Supervisor Development Program

PROSENTASE PELATIHAN 2014
Training Percentage 2014

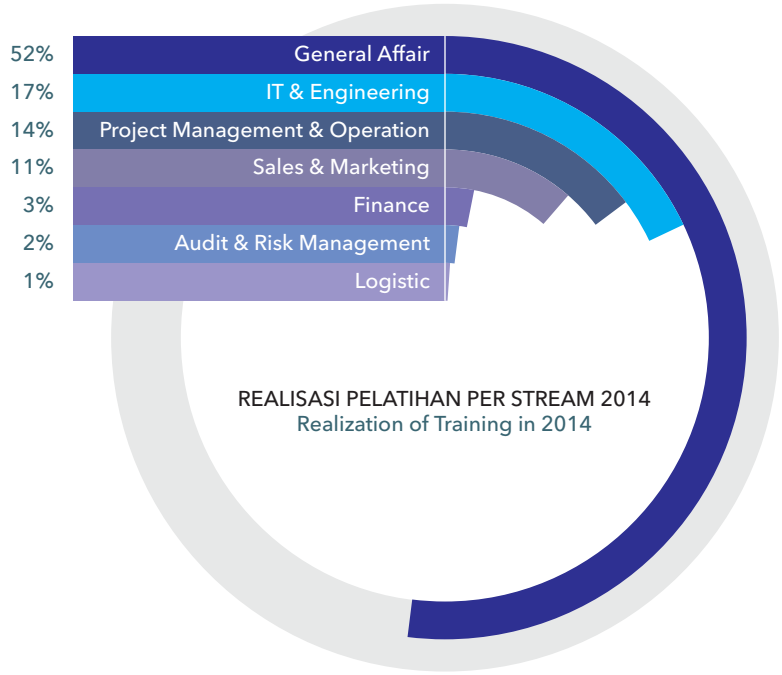

Setiap karyawan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelatihan yang di selenggarakan oleh perusahaan.

Every employee has the same rights to acquire the training which was held by the company.

Realisasi total biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2014 adalah berjumlah Rp. 268.597.500 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Realization of the total training costs incurred by the company in 2014 was amounted to Rp. 268,597,500 (two hundred and sixty eight million five hundred and ninety-seven thousand five hundred rupiah).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Safety & Health

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karyawan merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar, keselamatan berarti suatu keadaan dimana seseorang terbebas dari peristiwa celaka dan nyaris celaka. Sedangkan kesehatan memiliki arti tidak hanya terbebas dari penyakit namun juga sehat atau sejahtera secara fisik, mental serta sosial.

Occupational Health and Safety (K3) the employee is a non-negotiable demands , safety means a state where a person is free from harm events and near misses . While health means not only the absence of disease but also healthy or prosperous physically , mentally and socially.

Kaitan dengan ini Perusahaan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang memiliki program kerja diantaranya menyempurnakan kondisi dan tindakan kerja serta syarat - syarat lingkungan kerja yang aman, sehat dan ramah lingkungan guna mencegah kecelakaan kerja, menghindari penyakit akibat kerja & pencemaran lingkungan.

According to this one, the Company has formed a committee of Trustees of Occupational Safety and Health (P2K3) which has a work program and action of which improve the working conditions and terms of work environment that is safe, healthy and environmentally friendly in order to prevent occupational accidents , occupational diseases and avoid environmental pollution .

Direksi menetapkan SKD.200/KP.00/010704/2012 pembentukan TIM Kesiagaan menghadapi keadaan Tanggap Darurat dan Bencana.

The Board of Directors statement the decree SKD.200/KP.00/010704/2012 about establishing a Team of Emergency Preparedness and Disaster.

Aktivitas yang dilakukan:
- Menyelenggarakan rapat bulanan pengurus & anggota Tim P2K3.
- Melakukan inspeksi kerja dan analisa/ Identifikasi potensi bahaya secara berkala ke lokasi kerja, kantin gudang, halaman, Pool kendaraan dan lain-lain.
- Melaksanakan Assessment/Audit SMK3 dan menyelesaikan tindak lanjut atas temuan-temuan yang muncul.
- Membuat Buku Saku K3 bagi pekerja di lapangan Proyek Sistem Monitoring Pegendalian Bahan Bakar Minyak (SMPBBM) Pertamina & HSE Plan.
- Pengarahan Khusus kepada pengelola kantin & pedagang akan bahaya Borak, Zat pewarna, Formalin pentingnya menjaga kebersihan & perhatian akan Gas Elpiji serta Listrik.
- Sosialisasi K3 pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta memasang rambu-rambu K3
- Training K3 kepada Calon pelatih K3/tim HSE untuk proyek SMPBBM dilapangan & praktek penggunan APAR dan Alat Pelindung Diri (APD).
- Monitoring Pengendalian Health Safety Environment proyek SMPBBM Pertamina.
- Proses Audit KPKU oleh pihak Kementerian BUMN sesuai peraturan dan menyelesaikan tindak lanjut atas temuan-temuan yang muncul.
- Melakukan inspeksi/pemeriksaan kelengkapan dan unjuk kerja terkait aspek K3 dan lingkungan dalam rangka sosialisasi dan pemasangan peralatan-peralatan proyek SMPBBM.
- Melakukan pemantauan K3 dengan target mencapai Zero Accident

Activities carried out :
- Organizing committee and monthly meetings for P2K3 team members.
- Perform inspections of work and analysis/ identification of potential hazards on a regular basis to work sites, warehouses cafeteria, courtyard, pool and other vehicles.
- Implement Assessment / Audit SMK3 and completed follow-up on findings that emerged.
- Making K3 Handbook for on site workers of SMP BBM Project of Pertamina & HSE Plan.
- Point Briefing to the cafeteria manager and the merchant about hazard of borak, dyes, Formalin importance of maintaining cleanliness and attention to LPG Gas and Electric.
- Procure K3 light fire extinguisher (APAR) and put up signs K3 sosialization.
- K3 Training for Prospective coaches SMPBBM K3/ HSE team to project on site and practice the use of APAR and Personal Protective Equipment (APD).
- Health Safety Environment Monitoring Control of SMPBBM Pertamina projects .
- KPKU audit process by the Ministry of SOEs according to the rules and complete the follow up of the findings that emerged.
- Perform inspection/ examination completeness and performance related aspects of K3 and environment in order to socialize and installation of equipment SMPBBM project .
- Monitoring the K3 by a target of achieving Zero Accident.

Tinjauan Keuangan
Financial Overview

Sepanjang perjalanan lima tahun sejak 2008 sampai dengan 2013, Perusahaan telah membukukan tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan gabungan (CAGR) tidak kurang dari 13,9% per tahunnya. Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Perusahaan, dimana sejumlah faktor eksternal dan internal telah mengakibatkan pencapaian kinerja keuangan Perusahaan kurang menggembirakan. Pendapatan Perusahaan di tahun 2014 sebesar Rp. 817,9 Milyar merupakan pencapaian 44,2% dari pencapian tahun 2013 yang berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp. 1.466,8 Milyar. Perubahan rancangan teknologi menjadi jaringan kabel optik berbasis teknologi Fiber To The Home (FTTH) yang wajib diimplementasikan dalam Proyek TITO telah menimbulkan kerumitan teknis dan non-teknis dalam implementasi proyek, mengingat pemanfaatan teknologi FTTH mengharuskan penyelesaian pekerjaan berupa instalasi kabel optik sampai di rumah pelanggan. Sebuah kompleksitas yang tinggi dibandingkan implementasi berbasis teknologi Multi Services Access Network (MSAN) yang digunakan di awal Proyek TITO, dimana instalasi kabel optik hanya sampai ke rumah kabel dan selanjutnya instalasi sampai ke rumah pelanggan tetap menggunakan jaringan kabel tembaga eksisting. Kompleksitas ini dirasakan dampaknya di tahun 2014 dimana progres implementasi proyek mulai didominasi oleh aktivitas instalasi kabel rumah sehingga progres proyek secara keseluruhan mulai melambat dan berdampak pada pencapaian pendapatan yang rendah.

Rendahnya pencapaian pendapatan berdampak pada rendahnya pencapaian laba kotor dari Proyek TITO. Selain itu, meningkatnya beban pendanaan yang dipicu oleh melambatnya progres penyelesaian pekerjaan juga mengakibatkan tekanan kuat terhadap kemampulabaan Perusahaan, di samping tekanan lainnya yang diakibatkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar mengingat sebagian

In the five years from 2008 to 2013, the Company has recorded a compound annual growth rate (CAGR) on revenue of not less than 13.9% per year. 2014 was a challenging year for the Company, in which a number of external and internal factors have resulted in the less encouraging achievement of the Company's financial performance. Company revenues in 2014 amounted to Rp. 817.9 billion is 44.2% of the 2013 achievement which recorded a revenue of Rp. 1466.8 billion. Changes in technology design into Fiber To The Home (FTTH) based technology, which shall be implemented in TITO Project, has raised the complexity of technical and non-technical aspects in the implementation of the project, considering the use of FTTH technology requires the completion of work in the form of optical cable installation up to the customer's home. A high complexity compared to the implementation of technology-based Multi Services Access Network (MSAN) used in early TITO Project, where optical cable was installed up to the house wiring only and installation to the customer's home was using the existing copper cable network. This complexity impacted to 2014 performance when the progress of project implementation began to be dominated by the home wiring installation activities so that the progress of the project as a whole began to slow down and have an impact on the achievement of a low revenue.

This low realization of the revenue resulted in low achievement of gross profit of TITO Project. In addition, the increasing financing costs triggered by the increasing time of progress completion also resulted in strong pressure on the profitability of the Company, in addition to other pressures caused by the weakening of the rupiah against the US dollar since most devices for TITO project is imported materials, as well as the weakening of the world copper price regarding one

perangkat untuk Proyek TITO adalah material impor, serta melemahnya harga tembaga dunia mengingat salah satu komponen pendapatan dari Proyek TITO adalah pendapatan dari penjualan scrap tembaga yang penetapan nilainya mengacu pada harga tembaga menurut London Metal Exchange (LME) untuk pengiriman 3 bulan ke depan.

component of the TITO project incomes is coming from the sale of scrap copper in which the determination of its value refers to the London Metal Exchange (LME) copper price for 3-months delivery.

Tekanan financial terhadap kemampulabaan Perusahaan juga diakibatkan oleh belum adanya kepastian atas kelanjutan Proyek Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMP BBM) setelah perubahan kebijakan Pemerintah atas pengendalian subsidi BBM, sehingga manajemen pada tahun 2014 secara konservatif melakukan pembebanan penurunan nilai atas aset yang telah dibangun untuk pengoperasian sistem monitoring dan pengendalian ini. Diharapkan nilai aset ini akan terpulihkan pada saat diperoleh kepastian atas kelanjutan Proyek SMP BBM, termasuk opsi penghentian proyek dengan kesepakatan yang tidak merugikan Perusahaan.

Financial pressure ressure on company profitability is also caused by the lack of certainty over the continuation Fuel Monitoring and Controlling Systems (SMP BBM) Project after the change in government policy on fuel subsidy control, so that the management in 2014 conservatively perform an impairment of assets that have been built for the operation of this monitoring and controlling system. Value of this asset is expected to be recovered at the time of certainty is obtained over the continuation this project, including the option of project termination that is not adverse to the Company.

Faktor-faktor tersebut secara dominan memberikan tekanan kuat terhadap kemampulabaan Perusahaan sehingga secara keseluruhan Perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar Rp. 265,8 Milyar di tahun 2014, jauh di bawah pencapaian tahun 2013 yang berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp. 4,3 Milyar.

These factors are dominant, strong pressure against the Company profitability so that the Company had suffered a net loss of Rp. 265.8 billion in 2014, far below that achieved in 2013 which had a net profit of Rp. 4.3 billion.

Mengantisipasi kondisi yang kurang menggembirakan tersebut, manajemen telah melakukan beberapa inisiatif untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan. Untuk mengantisipasi risiko beban pendanaan yang semakin tinggi, manajemen telah menegosiasikan pola pembayaran yang lebih baik untuk Proyek TITO, dimana ditambahkan termin pembayaran sebesar 70% berdasarkan progres pekerjaan yang telah diserahterimakan, sebagaimana dituangkan dalam 'Amandemen Perjanjian Keempat terhadap Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga melalui Optimalisasi Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola TITO' No. K.TEL180/HK.820/CRMGA-002014/2014 tertanggal 4 Juni 2014.

Anticipating such unfavorable conditions, management has undertaken several initiatives to guarantee company business continuity. To anticipate the risk of higher financing costs, management has negotiated a better term of payment for TITO Project, which was added by 70% payment terms based on progress completion that has been handed over, as stated in the 'Amandemen Perjanjian Keempat terhadap Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga melalui Optimalisasi Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola TITO' No. K.TEL180/HK.820/CRMGA-002014/2014 dated 4 June 2014.

Manajemen juga mengupayakan kesepakatan atas kelanjutan atas proyek SMP BBM, termasuk alternatif penghentian kontrak No.15/C00000/2013-53 tanggal 28 Agustus 2013 dengan opsi penghentian yang tidak merugikan Perusahaan, dimana terdapat penggantian atas biaya dan investasi yang telah dikeluarkan.

Management is also doing the best efforts to follow up the SMP BBM project, including alternatives to terminate the Contract No. 15/C00000/2013-53 dated August 28, 2013 with a termination option that is not detrimental to the Company, where there is a reimbursement of expenses and investments that has been made.

Dengan upaya-upaya tersebut manajemen yakin bahwa Perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dan selanjutnya melakukan pengembangan bisnis sebagaimana harapan para pemangku kepentingan.

With such efforts, management believes that the Company will be able to maintain its business continuity and subsequently conduct the business development as expected by all of its stakeholders.

Analisis Kinerja Keuangan
Analysis of Financial Performance

1. PENDAPATAN

Selama tahun 2014, perusahaan berhasil membukukan Pendapatan Neto sebesar Rp. 817.889,79 juta menurun 44,24% dibanding tahun 2013. Pendapatan ini masih berasal dari lini bisnis Integrator Sistem, IT Capex to Opex, Manitenance dan Produk Genuine.

1. REVENUE

During 2014, the company recorded a net income of Rp. 817,889.79 million decreased 44.24% compared to 2013. This revenue is derived from business lines Integrator System, IT Capex to Opex, manitenance and Genuine Products.

2. BEBAN POKOK PENJUALAN

2. COST OF GOODS SOLD

Tabel Komparasi Pendapatan 2014 dan 2013
Comparative Table of Income in 2014 and 2013

BEBAN POKOK PENJUALAN Cost of Goods Sold	2014		2013	
	Rp	% KONTRIBUSI %Contribution	Rp	% KONTRIBUSI %Contribution
BEBAN PRODUKSI Production Expenses	1,127,714,858	0.14%	2,677,425,613	0.21%
BEBAN PROYEK Project Expenses	794,827,581,499	99.86%	1,243,000,987,688	99.79%
JUMLAH The Amount	790,849,869,105	100.00%	1,245,678,413,301	100.00%

Beban Pokok Penjualan di tahun 2014 Rp. 790.849,87 juta atau 96,69% dari penjualan terutama terbesar dari beban pemakaian barang jadi dan pemborongan pekerjaan jasa.

Cost of goods sold in 2014 to Rp. 790,849.87 million or 96.69% of sales primarily use most of the burden of finished goods and chartering services.

3. BEBAN USAHA

3. OPERATING EXPENSES

BEBAN USAHA Operating Expenses	2014		2013	
	Rp	% KONTRIBUSI %Contribution	Rp	% KONTRIBUSI %Contribution
BEBAN UMUM & ADMINISTRASI General & Administration Exp.	(91,209,266,432)	74.55%	(92,469,525,787)	74.89%
BEBAN PEMASARAN Marketing Expenses	(23,684,390,414)	19.36%	(24,229,665,013)	19.62%
BEBAN PENGEMBANGAN Development Expenses	(7,456,908,144)	6.09%	(6,780,218,014)	5.49%
JUMLAH The Amount	(122,350,564,990)	100.00%	(123,479,408,814)	100.00%

Secara umum Beban Usaha di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.128,84 juta dikarenakan perusahaan berhasil untuk mulai menerapkan program efisiensi seperti penurunan beban seminar dan pelatihan pegawai dimana perusahaan saat ini lebih selektif mengikutkan karyawan untuk seminar dan pelatihan yang terkait proyek yang berguna meningkatkan pendapatan perusahaan dan serangkaian program efisiensi di beban administasi dan rumah tangga.

Beban Umum Adm di tahun 2014 Rp. 91.209,26 juta ,turun 1,36 % atau Rp. 1.260,26 juta dari tahun 2013 Rp. 92.469,52 juta. Penurunan terutama dikarenakan oleh penurunan beban seminar dan pelatihan pegawai, beban kualitas serta beban penyusutan aset tetap dikarenakan aset-aset yang telah habis umur ekonominya di tahun sebelumnya.

Beban Pemasaran di tahun 2014 Rp. 23.684,39 juta, turun 2,25 % atau Rp. 545,28 juta dari tahun 2013 Rp. 24.229,67 juta, penurunan terutama dikarenakan oleh penurunan beban seminar dan pelatihan serta penurunan beban administrasi dan rumah tangga sebagai salah satu bentuk keberhasilan program efisiensi selama tahun 2014.

Beban Pengembangan di tahun 2014 Rp. 7.456,91 juta, naik 9,98 % atau Rp 676,69 juta dari tahun 2013 Rp. 6.780,22 juta. Kenaikan terutama berasal dari kenaikan beban kesejahteraan pegawai, administrasi dan rumah tangga, serta pemeliharaan dan perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk.

4. BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain di tahun 2014 terbesar terutama dari:

- Penurunan nilai aset SMP BBM (Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak) Pertamina Rp. 63.466,06 juta, Proyek SMP BB Pertamina saat ini masih dievaluasi keberlangsungannya dikarenakan adanya Perpres No. 141/2014 mengenai pembatasan BB bersubsidi . PT Petamina (Persero) belum memastikan kelanjutan proyek tersebut, sehingga manajemen merasa perlu untuk melakukan impairment atas ketidakpastian arus ekonomi masa depan.
- Kenaikan dari penurunan nilai piutang ragu- ragu, di tahun 2014 penurunan nilai piutang ragu-ragu sebesar Rp. 15.022,54 juta, adalah penurunan piutang ragu2 proyek HMIS yang kemungkinan besarnya tidak tertagih.

In general, Operating Expenses in 2014 decreased by Rp. 1128.84 million because the company managed to start implementing efficiency programs such as a decrease in employee training seminars where companies today are more selective to include employees to seminars and training related to the project is useful to enhance the company's revenue and a series of programs in the efficiency of administrative burden and households.

General & Adm. Expenses in 2014 Rp. 91,209.26 million, down 1.36% or Rp. 1260.26 million from 2013 Rp. 92,469.52 million. The decrease is mainly due to a decrease in seminars and training of employees, as well as the quality of the burden of fixed assets depreciation expense due to assets that have been depleted in the economic life of the previous year.

Marketing Expenses in 2014 Rp. 23,684.39 million, down 2.25% or Rp. 545.28 million from 2013 Rp.24.229,67 million, a decrease mainly due to a decrease in seminars and training as well as decrease the administrative burden and households as one of the success of the efficiency program for 2014.

Development Expenses in 2014 Rp. 7,456.91 million, up 9.98% or Rp. 676.69 million from 2013 Rp. 6,780.22 million. The increase came mainly from the increase in the burden of employee welfare, administration and households, as well as maintenance and repairs related to product development activities.

4. OTHER EXPENSES

Other Expenses in 2014 most notably from:

- Asset impairment of SMP BBM (Fuel Monitoring and Controlling System) Pertamina Rp. 63,466.06 million, SMP BB Pertamina Project is still evaluated continuity due to Presidential Decree No. 141/2014 regarding restrictions on the subsidized fuel. PT Pertamina (Persero) has not ensure the continuation of the project, so that the management felt the need to perform impairment on the uncertainty of future economic flows.

- The increase of impairment for doubtful accounts, in 2014 impairment for doubtful accounts of Rp. 15,022.54 million, is the decrease in receivables ragu2 HMIS projects are likely size of uncollected.

Analisis Posisi Keuangan
Analysis of Financial Position

1. ASET

Di tahun 2014, Total Aset perusahaan adalah Rp. 1.734.417,53 juta yang terdiri dari 88,33 % Aset Lancar dan 11,67% Aset Tidak Lancar. Nilai Total Aset ini menurun sebesar Rp. 88.245,89 juta atau 4,84% dari Rp. 1.822.663,43 juta pada tahun 2013.
Peningkatan aset tersebut terutama didorong peningkatan aset tidak lancar.

Aset Lancar

Aset Lancar perusahaan menurun 7,25% dari Rp 1.639.138,25 juta pada tahun 2013 ,menjadi Rp 1.520.342,11 juta di tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha sebagai akibat dari menurunnya pengakuan penjualan.

1. ASSETS

In 2014, total assets of the company is Rp. 1,734,417.53 million consisting of 88.33% and 11.67% Current Assets Current Assets. The total value of these assets decreased by Rp. 88,245.89 million or 4.84% from Rp. 1,822,663.43 million in 2013.
The increase in assets was primarily driven by higher non-current assets.

Current Assets

Current assets of the company decreased 7.25% from Rp 1,639,138.25 million in 2013, to Rp. 1,520,342.11 million in 2014. This was mainly due to the decrease in accounts receivable as a result of declining sales recognition.

KOMPOSISI ASET LANCAR
Composition of Current Assets

ASET LANCAR Current Assets	2014 (Rp.)	2013 (Rp.)	%
KAS DAN SETARA KAS Cash and cash equivalents	45,668,364,932	118,932,027,544	-61.60%
PIUTANG USAHA Account receiveables	55,202,969,529	105,564,739,182	-47.71%
PIUTANG LAIN-LAIN Other receiveables	85,539,248	105,742,973	-19.11%
PERSEDIAAN Inventories	404,427,005,401	483,154,830,069	-16.29%
PAJAK DIBAYAR DI MUKA Prepaid tax	30,495,494,681	124,696,061,994	-75.54%
BEBAN DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA Prepaid expenses and Down Payments	12,728,980,441	16,723,574,913	-23.89%
ASET LANCAR LAINNYA Other current assets	971,733,757,313	789,961,274,361	23.01%
JUMLAH ASET LANCAR Total Current Assets	1,520,342,111,544	1,639,138,251,036	-7.25%

Piutang Usaha - Neto

Penurunan saldo Piutang Usaha - Neto dari Rp.105.564,74 juta di tahun 2013 atau turun sebesar Rp. 50.361,77 juta menjadi Rp. 55.202,97 juta di tahun 2014. Komposisi Piutang Usaha - Bersih di tahun ini terdiri dari:
a. Piutang difaktur
- Piutang Telkom Rp. 1.961,77 juta
- Piutang Non Swasta Rp. 1.555,02 juta

Accounts Receivable - Net

Decrease in Accounts Receivable balance - Net of Rp.105,564.74 million in 2013, down Rp. 50,361.77 million to Rp. 55,202.97 million in 2014. The composition of Accounts Receivable - Net in this year consists of:
a. Billed Receivables
- Receivables of Telkom Rp. 1,961.77 million
- Receivables of non-Private Rp. 1,555.02 million

- Piutang Swasta Rp. 19.371,91 juta
- Piutang entitas anak Rp. 18.904,62 juta

b. Piutang belum difaktur Rp. 32.390,23 juta

Penurunan nilai piutang disebabkan pengakuan pendapatan atas proyek TITO menurun akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga penjualan yang bisa ditagihkan atau dibilling pun menurun. Proyek SMP BBM Pertamina yang diharapkan menjadi penjualan juga tidak terealisasi.

Akumulasi penurunan nilai piutang ragu-ragu perusahaan di tahun 2014 menjadi Rp. 18.923,05 juta. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang ragu-ragu tersebut meningkat 384,57% dibandingkan dengan tahun 2013 Rp. 3.905,14 juta.

Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya di tahun 2014 Rp, 971.733,76 juta terutama berasal dari tagihan bruto Proyek TITO dan FTTH Green Field sebesar Rp. 971.550,0 juta.
Aset lancar lainnya juga mencakup deposit sewa gedung sebesar Rp. 177,2 juta dan pendapatan yang masih harus diterima dari bunga deposito sebesar Rp. 6,5 juta.

Tagihan Bruto Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan selisih antara biaya yang terjadi, ditambah (dikurang) laba (rugi) yang diakui, dan termin penagihan atas kontrak-kontrak yang diakui berdasarkan persentase penyelesaian sampai dengan tanggal posisi keuangan sebagai berikut:

- Biaya kumulatif ditambah (dikurangi) laba (rugi) yang diakui sebesar Rp. 1.249.795,7 Juta;
- Termin penagihan yang telah diterbitkan dan aset yang telah diterima sebesar Rp. 278.245,7 Juta;
- Tagihan bruto kepada pemberi kerja sebesar Rp. 971.550,0 Juta.

- Private Accounts Rp. 19,371.91 million
- Due from subsidiaries Rp. 18,904.62 million

b. Unbilled Receivables Rp. 32,390.23 million

Impairment of receivables due to the recognition of revenue on TITO projects decreased due to delay completion of the work, so that sales can be charged or billed also decreased. Pertamina's SMP BBM project is expected to be selling well not be realized.

Accumulated impairment losses for doubtful accounts in 2014 to Rp. 18,923.05 million. Allowance for impairment losses for doubtful accounts is increased by 384.57% compared to 2013 Rp. 3,905.14 million.

Other Current Assets

Other current assets in 2014 USD, 971,733.76 million mainly derived from gross invoice TITO and FTTH Project Green Field Rp. 971,550.0 million.
Other current assets also include building rental deposits amounting to Rp. 177.2 million and accrued income from interest on deposits amounting to Rp. 6.5 million.

Gross Invoice to The Employer

Gross invoice to the employer is the difference between the costs incurred, plus (minus) income (loss) are recognized, and billing terms on contracts are recognized based on the percentage of completion as of the date of financial position as follows:

- Cumulative costs plus (minus) income (loss) recognized Rp. 1,249,795.7 million;
- Billing terms that have been issued and the assets that have been received Rp. 278,245.7 million;
- Gross invoice to the employer Rp. 971,550.0 million.

TAGIHAN BRUTO Gross Invoice	2014 (Rp.)	2013 (Rp.)
BEBAN KONTRAK KUMULATIF Cumulative Expenses	1,157,266,857,661	683,701,051,516
LABA (RUGI) KUMULATIF YANG DIAKUI Recognized Income (Loss)	92,528,814,320	159,652,627,531
	1,249,795,671,981	843,353,679,047
PENERBITAN TERMIN KUMULATIF Cumulative Billing Terms	(278,245,655,239)	(63,048,618,126)
JUMLAH TAGIHAN BRUTO The Amount of Gross Invoice	971,550,016,742	780,305,060,921

Tagihan bruto tahun 2014 sebesar Rp. 971.550,02 juta, hanya meningkat 24,51% atau sebesar Rp. 191.244,96 juta dibanding tahun 2013.

Gross bill in 2014 to Rp. 971,550.02 million, only increased by 24.51% or Rp. 191,244.96 million compared to the year 2013.

Aset Tidak Lancar

Non Current Assets

KOMPOSISI ASET TIDAK LANCAR
Composition of Non-Current Assets

ASET TIDAK LANCAR Non-Current Assets	2014 (Rp.)	2013 (Rp.)	%
ASET TETAP Fixed Assets	31,949,592,628	40,601,266,554	-21.31%
PENYERTAAN JANGKA PANJANG Long Term Investment	21,442,972,842	21,442,972,842	0.00%
PROPERTI INVESTASI Property Investment	1	1	0.00%
ASET TAK BERWUJUD & ASET DALAM PEMBANGUNAN Intangible Assets	53,196,270,922	93,717,673,438	-43.24%
ASET PAJAK TANGGUHAN Deferred Tax Assets	77,785,454,921	27,625,113,617	181.58%
ASET LAIN-LAIN Other Assets	153,148,109	138,148,046	10.86%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR Total Non-Current Assets	184,527,439,423	183,525,174,498	0.55%

Aset tidak lancar meningkat sebesar 0,55% dari Rp. 183.525,17 juta di tahun 2013, menjadi Rp. 184.527,44 juta di tahun 2014.

Non-current assets increased by 0.55% from Rp. 183,525.17 million in 2013, to Rp. 184,527.44 million in 2014.

Aset Tetap - Neto

Aset Tetap Neto mengalami penurunan sebesar 21,31% dari Rp. 40.601,27 juta di tahun 2013, menjadi Rp. 31.949,06 juta di tahun 2014 terutama terbesar disebabkan aset proyek SM3 Rp.12.852,72 juta yang disewakan telah berakhir masa sewanya, dan dipindahbukukan ke persediaan selanjutnya untuk dijual, serta aset tetap yang rusak dan tidak dapat diperbaiki yang dipindahkan ke aset tetap non operasi sebesar Rp. 845,5 juta.

Fixed Assets - Net

Net Fixed Assets decreased by 21.31% from Rp. 40,601.27 million in 2013, to Rp. 31,949.06 million in 2014 primarily due to asset most SM3 Rp.12,852.72 million project for rent lease period has expired, and transferred to the next inventory for sale, as well as fixed assets are damaged and can not be repaired are moved to a non-operating fixed assets Rp. 845.5 million.

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Perusahaan dan Entitas anak terdiri dari:

Intangible Assets

Intangible assets of the company and its subsidiaries consist of:

	2014 (Rp.)	2013 (Rp.)
PRODUK PENGEMBANGAN Development Product	14,271,617,247	14,207,467,247
LISENSI RADAR Radar License	2,000,000,000	2,000,000,000
SOFTWARE Software	19,111,708,687	19,111,708,687
JUMLAH PRODUK PENGEMBANGAN The Amount of Development Product	35,383,325,934	35,319,175,934

Aset Dalam Pembangunan

Aset Dalam Pembangunan perusahaan dan entitas anak terdiri dari:

Assets Under Construction

Assets Under Construction of company and its subsidiaries consist of:

	2014 (Rp.)	2013 (Rp.)
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ARUS AIR LAUT Sea Flow Power Plant	1,000,000,000	1,000,000,000
KWH METER (MLPB PRIMA) Prepaid KWH Meter	1,476,067,020	1,101,921,090
POS SPBU Public Fuel's Retail Outlet (Gas Station)	2,496,623,936	2,351,453,801
LAINNYA (< 1 MILYAR) Others (< 1 Billion)	1,528,840,153	1,148,106,027
	6,501,531,109	5,601,480,918
ASET DALAM PEMBANGUNAN SMP BBM PERTAMINA Assets Under Construction of SMP BBM Pertamina	101,520,925,538	73,294,678,542
	108,022,456,647	78,896,159,460
DIKURANGI: AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD Minus: Amottization of Intangible Assets	(26,743,452,280)	(20,497,661,956)
DIKURANGI: PENURUNAN NILAI ASET SMP BBM PERTAMINA Minus: Assets Impairment of SMP BBM Pertamina	(63,466,059,379)	-
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD DAN ASET DALAM PEMBANGUNAN TOTAL Intangible Assets and Assets Under Construction	53,196,270,922	93,717,673,438

2. LIABILITAS

Perusahaan membukukan Total Liabilitas di akhir tahun 2014 sebesar Rp. 1.528.544,92 juta yang terdiri dari 95,52% Liabilitas Jangka Pendek dan 4,48 % Liabilitas Jangka Panjang. Nilai Total Liabilitas ini meningkat Rp. 148.052,24 juta atau 10,72 % dari Rp. 1.380.492,68 juta pada akhir tahun 2013. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama disebabkan peningkatan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

2. LIABILITIES

The company posted total liabilities at the end of 2014 amounted to Rp. 1,528,544.92 million consisting of 95.52% Liabilities Short-Term and Long-Term Liabilities 4.48%. The total value of these liabilities increased by Rp. 148,052.24 million or 10.72% from Rp. 1,380,492.68 million by the end of 2013. The increase in liabilities was primarily due to an increase in short-term and long-term liabilities.

Liabilitas Jangka Pendek

Short-Term Liabilities

KOMPOSISI LIABILITAS JANGKA PENDEK
Composition of Short-Term Liabilities

LIABILITAS JANGKA PENDEK Short-Term Liabilities	2014 (Rp.)	2013 (Rp.)	%
UTANG USAHA Accounts payable	319,790,784,921	629,309,943,427	-49.18%
UTANG BANK Bank debt	549,479,377,581	455,890,349,023	20.53%
UTANG PAJAK Tax debt	2,984,025,909	4,871,561,484	-38.75%
PROVISI MASA GARANSI Provision for waranty	8,746,094,717	8,268,267,185	5.78%
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Prepaid income	6,633,998,444	12,871,845,779	-48.46%
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Accrued Expenses	132,184,998,686	163,549,315,791	-19.18%
PINJAMAN MTN MTN Loan	395,000,000,000	40,000,000,000	887.50%
UTANG LAIN-LAIN Other payables	45,319,512,763	2,673,248,166	1,595.30%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK TOTAL Short-Term Liabilities	1,460,138,793,021	1,317,434,530,855	10.83%

Liabilitas Jangka Pendek naik 10,83% dari Rp. 1.317.434,53 juta di tahun 2013, menjadi Rp. 1.460.138,79 juta tahun 2014. Kenaikan jumlah Liabilitas Jangka Pendek terutama disebabkan meningkatnya MTN (Medium Term Notes) yang diterbitkan di tahun 2014 ,utang bank, dan Utang lain-lain. Meningkatnya utang lain-lain berasal dari utang akru PPh final konstruksi atas pendapatan progress proyek TITO periode 2014 Rp. 31.787,17 juta dan utang bunga pinjaman bank Rp. 11.685,52 juta.

Current Liabilities rose 10.83% from Rp. 1,317,434.53 million in 2013, to Rp. 1,460,138.79 million in 2014. The increase in the number of short-term liabilities is mainly due to increased MTN (Medium Term Notes), published in 2014, bank debt and other debt. Increased other payables derived from final accrued debt of income tax on income progress construction of TITO project period 2014 to Rp. 31787.17 million and bank loan debt of Rp. 11,685.52 million.

MTN atau Medium Term Notes (Seri A,B dan C) diterbitkan di tahun 2014 merupakan surat utang berjangka menengah 18 bulan. MTN ini digunakan untuk mendanai Proyek TITO . Proyek TITO adalah proyek pembangunan penggantian kabel tembaga lama akses telepon PT Telkom (Persero) dengan Fiber Optik yang dibangun oleh PT. INTI (Persero).

MTN or Medium Term Notes (Series A, B and C) was issued in 2014, is a medium-term bonds to 18 months. MTN is used to fund the TITO Project. TITO project is the construction of the replacement of the old copper wire telephone access PT Telkom (Persero) with Fiber Optics built by PT. INTI (Persero).

Liabilitas Jangka Panjang

Long-Term Liabilities

KOMPOSISI LIABILITAS JANGKA PANJANG
Composition of Long-Term Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG Long-Term Liabilities	2014 (Rp.)	2013 (Rp.)	%
LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA Post-employment benefit obligations	62,938,375,700	55,168,901,122	14.08%
PENDAPATAN DITANGGUHKAN deferred revenue	5,467,749,997	7,889,250,000	-30.69%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG The Amount	68,406,125,697	63,058,151,122	8.48%

Liabilitas Jangka Panjang meningkat sebesar Rp. 5.347,98 juta atau 8,48% dari Rp. 63.058,15 juta pada tahun 2013, menjadi Rp. 68.406,13 juta pada tahun 2014.

Long-term liabilities increased by Rp. 5,347.98 million or 8.48% from Rp. 63,058.15 million in 2013, to Rp. 68,406.13 million in 2014.

3. EKUITAS

3. EQUITY

BEBAN USAHA Operating Expenses	2014		2013		
	Rp	% KONTRIBUSI %Contribution	Rp	% KONTRIBUSI %Contribution	% NAIK/TURUN %Increase/Decrease
MODAL SAHAM Capital Stock	350,000,000,000	198.50%	350,000,000,000	79.15%	0%
SALDO LABA Retain Earning	(177,465,490,908)	-100.65%	88,494,256,333	20.01%	-300.54%
KEPENTINGAN NON PENGENDALI Non-Controlling Interests	3,790,123,156	2.15%	3,676,487,224	0.83%	3.09%
JUMLAH The Amount	176,324,632,248	100.00%	442,170,743,557	100.00%	-60.12%

Ekuitas menurun 60,12% atau Rp. 265.846,11 juta dari Rp.442.170,74 juta pada tahun 2013, menjadi Rp. 176.324,63 juta pada tahun 2014. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan yang dialami perusahaan sebesar Rp. 265 846,11 juta .

Equity decreased 60.12% or Rp. 265,846.11 million of Rp.442.170,74 million in 2013, to Rp. 176,324.63 million in 2014. The decrease was primarily due to the loss suffered by the company for the year amounted to Rp. 265,846.11 million.

Arus Kas
Cash Flows

	2014	2013	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Laba sebelum pajak konsolidasian	(275,014,060,760)	24,552,454,747	Consolidated income before tax
Penyesuaian atas unsur-unsur			**Adjustments to the elements**
yang tidak mempengaruhi arus kas:			**which do not affect cash flows:**
Penyusutan aset tetap	9,300,510,298	11,120,703,397	Depreciation of fixed assets
Penyisihan piutang usaha	15,017,917,421	3,817,887,490	Allowance for doubtful accounts
Penyisihan persediaan	(758)	4,427,971,759	Allowance for inventory
Rugi penurunan nilai investasi	-	-	Loss on impairment of investments
Amortisasi beban tangguhan	6,245,790,324	5,888,142,484	Amortization of deferred
Beban imbalan pasca kerja	13,943,102,995	14,210,680,570	Post-retirement benefits
Amortisasi pendapatan tangguhan - sewa lahan	(2,421,500,002)	(1,210,750,000)	Amortization of income deferred - land lease
Beban penurunan nilai - SMP BBM	63,466,059,379	235,056,192	Impairment charges - Junior Fuel
Beban lainnya	-		Other Expenses
Arus kas operasi	**(169,462,181,102)**	**63,042,146,639**	**Operating cash flow**
sebelum perubahan modal kerja			**before changes in working capital**
Perubahan modal kerja			**Changes in working capital**
Penurunan (kenaikan) aset lancar:			**Decrease (increase) in current assets:**
Piutang usaha	35,343,852,234	133,323,673,947	Accounts receivable
Piutang lain-lain	20,203,725	3,126,926,980	Other receivables
Persediaan	78,727,825,426	(152,365,434,311)	Supply
Pajak dibayar dimuka	(44,386,002,365)	(99,133,481,753)	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	3,994,594,473	(7,503,532,225)	Prepaid expenses
Aset lancar lainnya	(181,772,482,952)	(661,937,831,991)	Other current assets
Kenaikan (penurunan)			**Increase (decrease)**
liabilitas jangka pendek:			**Short-term liabilities:**
Utang usaha	(309,519,158,506)	516,155,586,358	Accounts payable
Utang pajak	(1,887,535,574)	(3,560,639,333)	Tax Debt
Provisi masa garansi	477,827,532	3,312,216,804	Provision for warranty
Pendapatan diterima dimuka	(6,237,847,335)	(11,208,222,307)	Prepaid income
Beban yang masih harus dibayar	(31,364,317,106)	44,941,254,093	Expenses are still must be paid
Utang lain-lain	42,646,264,597	(150,902,407)	Other payables
	(583,418,956,954)	**(171,958,239,507)**	
Pembayaran pajak penghasilan badan	(40,992,391,853)	(29,749,242,924)	Payment of taxes corporate income
Penerimaan pajak lebih bayar tahun 2011	-	7,666,987,148	Tax revenues overpayment of 2011
Penerimaan kelebihan pembayaran PPN	138,586,569,678	-	Acceptance of excess VAT payments
Kas bersih yang diperoleh	**(485,824,779,130)**	(194,040,495,283)	**Net cash provided by**
dari (digunakan untuk) aktivitas operasi			**from (used for) operating activities**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Perolehan aset tetap	(863,197,877)	(10,681,570,857)	Acquisition of fixed assets
Penyertaan jangka panjang	-	-	Long-term investments
Kenaikan beban ditangguhkan	(29,190,447,187)	(82,571,143,289)	Increase in deferred charges
Aset lain-lain	199,361,441	1,379	Other assets
Kas bersih yang digunakan	**(29,854,283,623)**	(93,252,712,767)	**Net cash used**
untuk aktivitas investasi			**investing activities**
ARUS KAS DARI			**CASH FLOWS FROM**
AKTIVITAS PENDANAAN			**FINANCING ACTIVITIES**
Perolehan utang bank	93,589,028,558	249,974,062,225	Acquisition of bank debt
Pinjaman Jangka Menengah MTN	355,000,000,000	40,000,000,000	MTN Medium Term Loans
Pembayaran kembali utang bank	-	-	Repayment of bank debt
Pembayaran imbalan pasca kerja	(6,173,628,417)	(6,675,071,759)	Payment of post-employment benefits
Pembagian laba	-	(150,000,000)	Distribution of profits
Kas bersih yang diperoleh	**442,415,400,141**	283,148,990,466	**Net cash provided by**
dari aktivitas pendanaan			**from financing activities**
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(73,263,662,612)	(4,144,217,584)	**Net Increase (decrease) in cash & cash equivalents**
Kas dan setara kas awal tahun	118,932,027,543	123,076,245,127	**Cash & cash equivalents at beginning of year**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**45,668,364,932**	**118,932,027,543**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR**

Laporan Arus Kas selama periode disusun menggunakan metode tidak langsung, terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi.

Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh:

a. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan.
b. Pos non kas seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan, keuntungan atau kerugian valas yang belum direalisasi serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan.
c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Posisi Kas dan Setara Kas perusahaan tahun 2014 menurun 61,60% atau Rp. 73.253,18 juta, menjadi Rp. 45.668,36 juta dibanding tahun 2013 Rp.118.932,03 juta. Penurunan tersebut terutama karena peningkatan penggunaan kas untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Di tahun 2015 perusahaan akan berusaha menyelesaikan sisa pembangunan proyek TITO, melanjutkan penyelesaian IKR (Instalasi Kabel Rumah) dan migrasi, serta melakukan percepatan penerimaan kas dengan cara percepatan penyelesaian dokumen yang diperlukan sebagai dasar uji terima, rekonsiliasi dan penerbitan BAST-1 sehingga INTI dapat melakukan penagihan ke TELKOM sehingga dananya dapat digunakan untuk menambah pembiayaan proyek dan operasional perusahaan. Diperkirakan pembangunan proyek TITO akan dapat dituntaskan pada bulan Juli 2015. Arus kas masuk lainnya diharapkan dari proyek SMP BBM Pertamina, walaupun PT. Pertamina (Persero) akan menghentikan proyek tersebut tapi akan dilakukan koordinasi secara intensif dengan pimpinan PT. Pertamina (Persero) tentang pembahasan kompensasi atas pembangunan aset monitoring BBM di banyak SPBU yang telah dikerjakan oleh PT. INTI sesuai ketentuan kontrak yang tepat dan tidak merugikan perusahaan.

Statement of Cash Flows for the period were prepared using the indirect method, consisting of operational activities, financing activities and investing activities.

In the indirect method, the net cash flow from operating activities is determined by adjusting the profit or net loss of influence:

a. Changes in inventories and accounts receivable and accounts payable during the period.
b. Heading non-cash such as depreciation, provisions, deferred taxes, foreign exchange gains or losses and unrealized profits are not distributed associates.
c. All other items related to investing or financing cash flows.

Cash and Cash Equivalents position the company in 2014 decreased 61.60% or Rp. 73253.18 million, to Rp. 45,668.36 million compared to the year 2013 Rp.118,932.03 million. The decrease was primarily due to an increase in the use of cash for operating activities and investing activities. In 2015 the company will try to finish the rest of the TITO project development, continued settlement IKR (Home Cable Installation) and migration, as well as to accelerate the receipt of cash by way of accelerating the completion of the necessary documents as a basis for test received, reconciliation and publishing BAST-1 so that INTI can do billing to TELKOM so that the funds can be used to finance the project and the company's operations. It is estimated that construction of the project will be completed TITO in July 2015. Other cash inflows expected from Pertamina's SMP BBM project, though PT. Pertamina (Persero) will stop the project but will be coordinated closely with the management of PT. Pertamina (Persero) for a discussion of compensation for the development of fuel monitoring assets in many SPBU that have been done by PT. INTI accordance with proper contract and does not disserved the company.

	2014 (Rp. Juta) (Rp. million)	2013 (Rp. Juta) (Rp. Million)	NAIK/TURUN Increase/Decrease
KAS DAN SETARA KAS Cash & Cash Equivalent	45,668.36	118,932.03	(73,253.18)
			-61.60%

Arus kas dari kelompok aktivitas operasional sebesar Rp. 485.824,78 juta di tahun 2014, naik penggunaannya 150,37% atau Rp. 291.773,81 juta dibanding tahun 2013 Rp. 118.932,03 juta.

The use of cash flows from operating activities amounted to Rp. 485,824.78 million in 2014, an increase of 150.37% or Rp. 291,773.81 million compared to the year 2013 Rp.118.932,03 million.

	2014 (Rp. Juta) (Rp. million)	2013 (Rp. Juta) (Rp. Million)	(NAIK/TURUN Increase/Decrease
AKTIVITAS OPERASIONAL Operational Activities	(485,824.78)	(194,040.50)	(291,773.81)
% NAIK/TURUN % Increase/Decrease			150.37%

Arus kas dari kelompok aktivitas investasi sebesar Rp. 29.854,28. juta di tahun 2014, menurun penggunaannya 67,99% atau Rp. 63.398,43 juta dibanding tahun 2013 Rp. 93.252,71 juta.

Cash flows from investing activities amounted to Rp.29,854.28. million in 2014, decreased use of 67.99% or Rp.63,398.43 million compared to 2013 Rp.93,252.71 million.

	2014 (Rp. Juta) (Rp. million)	2013 (Rp. Juta) (Rp. Million)	(NAIK/TURUN Increase/Decrease
AKTIVITAS INVESTASI Investing Activities	(29,854.28)	(93,252.71)	63,398.43
% NAIK/TURUN % Increase/Decrease			-67.99%

Arus kas dari kelompok aktivitas pendanaan sebesar Rp. 442.415,4 juta di tahun 2014, meningkat 56,25% atau Rp.159.266,41 juta dibanding tahun 2013 Rp. 283.148,99 juta terutama berasal dari penerimaan kredit dari Bank Mandiri dan BRI, penerbitan surat utang jangka menengah MTN.

Cash flows from financing activities group amounted to Rp. 442,415.4 million in 2014, an increase of 56.25% or Rp.159.266,41 million compared to 2013 Rp.. 283,148.99 million mainly derived from the proceeds of loans from Bank Mandiri and BRI, medium-term debt issuance MTN.

	2014 (Rp. Juta) (Rp. million)	2013 (Rp. Juta) (Rp. Million)	(NAIK/TURUN Increase/Decrease
AKTIVITAS PENDANAAN Financing Activities	442,415.40	283,148.99	159,266.41
% NAIK/TURUN % Increase/Decrease			56.25%

Kemampuan Membayar Utang
Solvency

Pinjaman MTN naik menjadi Rp. 395.000 juta dibanding tahun 2013 Rp 40.000 juta atau naik 887,5%. Utang Bank naik menjadi Rp. 549.479,38 juta dibanding tahun 2013 Rp. 455.890,35 juta atau naik 20,52%

MTN loans rose to Rp. 395,000 million compared to 2013 Rp. 40,000 million, up 887.5%. Bank debt rose to Rp. 549.479,38 million compared to 2013 Rp. 455,890.35 million, up 20.52%

Debt to Equity Ratio dari 314, 83% pada tahun 2013 menjadi 885,94% pada tahun 2014, yang menunjukkan peningkatan signifikan porsi pendanaan ekternal perusahaan dibandingkan pendanaan internal Perusahaan.

Debt to Equity Ratio of 314.83% in 2013 to 885.94% in 2014, which showed a significant increase in the share of funding for external companies than the Company's internal funding.

LIKUIDITAS UTANG
Liquidity debt

(IDR)

LIKUIDITAS UTANG 2014 Liquidity debt	JATUH TEMPO (tahun) | Due date (years)		
	1	1 - 2	2 - 5
UTANG USAHA Operating debt	319,790,784,921		
BYMHD	132,184,998,686		
UTANG BANK Bank Debt	549,479,377,581		
MTN	395,000,000,000		

Kolektibilitas Piutang
Collectibility of Receiveables

Kemampuan perusahaan dalam menagih piutang (collection period) menurun menjadi 25 hari dibanding dengan tahun 2013 yaitu 26 hari. Hal ini disebabkan menurunnya piutang tahun 2104 dari tahun lalu hampir sama berbanding lurus dengan menurunnya penjualan tahun 2014 dibanding tahun lalu.

Company's ability to collect receivables (collection period) decreased to 25 days compared with the year 2013 is 26 days. This is due to decrease in accounts receivable in 2104 from last year about the same proportional to the decrease in sales in 2014 compared to last year.

Bahasan Mengenai Ikatan Yang Material Untuk Investasi Barang Modal
Review Of The Material For Investment Commitments Capital Goods

Perusahaan menjalin ikatan dengan pihak ketiga untuk memperoleh fasilitas kredit baik secara tunai dari pihak perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank yang menguntungkan perusahaan. Dari hubungan ikatan itu, perusahaan mengharapkan dapat memperoleh sumber dana sebagai berikut:

a) Pinjaman tunai berupa kredit modal kerja, kredit investasi, dan surat utang.
b) Pinjaman nontunai berupa fasilitas penerbitan kredit berdokumen atau bank garansi. Dalam keterikatan itu, perusahaan menggunakan rupiah sebagai mata uang denominasi.

Lalu, untuk melindungi perusahaan dari resiko posisi mata uang asing terkait, maka perusahaan melakukan upaya pencarian pendanaan yang berdenominasi sama dengan pinjaman yang dilakukan (natural hedging).

Firm bond with a third party to obtain a credit facility either in cash from banks and non-bank financial institutions that benefit the company. Of relationships that bond, the company expects to obtain a source of funds as follows:

a) Cash Loans in the form of working capital loans, investment loans, and bonds.
b) Non-cash loans in the form of documented credit facilities or the issuance of bank guarantees. In the attachment, the company uses rupiahs as the currency denomination.

Then, to protect the company from foreign currency risk related positions, the company conducts a search effort denominated funding equal to the loan made (natural hedging).

Pencapaian Target 2014
Target Achievement 2014

Penjualan tahun 2014 menurun dan tidak memenuhi target RKAP 2014. Di Tahun 2014 Perusahaan mengerjakan dua proyek besar yaitu Proyek TITO dan Proyek SMP BBM Pertamina. Keterlambatan waktu atas penyelesaian proyek TITO mengakibatkan pengakuan pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan menjadi rendah. Sementara itu pendapatan yang diharapkan berasal dari Proyek SMP BBM Pertamina belum dapat direalisasikan di tahun 2014. Oleh karenanya pendapatan tidak dapat menutupi seluruh beban operasi sehingga secara keseluruhan Perusahaan mengalami rugi operasi sebelum beban pendanaan sebesar Rp. 95.310,6 juta.

Sales in 2014 declined and did not achieved the 2014 RKAP Target. In 2014 the Company worked on two major projects, namely Project TITO and SMP BBM Project of Pertamina. Delay time for completion of the project resulted in the recognition of revenue TITO based on the percentage completion of the work to be low. Meanwhile, the expected income derived from SMP BBM Project of Pertamina can not be realized in the year 2014. Therefore, the income can not cover all operating expenses so that overall the Company experienced operating loss before financing costs Rp. 95,310.6 million.

Di tahun 2015 manajemen Perusahaan akan mengambil langkah-langkah strategis untuk penyelesaian Proyek TITO, mencakup penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan, instalasi kabel rumah dan migrasi yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2015. Sedangkan untuk Proyek SMP BBM Pertamina manajemen Perusahaan akan tetap melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan perangkat SMP BBM yang telah dibangun di sejumlah SPBU dengan tetap melakukan diskusi intensif dengan pemberi kerja mengenai kelanjutan proyek SMP BBM ini dengan opsi yang tidak merugikan Perusahaan. Selain itu di tahun 2015 perusahaan tetap akan mengembangkan bisnis-bisnis baru sebagai pengembangan portofolio bisnis Perusahaan yang mencakup bidang ICT Infrastructure, Smart System, Smart Applications, Smart Services, ICT Consumer, dan Smart Defense.

In 2015, the Company's management will takes strategic steps to completion TITO project, the completion of the remaining work includes the construction, home wiring installation and migration is expected to be completed by the end of 2015. As for Pertamina's SMP BBM project, company mangement will continue to perform the operation and maintenance SMP BBM devices that have built in a number of Fuel Retail Outlets (SPBU) while doing intensive discussions with the employer regarding the continuation of this SMP BBM project with options that are not disserve to the Company. In addition, in 2015 the company will continue to develop new businesses as the development of our business portfolio covers the fields of ICT Infrastructure, Smart System, Smart Applications, Smart Services, ICT Consumer, and Smart Defense.

	RKAP 2014 (Rp.) Target	REALISASI 2014 (Rp.) Realization	%
PENJUALAN Sales	2,342,762,385,238	817,889,789,314.00	34.91%
HARGA POKOK PENJUALAN Cost of Sales	2,014,994,000,619	790,849,869,105.17	39.25%
LABA (RUGI) OPERASI Operating Income	186,610,740,275	-95,310,644,781.17	-51.07%

Pendapatan perusahaan di tahun 2014 sebesar Rp. 817.889,79 juta terutama berasal dari lini bisnis:

A. Sistem Integrator Rp. 706.267,95 juta terutama dari proyek TITO SP 3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan FTTH atau 86,35% dari total penjualan.
B. IT Capex to Opex Rp. 35.262,89 juta terutama berasal dari proyek SM3 Telkom dan SM KAI atau 4,31% dari total penjualan.
C. Maintenance Rp. 69.299,08 juta terutama dari Proyek SPMS Hua Hwei atau 8,47% dari total penjualan.
D. Genuine Product Rp. 7.059,87 juta terutama dari penjualan Smart Control Unit dan Perisalah atau 0,86% dari total penjualan.

The company's revenues in 2014 amounted to Rp. 817,889.79 million mainly derived from business lines:

A. System Integrator Rp. 706,267.95 million primarily from TITO project SP 3,4,5,6,7,8,9,10,11 and FTTH or 86.35% of total sales
B. IT Capex to Opex Rp. 35,262.89 million mainly derived from SM3 Project of Telkom and SM Project of KAI or 4.31% of total sales
C. Maintenance Rp. 69,299.08 million primarily from SPMS Project of Hua Hwei or 8.47% of total sales
D. Genuine Product Rp. 7,059.87 million primarily from the sale of the Smart Control Unit and Perisalah or 0.86% of total sales.

Proyeksi di tahun mendatang dijabarkan dalam RKAP (Rencana dan Anggaran Kerja Perusahaan) 2015 dengan penjualan Rp. 2.394.008,31 juta terutama berasal dari lini bisnis:

1. ICT Infrastrukfur Rp. 1.063.987,56 juta
2. Smart Services Rp 109.468,44 juta
3. Smart Applications Rp. 49.739,06 juta
4. Smart System Rp. 1.160.281,7 juta
5. ICT Consumer Rp. 10.531,5 juta

Struktur pemodalan di tahun 2014:

Modal sendiri: Rp.350.000 juta
Pinjaman Bank: Rp.549.479,38 juta
MTN: Rp.395.000 juta

Projections in the coming year are translated into RKAP (Company Budget & Plan) 2015 with sales of Rp. 2,394,008.31 million mainly derived from business lines:

1. ICT Infrastructure Rp. 1,063,987.56 million
2. Smart Services Rp 109,468.44 million
3. Smart Applications Rp. 49,739.06 million
4. Smart System Rp. 1,160,281.7 million
5. ICT Consumer Rp. 10,531.5 million

Capital structure in 2014:

Equity Capital: Rp.350.000 million
Bank Loans: Rp.549.479,38 million
MTN: Rp.395.000 million

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan

Information and material facts occurring after the date of the financial statements

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

There are no significant events after the reporting date that require adjustments or disclosures in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2014.

Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

Information material transactions which contain conflict of interest and / or transactions with affiliates.

Tidak ada transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

There are no material transactions that conflict of interest and / or transactions with affiliates.

Uraian Mengenai Perubahan Kebijakan Akuntansi

Description of the Change in Accounting Policy

Di tahun 2014 tidak ada perubahan kebijakan Akuntansi Perusahaan . PSAK yang berlaku di tahun 2014 tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan perusahaan yaitu ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan dan ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas.

In 2014 there was no change in accounting policy of the Company. PSAK force in 2014 had no impact on the financial statements of companies that ISAK 27: Transfer of Assets from Customers and ISAK 28: Termination of Financial Liabilities with Equity Instruments.

Perbandingan Tingkat Profitabilitas
Comparison of Profitability Level

	2014	2013	
PENDAPATAN	817,889,789,314	1,466,790,301,402	REVENUE
BEBAN POKOK PENJUALAN	(790,849,869,105)	(1,245,678,413,301)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	27,039,920,209	221,111,888,101	GROSS PROFIT
Beban usaha			**Operating expenses**
Beban penjualan	(23,684,390,414)	(24,229,665,013)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(91,209,266,432)	(92,469,525,787)	General and administrative expenses
Beban pengembangan	(7,456,908,144)	(6,780,218,014)	Load development
	(122,350,564,990)	(123,479,408,814)	
LABA USAHA SEBELUM BEBAN PENDANAAN	(95,310,644,781)	97,632,479,287	**OPERATING INCOME BEFORE FINANCIAL EXPENSES**
Beban pendanaan	(96,294,463,665)	22,464,716,664)	Financing expenses
LABA USAHA SETELAH BEBAN PENDANAAN	(191,605,108,446)	75,167,762,623	**OPERATING INCOME AFTER FINANCIAL EXPENSES**
Pendapatan (beban) lain-lain:			**Other income (expense):**
Pendapatan lain-lain	22,006,813,879	16,096,204,299	Other income
Beban lain-lain	(105,415,766,193)	(66,711,512,175)	Other expenses
	(83,408,952,314)	(50,615,307,876)	
LABA SEBELUM PAJAK	(275,014,060,760)	24,552,454,747	**PROFIT BEFORE TAX**
Pendapatan (beban) pajak penghasilan			**Income (expense) tax**
Pajak kini	(840,689,663)	(4,692,982,158)	Current tax
Pajak tangguhan	(40,151,702,190)	6,414,753,023	Deferred tax
Pajak final	50,160,341,304	(21,973,870,973)	Final tax
	9,167,949,451	(20,252,100,108)	
LABA TAHUN BERJALAN	(265,846,111,309)	4,300,354,639	**CURRENT YEAR PROFIT**
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya	-	-	**Other comprehensive income (expense)**
LABA KOMPREHENSIF	(265,846,111,309)	4,300,354,639	**COMPREHENSIVE INCOME**
Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			**Total profit for the year attributable to:**
Pemilik entitas induk	(265,959,747,241)	4,074,503,987	Owners of the parent
Kepentingan non pengendali	113,635,932	225,850,652	Non-controlling interests
	(265,846,111,309)	4,300,354,639	
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			**Total comprehensive income attributable to:**
Pemilik entitas induk	(265,959,747,241)	4,074,503,987	Owners of the parent
Kepentingan non pengendali	113,635,932	225,850,652	Non-controlling interests
	(265,846,111,309)	4,300,354,639	

Kebijakan Akuntansi Terpenting
The Important Accounting Policy

1. Pernyataan kepatuhan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.

2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Interpretasi baru/revisi berikut yang berlaku pada 1 januari 2014 tidak mempunyai dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

- ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan
- ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

Laporan Keuangan disusun atas dasar prinsip kesinambungan usaha (going concern) dan dasar akrual serta konvensi harga perolehan historis, kecuali bila dinyatakan secara khusus dalam akun yang bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan Akuntansi Perusahaan masing-masing akun tersebut.

3. Pengakuan pendapatan dan beban

Perusahaan dan entitas anak mengadopsi PSAK 23 (Revisi 2010), "Pendapatan" untuk yang bersifat barang , jasa dan sistem (barang dan jasa) selain yang bersifat konstruksi, dan PSAK 34 (Revisi 2010) "Kontrak Konstruksi" untuk pengakuan pendapatan progres berdasarkan Berita Acara Progres Fisik untuk proyek Trade in Trade off.

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Beban diakui pada saat terjadinya transaksi.

4. Aset tetap

a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
b. Diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya, yaitu:

1. Statement of compliance

Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries prepared on the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntansi Indonesia.

2. Basis of measurement and preparation of financial statements

Changes to Statement of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards.

The new interpretation / revision following applicable on 1 January 2014 did not have a significant impact on the consolidated financial statements:

- ISAK 27: Transfer of Assets from Customers
- ISAK 28: Extinguishing of Financial Liabilities with Equity Instruments

Financial statements prepared on the basis of the principle of continuity of business (going concern) and accrual basis as well as the historical acquisition cost convention, unless otherwise specified in the relevant account as described in the Company's accounting policies of each such account.

3. Recognition of income and expenses

The Company and its subsidiaries adopted PSAK 23 (Revised 2010), "Income" for the nature of goods, services and systems (goods and services) in addition to construction, and PSAK 34 (Revised 2010) "Construction Contracts" for the progress of revenue recognition based News Physical Progress event for projects of Trade in Trade off.

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

Expenses are recognized on the transaction date.

4. Fixed assets

a. Held for use in the production or supply of goods or services to direntalkan to others, or for administrative purposes; and
b. Expected to use more than one period.

The Company and its subsidiaries use the straight-line method over their estimated useful lives, as follows:

JENIS ASET TETAP Type of Fixed Assets	TAKSIRAN MASA MANFAAT (TAHUN) Estimation of Useful Life (Years)
TANAH Land	Tidak ada batasan Unspecified limit
BANGUNAN & EMPLASEMEN Building & emplacement	20 - 25
MESIN DAN INSTALASI Machines and installations	10 - 16
ALAT UKUR & PERKAKAS KERJA Measuring tools and instruments of labor	4 - 5
ALAT PENGOLAH DATA Data processing equipment	4 - 5
ASET TETAP YANG DISEWAKAN Assets on lease	3 - 5
INVENTARIS KANTOR DAN GUDANG Office and warehouse inventory	4 - 5
ALAT ANGKUTAN DAN KENDARAAN Transport equipment and vehicles	4

Batasan mengenai biaya perolehan minimum yang dapat diperlakukan sebagai penambahan nilai aset tetap ditetapkan persatuan/ unit sebagai berikut:

Limitations on the minimum acquisition costs can be treated as an addition to the value of fixed assets set union / units as follows:

JENIS ASET TETAP Type of Fixed Assets	PEROLEHAN MINIMUM (Rp.) Minimum Acquisition (Rp.)
TANAH Land	Tidak ada batasan Unspecified limit
BANGUNAN & EMPLASEMEN Building & emplacement	50,000,000
MESIN DAN INSTALASI Machines and installations	10,000,000
ALAT UKUR & PERKAKAS KERJA Measuring tools and instruments of labor	5,000,000
ALAT PENGOLAH DATA Data processing equipment	5,000,000
INVENTARIS KANTOR DAN GUDANG Office and warehouse inventory	2,500,000
ASET TETAP YANG DISEWAKAN Assets on lease	Tidak ada batasan Unspecified limit
ALAT ANGKUTAN DAN KENDARAAN Transport equipment and vehicles	Tidak ada batasan Unspecified limit

Metode penyusutan, masa manfaat, nilai residu yang digunakan untuk aset direview minimal setiap akhir tahun.

Depreciation methods, useful lives, residual values are used for a minimum of assets are reviewed at each year end.

5. Instrumen keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50, "Instrumen Keuangan: Penyajian" dan PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" berlaku untuk Laporan Keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010, secara prospektif.

1) Aset keuangan

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
   Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek.
   Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang.
   Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan Piutang meliputi, antara lain Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Aset Keuangan Lancar lainnya, dan Aset Keuangan Tidak Lancar lainnya.

c. Aset yang dimiliki hingga jatuh tempo.
   Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intens positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:
   - Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
   - Investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
   - Investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual.
   Investasi dalam kelompok tersedia untuk

5. Financial instruments

Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 50, "Financial Instruments: Presentation" and PSAK No. 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" applies to financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2010, prospectively.

1) Financial assets

a. Financial assets at fair value through profit or loss.
   Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. Financial assets are classified as financial assets held for trading if acquired principally for selling or repurchasing in the near future and there is evidence of a trend of short term profit taking.
   No financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss.

b. Loans and receivables.
   Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have not quoted in an active market. At initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Loans and receivables include, among others, Accounts Receivable, Other Receivables, Other Financial Assets and Financial Assets Non-current other.

c. Assets held to maturity.
   Investments held-to-maturity are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities, as well as the management has a positive intense and ability to hold financial assets to maturity, except:
   - Investments designated upon initial recognition as a financial asset measured at fair value through profit or loss;
   - Investment Company designates as available for sale; and
   - Investments that meet the definition of loans and receivables.

d. Financial assets available for sale.
   Investments in available-for-sale are non-

dijual adalah Aset Keuangan Non-Derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai Pinjaman yang diberikan dan Piutang, Investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, Aset Keuangan tersedia untuk dijual diakui pada Nilai Wajarnya ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, Aset Keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya sampai dengan dihentikan pengakuannya. Laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas hingga terealisasi. Laba rugi yang telah direalisasi dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai efek yang tersedia untuk dijual dibawah harga perolehannya yang bersifat permanen dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian.

Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari surat berharga yang tersedia untuk dijual yang dicatat sebagai penyertaan.

derivative financial assets intended to be held until an indefinite period, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as Loans and Receivables, Investment classified as held-to-maturity or financial assets measured at fair value through profit or loss.

At the time of initial recognition, financial assets available for sale are recognized at fair value plus transaction costs. Subsequently, financial assets available for sale are measured at fair value through derecognized. Profits or unrealized losses reported as a separate component of stockholders' equity until realized. Realized gain or loss recorded in the consolidated statement of comprehensive income and is calculated based on the specific identification method. The decline in the value of securities available for sale below cost that is permanent is charged to the consolidated income statement.

Financial assets available for sale consist of securities available for sale are recorded as investments.

2) Liabilitas keuangan

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek.

Tidak ada kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diperdagangkan.

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain, hutang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman dan obligasi.

2) Financial liabilities

a. Financial liabilities at fair value through profit or loss.

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities held for trading. Financial liabilities are classified as financial liabilities held for trading if acquired principally for selling or repurchasing in the near future and there is evidence of a trend of short term profit taking.

No financial liabilities are classified as financial liabilities held for trading.

b. Financial liabilities measured at amortized cost.

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortized cost. Financial liabilities measured at amortized cost, among others, other payables, accrued expenses, loans and bonds.

3) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah nettonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah dakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

4) Penentuan dan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan referensi nilai pasar kuotasian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi,tanpa dikurangi biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang diijinkan oleh PSAK 55 seperti: menggunakan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (Arm's Length Market Transaction), mengacu nilai wajar instrumen lain yang serupa, analisa arus kas yang didiskontokan, Model Penetapan Harga Opsi (Option Pricing Model) atau metode penilaian lainnya.

Jika tidak ada data yang tersedia yang digunakan dalam teknik penilaian, maka instrumen keuangan dinyatakan sebesar nilai perolehan.

5) Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan dan entitas anak mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan (“loss event”) yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila loss event tersebut dapat diperkirakan secara handal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan. Arus kas masa depan ini yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Perusahaan dan entitas anak tidak mendiskontokan arus kas yang berasal dari piutang jangka pendek, apabila pengaruh pendiskontoan tersebut tidak material.

3) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities been offset and the amount of the net reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the amounts that have dakui and the intention to realize the asset and settle the liability simultaneously.

4) Determination and measurement of fair value

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined by reference to market value kuotasian on our consolidated balance sheet date, without deducting transaction costs.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques.

The Company uses valuation techniques permitted by PSAK 55 as: using transactions fair market current between the parties understand and desire (Arm's Length Market Transaction), refers to the fair value of another instrument that is similar, the analysis of discounted cash flows, Model Determination Price Option (Option Pricing Model) or other assessment methods.

If there is no available data used in the valuation technique, the financial instruments are stated at cost.

5) Impairment of financial assets

The Company and its subsidiaries to detect impairment of financial assets when there is objective evidence of adverse events ("loss event") that cause a negative effect on future cash flows of a financial asset. The impairment loss is recognized when the event can be reliably estimated to have occurred. Losses are anticipated as a result of future events may not be recognized, regardless it is very possible.

Impairment of financial assets measured at amortized cost is measured from the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows. These future cash flows discounted using the original effective interest rate of the asset. The Company and its subsidiaries are not discounting the cash flows arising from short-term receivables, if the effect of discounting is immaterial.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

If the decline in fair value of available-for-sale financial assets has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss previously recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss as an impairment loss. The amount of the cumulative loss is the difference between the acquisition cost (net of principal repayment and amortization) and current fair value, less any impairment loss previously recognized.

6) Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Perusahan dana entitas anak menghentikan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuanagn tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain. Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

6) Derecognition of financial instruments

Company funds its subsidiaries financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial assets have expired, or when all the risks and rewards of the asset keuanagn substantially transferred to another party. The Company and its subsidiaries derecognise a financial liability when its contractual obligations to pay discharged, canceled or expired.

7) Instrumen keuangan derivatif dan aktifitas lindung nilai

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehannya dan selanjutnya dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Metode untuk mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung pada sifat dari objek yang dilindungi nilainya. Perusahaan mengelompokkan derivatif sebagai (1) instrumen lindung nilai terhadap nilai wajar suatu aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen sah yang belum diakui (lindung nilai atas nilai wajar) atau (2) instrumen lindung nilai transaksi yang diperkirakan akan terjadi (lindung nilai arus kas).

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai atas nilai wajar, yang efektif, dicatat di dalam laporan laba rugi interim, bersama dengan perubahan yang terjadi pada nilai wajar aset dan liabilitas yang dilindungi nilainya.

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, yang efektif, diakui sebagai bagian dari ekuitas, khususnya pada akun cadangan nilai wajar. Jumlah yang ditangguhkan di ekuitas kemudian dialihkan ke laporan laba rugi interim dan diklasifikasikan sebagai pendapatan atau beban pada periode yang sama dengan periode ketika transaksi yang diperkirakan akan terjadi yang dilindungi nilainya mempengaruhi laporan laba rugi interim.

7) Derivative financial instruments and hedging activities

Derivative financial instruments are initially recognized in the statement of financial position at cost and are subsequently remeasured at fair value. The method of recognizing gains or losses depends on the nature of the item being hedged. The Company designates certain derivatives as either (1) a hedge of the fair value of a recognized asset or liability or an unrecognized firm commitment (fair value hedge) or (2) a hedge of a forecasted transaction (cash flow hedges).

Changes in fair value of derivatives that are designated and qualify as fair value hedges, the effective, are recorded in the interim income statement, together with changes in the fair value of assets and liabilities being hedged.

Changes in fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges, the effective, are recognized as part of equity, in the fair value reserve account. Amounts deferred in equity are subsequently transferred to the interim income statement and classified as income or expense in the same period as the period when the forecasted transaction being hedged affects the interim income statement.

Perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif yang tidak memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi interim.Ketika instrumen lindung nilai berakhir atau dijual, atau tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang ada di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat transaksi yang dijanjikan atau diperkirakan diakui dalam laporan laba rugi interim. Apabila suatu transaksi yang diperkirakan akan terjadi atau yang sudah dijanjikan tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah dicatat di bagian ekuitas dialihkan ke dalam laporan laba rugi interim.
Pada saat awal terjadinya transaksi, Perusahaan membuat dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aset dan liabilitas tertentu atau dengan komitmen tertentu atau transaksi yang diperkirakan akan terjadi. Perusahaan juga melakukan dokumentasi atas penilaian, apakah pada saat dilakukan transaksi lindung nilai dan saat berlakunya lindung nilai tersebut, derivatif yang digunakan pada transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (offsetting) perubahan nilai wajar atau arus kas suatu unsur yang dilindungi nilainya.

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognized in the income statement interim.Ketika hedging instrument expires or is sold, or no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time remains in equity and is recognized when the committed or forecasted transaction is recognized in the interim income statement. When a forecasted transaction will occur or has been promised no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported in equity is immediately transferred to the income statement interim.
At the beginning of the transaction, the Company made the documentation concerning the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as its risk management objective and strategy for undertaking various hedge transactions. This process includes linking all derivatives designated as hedges to specific assets and liabilities or to specific firm commitments or forecasted transactions. The company also undertake documentation of assessment, whether at the time of hedging transactions and the promulgation of the hedge, derivatives are used in hedging transactions are highly effective in the match (offsetting) changes in fair value or cash flows of hedged items.

Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi
Disclosure of Related Party Transaction

PIHAK BERELASI Related Partners	HUBUNGAN Relations	SIFAT SALDO AKUN/ TRANSAKSI Properties of Account/ Transaction
Pemerintahan, Departemen Government	Entitas sepengendali Entity under common control	Penjualan Genuine Product Sale of Genuine product
PT Telkom (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali Entity under common control	Pendapatan jasa modernisasi jaringan, beban telepon Revenue of service network modernization
PT KAI (Persero)	Entitas Sepengendali Entity under common control	Pendapatan sewa Aset Rental assets income
Bank BRI (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali Entity under common control	Beban bunga dan pendapatan bunga Interest expense and interest income
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali Entity under common control	Beban bunga dan pendapatan bunga Interest expense and interest income
Bank BNI (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali Entity under common control	Beban bunga dan pendapatan bunga Interest expense and interest income
BPJS Ketenagakerjaan Employment health insurance (BPJS)	Entitas Sepengendali Entity under common control	Beban asuransi karyawan Employee insurance expense

Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi
Disclosure of Related Party Transaction

Tabel Lanjutan
Continued Table

PIHAK BERELASI Related Partners	HUBUNGAN Relations	SIFAT SALDO AKUN/ TRANSAKSI Properties of Account/ Transaction
PT WBI	Dikendalikan oleh DAPEN Controlled by DAPEN	Pengelola dana perawatan kesehatan karyawan
Direksi dan Komisaris Directors and Commissioners	Personil manajemen kunci Key management personnel	Gaji dan fasilitas Salaries and facilities
Dana Pensiun INTI Pension Fund of INTI	Dikendalikan oleh Perusahaan Controlled by company	Pengelola Dana Pensiun Retirement fund management
KBSI (Koperasi Bina Sejahtera INTI)	Koperasi karyawan Perusahaan Cooperatives employees	Pembelian ATK, sewa kendaraan, jasa fotocopy, pengadaan material proyek Purchase of stationary, vehicle rental, fotocopy service, procurement of project material
PT Jasindo (Persero)	Entitas Sepengendali Entity under common control	Beban Asuransi Aset dan Proyek Insurance assets and project expenses
PT PLN (Persero)	Entitas Sepengendali Entity under common control	Beban Listrik Electricity expenses
PT Telkomsel, Tbk.	Entitas Sepengendali Entity under common control	Penjualan jasa maintenance Sale of maintenance services
PT Pertamina (Persero)	Entitas Sepengendali Entity under common control	Penjualan jasa capex to opex Sale of capex to opex services
PT Biofarma (Pesero)	Entitas Sepengendali Entity under common control	Penjualan Genuine Product Sale of genuine product

Pengungkapan Yang Berhubungan Dengan Aset Tetap

Disclosures Relating to Fixed Assets

Aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Perusahaan dan entitas anak menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya.

Assets are recorded at cost less accumulated depreciation. The Company and its subsidiaries use the straight-line method over their estimated useful lives.

Rekonsiliasi aset tetap: saldo awal, mutasi penambahan, mutasi pengurangan, reklasifikasi dan saldo akhir 2014:

Reconciliation of fixed assets: beginning balance, additional mutations, mutations reduction, reclassification and balances the end of 2014:

	2013 (Rp.)	PENAMBAHAN Increase	PENGURANGAN Reduction	REKLASIFIKASI Reclasification	2014 (Rp.)	
ASET TETAP						FIXED ASSETS
Harga Perolehan:						Acquisition Cost
Tanah	1,454,826,365				1,454,826,365	Land
Bangunan dan Emplasemen	40,486,475,234				40,486,475,234	Building and Emplacement
Mesin dan Instalasi	9,876,328,263	47,800,000			9,924,128,263	Machine & Installations
Alat Ukur & Perkakas Kerja	44,738,758,222	150,000,000		(3,800,000)	44,884,958,222	Tools & Instruments
Inventaris Kantor & Gudang	6,093,374,119	142,955,250	(4,500,000)		6,231,829,369	Office & Warehouse Inventory
Alat Olah Data	14,087,108,849	65,871,335	(845,509,470)		13,307,470,714	Data Processing Tools
Kendaraan	2,754,554,776				2,754,554,776	Vehicle
Alat Olah Data yang Disewakan	12,852,723,151		(12,852,723,151)		-	Data Processing Tools for Rent
Tower Disewakan	1,475,897,753				1,475,897,753	Rental Tower
Jumlah Harga Perolehan	133,820,046,732	406,626,585	(13,702,732,621)	(3,800,000)	120,520,140,696	The Amount of Acquisition Price
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Tanah						Land
Bangunan dan emplasemen	27,263,241,398	1,310,498,811			28,573,740,209	Building and Emplacement
Mesin dan instalasi	4,391,200,959	783,711,145			5,174,912,104	Machines and Installations
Alat ukur dan perkakas kerja	31,598,635,744	4,561,872,811			36,160,508,555	Tools and Instruments
Inventaris kantor dan gudang	5,697,508,234	187,138,578			5,884,646,812	Office and Warehouse Inventory
Alat olah data	9,835,488,028	1,178,398,893	(631,147,966)		10,382,738,955	Data Processing Tools
Kendaraan	2,560,772,118	172,699,313	(4,499,999)		2,728,971,431	Vehicle
Alat olah data yang disewakan	11,946,148,819	906,574,332	(12,852,723,151)		-	Data Processing Tools for Rent
Tower disewakan	960,710,878	199,616,417	-		1,160,327,295	Rental Tower
Jumlah Akumulasi Penyusutan	94,253,706,178	9,300,510,299	(13,488,371,116)	-	90,065,845,360	Total Accumulated Depreciation
Jumlah bersih Aset Tetap	39,566,340,555	(8,893,883,714)	214,361,505	(3,800,000)	30,454,295,336	Total net assets Fixed
Aset Tetap dalam Pembangunan:						Fixed Assets Under Construction
Minilab FTTX INTI	1,025,750,000	279,151,279			1,304,901,279	FTTX minilab INTI
Entitas Anak	9,176,000	181,220,013			190,396,013	Subsidiary
	1,034,926,000	460,371,292	-	-	1,495,297,292	
Total Aset Tetap	40,601,266,555	(8,433,512,422)	214,361,505	(3,800,000)	31,949,592,628	Total Property and Equipment

Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya

Recents Development on Financial Accounting Standards and Other Regulations

Standar dan baru revisi yang telah diterbitkan, berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (Revisi 2013) : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 4 (Revisi 2013) : Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 15 (Revisi 2013) : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 24 (Revisi 2013) : Imbalan Kerja
- PSAK 65 (Revisi 2013) : Laporan Keuangan Konsolidasian

The new and revised standards that have been issued, effective for years beginning on or after January 1, 2015 are as follows:

- PSAK 1 (Revised 2013) : Presentation of Financial Statements
- PSAK 4 (Revised 2013) : Separate Financial Statements
- PSAK 15 (Revised 2013): Investments in Associates and Joint Ventures
- PSAK 24 (Revised 2013): Employee Benefit
- PSAK 65 (Revised 2013): Consolidated Financial Statements

- PSAK 66 (Revisi 2013) : Pengaturan Bersama
- PSAK 67 (Revisi 2013) : Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 68 (Revisi 2013) : Pengukuran Nilai Wajar
- PSAK 46 (Revisi 2014) : Pajak Penghasilan
- PSAK 48 (Revisi 2014) : Penurunan Nilai Aset
- PSAK 50 (Revisi 2014) : Intrumen Keuangan: "Penyajian"
- PSAK 55 (Revisi 2014) : Instrumen Keuangan:"Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 60 (Revisi 2014) : Instrumen Keuangan:"Pengungkapan"
- ISAK 26 (Revisi 2014) : Penilaian Kembali Derivatif Melekat

Perusahaan sedang mengevaluasi dan menentukan dampak PSAK tersebut terhadap Laporan Keuangan.
Tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

- PSAK 66 (Revised 2013): Joint Arrangements
- PSAK 67 (Revised 2013): Disclosure of Interests in Other Entities
- PSAK 68 (Revised 2013): Fair Value Measurement
- PSAK 46 (Revised 2014): Income Taxes
- PSAK 48 (Revised 2014): Impairment of Assets
- PSAK 50 (Revised 2014): Financial Instruments: "Presentation"
- PSAK 55 (Revised 2014): Financial Instruments: "Recognition and Measurement"
- PSAK 60 (Revised 2014): Financial Instruments: "Disclosures"
- ISAK 26 (Revised 2014) : Revaluation of Embedded Derivatives

The Company is currently evaluating and determining the impact of PSAK on the Financial Statements.
No changes to legislation that significantly influence the company and its impact on the financial statements.

Uraian mengenai Kebijakan Dividen
Description about Dividen Policy

Untuk tahun 2014, deviden baru akan ditentukan oleh pemegang saham pada RUPS Pertanggungjawaban Kinerja 2014.

For 2014, dividends will be determined by the shareholders at the GMS of Performance Accountability 2014.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Pendahuluan
Preliminary

Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik ("Good Corporate Governance" atau "GCG") dalam organisasi Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan. Penerapan praktik-praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi Perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis serta pemangku kepentingan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan berkomitmen untuk menerapkan praktek-praktek GCG dalam pengelolaan kegiatan usaha

The concept of the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Company's organization is based on the Company's commitment to creating a transparent, accountable and trustworthy through business management that can be justified. Application of GCG practices is one important step for the Company to increase and maximize the value of the Company, the Company's management encourages professional, transparent and efficient by increasing the principles of openness, accountability, trustworthy, responsible and fair so that it can better fulfill its obligations to Holders Shares, the Board of Commissioners, business partners and stakeholders. Furthermore, the Board of Commissioners, Directors and employees are committed to implementing corporate governance practices in the management of the Company's operations. Awareness of the importance of good corporate governance for the

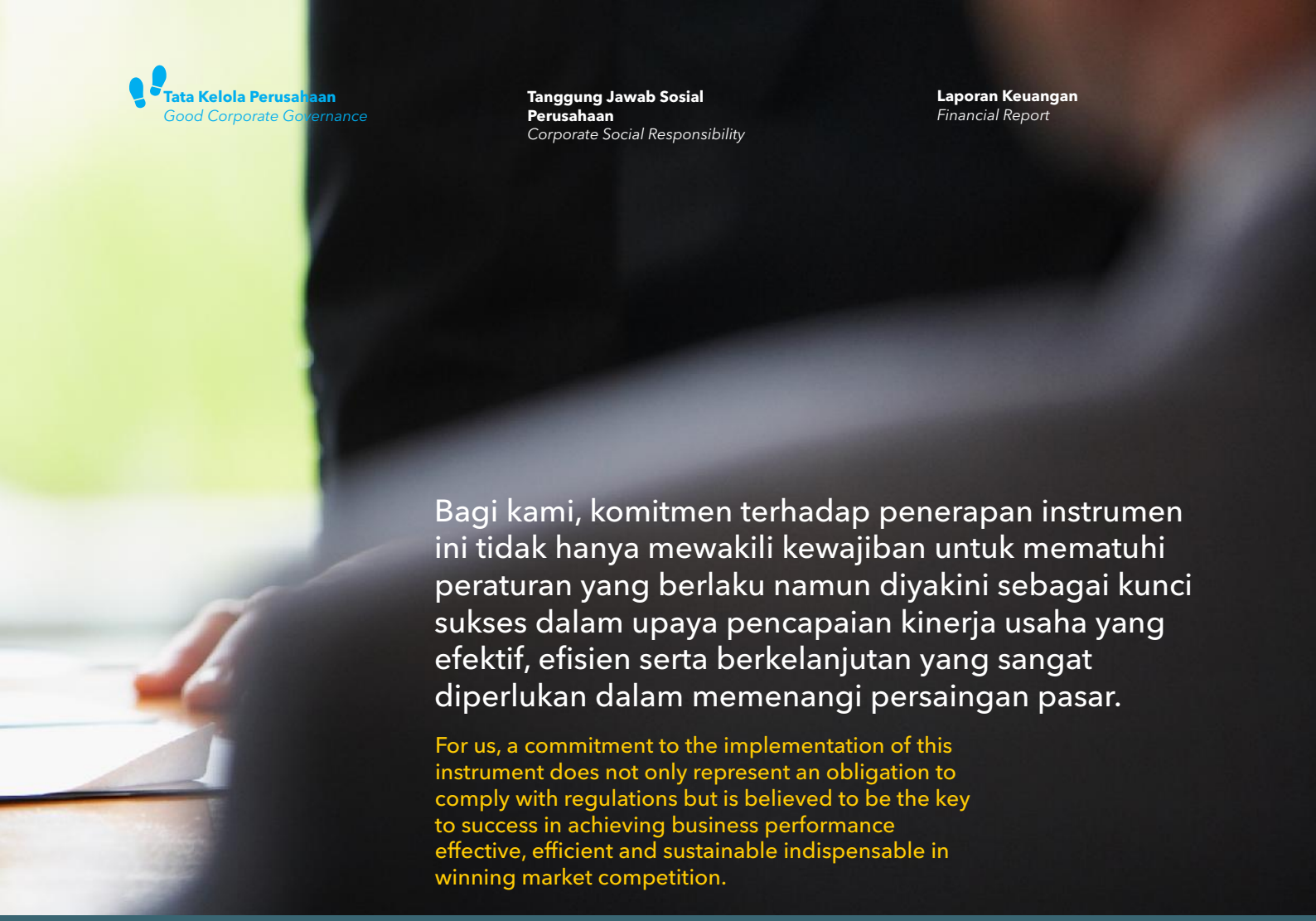

Bagi kami, komitmen terhadap penerapan instrumen ini tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku namun diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien serta berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangi persaingan pasar.

For us, a commitment to the implementation of this instrument does not only represent an obligation to comply with regulations but is believed to be the key to success in achieving business performance effective, efficient and sustainable indispensable in winning market competition.

Perusahaan. Kesadaran akan pentingnya GCG bagi Perusahaan adalah karena keinginan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan.

Bagi kami, komitmen terhadap penerapan instrumen ini tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku namun diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien serta berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangi persaingan pasar. Pelaksanaannya bahkan menjadi bagian dari budaya Perusahaan sehingga tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari tidak hanya di tingkatan Komisaris, dan Direksi namun hingga ke tingkatan karyawan agar tercipta keselarasan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan yang akan melindungi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang. Kami juga mengkomunikasikan dan melakukan sosialisasi, pelatihan dan memetakan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap karyawan memahami dan mengetahui tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perusahaan.

Company is due to the desire to uphold integrity in running the business healthy and sustainable.

For us, a commitment to the implementation of this instrument does not only represent an obligation to comply with regulations but is believed to be the key to success in achieving business performance effective, efficient and sustainable indispensable in winning market competition. Implementation even be part of a company culture that is reflected in the attitudes and behavior of everyday not only at the level of the Commissioner, and the Board of Directors but to all levels of employees in order to create harmony in order to achieve the vision, mission and objectives of the Company which will protect the interests of shareholders and stakeholders Other interests in the long term. We also communicate and socialize, training and mapping of accountability and responsibility to ensure that every employee understands and knows the duties, functions and responsibilities according to changes in the Company's businesses and organizations.

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

Struktur Tata Kelola Perusahaan terdiri atas:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris;

Adapun perincian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") baik RUPS Tahunan ("RUPST") maupun RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") bertindak sebagai forum utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Perusahaan. RUPS Tahunan terdiri dari: RUPS mengenai Persetujuan Laporan Keuangan dan RUPS mengenai Persetujuan RKAP, sedangkan RUPSLB dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

Dalam RUPST dan RUPSLB, setiap pemegang saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dan kedudukan yang seimbang, terutama dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis terkait dengan:
a. Perubahan Anggaran Dasar
b. Persetujuan Laporan Tahunan dan RKAP serta RJP
c. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisari dan Direksi
d. Penentuan dan persetujuan terhadap penggunaan laba perusahaan.
e. Hal-hal lain yang menjadi kewenangan RUPS.

2. Komisaris
Susunan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor KEP-49/MBU/2011 tanggal 23 Pebruari 201I, SK-179/MBU/2012 tanggal 30 April 2012, dan SK-142/MBU/2013 tanggal 14 Pebruari 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Soleman B. Ponto
Komisaris : Djoko Agung Harijadi
Komisaris : Slamet Effendi Yusuf
Komisaris : Nuning Sri Rejeki Wulandari

Governance Structure consists of:
1. General Meeting of Shareholders (RUPS);
2. The Board of Commissioners;
3. The Board of Directors;
4. Committees under the Board of Commissioners;

As for further details as follows:

1. General Meeting of Shareholders (RUPS)
Based on the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (RUPS) both of Annual General Meeting (RUPST) and Extraordinary General Meeting (RUPSLB) to act as the main forum for shareholders to exercise their rights and authority over the Company. Annual General Meeting consists of: RUPS to Approval of the Financial Statements and the RUPS on the agreement RKAP, whereas the RUPSLB held at any time according to need.

In the RUPS and RUPSLB, shareholders are entitled to equal treatment and a balanced position, especially in voicing their opinions and contribute to the decision-making process of strategic importance related to:

a. Amendments to the Articles of Association
b. Approval of the Annual Report and RKAP and RJP
c. Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioner's and Directors
d. Determination and approval of the use of corporate profits.
e. Other things that the authority of the RUPS.

2. Commissioner
Composition of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia based on the Ministry of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. KEP-49 / MBU / 2011 dated February 23, 201I, SK-179 / MBU / 2012 dated 30 April 2012, and SK-142 / MBU / 2013 dated 14 February 2013, on Discharge and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, the Board of Directors are as follows:

Chairman : Soleman B. Ponto
Commissioner : Djoko Agung Harijadi
Commissioner : Slamet Effendi Yusuf
Commissioner : Nuning Sri Rejeki Wulandari

3. Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-56/MBU/2014, tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia,dan SKD KN No. 13/2014 tanggal 23 Juli 2014 mengenai Perubahan Struktur Organisasi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, maka susunan Direksi PT INTI (Persero) menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Tikno Sutisna
Direktur Keuangan	: Nilawati Djuanda
Direktur Operasi & Teknik	: Adiaris
Pjs. Direktur Pemasaran	: Tikno Sutisna

4. Komite-Komite di bawah Komisaris

Untuk lebih meningkatkan kinerjanya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris serta kalangan luar dengan berbagai keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan. Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi maupun Eksternal Auditor. Dengan demikian Komite Audit hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Penggantian anggota Komite Audit yang belum habis masa jabatannya dan pengangkatn anggota Komite Audit yang baru harus mendapat persetujuan paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekom Nomor: KEP-017/DEKOM/INTI/IV/2013 tentang Pengangkatan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Susunan Komite Audit sebagaimana dimaksud Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

- Sdri. Nuning Sri Rejeki Wulandari sebagai Ketua;
- Sdr. Husni Sidik Sodikin sebagai Anggota.

Adapun Komite Audit memiliki tugas sebagai berikut:

1) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;

3. Board of Directors

Based on the Decree of the Minister of SOEs Number: S-56 / MBU / 2014, dated March 18, 2014 on Termination and Appointment of Members of Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, and SKD KN No.13 / 2014 dated July 23, 2014 on Structural Change organizations that have been approved by the Board of Commissioners, the Board of Directors of PT INTI (Persero) is as follows:

President Director	: Tikno Sutisna
Director of Finance	: Nilawati Djuanda
Director of Operations & Technic	: Adiaris
Act. Director of Marketing	: Tikno Sutisna

4. Committees under the Board of Commissioners

To further improve performance, the Board of Commissioners shall establish an Audit Committee consisting of one or more members of the Board of Commissioners and outer circles with a variety of skills and qualifications required. The Audit Committee shall be free from the influence of the Board of Directors and the External Auditors. Thus only the Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners. Replacement of members of the Audit Committee are not outgoing and pengangkatn new member of the Audit Committee must be approved by at least 50% of the total number of Commissioners.
BOC Dekom established by the Decree No. KEP-017 / dekom / INTI / IV / 2013 on the appointment of the Company's Audit Committee of the Limited Liablity Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

The composition of the Audit Committee referred to the decision of the Board of Commissioners are as follows:

- Mrs. Nuning Sri Rejeki Wulandari as Chairman;
- Mr. Husni Sidik Sodikin as Members.

The Audit Committee has the following tasks:

1) To assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the tasks of internal auditors and external auditors;
2) Assess the implementation of activities and the results of audits conducted by the Internal Audit and the external auditors;
3) To provide recommendations on improvement of management control systems and their implementation;
4) Ensure there has been a satisfactory evaluation procedures to all information issued by the Company;
5) To identify matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as the duties of the Board of Commissioners;

6) Lain-lain yang berkaitan dengan tugas Komite Audit.

6) Other relating to the duties of the Audit Committee.

5. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan Organ Pendukung Direksi yang bertindak sebagai pejabat penghubung (liaison officer) serta bertugas menatausahakan dan menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perusahaan dan risalah rapat Direksi, Dewan Komisaris maupun RUPS. Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh organ struktural setingkat di bawah Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta.

5. CORPORATE SECRETARY

Secretary of the Board of Directors of the Company is Supporting organ that acts as a liaison officer (liaison officer) to administer and store the documents of the Company, including but not limited to the Register of Shareholders, Special Register Company and minutes of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners and the RUPS. The Secretary of the Company is run by structural organ level under the Board of Directors and is responsible to the Board of Directors of the Company.

The Company Secretary shall ensure that the Company comply with the applicable disclosure requirements and shall provide all relevant information to the Board on a regular basis and to the Board upon request.

Implementasi GCG
GCG Implementation

Kinerja usaha Perusahaan merupakan suatu refleksi dari adanya upaya secara terus menerus dari organ-organ perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perusahaan meyakini bahwa dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan dapat menurunkan biaya (cost), meningkatkan kepercayaan stakeholder dan meningkatkan praktek-praktek bisnis terbaik (best practices). Dengan demikian, Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan perangkat yang handal bagi Perusahaan dalam menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin kompetitif.

The company's business performance is a reflection of their continuous efforts of the organs of the company to maintain and improve the quality of Good Corporate Governance. The Company believes that the Good Corporate Governance will be able to lower the cost, increase stakeholder confidence and improve the best business practices (best practices). Thus, Good Corporate Governance is a powerful device for the Company in responding to changes in the business environment and competition is increasingly competitive.

Dengan komitmen yang tinggi Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja usaha dan pertumbuhan jangka panjang yang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan para stakeholder lainnya. Sistem pengelolaan untuk mendukung hal tersebut diatas meliputi beberapa hal sebagai pondasi bagi kokohnya penerapan GCG di Perusahaan yaitu:

Company with a strong commitment to make efforts to improve business performance and long-term growth that can increase value for shareholders and other stakeholders. Management system to support the above covers some of the strong foundation for the implementation of GCG, namely:

- Pelaksanaan Kode Etik dan pedoman perilaku yang didalamnya memuat tata nilai budaya Perusahaan yang telah dikomunikasikan kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan sosialisasi ;
- Pengelolaan kebijakan dan prosedur kerja yang efektif atau sesuai dengan tuntutan bisnis melalui penerapan manajemen kualitas/ISO dengan membentuk Manajemen Representative, sebagai

- Implementation of Ethic Code and code of conduct which includes the Company's cultural values that have been communicated to employees and other stakeholders through socialization;
- Management policies and procedures are effective or in accordance with the demands of the business through the implementation of quality management / ISO to form a Management Representative, as

pedoman pengelolaan Perusahaan dan menjadi panduan bekerja untuk karyawan;
- Pembentukan Komite Manajemen Risiko ;
- Pengawasan internal dan penerapan pengendalian internal;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi pada proses bisnis berupa Sistem SAP;
- Pemantauan Kinerja Individu, berupa pembuatan sasaran kerja individu dan rencana kerja tahunan bagi setiap karyawan perusahaan.

IMPLEMENTASI GCG SEPANJANG TAHUN 2014

1. **Penandatanganan Pakta Integritas**
   Salah satu bentuk penerapan GCG adalah adanya kewajiban penandatanganan Pakta Integritas bagi setiap Insan INTI mulai dari Karyawan, Direksi sampai dengan Dewan Komisaris. Penandatanganan Pakta Integritas ini dilaksanakan setiap tahun secara konsisten dan berkesinambungan, hal ini agar setiap Insan INTI dapat lebih menyadari bahwa ada aturan-aturan yang berlaku dalam setiap gerak langkah dalam menjalankan roda bisnis Perusahaan ini. Untuk tahun 2014 penandatanganan Pakta Integritas dilakukan pada triwulan I.

2. **Perusahaan telah mengikuti BUMN Bersih**
   Sebagaimana Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-05/MBU/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Roadmap menuju BUMN Bersih dengan maksud mewujudkan BUMN yang tangguh (profesional dan tahan goncangan/godaan), unggul (mengutamakan sistem, mutu dan inovasi) serta bermartabat (bersih dari segala bentuk penyimpangan dan kecurangan termasuk korupsi). Nilai akhir yang diperoleh dari hasil penilaian BUMN Bersih terhadap Perusahaan dari persepsi/komiten sebesar 7,85 dan dari upaya internal/Dokumen Aplikasi sebesar 7,99, sehingga masuk dalam kategori "Berkomitmen".

3. **Self Assessment Penerapan GCG 2014**
   Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan Assessment dan/atau evaluasi penerapan GCG. Berdasarkan Self Assessment yang kami lakukan atas penerapan praktik-praktik GCG, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada perusahaan mencapai predikat kategori "Baik" dengan skor 78,55.

guidelines for the management of the Company and to guide the work of employees;
- Establishment of Risk Management Committee;
- Internal controls and implementation of internal control;
- Use of Information Technology in business processes such as SAP system;
- Individual Performance Monitoring, in the form of making individual work target and the annual work plan for each employee of the company.

GCG IMPLEMENTATION THROUGHOUT 2014

1. **The Signing of The Integrity Pact**
   One form of implementation of GCG is the obligation of signing the Integrity Pact for every INTI personnel ranging from employees, the Board of Directors to the Board of Commissioners. The signing of the Integrity Pact is held every year consistently and continuously, it is that every INTI person may be aware that there are rules that apply to every move in running the business of this company. For the 2014 signing of the Integrity Pact made in first quarter.

2. **The Company Has Followed The Bumn bersih (The Neat SOE)**
   Minister as Circular No. SE-05 / MBU / 2013 dated August 14, 2013 on the Roadmap to BUMN Bersih with the intention of realizing SOE formidable (professional and shockproof / temptation), superior (priority system, quality and innovation) and dignity (net of all forms of irregularities and fraud, including corruption). The final value obtained from the results of the BUMN Bersih assessment of perception / komiten amounted to 7.85 and from internal efforts / Document Application of 7.99, so that in the category of "Committed".

3. **Self Assessment GCG 2014**
   According to the provisions of Article 44 paragraph (1) letter b Regulation of the Minister of State Owned Enterprises State No. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned necessary assessment and / or evaluation of the application GCG. Based Self Assessment that we do on the application of corporate governance practices, it can be concluded that the conditions for the application of the company GCG predicate category of "Good" with a score of 78.55.

4. Capaian Skor masing-masing aspek governance terinci sebagai berikut:

4. Achievement scores of each aspect of governance detailed as follows:

No.	Aspek Governance	Bobot value	Capaian score	Presentase percentage	Governance Aspect
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,18	88,22	Commitment to implementation of Good Corporate Governance Sustainably
II	Pemegang Saham dan RUPS	9	8,06	89,50	Shareholders and GMS (RUPS)
III	Dewan Komisaris	35	26,92	76,93	Board of Commissioners
IV	Direksi	35	31,42	89,77	Board of Directors
V	Pengungkapan Informasi danTransparansi	9	5,97	66,37	Disclosure of Information and Transparency
VI	Aspek lainnya	5	0		Other aspects
	TOTAL	100	78,55		TOTAL

5. Sosialisasi:

Pada tanggal 11 Juli 2014 dan 18 Juli 2014 telah dilakukan sosialisasi "Hukuman Disiplin, Whistle Blowing System, dan Kode Etik", dengan target dicapainya peningkatan pemahaman GCG Karyawan dan Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya 80%.

1) Distribusi e-book
Sebagai salah satu cara untuk sosialisasi kebijakan-kebijakan GCG, Perusahaan telah membuat soft structure GCG yang telah dikemas dalam bentuk e-book. Hal itu dilaksanakan agar lebih mudah dan efisien dalam pendistribusiannya.
2) Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman GCG di Lingkungan Perusahaan, sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan rata-rata tingkat pemahaman Karyawan mengenai konsep GCG sekurang-kurangnya 80%. Peserta Sosialisasi adalah seluruh Karyawan Perusahaan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 September 2014.
3) Survey Persepsi Stakeholders Terhadap Penerapan Good Corporate Governance di PT INTI.
Survey Persepsi Stakeholders dalam Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT INTI (Persero) yang dilakukan oleh Divisi Hukum & Kepatuhan adalah salah satu cara untuk mengetahui persepsi Stakeholders terhadap Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 September 2014 bertempat di Auditorium Utara lantai I GKP PT INTI. Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan diikuti oleh 405 orang Karyawan atau 55% dari jumlah karyawan keseluruhan sejumlah 732 orang. Dari hasil evaluasi post sosialisasi diperoleh **angka rata-rata tingkat pemahaman**

5. Socialization:

On July 11, 2014 and July 18, 2014 has done socialization "Disciplinary Punishment, Whistle Blowing System, and the Code of Conduct", with the achievement of the target improved understanding of GCG Employees and Board of Commissioners is at least 80%.

1) The distribution of e-books
As one way to socialize GCG policies, the Company has made a soft structure GCG has been packaged in the form of an e-book. This was done in order to more easily and efficiently in its distribution.

2) Dissemination and Improved Understanding of GCG in Corporate Environmental, target to be achieved from the implementation of this socialization is to increase the average level of understanding of the concept of corporate governance Employees at least 80%. Socialization participants are all employees of the Company. Implementation of the activities carried out on 16 and 17, September 2014.

3) Stakeholders Perception Survey Against the Implementation of Good Corporate Governance in PT INTI.
Stakeholders Perception Survey on Application of Good Corporate Governance (GCG) in PT INTI (Persero) conducted by Legal & Compliance Division is one way to determine the perception of stakeholders on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company. Implementation of the activities carried out on 16 and 17 September 2014 at the Auditorium of north side in first floor GKP PT INTI. Overall socialization activities followed by 405 people Employees or 55% of the overall number of employees 732 people. The evaluation results from post of socialization

Karyawan terhadap konsep dan penerapan GCG adalah sebesar 85,5%.

4) Sosialisasi Penerapan GCG di Perusahaan
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Stakeholders atas penerapan GCG di Perusahaan, maka Perusahaan telah meng-up load kebijakan-kebijakan Perusahaan terkait penerapan GCG di perusahaan pada website INTI yang memuat :

a. Kebijakan Pedoman Good Corporate Governance;
b. Kebijakan Kode Etik;
c. Pengendalian Gratifikasi
d. Kebijakan Whistle Blowing System;
e. Kebijakan Benturan Kepentingan;
f. Kebijakan Donasi;
g. Pedoman Sistem Pengendalian Intern;
h. Kebijakan Kreditur;
i. Kebijakan Pelanggan;
j. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan.

6. Soft Structure
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) jo Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/M B U/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) terdapat 5 (lima) dokumen Soft Structure Good Corporate Governace yang, terdiri dari:

1) SKD Nomor: KN.021/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi;
Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang dan/atau mencegah terjadinya Gratifikasi yang dianggap suap.
2) SKD Nomor: KN.023/2014 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan;
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatur perihal Benturan Kepentingan serta prosedur pengungkapan kemungkinan adanya Benturan Kepentingan dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
3) SKD Nomor: KN. 024/2014 tentang Whistle Blowing System;
Kebijakan ini bertujuan untuk:
Memenuhi standar kepatuhan yang telah ditetapkan dan mengikat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perusahaan serta untuk menjamin pengelolaan Perusahaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
4) SKD Nomor: KN.025/2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);

obtained **the average number of the employee level to understanding the concept and implementation of GCG is 85.5%.**

4) Implementation of GCG Socialization
In order to improve the understanding of stakeholders on the implementation of GCG, the Company has to up load the Company's policies related to the implementation of good corporate governance in the company on INTI's website includes:
a. Guidelines Policy for Good Corporate Governance;
b. Policy for Code of Ethics;
c. Gratuity Control
d. Policy for Whistle Blowing System;
e. Conflict of Interest Policy;
f. Donation Policy;
g. Guidelines for Internal Control System;
h. Creditors policy;
i. Client Policy;
j. Guidelines for Procurement of Goods and Services Company.

6. Soft Structure
Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in conjunction with Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09 / MBU / 2012 on the Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01 / MBU / 2011 on the Application of Good Corporate Governance (GCG) there are 5 (five) document Soft Structure Good Corporate Governace which, consisting of:

1) SKD No: KN.021/2014 on the Gratuities Control;
This policy is intended to prohibit and / or prevent Gratuities are considered bribery.

2) SKD No: KN.023/2014 of the Conflict of Interest Policy;
This policy is intended to set the conflict of interest and procedures regarding disclosure of the possibility of conflict of interest in order to ensure the company's management based on the principles of Good Corporate Governance.

3) SKD No: KN.024/2014 of Whistle Blowing System;
This policy aims to:
Meet compliance standards that have been set and binding in carrying out daily activities of the Company and to ensure the Company's management based on the principles of good corporate governance;

4) SKD No: KN.025/2014 of the Code of Corporate Governance (GCG);

5) SKD Nomor: KN.026/2014 tentang Kode Etik.

Selain Soft Structure sebagaimana disebutkan di atas, Perusahaan juga melakukan evaluasi serta penyesuaian terhadap Board Manual yang telah ada sebelumnya.

7. Progres Persiapan Tindak Lanjut

Progres Persiapan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil assessment penerapan GCG tahun 2012 pelaksanaan GCG telah diselesaikan sebanyak 76% dari rekomendasi hasil assessment atau 91%.

8. Survey Persepsi Stakeholder Terhadap Penerapan Good Corporate Governance di PT INTI

Survey Persepsi Stakeholders terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT INTI (Persero) yang dilakukan adalah salah satu cara untuk mengetahui persepsi Stakeholders terhadap Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan. Secara keseluruhan dari hasil survey dimaksud dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat persepsi Stakeholders terhadap materi survey yakni, Pengungkapan Informasi, Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komitmen, Kebijakan GCG serta Penerapan GCG yang dilakukan Perusahaan mencapai nilai rata-rata 84,3 atau masuk dalam kategori "Baik".

9. Evaluasi Terhadap Peraturan Yang Terkait Perusahaan

Selain perihal GCG yang sudah dikerjakan, Bagian GCG & Kepatuhan melakukan evaluasi terhadap beberapa peraturan yang terkait Perusahaan, antara lain:

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara;
3) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/09/2014 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara;
5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

5) SKD No: KN.026/2014 of the Code of Conduct.

Besides Soft Structure as mentioned above, the Company also conducts evaluations and adjustments to the Board Manual that has been there before.

7. Progress of Follow-up Preparation

Preparation Follow-up Progress on recommendations from the assessment in 2012 of GCG implementation has been completed as much as 76% of the recommendations from the assessment or 91%.

8. Stakeholders Perception Survey Against Implementation of Good Corporate Governance in PT INTI

Stakeholders Perception Survey on Application of Good Corporate Governance (GCG) in PT INTI (Persero) is one way to determine the perception of stakeholders on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company. Overall the results of the survey is to obtain information that the level of perception of stakeholders on the survey material, Disclosure, Rights and Responsibilities of Shareholders, Commitment, and GCG policy of the Company reached an average value of 84.3 or in the category "Good".

9. Evaluation of The Related Companies Regulations

In addition to what has been done regarding corporate governance, corporate governance and Compliance Section evaluating several regulations related to the Company, among others:

1) The Indonesian Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Monitoring and Dissolution of State-Owned Enterprises;
2) Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. Per-13 / MBU / 09/2014 on Guidelines for Utilization of Fixed Assets of State Owned Enterprises;
3) Constitution No. 14 of 2008 on disclosure of information to public;
4) Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. Per-09 / MBU / 09/2014 on Public Policy Hedging Transactions State Owned Enterprises;
5) Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. Per-03 / MBU / 2012 on Guidelines for Appointment of Members of the Board of Directors and Member of the Board of Commissioners of the subsidiary.

Deskripsi Dewan Komisaris
Description of The Board of Commissioners

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

1) Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi ini, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk:

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme,efisiensi,transparansi,kemandirian, akuntabilitas,pertanggungjawaban, serta kewajaran;
b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
c. Pengawasan untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS;

d. Memberikan pendapat dan saran atau nasihat kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan Perusahaan;
e. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis lain yang diatur dalam Anggaran Dasar;
f. Memantau dan menilai Direksi menyangkut tingkat keberhasilannya dalam menjalankan korporasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham;
g. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam Perusahaan;
h. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya;
i. Bila dipandang perlu, dapat menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya;
j. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan termasuk seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga;
k. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten;
l. Memantau efektivitas praktek GCG antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate Governance di Perusahaan;
m. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan

DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1) Referred to the implementation of the functions of monitoring and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has the task and / or duties for:

a. Comply with the Statutes and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;

b. Goodwill, prudent and responsible in carrying out monitoring and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives;

c. Supervision for the benefit of the Company and is responsible to the General Meeting of Shareholders;

d. To advise or counsel to the Board of Directors relating to the management of the Company;

e. To advise the Board of Directors relating to the preparation of the vision, mission and other strategic plans set out in the Articles of Association;

f. Monitor and assess the Board of Directors regarding the level of success in running the corporation and report to Shareholders;
g. Monitoring the effectiveness of the process of openness and communication within the Company;
h. Following the development of its activities, both from the information provided by the Company's internal and external of the information coming from the media or from other sources;

i. If deemed necessary, may attend meetings of the working / coordination with the Board of Directors and all of his staff;
j. Make efforts to ensure that the Board of Directors and staff have to comply with legislation and other regulations in the management of the Company including all agreements and commitments made by the Company with third parties;

k. Applying consistently good corporate governance;

l. Monitor the effectiveness of corporate governance practices, among others, by holding regular meetings between Commissioners, the Board of Directors to discuss the implementation of good corporate governance in the Company;
m. Making Minutes of Meeting of the Board of

menyimpan salinannya;

n. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan perusahaan lain termasuk perubahannya;

o. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen,anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan asset Perusahaan dan manipulasi transaksi Perusahaan;

p. Melakukan pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris yang diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.

2) Terkait dengan Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham

a. Memberikan informasi yang relevan terkait pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham dan stakeholders berdasarkan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

b. Melakukan pemberitahuan dan pemanggilan RUPS apabila Direksi tidak melakukan pemberitahuan dan penyelenggaraan RUPS sebagaimana atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;

d. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan yang disertai saran untuk perbaikan kinerja tersebut;

e. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari RUPS;

f. Memberikan pendapat dan saran serta kriteria bagi Pemegang Saham dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

g. Mengajukan usulan kepada RUPS atas Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) bagi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat pada Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku;

h. Mengajukan calon Akuntan Publik (Auditor Eksternal) kepada RUPS berdasarkan usul dan seleksi yang dilakukan oleh Komite Audit dengan proses penunjukkan berdasarkan ketentuan

Commissioners and keep a copy;

n. Reporting to the Company regarding its ownership and / or their families in the company and other companies, including amendments;

o. Monitor and address the issue of conflict of interest at the level of management, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, including misuse of company assets and manipulation of the Company's transactions;

p. Doing the division of labor among the members of the Board of Commissioners are governed by their own, and to smooth the duties of the Board of Commissioners may be assisted by a Secretary to the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners at the expense of the Company.

2) Related to the Shareholders / General Meeting of Shareholders

a. Provide relevant information related to the supervision of the Board of Commissioners to the shareholders and stakeholders based on the applicable regulations in a timely, accurate, clear and objective.

b. Do notice and GMS if the Board of Directors does not perform the notification and implementation of GMS as at the request of one or more shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights or the Board of Commissioners within a maximum period of 15 (fifteen) days from the date of received the request of GMS;

c. To advise the GMS regarding Company Long Term Plan (RJPP) and CBP to the GMS on any matter of importance to the management of the Company;

d. Report immediately to the GMS if symptoms occur decreasing the Company's performance with suggestions for improvement of the performance;

e. Provide a report on the monitoring task has been carried out during the past financial year to the GMS in order to obtain liberation and discharge (acquit et decharge) of the GMS;

f. To advise and criteria for shareholders in terms of the appointment and dismissal of the Board of Directors;

g. Propose to the GMS on Key Performance Indicators for the Board of Commissioners in performing the function of monitoring and providing advice on the Board of Directors in accordance with the provisions of the legislation and statutes which apply;

h. Asking candidates Public Accountant (External Auditor) to the GMS based on proposals and the selection made by the Audit Committee with the appointment process under the provisions of the

pengadaan barang dan jasa Perusahaan;

l. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
j. Menunjuk salah seorang Anggota Direksi lain untuk melaksanakan tugas Anggota Direksi yang berhalangan dan untuk sementara melaksanakan tugas Direksi dalam hal Perusahaan pada suatu waktu oleh sebab apapun tidak mempunyai Anggota Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, Dewan Komisaris mengusulkan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut;
k. Menandatangani surat saham dan surat kolektif saham bersama Direktur Utama atau apabila Direktur Utama berhalangan, digantikan oleh salah seorang Direktur. Apabila Komisaris Utama berhalangan, maka digantikan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;
l. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.

3) Terkait dengan Rencana Kerja Perusahaan

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja Perusahaan;
b. Mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama;
c. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RKAP dalam rangka memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap RKAP yang telah disampaikan Direksi, selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun anggaran Perusahaan;
d. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP yang disiapkan oleh Direksi.

4) Terkait dengan Nominasi dan Remunerasi

a. Melakukan penelaahan dan pengawasan untuk memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi yang meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi;
b. Mengusulkan sistem nominasi dan seleksi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan, serta mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan;
c. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel;
d. Merumuskan dan menentukan serta mengusulkan kepada RUPS (jika diperlukan) terkait dengan

procurement of goods and services of the Company;

i. Provide explanations, opinions and advice to the GMS regarding the annual report, if requested;
j. The Directors appointed one another to carry out the duties of Directors Members are absent and temporarily perform duties of Directors in the Company at any time by any cause not have a Board of Directors, with the obligation not later than 30 (thirty) days after the vacancy occurs, BOC proposes the GMS to fill the vacancy;
k. Signed the collective share certificate shares and joint Managing Director or if the Director is absent, replaced by one Director. If the Commissioner is absent, then replaced by a member of the Board of Commissioners;
l. To advise the GMS on any other issues deemed important to the management of the Company.

3) Related to the Company Work Plan

a. Develop a work plan and budget of the Board of Commissioners for the period of the current year as part of our work plan;
b. Reviewing and commenting on the Work Plan and Budget (CBP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP) prepared the Board of Directors before being signed jointly;
c. Researching and reviewing and signing CBP in order to provide CBP approval or endorsement of the Board of Directors that have been submitted, no later than 60 (sixty) days prior to the commencement of the fiscal year of the Company;
d. Researching, reviewing and signing RJPP prepared by the Board of Directors.

4) Related to the Nomination and Remuneration

a. Reviewing and monitoring to ensure that the Company has policies and strategies nominations include organizational analysis processes, procedures and criteria for recruitment, selection and promotion;
b. Propose the nomination and selection system for candidates for the Board of Commissioners and Directors of the Company, and took them to the GMS for endorsement;
c. Ensure that the company has a transparent system of remuneration in the form of salary or emoluments, allowances and facilities that are fixed and which are variable incentive;
d. Formulate and determine and propose to the AGM (if necessary) related to remuneration policies in the

kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta berupa insentif dan tantiem yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi;

e. Mengevaluasi sistem imbalan Karyawan, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya, serta menyampaikan rekomendasi yang transparan minimal sekali dalam 2 (dua) tahun, mengenai:
   - Penilaian terhadap sistem imbalan Karyawan, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya;
   - Sistem dan tunjangan pensiun;
   - Sistem dan tunjangan lainnya dalam hal pengurangan Karyawan.

f. Memastikan adanya liability insurance untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi

g. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (jika dibentuk) atau komite lain yang telah dibentuk Perusahaan.

h. Sistem nominasi dan seleksi anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus dilaksanakan sedemikian rupa untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung-jawab, kemandirian dan kewajaran. Terkait dengan nominasi ini dapat dilakukan secara ad hoc pada saat diperlukan, yaitu menjelang pergantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

5) Terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dan Sumber Daya Manusia

a. Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan KPI Dewan Komisaris dengan sistem self assessment atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris;

b. Memberikan tanggapan dan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja;

c. Memberikan tanggapan dan rekomendasi penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dan/atau instrumen lainnya untuk disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan evaluasi lebih lanjut;

d. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;

e. Melakukan penelaahan dan pengawasan atas praktek manajemen pengembangan sumber daya manusia berdasarkan pedoman tata kelola Perusahaan khususnya kebijakan manajemen seperti manajemen karir di Perusahaan, sistem dan prosedur, mutasi dan demosi di Perusahaan ;

f. Melakukan penelaahan dan pengawasan atas implementasi sistem perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan Karyawan dan jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan,

form of salary or emoluments, allowances and facilities that are fixed and the form of incentives and bonuses that are variable for the Board of Commissioners and Board of Directors;

e. Evaluating Employee reward systems, allowances and other facilities, and to submit recommendations transparent at least once in 2 (two) years, regarding:
   - Assessment of the system of employee benefits, allowances and other facilities;
   - System and retirement benefits;
   - Systems and other benefits in terms of reduction of employees.

f. Ensure there is liability insurance for members of the Board of Commissioners and Board of Directors

g. In performing these duties and responsibilities, the Board may be assisted by the Nomination and Remuneration Committee (if formed) or other committees that have formed the Company.

h. System of nomination and selection of members of the Board of Commissioners and Board of Directors shall be carried out in such a way to ensure the implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Associated with this nomination can be done on an ad hoc basis when needed, ie before the turn of the Board of Commissioners and Board of Directors.

5) Related to Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Board of Directors and Human Resources

a. To evaluate the performance through the development of KPI of Board of Commissioners by the self assessment system or another system and then decided in a meeting of the Board of Commissioners;

b. Provide feedback and recommendations on the establishment of KPI of Directors at the beginning of each working year;

c. Provide feedback and recommendations based KPI performance assessment of Directors and / or other instruments to be submitted to the Shareholders as a further evaluation;

d. Ensuring that the Company has a policy of management and human resource development;

e. Reviewing and monitoring the management practices of human resource development based on corporate governance guidelines particularly management policies such as career management in the Company, systems and procedures, transference and demotion in the Company;

f. Reviewing and monitoring the implementation of the system of human resource planning, recruitment, selection, placement of employees and positions within the Company's organizational structure,

promosi dan demosi serta mutasi dan terkait dengan penetapan remunerasi;
g. Melakukan penelaahan atas rencana promosi dan mutasi pejabat satu level di bawah Direksi sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditetapkan Perusahaan;
h. Melakukan pengawasan atas hubungan industrial yang ada di lingkungan Perusahaan;
i. Melakukan pengawasan atas program pengembangan sumber daya manusia di Perusahaan, termasuk manajemen talenta untuk memastikan Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan Perusahaan;
j. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (jika dibentuk) atau komite lain yang telah dibentuk Perusahaan.

6) Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara menyeluruh di Perusahaan. Dalam menjalankan tugas ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite dibawahnya. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu Dewan Komisaris juga didorong untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Mendapatkan pemahaman lalu mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan dan penerapan manajemen risiko di Perusahaan, berbagai jenis risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem, metodologi dan infrastruktur serta penanganan risikonya;
b. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan penerapannnya, pertanggungjawaban Direksi dalam melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas;
c. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management (ERM) dalam Perusahaan;
d. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di Perusahaan;
e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
f. Dalam melaksanakan tugas Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (jika ada) atau komite lain yang telah dibentuk Perusahaan.

promotion and demotion as well as mutations and related remuneration;
g. Reviewing the promotion and transfer officials plan one level below the Board of Directors in accordance with the qualifications specified office of the Company;
h. Supervision over industrial relations that exist in the Company;
i. To supervise the human resource development program in the Company, including talent management to ensure the Company has competent human resources according to the needs of the Company;

j. In carrying out this obligation, the Board may be assisted by the Nomination and Remuneration Committee (if formed) or other committees that have formed by the Company.

6) Related to the Management of Risk Management

The Board of Commissioners shall ensure that the application of risk management has been carried out thoroughly in the Company. In carrying out this task, the Board of Commissioners may be assisted by the Committee under it. BOC perform an active role in monitoring the implementation of Risk Management conducted by the Board of Directors. In addition, the Board of Commissioners are also encouraged to carry out the following functions:
a. Gaining an understanding and evaluating the implementation of Risk Management in the Company, including but not limited to policies and implementation of risk management in the Company, various types of risks faced by the Company, strategies, systems, methodologies and infrastructure as well as risk management;
b. Evaluate the suitability of policies and penerapannnya, accountability of Directors in carrying out risk management policy referred to in subparagraph (a) above;
c. To coordinate the implementation and monitoring of the presence and degree of effectiveness of each component of the Enterprise Risk Management (ERM) in the Company;
d. Measuring the effectiveness of each component of the ERM has been applied in the Company;
e. Evaluate and decide petition the Board of Directors in respect of transactions that require the approval of the Board of Commissioners.
f. In carrying out the duties of the Board of Commissioners may be assisted by the Risk Oversight Committee (if any) or other committees that have formed the Company.

7) Terkait dengan Teknologi Informasi

a. Mendapatkan informasi lalu mengevaluasi atas sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan dan penerapannya, aplikasi yang digunakan;
b. Memberikan saran dan pendapat atas sistem teknologi informasi yang diterapkan Perusahaan.

8) Terkait dengan PKBL, Pengadaan Barang, dan Pencatatan serta Kualitas

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan melakukan penelaahan, memberikan saran dan pendapat atas:

a. Kebijakan, mekanisme publikasi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL);
b. Kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta penerapannya;
c. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
d. Kebijakan mutu dan pelaksanaannya di Perusahaan.

e. Dalam menjalankan tugas ini Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite yang ada di Perusahaan.

9) Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk:

a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, meliputi: sub system pengorganisasian, kebijakan, rencana kerja, pencatatan/akuntansi, pelaporan, pembinaan personil serta meliputi penilaian kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Auditor Internal;
b. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal, dengan menilai Kompetensi, Independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Eksternal;
c. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam Laporan Keuangan dan Non-Keuangan Tahunan serta Laporan Tahunan.

7) Associated with Information Technology

a. Obtain information on the system and then evaluate the information technology used by the Company, including but not limited to policies and implementation, applications used;

b. Provide advice and opinion on information technology systems are applied Company.

8) In relation to CSR, Procurement, and Recording and Quality

Board of Commissioners to supervise and giving advice to the Board on policies issued by the Company to undertake the review, provide advice and opinion on:

a. Policies, mechanisms publication Community Development Partnership Program (CSR);
b. Procurement policy and its implementation;

c. Accounting policies and the preparation of financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in Indonesia;
d. The quality policy and its implementation in the Company.
e. In carrying out this task the Board of Commissioners may be assisted by a committee in the Company.

9) Related to Internal Control System

BOC, assisted by the Audit Committee has the obligation to:

a. Ensure the effectiveness of the internal control system, comprising: a sub-system organization, policies, action plans, recording / accounting, reporting, personnel development and include assessment of competence and the number of resources, the scope of duties and authority as well as the independence of the Internal Auditor;
b. Ensure effective implementation of the tasks of the External Auditor, to assess the competence, as well as the independence of the External Auditor's scope of work;
c. Ensuring Internal Auditors, External Auditors and the Audit Committee has access to information about the Company is required to perform their duties;

d. Conduct an assessment of the accuracy of the information prepared for the other party, particularly in the Financial Statements and Non-Annual Financial and Annual Reports.

10)Terkait dengan Pelaporan

a. Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham;
b. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama;
c. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris;
d. Melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dan komite lainnya (jika ada) kepada RUPS;
e. Meneliti dan menelaah laporan triwulanan pelaksanaan RKAP yang disiapkan oleh Direksi serta memberi saran/rekomendasi yang diperlukan;

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan

11)Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS

PENGUNGKAPAN REMUNERASI
Bagan perhitungan Gaji/Honorarium Dewan Komisaris

10) Related to Reporting

a. Delivering the quarterly progress report the realization of Key Performance Indicators to the Shareholders;
b. Doing research and review of the reports of the Directors and the entire staff, particularly with regard to the specific tasks that have been decided jointly;

c. Researching and reviewing the reports of the committees under the Board of Commissioners;
d. Reported the appointment and dismissal of members of the Audit Committee and other committees (if any) to the GMS;
e. Researching and reviewing the implementation of RKAP quarterly reports prepared by the Board of Directors and provide advice / recommendations required;
f. Researching and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signed annual report

11) Duties and Obligations Related to Other

Carry out other obligations in the context of the task of monitoring and advising, to the extent not contrary to the laws, statutes and / or decision of the GMS.

DISCLOSURE OF REMUNERATION
Chart calculation Salary / Recompense BOC

Gaji/Honorarium = Gaji/Honorarium Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan

Salary/ Honorarium = Basic Salary/Recompense x Industry Factors Adjusment x Inflation Factors Adjusment x Position Factors

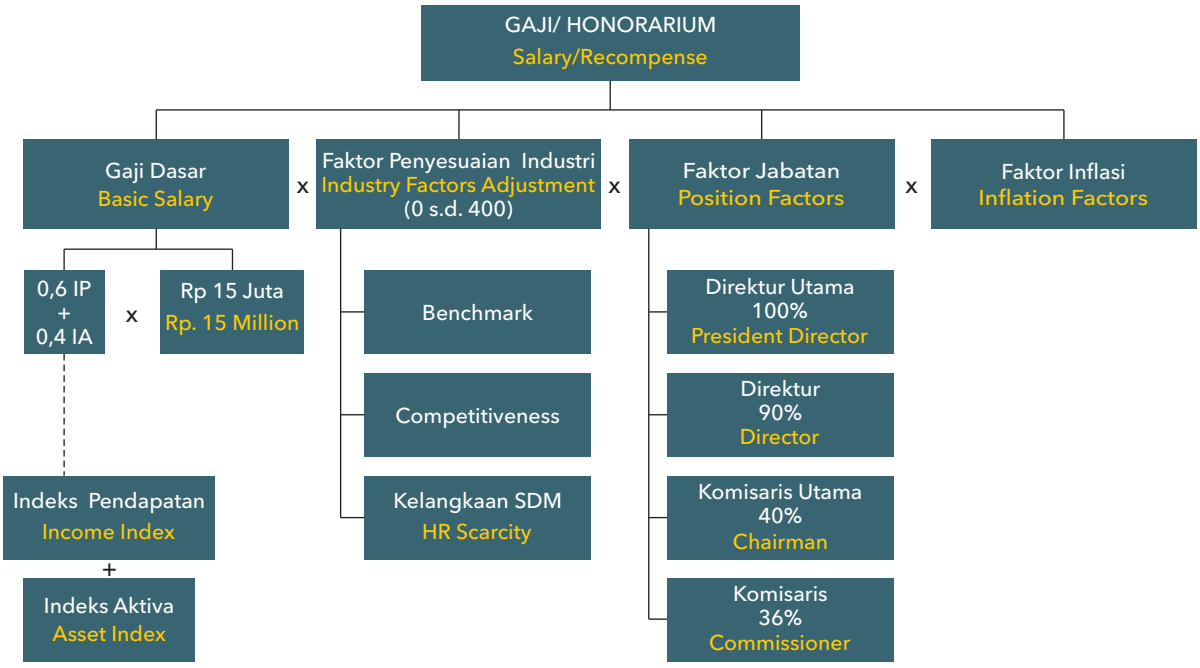

- Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks dasar/100) x Rp. 15 juta atau Rp. 17,5 juta atau Rp. 20 juta
- Indeks Dasar = 60% Indeks Pendapatan + 40% Indeks Total Aktiva
- Faktor Penyesuaian Industri = s.d. 400%
- Faktor Jabatan = [sesuai dengan uraian di bawah]
- Faktor Inflasi = 50% dari realisasi inflasi tahun sebelumnya yang dipergunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Besarnya Faktor Penyesuaian Industri ditetapkan oleh RUPS/Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.
Dalam mengusulkan besaran Faktor Penyesuaian Industri, Direksi menyertai usulan dimaksud dengan data dan informasi pendukung berupa:

a. Peningkatan kompleksitas pengelolaan perusahaan dan peningkatan tingkat persaingan
b. Peningkatan pencapaian kinerja yang signifikan dibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
c. Peningkatan penghasilan pada perusahaan sejenis dan/atau yang memiliki kompleksitas yang setara
d. Peningkatan tantangan dan/atau penugasan-penugasan spesiflk yang diberikan kepada Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan, yang memerlukan perhatian dan tanggung jawab yang melebihi kondisi sebelumnya
e. Rekomendasi/tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Besaran Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

a. Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%
b. Faktor Jabatan anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama
c. Faktor Jabatan Komisaris Utama/Ketua : 40% dari Direktur Utama Dewan Pengawas
e. Faktor Jabatan Anggota Komisaris : 36% dari Direktur Utama

RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan, maka besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
Pajak atas Honorarium ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.
Besarnya Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun dengan daya laku selama satu tahun buku perusahaan terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun

- Basic Salary / Recompense = (basic index / 100) x Rp. 15 million or Rp. 17.5 million or Rp. 20 million
- This index = 60% Income Index + 40% Total Assets Index
- Industrial Adjustment Factor = s.d. 400%
- Position Factor = [as described below]
- Inflation Factor = 50% from the previous year inflation was used in preparing the financial statements of the Central Government.

The magnitude of Industry Adjustment Factor determined by the GMS / Minister at the proposal of the Board of Directors, taking into account the similar industry sectors measured (benchmark), the conditions of competition (competitiveness) or the complexity of the business, and the scarcity of Human Resources.
In the proposed scale Industrial Adjustment Factor, Directors accompanying the proposal with the data and supporting information such as:

a. Increased complexity of managing the company and increase the level of competition
b. Increased achievement of significant performance compared to the industry or in comparison with previous years;
c. Increased earnings at similar companies and / or which has a complexity equivalent
d. Increased challenges and / or specific assignments given to the Board of Commissioners on the company concerned, which requires consideration and responsibilities that exceed the previous condition
e. Recommendations / written responses BOC / Board of Trustees.

Magnitude factors referred to in the above position is set with the following composition:

a. President Director: 100%
b. Members of The Boards of Directors: 90% of the President Director
c. Chairman: 40% of the President Director of the Board of Trustees
d. Commissioners: 36% of the President Director

GMS / Minister may determine the amount of different positions factors deemed more able to reflect on justice and fairness in the implementation of the tasks and responsibilities of each member of the Board of Commissioners.

In case there are other positions that are not listed in the composition Position factor, then the scale factor determined by the GMS Position / Minister.
Taxes on Wages and be a burden borne by the Company.
The amount of honorarium of the Board of Commissioners determined by the GMS / Minister each year with a validity of the company's annual books since January of the current year.

In the case of GMS / Minister did not specify the amount of honorarium of the Board of Commissioners for a

tertentu, maka besarnya Honorarium menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.

TUNJANGAN

Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pajak atas Tunjangan ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah 1 (satu) kali Honorarium. Dalam hal terdapat alasan yang khusus dan mendapat persetujuan RUPS/Menteri, maka besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dapat diberikan sebesar-besarnya 2 (dua) kali Honorarium.

Tunjangan Komunikasi
Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Komunikasi berupa biaya pemakaian mobile phone paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari Honorarium masing-masing yang bersangkutan.
Biaya komunikasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

Santunan Purna Jabatan
Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Santunan Purna Jabatan. Santunan Puma Jabatan sebagaimana dimaksud dalam bentuk Asuransi Puma Jabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya.
Pemberian Asuransi Puma Jabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya diatur sebagai berikut :

a. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
b. Premi, iuran atau istilah lain yang relevan yang dapat ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Honorarium dalam satu tahun yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun anggaran.
c. Pemilihan program untuk Santunan Puma Jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris setelah ditetapkan anggarannya oleh RUPS.

Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan sebagaimana dimaksud sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Tunjangan Pakaian
Tunjangan Pakaian dapat diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris. Tunjangan Pakaian sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direksi setelah anggarannya tercantum dalam RKAP .

particular year, then the amount of honorarium use the magnitude of the most established and enforced by the end of the GMS / Minister.

ALLOWANCE

Members of the Board of Commissioners may be given allowances that are tailored to the company's financial condition and ability and must not conflict with laws and regulations.
Tax on benefits and be a burden borne by the company.

Religious holiday allowance
Members of the Board of Commissioners may be given religious holiday allowance. Magnitude religious holiday allowance is 1 (one) time honorarium. In case there is a special reason and approved by the GMS / Minister, then the amount of religious holiday allowance can be given the maximum two (2) times the honorarium.

Communication Allowances
Members of the Board of Commissioners may be given in the form of Communications Allowance mobile phone usage fees shall not exceed 5% (five percent) of the honorarium each question.
Communication costs referred specified by the GMS / Minister.

Pension Rewards
Members of the Board of Commissioners may be granted Pension Rewards.
Pension Rewards referred to in the form of Pension Insurance, Insurance of Pension Fund or any other form.
Provision of Pension Insurance, Insurance of Pension Fund or any other form arranged as follows:

a. Given during his tenure (ranging lifted until it stops).
b. Premiums, dues or other relevant terms that can be borne by the company at most 25% (twenty five percent) of honoraria in one year is budgeted in the Work Plan and Budget (CBP) each fiscal year.
c. The selection of programs for Puma Position Compensation determined by each member of the Board of Commissioners after the budget set by the GMS.

Premi granted, dues or other relevant terms referred to already include premi of insurance for accident and death.

Clothing Allowance
Clothing allowance can be given to members of the Board of Commissioners. Clothing allowance referred established by the Board of Directors after the budget contained in CBP.

Tunjangan Transportasi
Kepada Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Transportasi. Tunjangan Transportasi dimaksud diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris apabila tidak diberikan Fasilitas Kendaraan oleh perusahaan. Jumlah Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud, ditetapkan untuk setiap bulan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

FASILITAS

Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud ditanggung dan menjadi beban perusahaan. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud di atas. Pemegang Saham dapat menuntut secara hukum terhadap Dewan Komisaris, yang melakukan penyalahgunaan Fasilitas.

Fasilitas Kendaraan
Perusahaan apabila mempunyai kondisi keuangan yang sehat dan mampu, dengan persetujuan Menteri/RUPS dapat menyediakan Fasilitas Kendaraan kepada Anggota Dewan Komisaris sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.

Dalam hal Perusahaan menyediakan Fasilitas Kendaraan, dan Anggota Dewan Komisaris tidak mau menggunakan kendaraan tersebut, maka kepada Anggota Dewan Komisaris, yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun biaya penggantian lainnya.

Spesifikasi dan standar kendaraan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
Dalam hal Anggota Dewan Komisaris tidak lagi menjabat, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud kepada perusahaan.

Dalam hal menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan/disediakan satu Fasilitas Kendaraan.

Fasilitas Kesehatan
Perusahaan memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Anggota Dewan Komisaris. Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.

Transportation Allowances
To the Members of the Board of Commissioners may be given Transport Allowance. Transport allowance is given to members of the Commissioners if not supplied by the company Vehicles facilities. Transport allowance amount referred to, are set for each month at most 20% (twenty percent) of the honorarium of each member of Commissioners concerned.

FACILITIES

Members of the Board of Commissioners may be given facilities adapted to the conditions and financial capability and must not conflict with laws and regulations. Tax arising from the provision of facilities as intended and be a burden borne by the company. Members of the Board of Commissioners are prohibited from abuse facilities referred to above. Shareholders may bring lawsuits against the Board of Commissioners, who do abuse Facility.

Facility of Vehicles
If the company has a healthy financial condition and capable, with the approval of the Minister / GMS can provide facilities to the Members of the Board of Commissioners Vehicles by one unit and its official vehicle maintenance and operating costs.

In the event that the Company provide Vehicle Facility, and Member of the Board of Commissioners do not want to use the vehicle, then the Members of the Board of Commissioners, which is concerned not given transportation allowance or other reimbursement costs.

Specifications and standards referred to in the above vehicles designated by the GMS / Minister.
In the case of members of the Board of Commissioners no longer in office, the period of 30 (thirty) days after being served, must return the vehicle referred to the company.

In the event served as a Member of the Board of Commissioners on more than one SOE and / or the subsidiary / joint venture, then the concerned only given / provided a vehicle facilities.

Health Facilities
The company provides health facilities to the members of the Board of Commissioners. Health facilities referred given to members of the Board in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses.

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Fasilitas Kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris beserta seorang istri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas Kesehatan;
b. Fasilitas Kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi :
   1) Rawat jalan dan obat;
   2) Rawat inap dan obat; dan
   3) Medical check-up.
c. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas Kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan;
d. Medical chek-up sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dan Fasilitas Pengobatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diberikan kepada isteri, suami, dan anak;
e. Medical check-up diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Dalam hal seseorang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan.

Perkumpulan Profesi

Perusahaan dapat mengikutsertakan Anggota Dewan Komisaris, sebagai anggota perkumpulan profesi paling banyak 2 (dua) perkumpulan.
Fasilitas Perkumpulan Profesi sebagaimana dimaksud diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.

Fasilitas Bantuan Hukum

Perusahaan wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu.

Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.

Health facilities referred granted with the following conditions:

a. Health facilities granted to members of the Board of Commissioners and a wife or a husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 years provided that if a child is not yet 25 years old never married or had worked so concerned not entitled to a health facility;
b. Health facilities are given by using the basic treatment and care in the country, which includes:
   1) Outpatient and medicines;
   2) Hospitalization and medicines; and
   3) Medical check-ups.
c. In the case of the treating physician to provide referrals for treatment abroad, the provision of health facilities can be granted full or in part by concerned financial capabilities;
d. Medical check-ups as referred to in paragraph b number 3) and treatment facilities abroad as referred to in point c is not given to wives, husbands, and children;
e. Medical check-ups are given 1 (one) times each year.

In the case of a person serving as a member of the Board of Commissioners on more than one SOE and / or the subsidiary / joint venture, then the concerned only given one health facility.

Professional associations

Companies can engage Members of the Board of Commissioners, as a member of the profession associations at most two (2) association.
Facilities Professional Association referred to are given only in the form of base money (cash register) and annual dues.

Legal Aid Facility

The Company shall provide facilities to members of the Legal Aid Board in the event of any act / acts for and on behalf of his position with regard to the intent and purpose as well as the company's business activities.

Members of the Board of Commissioners who will use the Legal Aid Facility, shall make a Statement on paper stamped enough that explains the position in question in a particular case.

Facilities referred to Legal Aid is given in the form of financing office services attorney / consultant covering the examination process as witnesses, suspects, and the defendant in the judiciary.

TANTIEM

Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada Anggota Dewan Komisaris dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan.

Pemberian Tantiem sebagaimana dimaksud, dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun buku yang bersangkutan.

Dalam hal RUPS menetapkan Tantiem yang lebih besar atau lebih kecil dari pada RKAP sebagaimana dimaksud pada butir (2), maka kelebihan atau kekurangan Tantiem dimaksud dapat diperhitungkan pada laporan keuangan tahun buku yang bersangkutan dan melakukan koreksi pembukuan apabila diperlukan.

Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris, dalam hal Perusahaan mengalami peningkatan kinerja walaupun Perusahaan masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya.

Perhitungan Tantiem dan Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud, didasarkan pada pertimbangan antara faktor-faktor :

a. Pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator); dan/atau
b. Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan tantiem atau insentif kinerja apabila pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator) lebih dari 70 % (tujuh puluh persen) dan Tingkat Kesehatan dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh).

Dalam hal Tingkat Kesehatan perusahaan ditargetkan dalam RKAP dengan nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh), anggota Dewan Komisaris, dapat diberikan tantiem atau insentif kinerja, apabila pencapaian Tingkat Kesehatan di atas target, dengan ketentuan pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator) lebih dari 70 % (tujuh puluh persen).

Pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang diperhitungkan dalam perhitungan Tantiem dan Insentif Kinerja maksimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen).

Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator) dan/atau Tingkat Kesehatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator) dan Tingkat Kesehatan BUMN.

TANTIEM

Companies can provide to members of the Board of Commissioners Tantiem in terms of company profit in the fiscal year concerned.

Giving Tantiem referred, budgeted and accounted for as an expense in the financial year concerned RKAP.

In the case of GMS set Tantiem larger or smaller than the RKAP as described in paragraph (2), then the excess or deficiency referred Bonus can be calculated in the financial statements of the financial year in question and make corrections if necessary bookkeeping.

The company can provide Tantiem the Board of Commissioners, in the case of the Company has increased the Company's performance despite still suffering losses in the financial year concerned or accumulated losses of the previous fiscal year.

Performance Incentive Bonus calculation, is based on the consideration of factors:

a. Achievement of Key Performance Indicator; and / or

b. Corporate Health Achievement Levels.

Members of the Board of Commissioners may be given bonuses or incentives when performance achievement Key Performance Indicator more than 70% (seventy percent) and Health Level to the value of more than 70 (seventy).

In terms of Health Level of company is targeted by RKAP with a value less than or equal to 70 (seventy), member of the Board of Commissioners, can be given bonuses or performance incentives, if the achievement Soundness above target, provided the achievement of Key Performance Indicator more than 70% (seventy percent).

Achievement of Key Performance Indicators are calculated in Performance Incentive Bonus calculation and a maximum of 150% (one hundred and fifty percent).

Key Performance Indicator and / or the rate set by the GMS / Minister in accordance with the provisions of the legislation regarding Key Performance Indicator and Health Level of SOEs.

Komposisi besarnya Tantiem dan Insentif Kinerja ditetapkan sebagai berikut :
a. Direktur Utama : 100%
b. Anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama

c. Komisaris Utama/Ketua Dewan : 40% dari Direktur Utama Pengawas
d. Anggota Komisaris/Anggota : 36% dari Direktur Utama

Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada butir (6), besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

Pajak Penghasilan atas Tantiem dan Insentif Kinerja ditanggung dan menjadi beban masing-masing Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Composition magnitude Performance Bonus and Incentives defined as follows:
a. Director: 100%
b. Member of the Board of Directors: 90% of the President Director
c. Chairman of the Board: 40% of the President Director of Trustees
d. Commissioners / Members: 36% of the President Director

In case there are other positions that are not listed in the composition Occupation factor referred to in point (6), scale factor determined by the GMS / Minister.

Income Tax on Bonus and Incentive Performance and become a burden borne by each Member of the Board of Commissioners concerned.

TABEL REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2014
Remuneration table of The Board of Commissioners 2014

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

HONORARIUM	TUNJANGAN Allowances	TUNJANGAN LAINNYA Other Allowances	ASPURJAB Pension Insurance
719,100,000	143,820,000	59,925,000	179,775,000

TABEL KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2014
The presence of The Board of Commissioners Meetings 2014

NAMA Name	JUMLAH RAPAT Number of Meeting	KEHADIRAN Attendance	KETERANGAN Note	PROSENTASE Percentage
KOMISARIS:				
Soleman B. Ponto	15	15		100%
Djoko Agung Harijadi	15	14	dinas luar I outstation	92%
Slamet Effendy Yusuf	15	10	dinas luar I outstation	67%
Nuning S.R. Wulandari	15	13	dinas luar I outstation	87%

Deskripsi Dewan Direksi
Description of The Board of Directors

1. Kebijakan Umum

Tugas dan Kewajiban Direksi dalam mengurus Perusahaan adalah:

a. Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian maksud dan tujuan;
c. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
d. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
e. Membuat daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;

f. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;
g. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan serta dokumen keuangan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaiman dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
h. Memelihara dan menyimpan ditempat kedudukan Perusahaan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan dan dokumen Perusahaan lainnya;

i. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
j. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
k. Menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan;

1. General Policy

Duties and Liabilities of Directors in care of the Company are:

a. Carry out their duties in good faith for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives, and to ensure that the Company exercises its social responsibility and considering the interests of the various stakeholders in accordance with the provisions of the legislation;

b. Energies, thoughts, attention and full devotion to duty, obligation and the achievement of the aims and objectives;
c. Complying with the Articles of Association and regulations and shall implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;
d. Seek and guarantee the implementation of the business and activities of the Company in accordance with the purpose and business activities;
e. Make a list of Shareholders, the Special Register, Minutes of Meeting Minutes of the AGM and Board of Directors;
f. Reporting to the Company regarding its ownership and / or his family (wife / husband and children) in the Company and other companies, including any amendments thereto;
g. Make the Annual Report as a form of accountability management of the Company and the Company's financial documents, as well as the Company's financial documents as mentioned in the Law on Corporate Documents;
h. Maintaining and storing the domicile of the Company Register of Shareholders, the Special Register, Minutes of the AGM, the Minutes of Meeting Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Annual Report and financial documents and other company documents;
i. Provide regular reports in the manner and time in accordance with applicable regulations and other reports whenever requested by the Board of Commissioners;
j. Hold and maintain the Company's accounting and administration in accordance with the standards in force for the Company;
k. Applying GCG consistently and continuously guided by the provisions applicable with regard to regulations, and norms as well as the Articles of Association of the Company;

l. Memastikan bahwa Auditor Eksternal, Auditor Internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
m. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan;
n. Melakukan pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas tersebut;
o. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perusahaan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
   1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
   3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Terkait dengan Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham

a. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir;
c. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
d. Menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. Dalam hal ada anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud di atas, harus disebutkan alasannya secara tertulis;
e. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa;
f. Mengumumkan Laporan Tahunan Perusahaan

l. Ensure that the External Auditors, Internal Auditors and the Audit Committee, and other committees if any, have access to the accounting records, supporting data, and information about the Company, to the extent necessary to perform their duties;
m. Each member of the Board of Directors personally take full responsibility if the concerned fault or neglect their duties for the benefit and the Company's business;
n. Doing roles and responsibilities between the Board of Directors are determined by decision of the Directors in the case of the GMS does not specify the division of tasks;
o. Members of the Board of Directors can not be held responsible for the loss of the Company, if such person can prove that:
   1) The loss is not due to error or negligence;
   2) Has been doing the maintenance of good faith and prudence to the benefit of and in accordance with the purposes and objectives;
   3) Do not have a conflict of interest, whether directly or indirectly, for the management of the resulting losses; and
   4) Has taken action to prevent the continuation of such losses.

2. Related to the Shareholders / General Meeting of Shareholders

a. Organize and store the Register of Shareholders and documents relating to the AGM in accordance with laws and regulations;
b. Develop and submit the Annual Report to the AGM after review by the Board of Commissioners at the latest within a period of five (5) months after the fiscal year ending Company;
c. Give an explanation to the AGM regarding the Annual Report;
d. Draw up an annual report in accordance with the legislation in force, signed by all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted at the AGM. The annual report must be provided in the Company's office no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the AGM held and available for inspection by the shareholders with a written request. In the event that any member of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners did not sign the annual report referred to above, it should be mentioned reasons in writing;
e. Calling and organizing the Annual General Meeting and / or Extraordinary General Meetings;
f. Announced in the Company's Annual Report 2 (two)

dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar yaitu untuk rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS;

g. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
h. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham di Kantor Perusahaan dan diberikan secara cuma-cuma jika diminta;
i. Membuat risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS;
j. Memberikan salinan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham;
k. Meminta persetujuan RUPS jika Perusahaan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, termasuk pengalihannya;
l. Mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian (PKB) dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Meminta persetujuan RUPS jika Perusahaan ingin menambah besarnya jumlah modal Perusahaan. RUPS dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
n. Menyampaikan dokumen Perusahaan yang diperlukan dalam RUPS;
o. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi yang mewakili Pemegang Saham dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.

3. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja Perusahaan

a. Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perusahaan;
b. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
c. Menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana

Indonesian language daily newspaper published and circulated widely / national in the territory of the Republic of Indonesia and, if deemed necessary by the Board of Directors in a newspaper that is for the planned merger, consolidation and acquisition of the Company no later than 30 (thirty) calendar days before the GMS;

g. Requesting approval of the GMS to divert or guarantees of debts of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets in one or more transactions, whether in relation to one another or not;
h. Provide materials to the Shareholders General Meeting at the Corporate Office and provided free of charge if requested;
i. Make treatise GMS shall contain at least the time, agenda, participants, notions developed in the GMS, and the decision of the GMS;
j. Provide a copy of the Minutes of the AGM to shareholders;
k. Requesting approval of the AGM if the Company wants to buy back shares that have been issued, including the transfer;
l. Approval of the General Meeting of Shareholders to make an agreement (PKB) with the employees associated with the employees who are not required by or exceed the provisions of the legislation;
m. Requesting approval of the GMS if the Company would like to add a large amount of capital. GMS may delegate this authority to the Board for a maximum period of 1 (one) year;
n. Companies are required to submit documents in the GMS;
o. In voting, members of the Board of Directors Shareholders representing prohibited from acting as a power of Shareholders.

3. Related to the Company's Strategy and Work Plan

a. Set out the vision, mission, goals, strategy and corporate culture;
b. Prepare a draft Work Plan and Budget (RKAP) which has been signed by all members of the Board of Directors to be submitted to the Board for review and signed before being submitted to the Shareholders. RKAP draft which has been signed by all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be submitted to the Shareholders no later than 60 (sixty) days prior to the relevant financial year RKAP for approval by the GMS to the provisions applicable;
c. Prepare a plan of the Company's Long Term Plan (RJPP) which is a strategic plan that includes goals

strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RJPP dan diajukan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum periode RJPP berakhir;

d. Melaksanakan dan mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam RJPP;
e. Melaksanakan dan mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP melalui penetapan target kinerja yang diturunkan di tingkat satuan kerja dan jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan;
f. Menerima, menampung dan membahas usulan peluang bisnis yang disampaikan oleh karyawan/anggota Direksi/Dewan Komisaris;

g. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris, usulan peluang bisnis sebagaimana dimaksud butir f di atas disertai studi kelayakan untuk dibahas dengan Dewan Komisaris untuk peluang bisnis yang apabila ditindaklanjuti oleh Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

h. Membahas isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan kinerja Perusahaan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Direksi. Apabila, menurut pendapat Direksi, perubahan lingkungan bisnis tersebut berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan, Direksi menyampaikan isu-isu tersebut kepada Dewan Komisaris untuk meminta arahan Dewan Komisaris atas isu-isu tersebut.

4. Terkait dengan Manajemen Risiko

Membangun, melaksanakan dan mengembangkan sistem manajemen risiko Perusahaan agar Direksi dalam mengambil setiap keputusan/tindakan dapat mempertimbangkan risiko usaha secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

5. Terkait dengan Teknologi Informasi

a. Menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif;
b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi kepada Dewan Komisaris;
c. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di Perusahaan.

6. Terkait dengan Kegiatan Usaha PKBL, Pengadaan dan Kualitas

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan lainnya, Direksi berkewajiban atas hal-hal berikut:
a. Membuat dan melaksanakan kebijakan, Program

and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years, within a period of one (1) year prior to the expiration of the period RJPP and submitted to the Board no later than 60 (sixty) days before the period expires RJPP;

d. Implement and facilitate the long-term goals listed in RJPP;

e. Implement and facilitate the short-term targets are listed in the RKAP through establishing performance targets are derived in the work unit level and position in the organizational structure of the Company;

f. Accept, accommodate and discuss business opportunities proposals submitted by employees / members of the Board of Directors / Board of Commissioners;
g. Deliver to the Board of Commissioners, the proposed business opportunities referred to above point f with a feasibility study to be discussed with the Board of Commissioners for business opportunities when acted upon by the Board of Directors require the approval of the Board of Commissioners as set out in the Articles of Association;
h. Discussing issues of the changing business environment and its problems are expected to have an impact on the business and performance of the Company at any time deemed necessary by the Board of Directors. If, in the opinion of the Directors, changes in the business environment have a major impact on the operations and performance of the Company, the Board of Directors convey these issues to the Board of Commissioners to request directed by the Board of Commissioners on these issues.

4. Related to Risk Management

Develop, implement and develop the Company's risk management system so that the Board of Directors in making any decision / action may consider business risks in an integrated manner which is part of the GCG program implementation.

5. Related to Information Technology

a. Establish governance effective information technology;
b. Submit an information technology governance to the Board of Commissioners;
c. Maintain and evaluate the quality of information technology governance functions in the Company.

6. Related to Business Activities of PKBL, Procurement and Quality

In carrying out business activities other company, the Board of Directors liable for the following:
a. Create and implement policies of Community

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
b. Membuat dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa;
c. Membuat kebijakan mutu serta pelaksanaanya di Perusahaan.

7. Terkait dengan Sumber Daya Manusia

a. Menetapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
b. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi sistem perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan Karyawan dan jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan, promosi dan demosi serta mutasi;
c. Memastikan penempatan Karyawan sesuai dengan kriteria jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan;
d. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris atas rencana promosi Pejabat satu level di bawah Direksi;
e. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Karyawan sesuai dengan kompetensi jabatan;
f. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja dan jabatan dalam organisasi secara obyektif dan transparan.

8. Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi

a. Memastikan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat satu level di bawah Direksi telah melaporkan harta kekayaan kepada Lembaga Pemerintah yang berwenang.
b. Melakukan sosialisasi atas program pengendalian gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

a. Menetapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
b. Membangun Sistem Pengendalian Internal sehingga mampu mengarahkan dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya tindakan penyimpangan pada Perusahaan;
c. Memberikan arahan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan serta melakukan tindak lanjut dan monitoring atas rekomendasi yang diberikan oleh SPI.
d. Memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berjalan efektif;
e. Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Intern diatur dalam Piagam Satuan Pengawasan Intern yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Development and Partnership Programs (PKBL);
b. Creating and implementing procurement policies and / or services;
c. Creating a quality policy and its implementation in the Company.

7. Related to Human Resources

a. The Company establishes the organizational structure complete with details and duties;
b. Develop and implement guidelines for the management of human resources which include human resource planning systems, recruitment, selection, placement of employees and positions within the Company's organizational structure, promotion and demotion and transfer;
c. Ensure placement of employees in accordance with the criteria of positions within the Company's organizational structure;
d. Deliver to the Board of Commissioners on promotional plans Officials one level below the Board of Directors;
e. Ensuring the implementation of the education and training of employees in accordance with the job competency;
f. Implement measurement and performance assessment for work units and positions within the organization objectively and transparently.

8. In relation to the Business Ethics and Anti-Corruption

a. Ensure that all members of the Board of Commissioners, Directors and Officers of one level below the Board of Directors has reported assets of the authorized government agency.
b. To socialize over control program gratification accordance with laws and regulations applicable.

9. Related to Internal Control System

a. Establish a policy on effective internal control system to secure investments and assets of the Company;
b. Build Internal Control System that is able to direct and guide subordinates in the execution of their duties to achieve the goals and objectives of the organization that has been established, and is able to prevent the occurrence of irregularities in the actions of the Company;
c. Provide direction implementation of the Company's internal control systems and perform follow-up and monitoring of the recommendations given by the SPI.
d. Ensuring the company's internal control systems are effective;
e. Further elaboration of the duties and functions of the Internal Audit Unit is set in the Internal Audit Charter which has been established by the Decree of the Board of Directors.

10. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

a. Mengungkapkan penerapan GCG di Perusahaan dan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan informasi lainnya kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif;
b. Menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta Penghasilan yang diterima dari Perusahaan dan anak perusahaan/perusahaan patungan, untuk dimuat dalam LaporanTahunan Perusahaan;
c. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksi Perusahaan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan individu atau kelompok.

11. Terkait hubungan dengan Stakeholders

a. Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan Karyawan, Pengguna Jasa, Pemasok dan stakeholders lainnya;
b. Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan;
c. Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

12.Terkait Sistem Akuntansi dan Pembukuan

a. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit;
b. Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
c. Memastikan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan

10. Related to the Disclosure and Confidentiality of Information

a. Reveals the implementation of GCG and important information in the Annual Report and Financial Statements and other information to other parties, according to laws and regulations applicable in a timely, accurate, clear and objective;

b. Convey information about the identity, the main occupations, office of the Board of Commissioners in Subsidiary / joint ventures and / or other companies, including meetings are conducted in any one financial year (internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners), as well as income received of the Company and its subsidiaries / joint venture, to be published in LaporanTahunan Company;

c. Confidential information obtained while serving as a Member of Board of Directors of the Company shall remain confidential in accordance with the legislation in force;
d. In terms of maintaining the confidentiality of information of the Company, the Directors are required to give priority to the interests of the Company rather than the interests of individuals or groups.

11. Related to the relationship with Stakeholders

a. Ensuring the security of stakeholder rights arising under the laws in force and / or agreements made by the Company with employees, service users, suppliers and other stakeholders;

b. Ensure that the assets and business locations as well as other Company facilities, comply with legislation relating to health and safety and environmental protection;

c. Provide a work environment free from all forms of pressure (harassment) which may arise as a result of differences in character, personal circumstances and cultural background of a person.

12. Related to the Accounting and Bookkeeping

a. Develop Financial Statements by Financial Accounting Standards and submit to the public accountant to audit;
b. Develop appropriate accounting system and the Financial Accounting Standards based on the principles of internal control, especially the function of obtaining, recording, storage and supervision;

c. Ensure accounting policies and the preparation of financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in Indonesia;
d. Hold and maintain the Company's accounting and

administrasi Perusahaan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.

administration to produce an orderly bookkeeping administration, the adequacy of working capital to capital cost efficient, good structure and a solid balance sheet, statements and analysis of timely and accurate financial and other principles in accordance with the standards in force for a company.

13. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Duties and Liabilities Related to Other

Running other obligations in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association or set by the General Meeting of Shareholders based on the legislation.

Rapat Dewan Direksi
Meetings of The Board of Directors

TABEL KEHADIRAN RAPAT DEWAN DIREKSI TAHUN 2014
The presence of The Board of Directors' Meetings 2014

NAMA Name	JUMLAH RAPAT Number of Meeting	KEHADIRAN Attendance	KETERANGAN Annotation	PROSENTASE Percentage
Tikno Sutisna (Dirut)	46	46		100%
Tikno Sutisna (Pjs. Dir. Marketing)	29	29		100%
Adiaris	46	45	Cuti 24/12 | Leave	97.8%
Nilawati Djuanda*)	35	34	Cuti 15/12 | Leave	97'2%
Andy K. Saputra **)	11	11		100%
Dayu Padmara Rengganis **)	11	11		100%

TABEL KEHADIRAN RAPAT KOMISARIS DENGAN DIREKSI TAHUN 2014
The presence of The Board of Commissioners and Board of Directors Meetings 2014

NAMA Name	JUMLAH RAPAT Number of Meeting	KEHADIRAN Attendance	KETERANGAN Annotation	PROSENTASE Percentage
KOMISARIS | Commissioners:				
Soleman B. Ponto	15	15		100%
Djoko Agung Harijadi	15	14	dinas luar | outstation	92%
Slamet Effendy Yusuf	15	10	dinas luar | outstation	67%
Nuning S.R. Wulandari	15	13	dinas luar | outstation	87%
DIREKSI | Directors:				
Tikno Sutisna	15	15		100%
Adiaris	15	15		100%
Nilawati Djuanda*)	11	11		100%
Andy K. Saputra **)	4	4		100%
Dayu Padmara Rengganis **)	4	4		100%

*) Diangkat sebagai anggota Direksi PT INTI (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-56/MBU/2014, tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

**) Berhenti sebagai anggota Direksi PT INTI (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-56/MBU/2014, tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

*) Appointed as a member of the Board of Directors of PT INTI (Persero) in accordance with the Decree of the Minister of SOEs Number: SK-56 / MBU / 2014, dated March 18, 2014 on Termination and Appointment of Members of Board of Directors of the Company (Persero) PT IndustriTelekomunikasi Indonesia.

**) Ended his term as a member of the Board of Directors of PT INTI (Persero) in accordance with the Decree of the Minister of SOEs Number: SK-56 / MBU / 2014, dated March 18, 2014 on Termination and Appointment of Members of Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Uraian Mengenai Kebijakan Remunerasi Bagi Direksi
Description of The Remuneration Policy for The Board of Directors

Penghasilan Direksi dapat terdiri dari :
1. Gaji;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan
4. Tantiem

Board of Directors remuneration may consist of:
1. Salary;
2. Allowance;
3. Facilities, and
4. Tantiem

1. GAJI
Anggota Direksi diberikan Gaji yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Gaji Direksi ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

1. SALARY
Member of the Board of Directors granted salary adjusted to the conditions and the financial ability of the Company and shall not be inconsistent with the laws and regulations set by the Board of Directors Salary following formula:

Gaji/Honorarium = Gaji/Honorarium Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan

Salary/ Honorarium = Basic Salary/Recompense x Industry Factors Adjusment x Inflation Factors Adjusment x Position Factors

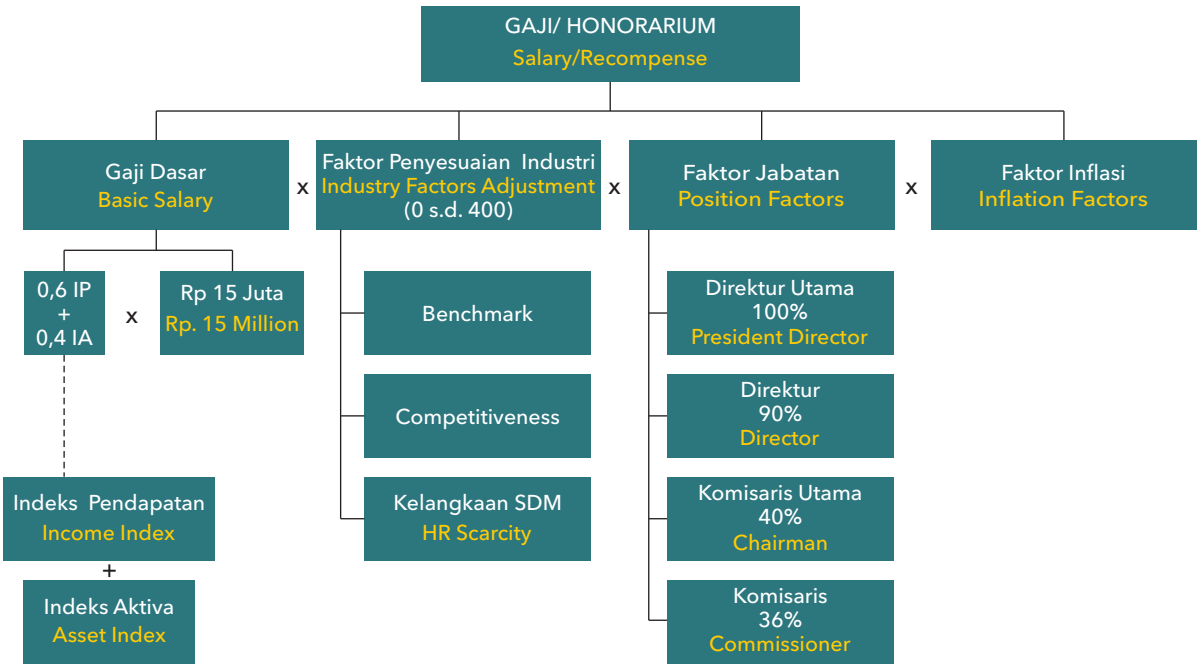

TABEL REMUNERASI DEWAN DIREKSI TAHUN 2014
Remuneration table of The Board of Directors 2014

(dalam Rupiah) (in Rupiah)

HONORARIUM	TUNJANGAN Allowances	TUNJANGAN LAINNYA Other Allowances	ASPURJAB Pension Insurance
1,368,000,000	547,200,000	114,000,000	342,000,000

Gaji/ Honorarium Dasar Salary/ Basic Honorarium	= (Indeks Dasar/100) x Rp. 15 Juta, Rp. 17,5 Juta atau Rp. 20 Juta = (Basic Index/100) x Rp. 15 Million Rp. 17.5 million or Rp. 20 Million
Indeks Dasar Basic Index	= 60% Indeks Pendapatan + 40% Indeks Total Aktiva = 60% Income Index + 40% Index of Total Assets
Faktor Penyesuaian Industri Industrial Adjusment Factor	= s.d. 400% = to 400%
Faktor Jabatan Factor of Position	= [Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)] = [Under the Provision referred to in paragraph (4)]
Faktor Inflasi Inflation Factor	= $(1 + 50\% \times \text{Inflasi})^n$ = $(1 + 50\% \times \text{Inflation})^n$
Inflasi Inflation	= Inflasi tahun sebelumnya yang dipergunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat = Inflation previous year used in order preparation of the Financial Statements of the Government
n	= Tahun sebelum Tahun Buku yang bersangkutan dikurangi Tahun Dasar (2011) = Year prior Fiscal Year, reduced Base Year (2011)
Rp. 15 Juta Rp. 15 Million	= bagi BUMN yang gaji/honorarium Direktur Utama tahun 2012 telah mencapai Rp. 100 Juta = For SOE salary / honorarium Director in 2012 has reached Rp. 100 Million
Rp. 17,5 Juta Rp. 17.5 Million	= bagi BUMN yang gaji/honorarium Direktur Utama tahun 2012 telah mencapai Rp. 50 Juta dan di bawah Rp. 100 Juta = For SOE salary / honorarium Director in 2012 has reached Rp. 50 Million and below Rp. 100 Million
Rp. 20 Juta Rp. 20 Million	= bagi BUMN yang gaji/honorarium Direktur Utama tahun 2012 di bawah Rp. 50 juta = For SOE salary / honorarium Director in 2012 under Rp. 50 million

Besarnya Faktor Penyesuaian Industri ditetapkan oleh RUPS/Menteri atas usul Direksi, dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.

Dalam mengusulkan besaran Faktor Penyesuaian Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi menyertai usulan dimaksud dengan data dan informasi pendukung berupa:

a. Peningkatan kompleksitas pengelolaan perusahaan dan peningkatan tingkat persaingan di industri yang bersangkutan;
b. Peningkatan Pencapaian kinerja yang signifikan dibandingkan dengan industri atau dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
c. Peningkatan penghasilan pada perusahaan sejenis dan/atau yang memiliki kompleksitas yang setara;
d. Peningkatan tantangan dan/atau penugasan

The magnitude of Industry Adjustment Factor determined by the GMS / Minister at the proposal of the Board of Directors, taking into account the similar industry sectors measured (benchmark), the conditions of competition (competitiveness) or the complexity of the business, and the scarcity of Human Resources.

In the proposed scale Industrial Adjustment Factors referred to in paragraph (3), the Board of Directors accompanying the proposal with the data and supporting information such as:

a. Increased complexity of managing the company and increase the level of competition in the relevant industries;
b. The achievement of a significant increase in performance compared to the industry or in comparison with previous years
c. Increased earnings at similar companies and / or which has a complexity equivalent;
d. Increased challenges and / or assignment of specific

penugasan spesifik yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas pada perusahaan yang bersangkutan, yang memerlukan perhalian dan tanggung jawab yang melebihi kondisi sebelumnya;
e. Rekomendasi/tanggapan tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Besaran Faktor Jabatan ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
a. Faktor Jabatan Direktur Utama : 100%
b. Faktor Jabatan anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama

RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing masing anggota Direksi. Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan maka besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

Pajak atas Gaji sebagaimana dimaksud di atas ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.
Besarnya Gaji anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun dengan daya laku selama satu tahun buku Perusahaan terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besamya Gaji anggota Direksi untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.

2. TUNJANGAN

Anggota Direksi dapat diberikan Tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pajak atas Tunjangan sebagaimana dimaksud di atas, ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Anggota Direksi dapat diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud di atas adalah 1 (satu) kali Gaji. Dalam hal terdapat alasan yang khusus dan mendapat persetujuan RUPS/Menteri, maka besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dapat diberikan sebesar-besaranya 2 (dua) kali Gaji.

2. Tunjangan Komunikasi

Anggota Direksi dapat diberikan Tunjangan Komunikasi berupa biaya pemakaian mobile phone sebesar pemakaian (at cost).
Biaya komunikasi sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

assignments given to the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Board of Trustees at the company in question, which requires perhalian and responsibilities that exceed the previous condition;

e. Recommendations / written responses BOC / Board of Trustees.

Magnitude Position Factors set with the following composition:
a. Position Factor of President Director: 100%
b. Position Factor of member of Directors: 90% of the President Director

GMS / Minister may determine the amount of different positions factor with the provisions referred to above when it is more able to reflect on justice and fairness in the implementation of tasks and responsibilities for each member of the Board of Directors. In case there are other positions that are not listed in the composition of the scale Position Factor determined by the GMS / Minister.

Tax on Salaries referred to above and be a burden borne by the Company.
The amount of salary of the members of the Board of Directors determined by GMS / Minister each year with validity for the financial year the Company beginning January of the current year.
In the case of GMS / Minister did not specify the magnitude of Salary member of the Board of Directors for a given year, then the amount of salary using the latest mass set and enforced by the GMS / Minister.

2. ALLOWANCES

Member of the Board of Directors may be given allowances that are tailored to the company's financial condition and ability and must not conflict with the laws - undangan. Tax on benefits referred to above, and a burden borne by the company.

1. Religious Holiday Allowance

Member of the Board of Directors may be given religious holiday allowance.
Magnitude religious holiday allowance referred to above is 1 (one) time salary. In case there is a special reason and approved by the GMS / Minister, then the amount of religious holiday allowance can be made for up-besaranya 2 (two) times the salary.

2. Communication Allowances

Member of the Board of Directors may be given in the form of Communications Allowance mobile phone usage fees for the use of (at cost).
Communication costs referred to above are set by the GMS / Minister.

3. Santunan Purna Jabatan

Anggota Direksi dapat diberikan Santunan Purna Jabatan. Santunan Purna Jabatan sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada anggota Direksi dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya. Pemberian Asuransi Puma Jabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut :

a. Diberikan kepada Anggota Direksi selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
b. Premi, iuran atau istilah lain yang relevan yang dapat ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun anggaran.
c. Pemilihan program untuk Santunan Puma Jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi setelah ditetapkan anggarannya oleh RUPS.
d. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan sebagaimana dimaksud, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

4. Tunjangan Pakaian

Tunjangan Pakaian dapat diberikan kepada Anggota Direksi. Tunjangan Pakaian sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direksi setelah anggarannya tercantum dalam RKAP .

Tunjangan Khusus

Kepada Anggota Direksi diberikan pula tunjangan lain yang dapat berupa Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Perumahan, dan Tunjangan Biaya Utilitas.

1. Tunjangan Cuti Tahunan

Tunjangan Cuti Tahunan diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Gaji. Tunjangan Cuti Tahunan tetap diberikan kepada Anggota Direksi walaupun hak cuti tidak diambil, atau tidak diberikan karena kepentingan perusahaan. Tunjangan Cuti Tahunan diberikan setelah Anggota Direksi telah bekerja minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

2. Tunjangan Cuti Besar

Tunjangan Cuti Besar diberikan paling banyak 2 (dua) kali gaji dan tidak diberikan Tunjangan Cuti Tahunan pada tahun yang bersangkutan. Tunjangan Cuti Besar tetap diberikan kepada Anggota Direksi walaupun hak cuti tidak diambil atau tidak diberikan karena kepentingan perusahaan. Tunjangan Cuti Besar diberikan setelah anggota Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan.

3. Pension Rewards

Member of the Board of Directors may be granted Pension Allowance. Pension Allowance referred to above is given to members of the Board of Directors in the form of Pension Insurance, Insurance of Pension Fund or any other form. Provision of Pension Insurance, Insurance of Pension Fund or any other form as shall be prescribed as follows:

a. Awarded to Members of the Board of Directors during his tenure (ranging lifted until it stops).
b. Premiums, dues or other relevant terms that can be borne by the company at most 25% (twenty five percent) of the salary in a year is budgeted in the Work Plan and Budget (RKAP) each fiscal year.
c. The selection of programs for Puma Position Compensation determined by each member of the Board of Directors after the budget set by the GMS.
d. Granting premy, dues or other relevant terms referred to, already includes insurance premy for accident and death.

4. Clothing Allowances

Clothing allowance can be given to the Board of Directors. Clothing allowance referred established by the Board of Directors after the budget contained in RKAP.

Special Allowances

To the Board of Directors given also other Allowances that can be Allowances Annual Leave, Long Vacancy Allowance, Housing Allowance and Cost Utility Allowance.

1. Allowance of Annual Leave

Benefits Annual Leave is given each year at most 1 (one) time salary. Annual Leave Allowance still be given to the Board of Directors although entitlement not taken, or not given because the interests of the company. Annual Leave Allowance granted after the Board of Directors have worked a minimum of six (6) consecutive months.

2. Leave Large Allomances

Large leave allowance granted at most two (2) times the salary and allowances Annual Leave is not granted during the year. Leave allowances Great stay granted to the Board of Directors Members although entitlement not taken or not given because the interests of the company. Leave allowance granted after members of the Board of Directors of the work three (3) consecutive years in the period of office.

3. Tunjangan Perumahan
Tunjangan Perumahan hanya dapat diberikan apabila Perusahaan tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan.

Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Gaji dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut:
a. Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Negara
b. Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Provinsi
c. Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk wilayah Kabupaten dan Kota.

Tunjangan Perumahan dapat disesuaikan setiap tahun dengan memperhitungkan faktor inflasi di bidang properti berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau instansi lain yang berwenang.

4. Tunjangan Biaya Utilitas
Tunjangan Biaya Utilitas diberikan secara at cost paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Tunjangan Perumahan setiap bulan.

3. FASILITAS
Anggota Direksi dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas ditanggung dan menjadi beban perusahaan. Anggota Direksi dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud di atas. Pemegang Saham dapat menuntut secara hukum terhadap Anggota Direksi yang melakukan penyalahgunaan Fasilitas.

1. Fasilitas Kendaraan Atau Tunjangan Transportasi
Perusahaan dapat menyediakan tunjangan transportasi atau fasilitas berupa kendaraan kepada Anggota Direksi sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.

2. Fasilitas Kesehatan
Perusahaan wajib memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Anggota Direksi dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.

3. Fasilitas Perkumpulan Profesi
Perusahaan dapat mengikutsertakan Anggota Direksi sebagai anggota perkumpulan profesi paling banyak 2 (dua) perkumpulan.
Fasilitas Perkumpulan Profesi sebagaimana dimaksud diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.

4. Fasilitas Bantuan Hukum
Perusahaan wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada anggota Direksi dalam hal terjadi

3. Housing Allowance
Housing allowance can only be granted if the Company does not provide a Home Occupation.

Housing allowances are given on a monthly basis by 30% (thirty percent) of the salary with most provisions as follows:
a. Rp. 21,000,000.00 (twenty one million Rupiah) for the Capital State
b. Rp. 19,000,000.00 (nineteen million Rupiah) for the provincial capital region
c. Rp. 16,000,000.00 (sixteen million Rupiah) for the district and the city.

Housing allowance can be adjusted each year to take into account the inflation factor in the property based on the standards set by the Central Statistics Agency (BPS) or other authorized.

4. Utility Cost Allowance
Utility Costs Allowance given at cost at most by 30% (thirty percent) of the value of housing allowance every month.

FACILITIES
Member of the Board of Directors may be given facilities adapted to the conditions and financial capability and must not conflict with laws and regulations. Tax arising from the provision of facilities and a burden borne by the company. Member of the Board of Directors are prohibited from abusing facilities referred to above. Shareholders may bring lawsuits against members of the Board who do abuse facilities.

1. Facility of Vehicle Or Transport Allowance
The company can provide transportation allowances or facilities such as a vehicle to Members of the Board of Directors by one unit and its official vehicle maintenance and operating costs.

2. Health Facilities
The Company shall provide health facilities to the members of the Board in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses.

3. The Professional Association
The Company may include members of the Board as a member of the profession associations at most two (2) association.
Facilities Professional Association referred to are given only in the form of base money (cash register) and annual dues.

4. Legal Aid Facility
The Company shall provide facilities to the members of the Board of Directors of Legal Aid in case of

tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.

5. **Fasilitas Rumah Jabatan**
   Perusahaan wajib memberikan Fasilitas Rumah Jabatan kepada Anggota Direksi sebanyak satu unit beserta biaya pemeliharaan dan utilitas.

6. **Fasilitas Club Membership/Corporate Member**
   Perusahaan dapat memberikan Fasilitas Club Membership/Corporate Member kepada Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) keanggotaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
   Fasilitas Club Membership/Corporate Member sebagaimana dimaksud di atas diberikan hanya berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.

7. **Biaya Representasi**
   Perusahaan dapat memberikan Biaya Representasi kepada Direksi sebesar biaya yang dikeluarkan (at cost) dalam hal Direksi mewakili perusahaan.
   Batas maksimum besaran Biaya Representasi bagi Direksi sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh RUPS/Menteri dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

4. TANTIEM

Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada Anggota Direksi dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan.
Pemberian Tantiem sebagaimana dimaksud dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun buku yang bersangkutan.

Perhitungan Tantiem didasarkan pada pertimbangan antara faktor-faktor :
a. Pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator); dan/atau
b. Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.

Anggota Direksi dapat diberikan tantiem apabila pencapaian Ukuran Kinerja Utama lebih dari 70 % (tujuh puluh persen) dan Tingkat Kesehatan dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh).

Dalam hal Tingkat Kesehatan perusahaan ditargetkan dalarn RKAP dengan nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh), anggota Direksi dapat diberikan tantiem, apabila pencapaian Tingkat Kesehatan di atas target, dengan ketentuan pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator) lebih dari 70 % (tujuh puluh persen).
Pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang diperhitungkan dalam perhitungan Tantiem maksimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen). Ukuran Kinerja Utama (Key Performance

actions / deeds for and on behalf of his position with regard to the intent and purpose as well as the company's business activities.

5. **Functional House Facilities**
   The Company shall provide facilities House service to members of the Board as a unit along with the cost of maintenance and utilities.

6. **Club Membership / Corporate Member Facilities**
   The company can provide facilities Club Membership / Corporate Member to Member of the Board of Directors at most two (2) membership with the company's financial capability.
   Amenities Club Membership / Corporate Members referred to above is given only in the form of base money (cash register) and annual dues.

7. **Cost of Representation**
   The company can provide representation to the Board of Directors fee for costs incurred (at cost) in case the Board of Directors to represent the company.
   The maximum limit of the amount of fee for the Board of Directors Representation referred to above are set by the GMS / Minister with concerned to financial capabilities.

4. TANTIEM

The company can provide performance bonus to the Company Board of Directors in terms of profit in the fiscal year concerned.
Giving Tantiem referred budgeted and accounted for as an expense in the financial year concerned RKAP.

Bonus calculation is based on the consideration of factors:
a. Achievement of Key Performance Indicator; and / or

b. Corporate Health Achievement Levels.

Member of the Board of Directors can be given bonuses if achievement of Key Performance Indicator more than 70% (seventy percent) and Health Level to the value of more than 70 (seventy).

In terms of Soundness companies targeted dalarn RKAP with a value less than or equal to 70 (seventy), member of the Board of Directors may be given the bonus, if the achievement Soundness above target, provided the achievement of Key Performance Indicator more than 70% (seventy percent).

Achievement of Key Performance Indicators are calculated in calculation of maximum performance bonus of 150% (one hundred and fifty percent). Key Performance Indicator and / or the Health Level

Indicator) dan/atau Tingkat Kesehatan ditetapkan oleh RUPS/Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicator) dan Tingkat Kesehatan BUMN.

determined by the GMS / Minister in accordance with the provisions of the legislation regarding Key Performance Indicator and Health Level SOEs.

Komposisi besarnya Tantiem ditetapkan sebagai berikut:
a. Direktur Utama : 100%
b. Anggota Direksi : 90% dari Direktur Utama

Composition Tantiem magnitude set as follows:

a. President Director: 100%
b. Member of the Board of Directors: 90% of the President Director

Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud maka Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS/ Menteri.

In case there are other positions that are not listed in the composition of Position Factor, so Position set out by the GMS / Minister.

Pajak Penghasilan atas Tantiem ditanggung dan menjadi beban masing-masing Anggota Direksi yang bersangkutan.

Income Tax on Bonus and a burden borne by each Member of the Board of Directors concerned.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi
Disclosure of Affiliation

Dewan Komisaris — Board of Commissioners

Nama / Name	Hubungan Keluarga dengan Organ PT INTI (Persero) / Family Relations with the Organs of PT INTI (Persero)					
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Dewan Direktur / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders	
	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No
Soleman B. Ponto		v		v		v
Djoko Agung Harijadi		v		v		v
Slamet Effendy Yusuf		v		v		v
Nuning S.R. Wulandari		v		v		v

Dewan Direksi — Board of Directors

Nama / Name	Hubungan Keluarga dengan Organ PT INTI (Persero) / Family Relations with the Organs of PT INTI (Persero)					
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Dewan Direktur / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders	
	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No	Ya | Yes	Tidak | No
Tikno Sutisna		v		v		v
Adiaris		v		v		v
Nilawati Djuanda		v		v		v
Andy K. Saputra*)		v		v		v
Dayu Padmara Rengganis*)		v		v		v

*) Berhenti sebagai anggota Direksi PT INTI (Persero) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-56/MBU/2014, tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

*) Ended his term as a member of the Board of Directors of PT INTI (Persero) in accordance with the Decree of the Minister of SOEs Number: SK-56 / MBU / 2014, dated March 18, 2014 on Termination and Appointment of Members of Board of Directors of the Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan

Description of the duties and functions of the Secretary of the Company

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia No. KN.025/2014 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), dijelaskan mengenai Sekretaris Perusahaan :

1) Fungsi dan Peran

Perseroan memiliki Sekretaris Perusahaan yang bertindak sebagai pejabat penghubung (liaison officer) untuk menatausahakan dan menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Perseroan dan risalah rapat Direksi, Komisaris maupun RUPS. Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh organ struktural setingkat di bawah Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Komisaris apabila diminta.

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN PADA TAHUN 2014

Selama tahun 2014 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, antara lain:

1. Penyelenggaraan keprotokoleran perusahaan.
2. Menyelenggarakan RUPS RKAP 2015.
3. Menyelenggarakan RUPS RJPP 2015-2019.
4. Menyelenggarakan RUPS Laporan Tahunan 2013.
5. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Manajemen dengan Karyawan.
6. Menyelenggarakan Rapat Dinas 2014.
7. Dukungan Dokumen Self Assessment Pelaksanaan GCG tahun 2013.
8. Menyusun "Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)" dan "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)" untuk dimuat dalam Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2013.
9. Menyelenggarakan pelaksanaan Press Conference.
10. Mengembangkan dan mengimplementasikan program kemitraan dan bina lingkungan, sebagaimana diuraikan pada Bagian PKBL Laporan Tahunan PT. INTI (PERSERO) ini.
11. Melaksanakan program penanaman 1000 Pohon dalam rangka Bina Lingkungan perusahaan.
12. Mengembangkan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan PT. INTI (Persero).

Based on the Decision of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia No. KN.025 / 2014 about Implementation Guidelines of Good Corporate Governance, described on the Corporate Secretary:

1) Functions and Roles

The Company has Company Secretary acts as liaison officer (liaison officer) to administer and store the documents of the Company, including but not limited to the Register of Shareholders, the Special Register of the Company and minutes of meetings of the Board of Directors, Commissioners and the RUPS. The Secretary of the Company is run by structural organ level under the Board of Directors and is responsible to the Board of Directors.

The Company Secretary shall ensure that the Company comply with the applicable disclosure requirements and shall provide all relevant information to the Board regularly and to the Commissioner upon request.

BRIEF DESCRIPTION OF DUTIES CORPORATE SECRETARY IN 2014

During the year 2013 the Secretary of the Company has conducted the following activities, among others:

1. Implementation of company precedences.
2. Organizing RUPS RKAP 2015.
3. Organize RUPS RJPP 2015-2019.
4. Holding RUPS Annual Report 2013.
5. Holding Management and Employee Communication Forum.
6. Conducting Meetings Department, 2014.
7. Support Document Self Assessment GCG implementation in 2013.
8. Develop "Corporate Governance" and "Corporate Social Responsibility" to be published in the Annual Report 2013.
9. Organize the implementation of the Press Conference.
10. Develop and implement partnerships and community development programs, as described in Section PKBL on Annual Report PT INTI (Persero).
11. Implement the 1000 tree planting program in the framework of the Community Development company.
12. Develop a press release related to the performance and development of PT. INTI (Persero).

13. Mengembangkan materi komunikasi korporasi PT. INTI (Persero) seperti publikasi laporan keuangan PT. INTI (Persero) melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain.
14. Membangun Database Relasi melalui website internal perusahaan.
15. Melaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2014.
16. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan sponsorship PT. INTI (Persero) seiring dengan kebijakan PT. INTI (Persero).
17. Mengembangkan sarana komunikasi dan event internal, seperti perayaan ulang tahun PT. INTI (Persero) ke-40, silaturahmi Purnabakti PT. INTI (Persero), halal bi halal dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri.
18. Memastikan kesediaan sarana dan prasarana operasional perusahaan.
19. Memastikan perawatan aset dan lahan perusahaan.
20. Penerapan SMK3 dan ISO di perusahaan.

2) Kualifikasi
Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

3) Akuntabilitas
Sekretaris Perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mendukung dan membantu Direksi Perseroan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan Perseroan meliputi bidang Humas, Biro Direksi dan Pelaporan Manajemen.

Struktur Organisasi Divisi Sekretaris Perusahaan PT INTI (Persero) adalah:

13. Develop corporate communication materials PT INTI (Persero) such as the publication of the financial statements PT INTI (Persero) through the mass media, high seasons' advertisement, etc.
14. Building a Database Relation through the company's internal website.
15. Implement Customer Satisfaction Survey 2014.
16. Develop and implement sponsorship activities of PT. INTI (Persero) in line with the policy of PT. INTI (Persero).
17. Develop a means of communication and internal events, such as birthday celebrations 40th aniversary of PT. INTI (Persero), gathering Purnabakti (former employee) PT. INTI (Persero), commemoration of Idul Fitri Festival day.
18. Ensure the availability of facilities and infrastructure operations.
19. Ensure the maintenance of company assets and land.
20. Application of SMK3 and ISO in the company.

2) Qualification
Company Secretary must have adequate academic qualifications in order to carry out the duties and responsibilities well.

3) Accountability
Secretary Company was formed with the aim to support and assist the Board of Directors of the Company in managing and running the Company's activities include the field of Public Relations, Bureau Directors and Management Reporting.

Organizational Structure Division Corporate Secretary of PT INTI (Persero) are:

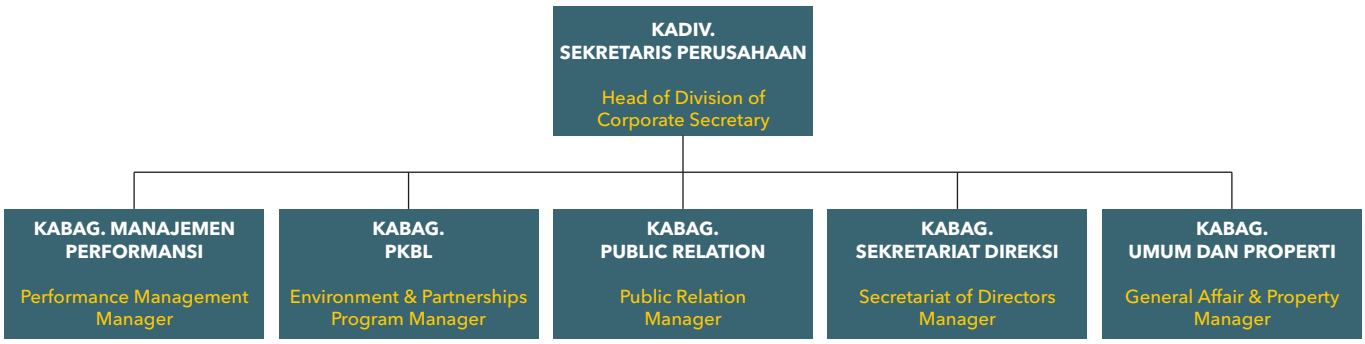

Sekretaris Perusahaan dalam Struktur Organisasi PT INTI Persero saat ini adalah Endang Yuliawaty, dengan riwayat jabatan :

Company Secretary in Organizational Structure PT INTI (Persero) at this time is Endang Yuliawaty, with a history of positions:

RIWAYAT JABATAN History of Position	DIVISI Division	TAHUN Years
KA. DIVISI SEKPER	SEK. PER.	2012 - Sekarang
KA. DIVISI HUKUM DAN KEPATUHAN	DIR. SDM DAN UMUM	2009 - 2010
MAN. BANG. & YAN. SDM	SEKPER & SDM	2006 - 2009
MAN. SDM	SEK. PER.	2004 - 2006
MAN. PELAYANANPERSONALIA	SDM DAN OR	2001 - 2004
AHLI MUDA BID. HUKUM 2	SEKRETARIAT	1995
AHLI MUDA BID. PER. PENJUALAN	SEKRETARIAT	1995

RUPS atas Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013

Sesuai undangan Direksi PT INTI Nomor 1061/ST.03/010700/2014 tertanggal 3 Maret 2014, telah diadakan rapat bersama Deputi Bidang Usaha Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN yang mendapat kewenangan sebagai kuasa pemegang saham sesuai Nomor SKU-33/MBU/2014 tertanggal 18 Maret 2014 untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 19 Maret 2014 di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Pokok-pokok Keputusan RUPS tertuang dalam Risalah Nomor : 1060A/PS.22/010900/2014, dengan uraian sebagai berikut:

Keputusan RUPS

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan termasuk Laporan pelaksanaan TUgas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2013.

2. Menyetujui pengesahan laporan keuangan, laporan tahunan PKBL tahun buku 2013, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tahun buku 2013.

3. Menetapkan penggunaan laba bersih PT INTI tahun buku 2013 sebesar Rp.4.074.503.987 seluruhnya sebagai cadangan.

4. Menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan

RUPS on Approval of Annual Report and Approval of Financial Statements Financial Year 2013

In accordance invitation of Directors of PT INTI No. 1061 / ST.03 / 010 700/2014 dated March 3, 2014, has held a meeting with Deputy for Strategic and Manufacturing Ministry of SOEs are authorized as the power of the shareholders in accordance No. SKU-33 / MBU / 2014 dated 18 March 2014 to implement the RUPS on March 19, 2014 at the Ministry of State-Owned Enterprises, Jakarta.

The main points contained in the Minutes of the RUPS Decision Number: 1060A / PS.22 / 010 900/2014, with the following description:

RUPS decisions

1. To approve the Annual Report on the situation and the course of the company, including the Report of the supervisory Board of Commissioners during the fiscal year 2013.

2. To approve the ratification of the financial statements, annual reports Partnership fiscal year 2013, and to provide release and discharge full responsibility (volledig acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2013.

3. Establish the net profit of PT INTI year book 2013 by Rp.4.074.503.987 entirely as a backup.

4. Establish income Board of Directors and Board of

Komisaris atas kinerja tahun 2014, dengan uraian :

a. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT INTI tahun buku 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran.
b. Rincian penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT INTI yang belum diatur dalam Keputusan RUPS ini agar mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/BUMN/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.
c. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT INTI sebagaimana dimaksud pada poin a) berlaku sejak 1 Januari 2014.
d. Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk organ Dewan Komisaris) tidak diperkenankan memperoleh honorarium atas rapat yang diselenggarakan oleh Perseroan.
e. Direksi dan Dewan Komisaris tidak diberikan tantiem atas kinerja tahun 2013.

5. Menunjuk kembali KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL tahun buku 2014 dengan ketentuan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan.

RUPS atas Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014

Sesuai undangan Direksi PT INTI Nomor 5213A/ST.03/010900/2013 tertanggal 5 Desember 2013, telah dilaksanakan RUPS atas Persetujuan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2013 di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, dengan hasil putusan rapat sebagai berikut:

1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PT INTI tahun 2014.
2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA-PKBL) PT INTI tahun 2014.
3. Menyetujui Indikator Aspek Operasional PT INTI tahun 2014 untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan dengan nilai total 15,00.
4. Menyepakati Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam kontrak manajemen tahun 2014 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
5. Menyetujui penjaminan aset perusahaan dalam rangka penarikan fasilitas kredit dan/atau menerima pinjaman dan/atau penerbitan surat utang dari lembaga keuangan untuk tahun 2014 dengan plafon sebesar Rp 1,57 triliun dan US$ 65,24 juta. Pelaksanaannya agar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commissioners on the performance in 2014, with the description:

a. Income of Directors and Board of Commissioners of PT INTI on fiscal year 2014 as stated in the attachment.
b. Details of Directors and Board of Commissioners income PT INTI are not regulated in this RUPS's decision to follow the provisions in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04 / SOE / 2014 concerning Determination Guidance for Directors and Board of Commissioners of SOEs.
c. Income of Directors and Board of Commissioners of PT INTI referred to in points a) in effect since January 1, 2014.
d. Board of Directors and Board of Commissioners (including organ BOC) is not allowed to obtain honorarium of meetings held by the Company.
e. Board of Directors and Board of Commissioners are not given annual bonus based on performance in 2013.

5. Referring to Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit the Company's Financial Statements and Financial Statements 2014 financial year of PKBL implementation should be in accordance with the provisions of the rules and laws and regulations.

RUPS on Ratification of the Work Plan and Budget (RKAP) 2014

In accordance invitation of Directors of PT INTI No. 5213A / ST.03 / 010 900/2013, dated December 5, 2013, has implemented the RUPS on RKAP and RKA PKBL Agreement 2014 dated December 24, 2013 at the Ministry of SOEs in Jakarta, with the outcome of the meeting as follows:

1. To approve the Work Plan and Budget PT INTI 2014.
2. To approve the Work Plan and Budget Partnership (RKA-PKBL) PT INTI 2014.
3. Approve Indicators Operational Aspects of PT INTI 2014 for the calculation of the level of health of the company with a total value of 15.00.
4. Agree on Key Performance Indicators (KPI) are set out in the 2014 management contract between the Board of Directors and Board of Commissioners of the Shareholders.
5. To approve the company's assets in order to guarantee the withdrawal of credit facilities and / or receiving a loan and / or the issuance of debt securities from financial institutions for the year 2014 with a ceiling of Rp 1.57 trillion and US $ 65.24 million. Implementation in order to be in accordance with the provisions of the legislation.

Uraian Mengenai Unit Audit Internal
Description of Internal Audit Unit

Fungsi Audit Internal PT INTI (Persero) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Bab IV pasal 67, 68, dan 69 dengan sebutan Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Internal Audit Function of PT INTI (Persero) established pursuant to Act No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises, Chapter IV, Article 67, 68, and 69 as the Division of Internal Control Unit (SPI).

Di tahun 2014 Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT INTI (Persero) dijabat oleh **Ir. Tyasno Nurhadi, MM, PIA**; Lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Mei 1962. Meniti karir di PT INTI (Persero) sejak tahun 1985. mendapat gelar Strata 1 pada Bidang Elektro Telekom di Institute Teknologi Bandung pada tahun 1985 dan mendapat gelar S2 nya di bidang Bisnis Administrasi, Sekolah Tinggi Manajemen Bandung pada tahun 1991. Sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Kadiv Pengembangan Bisnis di tahun 2001 dan Staf ahli Direktur pada tahun 2003. dan menjadi Direktur anak perusahaan PT INTI (Persero) pada tahun 2011 hingga akhirnya menjabat sebagai Ka. SPI pada tahun 2013.

In 2014, Head of Internal Audit Unit (IAU - SPI) PT INTI (Persero) held by **Ir. Tyasno Nurhadi, MM, PIA**;
Born in Yogyakarta on May 29,1962. Pursue a career in PT INTI (Persero) since 1985. Earned Bachelor Degree on Telecom Electrical Field at Institut Teknologi Bandung in 1985 and received his Master degree in Business Administration, at Sekolah Tinggi Manajemen Bandung in 1991. Previously, he also served as Head of Business Development in 2001 and Director of the expert staff in 2003 and became director of a subsidiary of PT INTI (Persero) in 2011 and eventually served as Head of SPI in 2013.

Jumlah pegawai Internal Audit saat ini ada 11 (sebelas) orang , yang terdiri dari:
- 1 (satu) Kepala SPI,
- 3 (tiga) kepala Bagian,
- 2 (dua) kepala Urusan,
- 3 (tiga orang) Auditor dan
- 2 (dua) tenaga Administrasi.

Number of Employees of Internal Audit at this time there are 11 (eleven) persons, consisting of:
- 1 (one) Head of Internal Audit,
- 3 (three) head section,
- 2 (two) heads Affairs,
- 3 (three) Auditors and
- 2 (two) administrative personnel.

Sertifikasi profesi auditor yang dimiliki oleh Satuan Pengawasan Intern terdiri dari:
1. Perhimpunan Internal Auditor (PIA) sebanyak 1 orang
2. Qualified Internal Audit (QIA) sebanyak 1 orang
3. Akuntan (AK) sebanyak 1 orang
4. Chartered Accountant (CA) 1 orang
5. Certified Profesional Management Accountant (CPMA) 1 orang
6. Microsoft Office Specialist (MOS) 1 orang
7. Program untuk sertifikasi, yaitu : Audit Dasar, Audit Operasional, Audit Komunikasi dan Psikologi serta Fraud Audit.

Professional certification auditor owned by the Internal Audit Unit consists of:
1. Internal Auditors Association (PIA) by 1 person
2. Qualified Internal Audit (QIA) by 1 person
3. Accountant (AK) by 1 person
4. Chartered Accountant (CA) by 1 person
5. Professional Certified Management Accountant (CPMA) 1
6. Microsoft Office Specialist (MOS) by 1 person
7. Program for certification, namely: Basic Audit, Operational Audit, Audit Communication and Psychology and Fraud Audit.

STRUKTUR SATUAN PENGAWASAN INTERN

Struktur unit Satuan Pengawasan Intern tercantum dalam SKD KN. 014 / 2014 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Tingkat Urusan.

Satuan Pengawas Intern dikepalai oleh seorang Kepala Divisi yang membawahi 3 bagian, dimana masing-masing bagian tersebut dikepalai oleh Kepala Bagian. Kepala Bagian membawahi urusannya masing-masing, dimana setiap urusan dikepalai oleh seorang Kepala Urusan.

STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit Unit structures listed in SKD KN. 014/2014 on Organizational Structure Corporate Affairs rate.

Internal Audit Unit is headed by a Head of Division in charge of three sections, where each section is headed by the Head of Department. Head of Section in charge of their own affairs, where every business is headed by a Chief of Affairs.

Adapun bagian dan urusan di struktur organisasi Divisi Satuan Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan Audit
   - Urusan Perencanaan Pengendalian Audit
   - Urusan Pengembangan Audit
2. Bagian Financial and Management Audit
   - Kelompok Keahlian
3. Bagian Operational and Special Audit
   - Kelompok Keahlian

As part of the organizational structure and affairs in the Internal Audit Division are as follows:

1. Section of Planning, Control and Audit Development
   - Audit Control Planning Affairs
   - Audit Development Affairs
2. Section Financial and Management Audit
   - Research Groups
3. The Operational and Special Audits
   - Research Groups

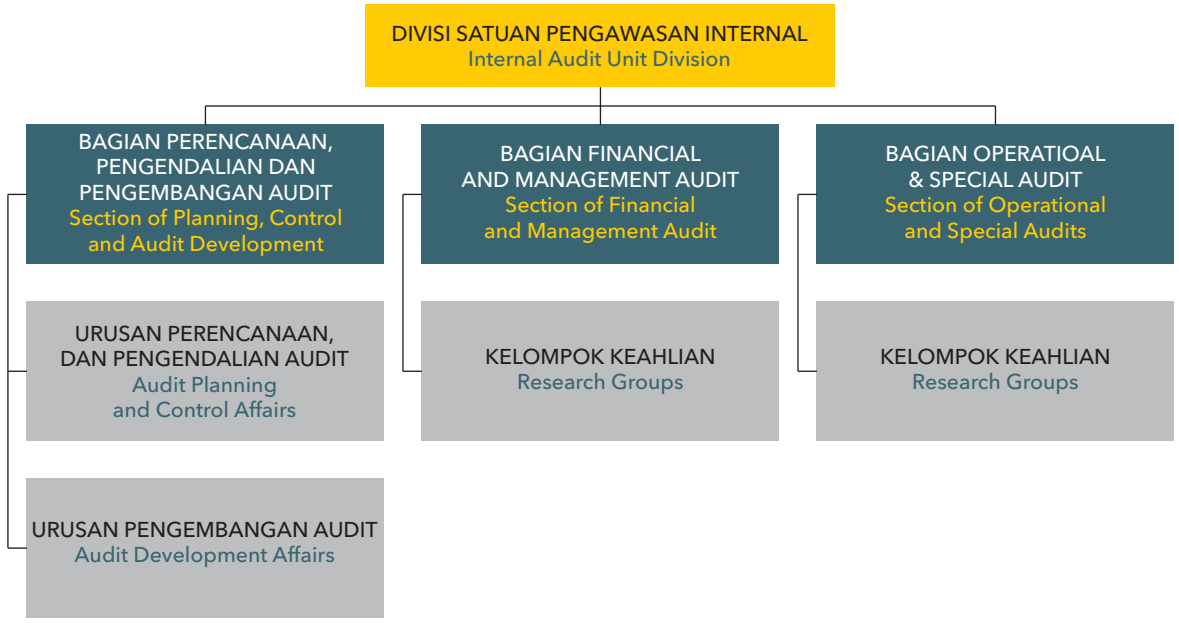

TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERN

1. Satuan Pengawasan Intern bertugas melaksanakan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.
2. Satuan Pengawasan Intern bertugas melaksanakan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Untuk mencapai tujuan di atas, pemenuhan tugas Satuan Pengawasan Intern dilakukan rnelalui pemberian informasi; konsultasi dan rekomendasi atas aktivitas yang di-audit/di-evaluasi kepada manajemen, serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, guna:

1. Meningkatkan kinerja usaha perusahaan secara efektif, efisien dan ekonomis;
2. Menjaga ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku;
3. Menjaga kejelasan fungsi; pelaksanaan; serta pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan risiko.

DUTIES OF INTERNAL AUDIT UNIT

1. Internal Audit Unit perform an evaluation of the effectiveness of internal control, risk management and corporate governance processes. in accordance with legislation and company policy.
2. Internal Audit Unit in charge of carrying out the examination and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, operations, human resources, information technology and other activities.

To achieve the above objectives, the fulfillment of the task of Internal Audit conducted rnelalui provision of information; consultations and recommendations on the activities audited / on-evaluation to management, as well as ensure follow-up on audit recommendations, in order to:

1. Improve the company's business performance effectively, efficiently and economically;
2. Maintain adherence to policies and procedures;
3. Maintain clarity of function; implementation; and accountability for the management of the company, including risk management.

Adapun aktivitas Satuan Pengawasan Intern pada pokoknya meliputi:

1. Penyusunan Rencana Kegiatan Audit, baik Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun non-PKPT;
2. Penilaian terhadap kecukupan sistem/sarana pengendalian intern; ketaatan/kepatuhan atas ketentuan yang berlaku; kinerja manajemen; pengamanan asset perusahaan; dan pengelolaan risiko;
3. Pengawasan terhadap kegiatan operasional atas fungsi unit kerja;
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen, serta memberikan informasi; konsultasi; dan rekomendasi mengenai hal dimaksud;
5. Memastikan bahwa rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti oleh manajemen dan/atau auditee;
6. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atas hasil audit yang telah dilaksanakan, dan Satuan Pengawasan Intern dapat menyampaikan tembusan laporan hasil audit kepada auditee, Direktur dan/atau Kepala Divisi yang membawahi auditee.

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The Internal Audit activities principally include:

1. Preparation of Audit Work Plan, both the Annual Work Program Monitoring (PKPT) and non-PKPT;
2. An assessment of the adequacy of the system / internal control means; adherence / compliance with applicable regulations; performance management; safeguarding the assets of the company; and risk management;
3. Supervision of operations on the function unit;
4. Identify matters requiring the attention of management, as well as providing information; consultation; and recommendations on the matter in question;
5. Ensure that audit recommendations have followed up by management and / or the auditee;
6. Delivering a report to the Director of the audit results that have been implemented, and the Internal Audit can submit a copy of the audit report to the auditee, the Director and / or Chief of the Division which oversees the auditee.

Internal Audit Unit is headed by a chief who is appointed and dismissed by the President Director based on the company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

Uraian Mengenai Sistem Pengendalian Internal
Description of Internal Audit System

Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh satu entitas direksi, manajemen dan personil-personil lain, yang dirancang untuk memberikan reasonable assurance (jaminan yang layak) tentang tercapainya tujuan-tujuan yang berkenaan dengan operasi, pelaporan dan compliance (kepatuhan).

Dengan demikian, pengendalian intern mengandung unsur-unsur:

- Membantu manajemen/organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan
- Suatu proses yang berisikan kegiatan-kegiatan perusahaan
- Dilaksanakan oleh jajaran perusahaan.
- Dapat memberikan reasonable assurance
- Disesuaikan dengan struktur organisasi

Untuk memudahkan proses evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, SPI menggunakan metodologi frame work COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), tanpa memasukkan risk assessment. Direncanakan evaluasi manajemen risiko akan dilakukan secara terpisah.

Internal control is a process, which is carried out by one entity directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance on the achievement of objectives relating to operations, reporting and compliance.

Thus, internal control contains the following elements:

- Assist management / organization in achieving its goals
- A process that contains the activities of the company
- Implemented by the company's lineup.
- Can provide reasonable assurance
- Adjusted to the organizational structure

To facilitate the evaluation of the company's internal control, SPI using the methodology frame work COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), without including risk assessment. Planned evaluation of risk management will be done separately.

Adapun materi-materi frame work COSO yang digunakan secara garis besar meliputi:
1. Lingkungan Pengendalian
2. Aktivitas Pengendalian
3. Informasi dan Komunikasi
4. Monitoring.

The materials used COSO frame work is primarily based on:
1. Environmental Control
2. Activity Control
3. Information and Communication
4. Monitoring.

Tabel Laporan Hasil Audit 2014
Table of Report of Audited Results 2014

NO.	OBYEK PEMERIKSAAN Examination Object	JENIS PEMERIKSAAN Type of Examination	KETERANGAN Information
1	Divisi Account PE Account PE Division	Operational Operational	Selesai pemeriksaan 20 Maret 2014 Audited on March 20, 2014 LHA No.: 01/PS.19/010800/2014
2	Divisi Pembangunan & Operasi Regional Barat Operational & Development Division for West Region	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 26 Maret 2014 Audited on March 26, 2014 LHA No.: 02/PS.19/010800/2014
3	Divisi Pembangunan & Operasi Regional Timur Operational & Development Division for East Region	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 26 Maret 2014 Audited on March 26, 2014 LHA No.: 03/PS.19/010800/2014
4	Divisi Implementasi TITO Reg. 2 TITO Reg. 2 Implementation Division	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 25 Juni 2014 Audited on June 25, 2014 LHA No.: 04/PS.19/010800/2014
5	Divisi Implementasi TITO Reg. 1 TITO Reg. 1 Implementation Division	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 25 Juni 2014 Audited on June 25, 2014 LHA No.: 05/PS.19/010800/2014
6	Divisi Keuangan Finance Division	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 27 Juni 2014 Audited on June 27, 2014 LHA No.: 06/PS.19/010800/2014
7	Divisi Account Celco Account Celco Division	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 22 Juli 2014 Audited on July 22, 2014 LHA No.: 07/PS.19/010800/2014
8	Divisi OCPP OCPP Division	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 24 Juli 2014 Audited on July 24, 2014 LHA No.: 08/PS.19/010800/2014
9	Divisi Akuntansi Accountant Division	Keuangan Finance	Selesai pemeriksaan 22 September 2014 Audited on September 22, 2014 LHA No.: 09/PS.19/010500/2014
10	Divisi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Division	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 24 November 2014 Audited on November 24, 2014 LHA No.: 11/PS.19/010500/2014
11	Divisi Pengembangan Produk Product Development Division	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 26 November 2014 Audited on November 26, 2014 LHA No.: 12/PS.19/010500/2014
12	Divisi Pengadaan dan Logistik Procurements & Logistic Division	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 24 Desember 2014 Audited on December 24, 2014 LHA No.: 13/PS.19/010500/2014

Tabel Laporan Audit Hasil Evaluasi 2014
Table of Report of Audited Evaluation Results 2014

NO.	OBYEK PEMERIKSAAN Examination Object	JENIS PEMERIKSAAN Type of Examination	KETERANGAN Information
1	Evaluasi Status Pendirian, Kinerja dan Prospek PT IPMS Evaluation of Establishment Status, Performance and Prospects of PT IPMS	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 14 Maret 2014 Audited on March 14, 2014 No.: 03/III/2014
2	Evaluasi Status Pendirian, Kinerja dan Prospek PT INTENS Evaluation of Establishment Status, Performance and Prospects of PT INTENS	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 14 Maret 2014 Audited on March 14, 2014 No.: 04/III/2014
3	Evaluasi Pengelolaan dan Pengendalian Material Proyek SMPBBM Evaluation of Material handling and management of SMP BBM project	Operasional Operational	Management Letter No.: I.142/PS.019/010800/2014 Tgl. 17 Juni 2014 dated June 17, 2014
4	Divisi Keuangan Division of Finance	Operasional Operational	Management Letter No.: I.150/PS.019/010800/2014 Tgl. 27 Juni 2014 dated June 27, 2014
5	Ev.aluasi Bantuan Operasional SEJATI serta subsidi keg. olahraga & kesenian karyawan Evaluation of SEJATI's Operational Support & subsidies of employees' sports & arts act.	Operasional Operational	Selesai pemeriksaan 24 Juli 2014 No.: 04/III/2014 Audited on July 24, 2014
6	Evaluasi Proyek SKKL dengan No. Kontrak 473/BNP/XII/2011 Tgl. 27 Desember 2011 Evaluation of SKKL Project contract no. 473/BNP/XII/2011 date Dec. 27, 2011	Operasional Operational	Management Letter No.: I.195/PS.019/010800/2014 Tgl. 12 Agustus 2014 dated August 12, 2014
7	Evaluasi Kewajaran Harga Tiang 7 (tujuh) meter eks. Proyek TITO Evaluation of reasonable price of column 7 meters used TITO project	Operasional Operational	Management Letter No.: I.198/PS.019/010800/2014 Tgl. 27 Agustus 2014 dated August 27, 2014
8	Laporan Keuangan PKBL posisi 30 September 2014 PKBL Financial Report position Sep. 30, 2014	Keuangan Finance	LHA No.: 10/PS.019/010500/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 dated October 23, 2014
9.	Evaluasi Proyek RMJ Netre Kalimantan 2011 Evaluation of RMJ Project Netre, Borneo 2011	Operasional Operational	Management Letter No.: I.267/PS.019/010800/2014 Tgl. 23 Desember 2014 dated December 23, 2014

Akuntan Perseroan
Corporate Accountant

PT INTI (Persero) menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja Suhartono sebagai Akuntan Publik Laporan Keuangan Tahun Buku PT. INTI (Persero) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik ini dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT INTI (Persero) appoint Public Accountant (KAP) Kanaka Puradiredja Suhartono as Public Accountant Annual Financial Statements of PT. INTI (Persero) which ended on December 31, 2014. The appointment of public accounting firm is conducted by the Board in the General Meeting of Shareholders (GMS).

Fee Audit
Fee audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT INTI (Persero) untuk tahun buku 2014 adalah sebesar Rp 260.000.000,-.sedangkan fee audit untuk tahun buku sebelumnya dapat dilihat di bawah berikut:

Audit Fee
Fee audit of the Consolidated Financial Statements PT INTI (Persero) for the fiscal year 2014 amounted to Rp 260,000,000, -. Whereas the audit fee for the previous financial year can be seen under the following:

TAHUN Year	KANTOR AKUNTAN PUBLIK Public Accountant Office	FEE AUDIT (Rp.) Audit Fee
2010	KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO	187,000,000
2011	KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO	207,270,000
2012	KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO	230,000,000
2013	KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO	255,000,000
2014	KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO	260,000,000

Uraian Manajemen Risiko Perusahaan
Description of Company Risk Management

Sistem Manajemen Risiko di dalam Perusahaan diatur melalui Keputusan Direksi Perusahaan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tentang Penerapan Kebijakan Operasional dan Manual/Panduan Manajemen Risiko.

Risk Management System in the Company regulated by the Decree of Directors of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) About Implementation and Operational Policy Manual / Risk Management Guide.

Surat Keputusan Direksi ini bertujuan mengarahkan dan memperlancar penerapan manajemen risiko di Perusahaan, dimana manajemen risiko bermanfaat meningkatkan jaminan pencapaian tujuan, strategi, sasaran dan hasil kegiatan.

Decree of the Board is intended to direct and facilitate the implementation of risk management in the Company, in which risk management is beneficial to increase the guarantee achievement of the objectives, strategies, objectives and results of operations.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, perusahaan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan, yang meliputi hal-hal, yaitu:
- Dokumen Kebijakan dan Manual Manajemen risiko yang terus menerus disempurnakan;

To support the implementation of risk management, the company providing the necessary infrastructure, which includes things, namely:
- Document Policy and Management Manual continuously enhanced risk;

- Struktur organisasi, uraian tugas dan mekanisme kerja yang memadai dan jelas yang berhubungan dengan manajemen risiko;
- Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan;
- Kultur sadar risiko.

Kebijakan manajemen risiko harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum sebagai berikut:
- Obyektif: Proses-proses manajemen risiko harus dijalankan secara obyektif;
- Konsisten: Proses-proses manajemen risiko harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan baku;
- Terdokumentasi: Proses-proses manajemen risiko harus didasarkan kepada ketentuan tertulis dan diarsipkan;
- Terbuka (transparan): Risiko harus diungkapkan secara terbuka kepada pemegang kepentingan terkait.

Istilah-istilah dalam Sistem Manajemen Risiko adalah:
1. **Risiko (risk)** adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang membawa akibat yang tidak dikehendaki atas hal yang ingin dicapai Perusahaan yang telah dirumuskan di dalam tujuan, strategi, sasaran yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (Tahunan).
2. **Tingkat Risiko (risk level)** adalah tinggi atau rendahnya risiko yang diukur berdasarkan 2 (dua) hal berikut:
   - Seberapa besar akibat negatif yang ditimbulkan bila suatu risiko terjadi
   - Seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu risiko
3. **Toleransi risiko** (risk tolerance) adalah batas tingkat risiko yang berdasarkan kebijakan Perusahaan dibolehkan untuk diterima sebagaimana adanya (tidak harus diturunkan menjadi lebih rendah lagi).
4. **Identifikasi risiko** (risk identification) adalah proses mengenali peristiwa yang mungkin terjadi dan dapat berakibat negatif.
5. **Asesmen risiko** (risk assessment) adalah proses menentukan tingkat risiko dan menentukan prioritas risiko.
6. **Manajemen risiko** (risk management) adalah proses manajemen, pengorganisasian dan kultur di Perusahaan yang diarahkan terhadap identifikasi risiko, asesmen risiko dan pemberian tanggapan serta perlakuan atas risiko.
7. **Tanggapan atas risiko** (risk response) adalah keputusan setelah berlangsungnya analisis risiko untuk menerima suatu risiko (sehingga terhadap risiko tidak dilakukan perlakuan untuk menurunkan tingkatnya) atau untuk tidak menerima risiko (sehingga terhadap risiko harus dilakukan perlakuan untuk menurunkan tingkatnya).
8. **Perlakuan atas risiko** (risk treatment) adalah

- Organizational structure, job descriptions and adequate working mechanisms and clearly associated with risk management;
- Human resources who have the knowledge and skills required;
- Culture of risk awareness.

Risk management policies must be based on general principles as follows:
- Objective: risk management processes must be executed objectively;
- Consistent: risk management processes should refer to the provisions of the standard;
- Documented: risk management processes must be based on the provisions of the written and archived;

- Transparent: Risk should be publicly disclosed to the relevant stakeholders.

Terms in the Risk Management System are:
1. **Risk** is the possibility of the occurrence of events leading to undesirable consequences on the things you want to achieve the Company which has been formulated in the objectives, strategies, objectives contained in the Medium Term Plan and Business Budget Plan (Annual).
2. **Risk Level** is high or low risk as measured by 2 (two) of the following:
   - How much of the negative repercussions that occur when a risk
   - How likely a risk
3. **Risk tolerance** is the limit of the level of risk that is based on the Company's policy is allowed to be accepted as is (not to be revealed to be even lower).
4. **Risk identification** is a process to identify events that may occur and may have negative consequences.
5. **Risk assessment** is the process of determining the level of risk and prioritize risks.
6. **Risk management** is the process of management, organization and culture in the company directed towards risk identification, risk assessment and response activities as well as the treatment of risks.
7. **Risk response** is a decision after the ongoing analysis of risk to accept a risk (so that risk does not do the treatment for lower levels) or to not accept the risk (so against the risk of treatment should be done to lower levels).
8. **Risk treatment** is the action after the response to the

tindakan setelah adanya tanggapan atas risiko yang dimaksudkan untuk menurunkan tingkat risiko dengan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi akibat negatif yang timbul bila risiko terjadi, memindahkan (mentransfer) risiko kepada pihak lain atau menghindari risiko (dengan menghindari tujuan, strategi, sasaran atau rencana hasil kegiatan yang terkait).

9. **Sisa risiko** (residual risk) adalah tingkat risiko setelah tindakan perlakuan atas risiko.
10. **Proses inti** (core process) adalah proses analisis risiko dan pemberian tanggapan dan perlakuan atas risiko.

Untuk penerapan manajemen risiko di Perusahaan, manajemen menetapkan organisasi dengan tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direksi, memiliki tanggung jawab dan wewenang di dalam manajemen risiko sebagai berikut:
   a. Menyusun dan merevisi draft Kebijakan dan Manual Manajemen Risiko untuk diberlakukan di organisasi dengan persetujuan Direksi.
   b. Menetapkan format dokumen isian atau kertas kerja baku yang digunakan di unit-unit kerja untuk pendokumentasian manajemen risiko, bila diperlukan tambahan format baru atau revisi format yang dimuat di dalam Manual Manajemen Risiko.
   c. Mengumpulkan Daftar Risiko dari seluruh Divisi dan merangkumnya menjadi Daftar Risiko Tingkat Korporasi untuk dilaporkan kepada Direksi secara berkala dan sewaktu-waktu bila terdapat perubahan yang signifikan.
   d. Mengumpulkan Rencana Tindak Lanjut Risiko dan Laporan Status Kemajuan Tindak-Lanjut dari seluruh Divisi dan mengingatkan pihak yang terkait bila ada risiko yang pada waktunya belum diberi tanggapan dan perlakuan.
   e. Melaporkan kepada Direksi bila melihat unit kerja telah menerima risiko melampaui batas toleransi risiko yang dapat diterima organisasi.
   f. Melakukan evaluasi tahunan atas penerapan Manajemen Risiko di seluruh unit kerja.
   g. Bila diminta Direksi, membantu Direksi melakukan identifikasi dan asesmen risiko untuk asesmen risiko yang tanggung jawabnya berada pada Direksi. Di dalam melakukan tugas membantu melakukan asesmen risiko ini, tugas Komite Manajemen Risiko terbatas pada melakukan analisis risiko (analisis besarnya kemungkinan dan analisis besarnya akibat negatif) dan tidak memberikan rekomendasi atas keputusan yang akan diambil terhadap risiko tersebut.
   h. Bila perlu, memfasilitasi Lokakarya Swa-Asesmen Risiko di unit-unit kerja.
   i. Bila perlu, membantu unit-unit kerja melakukan

risks that are intended to reduce the level of risk by reducing the likelihood of the risk, reducing the negative consequences that arise when the risk occurs, move (transfer) the risk to others or avoid risk (with avoid goals, strategies, objectives or plans results related activities).

9. **Residual risk** is the risk level after treatment measures of risk.
10. **Core processes** is the process of risk analysis and response activities and the treatment of risks.

For the application of risk management in the Company, the management organization with responsibility and authority as follows:

1. Risk Management Committee is directly responsible to the Board of Directors, has the responsibility and authority in the management of risk as follows:
   a. Develop and revise the draft Policy and Risk Management Manual to be applied in the organization with the approval of the Board of Directors.
   b. Setting a document format standard stuffing or working papers used in the work units for risk management documentation, if required additional new or revised format format contained in the Risk Management Manual.
   c. Collect the entire Division of Risk List and summarize it into a Corporate Level Risk List to be reported to the Board on a regular basis and at any time when there are significant changes.
   d. Collecting Risk Action Plan and Progress Status Report Follow-Up of the entire division and reminds parties concerned when there is a risk that the time has not yet given a response and treatment.
   e. Reporting to the Board of Directors when the saw unit has received a risk beyond the limits of acceptable risk tolerance of the organization.
   f. Conduct an annual evaluation of the application of risk management in all work units.
   g. When prompted Directors, assist the Board of Directors perform identification and risk assessment for risk assessment that the responsibility rests on the Board of Directors. In conducting a risk assessment tasks to help do this, the Risk Management Committee is limited to conduct a risk analysis (analysis of the likelihood, and analysis of the magnitude of the negative consequences) and does not provide recommendations on decisions to be taken against such risks.
   h. If necessary, facilitate workshops Self-Assessment of Risk in work units.
   i. If necessary, help the working units socializing

sosialisasi manajemen risiko secara terus-menerus kepada seluruh pegawai.

j. Membangkitkan dan memelihara kultur sadar risiko di unit kerjanya.

2. Divisi (di luar Komite Manajemen Risiko dan Internal Audit) memiliki tanggung jawab dan wewenang di dalam manajemen risiko sebagai berikut:
   a. Menyelenggarakan Lokakarya Swa-Asesmen Risiko dan menyusun Daftar Risiko unit kerjanya.
   b. Menetapkan dan menyelesaikan tindak-lanjut risiko (bila berada pada kewenangannya) atau mengusulkan tindak-lanjut risiko kepada atasan atau unit kerja yang berwenang untuk mendapatkan keputusan. Terhadap keputusan tindak lanjut risiko yang diputuskan oleh Unit Kerja (baik di dalam menerima risiko maupun memitigasi risiko) tanggung jawab atas implikasi yang diakibatkan oleh keputusan tersebut merupakan tanggung jawab Unit Kerja.
   c. Melakukan sosialisasi manajemen risiko secara terus-menerus kepada seluruh pegawai di unit kerjanya.
   d. Membangkitkan dan memelihara kultur sadar risiko di unit kerjanya.
   e. Melakukan kaji-ulang Daftar Risiko unit kerjanya.

3. Internal Audit memiliki tanggung jawab dan wewenang di dalam manajemen risiko sebagai berikut:
   a. Mengaudit penyelenggaraan manajemen risiko di seluruh unit kerja dengan melakukan audit berbasis risiko.
   b. Bila perlu, membantu Komite Manajemen Risiko di dalam memfasilitasi Lokakarya Swa-Asesmen Risiko di unit-unit kerja.
   c. Melaporkan kepada Direksi bila melihat unit kerja telah menerima risiko melampaui batas toleransi risiko yang dapat diterima organisasi atau batas toleransi risiko yang wajar.
   d. Membangkitkan dan memelihara kultur sadar risiko di Unit Kerjanya.

4. Direksi memiliki tanggung jawab dan wewenangnya di dalam manajemen risiko:
   a. Memutuskan pengorganisasian.
   b. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk manajemen risiko baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik dan dana.
   c. Memutuskan Kebijakan dan Manual Manajemen Risiko dan revisinya.
   d. Memutuskan tindak-lanjut risiko (khusus untuk tindak lanjut yang kewenangannya berada pada Direksi).
   e. Menugaskan Komite Manajemen Risiko untuk mengungkapkan daftar risiko kepada pemegang-kepentingan eksternal (sesuai dengan yang disyaratkan di dalam prinsip Good Corporate Governance).

risk management on an ongoing basis to all employees.

j. Generating and maintaining a culture of risk awareness in their work unit.

2. Division (outside Committee Risk Management and Internal Audit) has the responsibility and authority in the following risk management
   a. Workshop on Self-Organizing and preparing Risk Assessment Risk List work unit.
   b. Establish and complete the follow-up of risk (when positioned in the authority) or propose a follow-up of risk to the boss or work units are authorized to get a decision. Against the decision of the follow-up of risk that is decided by the Unit of Work (both in accepting the risk and mitigate risk) responsibility for the implications caused by such decisions are the responsibility of the Unit of Work.
   c. Socializing risk management on an ongoing basis to all employees in the work unit.
   d. Generating and maintaining a culture of risk awareness in their work unit.
   e. Perform re-examine his unit Risk List.

3. Internal Audit has the responsibility and authority in the management of risk as follows:
   a. Auditing the implementation of risk management throughout the unit by performing a risk-based audit.
   b. If necessary, assist in the Risk Management Committee in facilitating the workshop Self-Assessment of Risk in work units.
   c. Reporting to the Board of Directors when the saw unit has received a risk beyond the limits of acceptable risk tolerance of the organization or reasonable risk tolerance limits.
   d. Generating and maintaining a culture of risk awareness in the unit works.

4. The Board of Directors has the responsibility and authority in the management of risk:
   a. Decided organizing.
   b. Provide the resources needed for better risk management of human resources and physical resources and funds.
   c. Decided Policy and Risk Management Manual and its revision.
   d. Deciding follow-up of risk (for follow-up was on the Board of Directors authority).
   e. Assigning Risk Management Committee to reveal the list of risks to external stake-holders (as required in the principles of good corporate governance).

Risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan berasal dari internal dan eksternal, dimana risiko dari internal antara lain:

1. Tenaga kerja, meliputi:
   - Ketidaklayakan metode pelaksanaan
   - Kelemahan perencanaan
   - Kelemahan pelaksanaan
   - Kelemahan monitoring & supervisi
   - Ketidakakuratan estimasi
2. Sarana & prasarana, meliputi:
   - Ketidakcukupan jumlah alat kerja
   - Kekuranghandalan alat kerja
   - Ketidaksesuaian biaya pemeliharaan/ pengoperasian
   - Kurangnya pengamanan aset
   - Kapasitas menganggur
   - Keterlambatan izin site/tempat kerja
   - Kendala kondisi geo teknik site/tempat kerja
   - Kendala lokasi di daerah tertentu
   - Kondisi site yang tidak diketahui
   - Kesalahan penentuan lokasi
3. Material/bahan, meliputi:
   - Kendala ketersediaan
   - Ketidaksesuaian biaya
   - Ketidaksesuaian mutu
   - Ketidaktepatan waktu (ketidaktersediaan)
   - Kurangnya pengaman aset

4. Dana, meliputi:
   - Ketidaktepatan waktu (ketidaktersediaan pembiayaan)
   - Kurangnya pengaman aset

5. Data & informasi, meliputi:
   - Ketidaksesuaian biaya
   - Kurang handal atau ketidakakuratan & ketidaklengkapan
   - Ketidaktepatan waktu

6. Produk (Output & hasil kerja)
   - Ketidaksesuaian biaya
   - Ketidaksesuaian mutu
   - Ketidaktepatan waktu (ketidaktersediaan)
   - Kurangnya pengamanan aset

Dari sisi eksternal, antara lain:
1. Sosial, politik, budaya & keamanan, meliputi:
   - Wabah penyakit
   - Perubahan gaya hidup dan atau perubahan kebiasaan
   - Kerusuhan massal
   - Terorisme
   - Tindak kriminal
   - Gangguan masyarakat sekitar
   - Ketidakpastian politik
   - Intervensi politik

2. Ekonomi & pasar, meliputi:
   - Perubahan kurs mata uang
   - Kenaikan suku bunga uang
   - Inflasi/kenaikan harga dan penurunan daya beli

The risks faced by the Company derived from internal and external, where the risk of internal, among others:

1. Labor, include:
   - Ineligibility method of execution
   - Weakness planning
   - Weakness implementation
   - Weakness of monitoring and supervision
   - Inaccuracy estimation
2. Facilities and infrastructure, including:
   - Insufficient number of working tools
   - Kekuranghandalan working tools
   - Incompatibility costs of maintenance / operation
   - Lack of security of assets
   - Capacity unemployed
   - Delay permit site / workplace
   - Constraints geo-engineering conditions of site / workplace
   - Constraints on the location of a particular region
   - Unknown site conditions
   - Error determining the location
3. Materials / materials, including:
   - Constraint availability
   - Non-compliance costs
   - Incompatibility quality
   - Inaccuracy time (unavailability)
   - Lack of security of assets

4. Fund, include:
   - Inaccuracy time (unavailability of financing)
   - Lack of security of assets

5. The data and information, covering:
   - Non-compliance costs
   - Powerless or inaccuracies and incompleteness
   - Inaccuracy time

6. Product (Output & work)
   - Non-compliance costs
   - Incompatibility quality
   - Inaccuracy time (unavailability)
   - Lack of security of assets

On the external side, among others:
1. Social, political, cultural and security, including:
   - Epidemic of a disease
   - Changes or changes in lifestyle and habits
   - Mass riots
   - Terrorism
   - Crime
   - Disorders surrounding communities
   - Political uncertainty
   - Political intervention

2. Economic & markets, include:
   - Changes in exchange rates
   - An increase in interest rates money
   - Inflation / rising prices and declining purchasing

masyarakat
- Keterlambatan pertumbuhan ekonomi
- Kendala perpajakan
- Meningkatnya persaingan
- Tertundanya permintaan
- Berkurangnya kebutuhan pengguna
- Perubahan demografis
- Resesi

3. Hubungan dengan pelanggan, meliputi:
- Kelemahan isi perjanjian
- Pelanggaran perjanjian
- Kegagalan pembayaran
- Terputusnya hubungan

4. Hubungan dengan pemasok, sub-kontraktor & mitra lainnya, meliputi:
- Kelemahan isi perjanjian
- Pelanggaran perjanjian
- Kegagalan pembayaran
- Terputusnya hubungan

5. Hukum, meliputi:
- Kendala standar/ketentuan internasional/negara lain
- Kendala hukum di tingkat Nasional
- Kendala hukum di tingkat Provinsi
- Kendala hukum di tingkat Kota/Kabupaten
- Adanya tuntutan hukum

6. Peristiwa alam, meliputi:
- Gempa bumi
- Banjir
- Badai
- Tanah longsor
- Kemarau panjang
- Hujan
- Petir
- Tsunami

7. Teknologi, yakni usangnya teknologi yang dimiliki.

8. Kebakaran dari sumber ekstern

Perusahaan membentuk Tim pembentukkan Fungsi Manajemen Risiko dan Champion Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No. KD. 053/KP.00/041900/2014, tanggal 17 Maret 2014. Adapun anggota dari Tim tersebut adalah:

1. Ketua : Bahrun Rosyadi
2. Sekretaris : Dody Drajat
3. Anggota : Hari Suprianto
   Ellen Hutabarat

Tim Champion Manajemen Risiko ini ditugaskan untuk:
1. Menyelenggarakan se/f-assessment Risiko dan menyusun Daftar Risiko unit kerjanya;
2. Menganalisis potensi risiko di unit kerjanya dan

power
- Delay in economic growth
- Constraints taxation
- Increased competition
- The delay request
- Reduced user needs
- Demographic changes
- Recession

3. The relationship with the customer, including:
- The weakness of the agreement
- Violation of the agreement
- Failure of payment
- Breakdown in relations

4. Relationships with suppliers, sub-contractors and other partners, including:
- The weakness of the agreement
- Violation of the agreement
- Failure of payment
- Breakdown in relations

5. Law, include:
- Constraints standards / international regulations / other countries
- Legal constraints on national level
- Legal constraints at the provincial level
- Legal constraints on the level of the City / County
- The existence of lawsuits

6. Natural events, including:
- Earthquake
- Flood
- Hurricane
- Landslide
- The long drought
- Rain
- Lightning
- Tsunami

7. Technology, which is owned by his old technology.

8. Fire from external sources

The company formed a team formation Champion of Risk Management and Risk Management Directors' Decree No. KD.053 / KP.00 / 041 900/2014, dated March 17, 2014. The members of the team are:

1. Chairman : Bahrun Rosyadi
2. Secretary : Dody Drajat
3. Members : Hari Suprianto
   Ellen Hutabarat

Champion Team of Risk Management is tasked to:
1. Organizing se / f-assessment of Risk and Risk List compiled his work unit;
2. Analyze the potential risks in their work unit and

mengusulkan tindak lanjut atas risiko tersebut kepada atasan langsung dan/atau unit kerja yang menangani fungsi manajemen risiko;
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan hasil tindak lanjut atas risiko baik tindak lanjut berupa penerimaan risiko maupun mitigasi risiko;
4. Melakukan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko secara terusmenerus kepada seluruh Karyawan di unit kerjanya;
5. Menumbuhkan dan memelihara kultur sadar risiko di unit kerjanya;
6. Melakukan kaji-ulang atas Daftar Risiko di unit kerjanya.

propose follow-up of these risks to the immediate supervisor and / or work units that deal with risk management functions;
3. Responsible for the implementation of the follow-up decisions on good risk follow-up in the form of acceptance of risk and risk mitigation;
4. To disseminate the implementation of Risk Management continuously to all employees in the work unit;
5. To foster and maintain a culture of risk awareness in their work unit;
6. To re-examine the above List of Risks in their work unit.

Analisa Peningkatan Pelayanan Pelanggan

Dalam melakukan analisa dan untuk meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan, maka Perusahaan menggunakan dasar:

1. Kemudahan Akses, yaitu ketersediaan atas berbagai informasi yang diperlukan Pelanggan dan kemudahan menghubungi baik melalui telepon, email dan faksimili kepada unit yang menangani Keluhan Pelanggan, alamat Kantor Perusahaan dan website Perusahaan;
2. Kompetensi Karyawan, yang diukur dari kemampuan dan pengetahuan Karyawan yang berhubungan langsung dengan Pelanggan;
3. Tingkat keramahan dan kemampuan berempati dari Karyawan yang berhubungan langsung dengan Pelanggan;
4. Kehandalan Produk/layanan, yaitu barang yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi, kuantitas dan kualitas secara keseluruhan dan tingkat layanan yang memenuhi harapan Pelanggan;
5. Respon atas kebutuhan Pelanggan, yaitu tingkat kesigapan Perusahaan dalam menanggapi keluhan dan permintaan Pelanggan;
6. Kecepatan, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menindaklanjuti informasi, proses pembayaran dan penanganan keluhan;
7. Keamanan, yaitu jaminan keamanan dalam menggunakan Produk/layanan yang diberikan oleh Perusahaan;
8. Layanan yang kasat mata, seperti: fasilitas kantor Perusahaan, loket pembayaran, penampilan pekerja, berbagai tampilan media serta lembaran promosi, dan lain-lain yang dapat menciptakan image/citra Perusahaan.

Mekanisme Penanganan Keluhan Pelanggan

1. Karyawan yang melaksanakan fungsi pemasaran, sales engineering, manajemen proyek dan operasi harus menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk berkomunikasi dengan Pelanggan berkaitan dengan:
   a. Informasi Produk melalui internet, brosur, atau media lainnya;
   b. Pertanyaan, penanganan kontrak atau pesanan, perubahan kontrak atau pesanan, saran dari Pelanggan dan/atau keluhan Pelanggan melalui surat, telepon, e-mail, fax, kunjungan, rapat, dan lain-lain.
2. Mekanisme penerimaan dan penyampaian keluhan Pelanggan di Perusahaan dilakukan melalui unit yang ditunjuk untuk menangani Keluhan Pelanggan.

3. Penanganan Keluhan Pelanggan pada prinsipnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Penerimaan keluhan/pengaduan dari setiap malfungsi ataupun gangguan perangkat/

Analysis of Customer Service Improvement

In conducting the analysis and to improve service to customers, the company is using basic:

1. Ease of access, that's the availability of the necessary information and the ease of contacting customers by phone, email and fax to the unit that handles customer complaints, address and website of Office of the Company;

2. Competence Employees, which is measured from the ability and knowledge of employees who deal directly with customers;
3. The level of friendliness and empathy ability of employees who deal directly with customers;

4. The reliability of products / services, ie goods produced in accordance to specifications, quantity and overall quality and level of service that meets customer expectations;
5. Respond to the needs of customers, that's the level of alertness of the Company in response to complaints and customer demand;
6. The speed, which is the time needed to follow up on information, payment processing and handling of complaints;
7. Security, which guarantee safety in using the products / services provided by the Company;

8. Services are invisible, such as: Corporate office facilities, checkouts, appearance workers, various display media and promotional sheets, and others that can create company image.

Customer Complaints Handling Mechanism

1. Employees who carry out the functions of marketing, sales engineering, project management and operations shall establish and implement effective arrangements for communicating with customers in relation to:
   a. Product information via the Internet, brochures, or other media;
   b. Inquiries, contracts or order handling, changes in the contract or order, suggestions from customers and / or customer complaints by mail, telephone, e-mail, fax, visits, meetings, and others.
2. The mechanism of acceptance and delivery of customer complaints in the Company carried through the unit designated to handle customer complaints.
3. Handling Customer Complaints, in principle, be done in the following way:
   a. Acceptance complaint / grievance of any malfunctions or interference devices / different

spesifikasi teknis yang berbeda setelah diserahterimakan dan dioperasikan oleh Pelanggan;
b. Pencatatan dan registrasi keluhan dalam daftar keluhan untuk keperluan pengendalian penyelesaian keluhan;
c. Pendistribusian keluhan untuk dilakukan penanganan yang tepat kepada unit kerja internal yang memiliki tanggung jawab/ kemampuan dalam menindaklanjuti keluhan yang diterima;
d. Monitoring penyelesaian keluhan sesuai dengan standar layanan kualitas yang ditetapkan;
e. Menutup permasalahan (Closing) dan menyampaikan kepada Pelanggan tentang penyelesaian atau tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan.

4. Proses pengaduan keluhan sampai dengan penyelesaian keluhan tersebut diatur tersendiri dalam Standard Operating Procedur.

technical specifications after the handover and operated by the Customer;
b. Recording and registration of the complaint in the list of complaints for control purposes complaint resolution;
c. Distribution of complaints to be precise handling the internal workings of the unit which has responsibility / ability to follow up on complaints received;
d. Monitoring resolution of complaints in accordance with the specified quality of service standards;
e. Closing the problem (Closing) and delivered to the customer on completion or follow up on complaints submitted.

4. The process of grievance through the grievance resolution separately regulated in the Standard Operating Procedure.

Garansi Produk

1. Perusahaan senantiasa berusaha agar Produk yang diserahkan kepada Pelanggan memenuhi harapan Pelanggan dan dilakukan dengan layanan yang terbaik dan senantiasa menghindari kemungkinan timbulnya kerugian pada Pelanggan.
2. Perusahaan memberikan jaminan berupa perbaikan atau penggantian dengan Produk baru dalam hal terjadi kerusakan pada Produk yang masih dalam masa garansi.
3. Perusahaan akan mengganti kerugian yang dialami oleh Pelanggan yang disebabkan oleh Produk yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Perusahaan atau Karyawan atau orang-orang yang bekerja untuk Perusahaan dalam implementasi/ penyerahan Produk.
4. Perusahaan memberikan layanan purna jual atas Produk setelah masa garansi berupa konsultasi teknis Produk, perbaikan dan pemeliharaan, serta penyediaan suku cadang berbayar.

Product warranty

1. The company is constantly trying to get products delivered to customers meet customer expectations and performed with the best service and always avoid potential losses on customers.
2. The Company provides collateral in the form of repair or replacement with new products in the event of damage to the product is still under warranty.
3. The Company will reimburse the losses suffered by the Customer due to the product not working properly or are caused by the negligence or fault of the Company or employees or those who work for the Company in the implementation / delivery of products.
4. The Company provides after-sales service on products after the warranty period in the form of technical consultancy Products, repairs and maintenance, as well as the provision of spare parts paid.

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan

Pada Tahun 2014, tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Important matters that are being faced by companies, entities, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who served during a period of annual report

In the year 2014, there's no important case being faced by companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners.

Akses informasi dan data perusahaan

Penyebaran informasi kepada semua stakeholder merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif dari para stakeholder terhadap kebijakan dan kegiatan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Selain menerbitkan publikasi Laporan Keuangan Tahunan melalui media massa baik cetak nasional, juga memanfaatkan teknologi informasi dan media lainnya sebagai sarana penyebaran informasi bagi perusahaan, antara lain melalui:

- Situs internet www.inti.co.id
- Radio Internal
- Portal internal (intranet) Jaring
- Media Sosial Facebook PT INTI
- Media Sosial Twitter @pt_inti
- Portal Kementerian BUMN

Access to information and corporate data

Dissemination of information to all stakeholders is an important part of the increase of transparency of information internally and externally, which is expected to help maintain and improve the knowledge, understanding and positive perceptions of stakeholders on the policies and activities of PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). In addition to the publication of annual financial statements published by the mass media both national print, also utilizing information technology and other media as a means of disseminating information for the company, including through:

- Internet site www.inti.co.id
- Internal Radio
- Internal portal (intranet) Jaring
- Social Media Facebook PT INTI
- Social Media Twitterpt_inti
- Portal Ministry of SOEs

Bahasan Mengenai Kode Etik

The Discussion of The Ethics Code

Perusahaan memiliki kode etik yang sejalan dengan Sarbanes Oxley Act (SOA) section 406. Kode etik berlaku pada Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat struktural lainnya serta seluruh karyawan.

Dasar hukum berlakunya Kode Etik Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia No. KN.026/2014 dan dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

The company has a code of conduct, in line with the Sarbanes Oxley Act (SOA) of section 406. The Code of Conduct applies to the Board of Directors, Board of Commissioners, and other structural officials and employees.

The legal basis for the enactment of the Code of Conduct by Decision of the Board of Directors of the Company Company (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia No. KN.026/2014 and clarified as follows:

Pedoman Etika Perusahaan

PT INTI telah memiliki Kebijakan Kode Etik Perusahaan sejak 2011 yang menjadi pedoman bagi Perusahaan untuk memastikan kegiatan usaha dijalankan dengan penuh integritas serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, direksi, dan seluruh karyawan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsip-prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan.

A. Isi Kode Etik

Kebijakan Kode Etik PT INTI merupakan himpunan perilaku yang harus dikerjakan dan perilaku yang harus dihindari oleh setiap insan Perusahaan. Kebijakan Kode Etik Perusahaan terdiri atas Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Etika Perilaku.

1. Etika Bisnis

Etika Bisnis merupakan nilai dan norma yang harus diperhatikan baik dalam lingkup internal maupun

Corporate's Code of Conduct

PT INTI has a Code of Conduct Policy since 2011, which serve as guidelines for the Company to ensure operations run with integrity and in accordance with the laws and regulations in force. These guidelines are expected to develop good behavior in accordance with high ethical standards for corporations, directors, and employees. This policy also aims to develop good relationships with external parties on the principles of good corporate governance and the spirit of the Ethics Code.

A. The Ethics Code Contents

Policy Code of PT INTI is a set of behaviors that must be done and behaviors that should be avoided by every member of the Company. Policy Code of Ethics consists of the Code of Business Ethics and Code of Ethical Conduct.

1. Business Ethics

Business Ethics is the values and norms that must be

eksternal Perusahaan, sekaligus pedoman entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap Stakeholders sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan. Etika Bisnis mengatur hal-hal sebagai berikut:

1.1 Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, dalam artian setiap insan INTI harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap Insan INTI. Ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada peraturan Perusahaan yang berlaku.

1.2 Larangan Pemberian dan/atau Penerimaan Gratifikasi, dengan memperhatikan sejumlah kebijakan berikut :

1) Kebijakan Pemberian kepada Pihak Ketiga
   a) Insan INTI dilarang memberikan atau menjanjikan hadiah, suap, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyelenggara negara, mitra bisnis, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
   b) Segala hal menyangkut pemberian sesuatu pada pihak-pihak yang berhubungan dengan Perusahaan wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan gratifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Tindak Pidana Korupsi.
2) Kebijakan Penerimaan Hadiah, Suap, dan Sejenisnya.
   a) Insan INTI dilarang melakukan hal berikut:
      I Menerima gratifikasi yang dianggap suap dari pihak manapun yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.
      ii. Meminta gratifikasi yang dianggap suap dari pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk

considered well within the scope of the Company's internal and external, as well as being a business entity guidelines, ethical, and act in an effort to balance the interests of the Company and the interests of all stakeholders in accordance with the principles of good corporate governance and corporate values are healthy with while maintaining the profitability of the Company. Business Ethics set things up as follows:

1.1 Compliance with Laws and Regulations, in the sense that every INTI's person have to understand and obey legislation is a key element that must be maintained in any action taken by any person of INTI. Further provisions may refer to the Company's rules and regulations.

1.2 Prohibition of Giving and / or Reception Gratuities, having regard to the following policies:

1) Granting Policies to Third Parties
   a) INTI's person are prohibited from giving or promising gifts, bribes, and the like, either directly or indirectly to the state officials, business partners, and other parties related to the Company, in which the administration is known or reasonably suspected to be used to influence or move these parties do or do not do anything in his post, which is contrary to his duty.
   b) All matters concerning the administration of something on the parties relating to the Company shall refer to the provisions of the applicable legislation, including gratuities provisions referred to in the legislation in the field of Corruption.
2) Policies Receiving Gifts, Bribes, and the same other.
   a) INTI's person prohibited to do the following:
      i. Accept gratification considered bribes received from any party directly or indirectly.
      ii. Ask gratification is considered a bribe of any party either directly or indirectly, or by abusing his power to force someone to give something, pay, or do something for themselves that are known or reasonably suspected to be used to influence decision-making or to move in order to perform or not perform something

mempengaruhi pengambilan keputusan atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, ketentuan Peraturan Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iii. Penerima gratifikasi yang dianggap suap, wajib melaporkan pada atasan langsung, serendah-rendahnya setingkat Kepala Bagian dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi dimaksud.

iv. Memotong atau menerima sebagian jumlah pembayaran pada pihak ketiga sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

v. Larangan sebagaimana dimaksud pada butir i sampai dengan iii, juga berlaku bagi Keluarga Batih insan INTI, sepanjang hal tersebut dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi Insan INTI dalam pelaksanaan tugas/pengambilan kebijakan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, ketentuan Peraturan Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Penerima gratifikasi yang dianggap suap, wajib melaporkan pada atasan langsung serendah-rendahnya setingkat Kepala Bagian dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberian.

c) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud butir b di atas, atasan langsung meneliti gratifikasi yang diterima tersebut untuk menentukan apakah gratifikasi yang diterima tersebut diklasifikasikan/dianggap Suap atau bukan dengan sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Jika pemberian yang diterima dianggap suap, maka kewajiban bagi penerima pemberian untuk mengembalikan kepada si pemberi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya pemberian dimaksud, disertai penjelasan mengenai kebijakan ini dengan menggunakan Formulir Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi tentang Pengendalian Gratifikasi.

e) Jika alamat si Pemberi sebagaimana dimaksud butir d di atas berada di tempat yang jauh atau di luar negeri, maka cukup Formulir tersebut di atas yang dikirimkan, sedangkan pemberiannya diberikan kepada lembaga sosial yang ditentukan oleh Perusahaan.

in his post, which is contrary to its obligations, the provisions of the Company Regulations, and regulations that apply.

iii. Graft recipients were considered bribery, shall report to the direct supervisor, as low-level Chief within 30 days of receipt of gratuities intended.

iv. Cut or accept partial payments amount to a third party in return for the performance of duties and obligations.

v. The prohibition referred to point i to iii, also applies to Family of INTI's person, the extent they can or should be expected to affect personnel of INTI in the execution of tasks / policy making position that is contrary to its obligations, the provisions of the Company Regulations and laws existing law.

b) The recipient graft is considered a bribe, shall report to the direct supervisor as low-level Chief within 30 days of receipt of the provision.

c) Upon receipt of the report as referred to in point b above, the direct supervisor examines the gratuities received to determine whether the received gratuities are classified / considered bribes or not in accordance with company rules and regulations in force.

d) If the gift received is considered a bribe, it is an obligation for the recipient to return the gift to the giver within 30 working days of receipt of the provision in question, along with an explanation of this policy by using the Returns Form referred to in the Decree of the Board of Control Gratification.

e) If the address of the giver referred to item d above are in distant places or abroad, then simply mentioned above form is sent, while the gift is given to social institutions as determined by the Company.

1.3 Kepedulian terhadap Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan, harus dilakukan oleh semua insan INTI melalui hal-hal berikut :

1) Senantiasa menjaga dan memelihara keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Setiap Insan INTI merupakan aset penting, karenanya pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut senantiasa memperhatikan kesehatan dan keselamatan serta hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya.
3) Bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan kerja yang aman dengan mematuhi peraturan dan praktek-praktek mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.
4) Melaporkan apabila terjadi kecelakaan, luka/cacat fisik, dan adanya peralatan kerja yang tidak aman, pada pimpinan atau pihak yang ditunjuk untuk itu.
5) Memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari bahaya, serta senantiasa menjaga kelestarian lingkungan.
6) Memahami dan mematuhi seluruh prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan.
7) Menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien.

1.4 Lingkungan Kerja yang Baik, harus dilakukan oleh semua insan INTI melalui hal-hal berikut :

1) Privasi bagi insan INTI
2) Keragaman dan praktik hubungan kerja yang adil
3) Diskriminasi dan Pelecehan
4) Saling Menghormati
5) Tindakan tidak Menyenangkan

1.5 Standar Etika dalam Berhubungan dengan Stakeholders, menjadi pernyataan jaminan Perusahaan dalam rangka pemenuhan hak-hak dan kepentingan pada para stakeholders yang dijalankan pada hubungan berikut :

1) Hubungan dengan Insan INTI, yang diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
2) Hubungan dengan Kastemer, yang dilakukan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan kastemer berdasarkan kejujuran dan integritas. Segala bentuk promosi Perusahaan dilakukan secara terukur dan jujur. Pelaksanaannya diatur tersendiri dalam Kebijakan Kastemer.
3) Hubungan dengan Pemasok, yang diatur tersendiri dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan.
4) Hubungan dengan Kreditur, yang diatur

1.3 Concern for Health, Safety, and Environment, to be done by all members of INTI through the following:

1) Always keep and maintain the safety, health and the environment in accordance with the legislation in force.
2) Each INTI's person is an important asset, therefore the management and maintenance of these assets continue to pay attention to health and safety as well as its relationship with the surrounding environment.
3) Responsible for maintaining a safe working environment by complying with the rules and practices regarding safety, health and environment.
4) Reported in the event of an accident, luka / physical disabilities, and their equipment unsafe work, the leader or assigns to it.
5) Have a commitment to creating a work environment that is free from danger, and always preserving the environment.
6) Understand and adhere to all safety procedures that have been set.
7) Tackling the problem of environmental pollution that occurred with an effective and efficient.

1.4 Good Work Environment, should be done by all INTI's person through the following:

1) Privacy for the personnel of INTI
2) Diversity and fair labor relations practices
3) Discrimination and Harassment
4) Respect
5) No action Fun

1.5 Standards in Dealing with Stakeholders, be firm guarantee statement in order to fulfill the rights and interests of the stakeholders that are run on the following relationship:

1) Relationship with INTI's Person, which is regulated separately in the Collective Labour Agreement (PKB).
2) Relationship with the Customer ', which is performed to establish a long term relationship with the customer based on honesty and integrity. All forms of promotion of the Company's measurable and honest. Policy implementation is regulated separately in the Customer '.
3) Relationship with Suppliers, are regulated separately in the Procurement of Goods and / or Services Company.
4) The relationship with the creditor, which is

tersendiri dalam Kebijakan Kreditur.

5) Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar, yang diatur tersendiri dalam Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

6) Hubungan dengan Pemerintah, selalu didasarkan pada standar etika bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Hubungan dengan Pemegang Saham
   a. Jaminan Perlindungan bagi Pemegang Saham
      Insan INTI berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pemegang Saham. Hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Prinsip Jaminan Bagi Pemegang Saham
      - Setiap Insan INTI bertanggung jawab untuk melindungi aset Pemegang Saham yang dipercayakan pada Perusahaan dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, atau pencurian.
      - Saham-saham berupa dana, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), prototype, product, ataupun peralatan, hanya dapat digunakan untuk usaha dan tujuan yang disetujui manajemen.
      - Setiap Insan INTI dilarang menggunakan aset-aset Perusahaan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar peraturan Perusahaan.
      - Setiap Insan INTI wajib segera memberitahu terjadinya pencurian, kehilangan atau penyalahgunaan aset Perusahaan pada fungsi general affair/umum atau pihak yang ditunjuk untuk itu.
   c. Keakuratan Dokumen-Dokumen Perusahaan
      Segala dokumen, catatan-catatan, dan akun-akun harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan sistem internal kontrol Perusahaan.
   d. Audit dan Investigasi
      - Setiap Insan INTI diharuskan bekerja sama dengan tim pemeriksa dan investigasi yang dilakukan oleh Perusahaan, Instansi pemeriksa, dan regulator;
      - Seluruh informasi yang diberikan

regulated separately in Creditor Policy.

5) Relationship with the Community and Neighborhood, which is regulated separately in the Guidelines for the Management Partnership Program and Community Development Program.

6) Relationship with the Government, always based on business ethics standards and legislation in force.

7) Relations with Shareholders
   a. Guarantees for the Protection of Shareholders
      INTI's person is committed to continually strive for the Company experienced continuous growth based on mutual business standards to be able to give a maximum contribution to the Shareholders. Relations with Shareholders can be established to comply with the legislation in force.
   b. Security Principle Shareholders
      - Each INTI's perseon is responsible for protecting the assets entrusted to the Shareholders of the Company's loss, damage, misuse, or theft.
      - Shares in the form of funds, Intellectual Copyrights (HKI), prototype, product, or equipment, may only be used for business and management-approved purposes.
      - Each INTI's person prohibited from using the Company's assets for purposes contrary to the law and violate the rules of the Company.
      - Each INTI's person shall immediately notify the occurrence of theft, loss or misuse of company assets on the function of general affairs / public or assigns to it.
   c. The accuracy of Company Documents
      All documents, records, and accounts must be in accordance with the principles of accounting and internal control systems of the Company.
   d. Audit and Investigation
      - Each INTI's person required to cooperate with the inspection team and the investigations conducted by the Company, Agency inspectors, and regulators;
      - All information provided must be

harus benar dan akurat;
- Seluruh Insan INTI tidak akan menyembunyikan, merubah, memusnahkan dokumen atau catatan-catatan sehubungan dengan adanya kegiatan investigasi atau adanya permintaan yang sah untuk itu;
- Setiap Insan INTI disarankan untuk berkonsultasi dengan fungsi hukum sebelum merespon segala permintaan audit, investigasi atau informasi lain di luar kebiasaan.

8) Hubungan dengan Mitra Bisnis, mengedepankan asas manfaat, sinergi, tidak merugikan perusahaan, mematuhi kode etik, transparan, sesuai kontrak, dan memastikan telah memenuhi kebijakan perusahaan.

9) Hubungan dengan Pesaing, patuh pada ketentuan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berlaku.

10) Hubungan dengan Media Massa, senantiasa menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab dalam rangka membangun citra Perusahaan yang positif dengan tetap menghormati kode etik jurnalistik.

11) Hubungan dengan Anak Perusahaan, harus dilakukan dengan baik dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan.

1.6 Standar Etika Insan, penting bagi Perusahaan untuk mengatur perilaku yang beretika dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam proses pekerjaan. Hal itu mengatur hal berikut :
1) Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan
2) Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan
3) Perilaku sebagai Rekan Kerja
4) Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Rights)

2. Etika Perilaku

Etika perilaku diharapkan menjadi pedoman untuk mengembangkan perilaku yang baik baik di lingkup eksternal maupun internal. Hal ini dijalankan dengan hal berikut :
2.1 Komitmen Insan INTI
2.2 Menjaga Nama Baik Perusahaan
2.3 Menjaga Hubungan Baik Antar Insan Inti
2.4 Menjaga Kerahasiaan Perusahaan
2.5 Menjaga dan Menggunakan Aset Perusahaan
2.6 Menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Lingkungan
2.7 Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian, dan Merokok
2.8 Melakukan Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan
2.9 Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest)

truthful and accurate;
- The entire personnel of INTI will not hide, alter, destroy documents or records in connection with the activities of the investigation or any valid request for it;

- Each INTI's person are advised to consult with legal function before responding to any request audits, investigations or other information out of the ordinary.

8) Relationship with Business Partners, put forward the principle benefits, synergies, not hurt the company, adhere to a code of ethics, transparency, according to the contract, and make sure it meets the company's policy.

9) Relations with Competitors, comply with the provisions on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition regulations.

10) Relations with the Mass Media, always conveying information openly and responsibly in order to build a positive image of the company while respecting the journalistic code of ethics.

11) Relationship with Subsidiary, should do well in order to build synergies and better image and can improve the performance of the Company.

1.6 Individual Ethical Standards, it is important for the Company to regulate ethical behavior in the execution of daily activities in a work process. It was set up as follows:
1) Conduct For Against Tops Bottoms
2) Conduct For Against Tops Bottoms
3) Conduct a Colleague
4) Copyrights

2. Behavior Ethical

Ethical behavior is expected to be a guideline to develop good behavior among both external and internal. It is run by the following:

2.1 Commitment INTI's person
2.2 Maintain a Good Name Company
2.3 Maintain a Good Relationship Between Individuals Core
2.4 Confidentiality Company
2.5 Maintain and Use of Company Assets
2.6 Maintain Health and Safety, and Environment
2.7 Amoral behavior, Narcotics, Drugs, Gambling, and Smoking
2.8 Perform Data Recording Company and Prepared
2.9 Conflict of Interest (Conflict Of Interest)

2.10 Aktivitas Politik, Perusahaan menjamin seluruh Insan INTI untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.

3. Pelanggaran Terhadap Kebijakan Kode Etik Perusahaan

3.1 Komitmen Kebijakan Kode Etik Perusahaan, wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen untuk melaksanakan Kebijakan Kode Etik Perusahaan.

3.2 Sosialisasi dan Internalisasi, yang dilakukan oleh seluruh Kepala Divisi untuk memastikan Kebijakan Kode Etik Perusahaan telah tersosialisasikan.

3.3 Pelaporan Pelanggaran Terhadap Kebijakan Kode Etik Perusahaan, melalui mekanisme pelaporan pelanggaran yang telah diatur serta mendapat jaminan perlindungan terhadap pelapor atas pelaporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik Perusahaan.

3.4 Mekanisme Pelaporan Pelanggaran, setiap insan INTI wajib melaporkan pelanggaran pada atasan langsung dari Insan INTI yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. Pejabat berwenang akan menghukum sesuai dengan ketentuan Hukuman Disiplin yang tertuang di dalam lampiran II Perjanjian Kerja Bersama.

3.5 Sanksi Atas Pelanggaran Kebijakan Kode Etik Perusahaan, sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.6 Pengaturan Imbalan Karyawan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui perundingan dengan serikat pekerja yang dituangkan dalam Perjanjian kerja Bersama (PKB).

Dalam rangka meningkatkan awareness dan kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama untuk melaksanakan GCG, perusahaan melakukan sosialisasi kode etik pada tanggal 11 dan 18 Juli 2014 serta 16, 17 september 2014. Serta sebelumnya telah disampaikan e-book Kode etik kepada Direksi. Dekom dan Seluruh Karyawan pada tanggal 1 September 2014.

Penindakan atas pelanggaran kode etik pada tahun 2014 dilakukan merujuk pada ketentuan hukuman disiplin Karyawan yang berlaku.

Akses terhadap Kode Etik Perusahaan melalui web intern yaitu portal-hukum.inti.net yang dapat diakses oleh seluruh karyawan dan direksi PT INTI. Permintaan pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan dan Pakta Integritas telah dilakukan oleh Divisi Hukum dan Kepatuhan.

2.10 Political Activities, the Company guarantees that all personnel of INTI to be able to exercise the right to the opportunity to channel their political aspirations. The company did not give political contributions and are not affiliated to any political party.

3. Violations of the Code of Conduct Policy

3.1 Commitment to the Code of Conduct Policy, shall sign the Integrity Pact is a commitment to implement the Code of Conduct Policy.

3.2 Socialization and Internalization, which is done by all Heads of Divisions to ensure the Company's Code of Conduct Policy socialized.

3.3 Reporting Violations of the Code of Conduct Policy, through reporting mechanisms that have been set as well as violations of guaranteed protection against the complainant for reporting violations or alleged violations of the Code of Conduct Policy.

3.4 Mechanism Reporting Violations, every human being is obliged to report violations of the INTI's person direct supervisor of INTI's person suspected Code violations. Authorities will punish in accordance with the Disciplinary Punishment contained in annex II Collective Labor Agreement.

3.5 Sanctions for Violations Code of Conduct Policy, in accordance with the Company's Regulations and legislation in force.

3.6 Setting Employee Benefits, based on the laws and regulations that apply through negotiations with unions set forth in the labor agreement (PKB).

In order to increase awareness and awareness of the importance of good corporate governance and commitment to implement the GCG, the company conducted a code of conduct on June 11 and July 18, 2014 as well as 16, 17 September 2014. As well as the previous e-book of Code of Conduct has been submitted to the Board of Directors, BOC and All Employees on September 1, 2014.

Prosecution of violations of the ethics code in 2014 made reference to the provisions applicable disciplined employees.

Access to our Code of Ethics through internal web is portal-hukum.inti.net that can be accessed by all employees and directors of PT INTI. Request a statement of compliance with the Ethics Code and Integrity Pact has been done by the Legal and Compliance Division.

Pengungkapan mengenai whistleblowing system
Disclosure about Whistle Blowing System

Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system/WBS)

Perusahaan telah menetapkan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan dalam Surat Keputusan Direksi KN.026/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Kebijakan Whistle Blowing System sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi KN.024/2014 yang memuat prosedur kebijakan Whistle Blowing System (WBS), jaminan perlindungan bagi Whistle Blower, tim WBS dan kerahasiaan. Selain itu, Perusahaan telah menyediakan sarana komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan WBS berupa Kotak WBS, Email gcg_wbs@inti.co.id dan SMS center.

Sosialisasi pelaksanaan kebijakan WBS seperti yang tercantum dalam rencana sosialisasi dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KN.026/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi KN.024/2014 telah dilaksanakan Perusahaan pada karyawan berupa sosialisasi Harmony dan pada tanggal 11 Juli 2014 dan 18 Juli 2014 telah dilakukan sosialisasi Hukuman Disiplin, Whistle Blowing System, dan Kode Etik.

Prosedur Pelaporan

(1) Pelaporan yang dilakukan oleh Whistle-Blower dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara yaitu:
   a. Melalui surat yang berisikan uraian pelaporan dan bukti-bukti, yang ditujukan langsung kepada "Ketua Tim WBS", dengan format tertentu, dan dimasukkan ke kotak WBS; atau
   b. Melalui e-mail yang berisikan uraian pelaporan ke gcg_wbs@inti.co.id; atau
   c. Melalui SMS kepada Ketua Tim WBS, dengan nomor yang akan diinformasikan kemudian.

(2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dapat berupa:
   a. Bukti tulisan, seperti surat, kwitansi, nota, atau dokumen yang berisi informasi dalam bentuk apapun yang dituangkan di atas kertas atau dalam bentuk data elektronik yang dapat dibaca;
   b. Bukti audio (rekaman suara):
   c. Bukti video (rekaman gambar);
   d. Bukti kesaksian.

(3) Dalam hal pelaporan dilakukan melalui e-mail atau SMS, bukti-bukti sebagaimana dimaksud dimintakan oleh Tim WBS pada tahap proses Evaluasi Kelayakan.

The company carries out the policy on reporting system over alleged irregularities in the company (whistle blowing system / WBS)

The Company has established a policy on reporting system over alleged irregularities at the company in the Decree of Directors KN.026 / 2009 dated December 30, 2009 on Whistle Blowing System Policy as amended by the Decree of the Board of Directors KN.024 / 2014 contains procedures Whistle Blowing Policy System (WBS), guarantees protection for Whistle Blower, WBS team and confidentiality. In addition, the Company has provided a means of communication to support the implementation of such WBS policies such as WBS boxes, e-mail: gcg_wbs@inti.co.id and SMS center.

Socialization WBS policy implementation as listed in the dissemination plan Directors Decree No. KN.026 / 2009 dated December 30, 2009 as amended by the Decree of the Board of Directors KN.024 / 2014 has been carried out on the Company's employees in the form of socialization Harmony and on July 11, 2014 and July 18, 2014 has done socialization Disciplinary Sanctions, Whistle Blowing System, and the Code of Conduct.

Reporting procedures

(1) The reported by Whistle-blowers can be implemented through three (3) ways:
   a. Through a letter containing a description of reporting and evidence, which is addressed directly to "WBS Team Leader", with a particular format, and put into a box of WBS; or
   b. Via e-mail that contains a description reporting to gcg_wbs@inti.co.id; or
   c. Via SMS to the Chairman of the WBS, the number will be informed later.

(2) The evidence referred to in paragraph (1) letter a of this article can be:
   a. Written evidence, such as letters, receipts, notes, or documents containing the information set forth in any form on paper or in the form of electronic data that can be read;
   b. Proof audio (sound recording):
   c. Evidence of video (image recording);
   d. Testimonial evidence.

(3) If the reporting is done through e-mail or SMS, the evidence referred requested by WBS team at this stage of the Feasibility Evaluation process.

(4) Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas pelapor yaitu Nama, NIP, Jabatan, dan Divisi/Unit Kerja, untuk memudahkan tindak lanjut

(5) Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas tetap diproses, namun demikian dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti- bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan.

(6) Apabila Pelaporan Pelanggaran dan/atau Kecurangan diajukan oleh orang atau badan hukum atau lembaga di luar Perusahaan, maka selain bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diserahkan bukti-bukti lainnya yaitu:
a. Fotokopi bukti identitas pelapor; atau
b. Surat Kuasa dari Whistle-blower di luar Perusahaan kepada penerima kuasa yang menyatakan memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama yang bersangkutan; atau
c. Jika perwakilan Whistle-Blower di luar Perusahaan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus melampirkan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran dan/atau Kecurangan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

(7) Whistle-Blower wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
a. Bentuk/uraian Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang terjadi dan kerugian (apabila dapat ditentukan) yang ditimbulkan dari Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut;
b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut;
c. Lokasi Pelanggaran dan/atau Kecurangan, yaitu meliputi nama, tempat, unit kerja atau fungsi terjadinya Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut;
d. Waktu Pelanggaran dan/atau Kecurangan, yaitu periode Pelanggaran dan/atau Kecurangan baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut terjadi;
e. Bagaimana terjadinya Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya Pelanggaran dan/atau Kecurangan;
f. Apakah Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain;
g. Apakah Pelanggaran dan/atau Kecurangan tersebut pernah terjadi sebelumnya.

(4) Reporting is done by stating the identity of the complainant ie Name, NIP, Position, and Division / Unit of Work, to facilitate follow-up.

(5) Reporting delivered without identity will still be processed, however, consider first the contents of the report sincerity, credibility, and the evidence submitted, as well as the possibility to confirm reporting.

(6) If the Reporting Violations and / or fraud filed by the person or legal entity or institution outside the Company, in addition to the evidence referred to in paragraph (2) also submitted other evidence, namely:
a. Photocopy of proof of identity of the complainant; or
b. Power of Attorney of the Whistle-blower outside the Company to the authorized person who claimed to give the authority to act for and on behalf of the concerned; or
c. Whistle-Blower If the representative outside the institution or company is a legal entity, it must attach a document stating that the party applying for Reporting Violations and / or Cheating authorized to represent the organization or legal entity.

(7) Whistle-blowers are required to provide an early indication of which can be accounted for, including:
a. Shape / description Violation and / or fraud that occurs and loss (if it can be determined) arising from the infringement and / or the fraud;
b. Parties involved, ie who should be responsible for Violation and / or fraud, including witnesses and parties are benefited or harmed for Infringement and / or the Fraud;
c. Location Violation and / or fraud, which includes the name, place, units work or function of the violation and / or the fraud;
d. Time Violation and / or fraud, which is the period of infringement and / or fraud in the form of day, week, month, year or a specific date when the violation and / or fraud took place;
e. How the violation and / or fraud and whether there is evidence supporting the occurrence of violations and / or Cheating;
f. Do Abuse and / or Cheating is never reported to the other party;
g. Do Abuse and / or Cheating is unprecedented.

Form Pelaporan WBS
Report Form of WBS

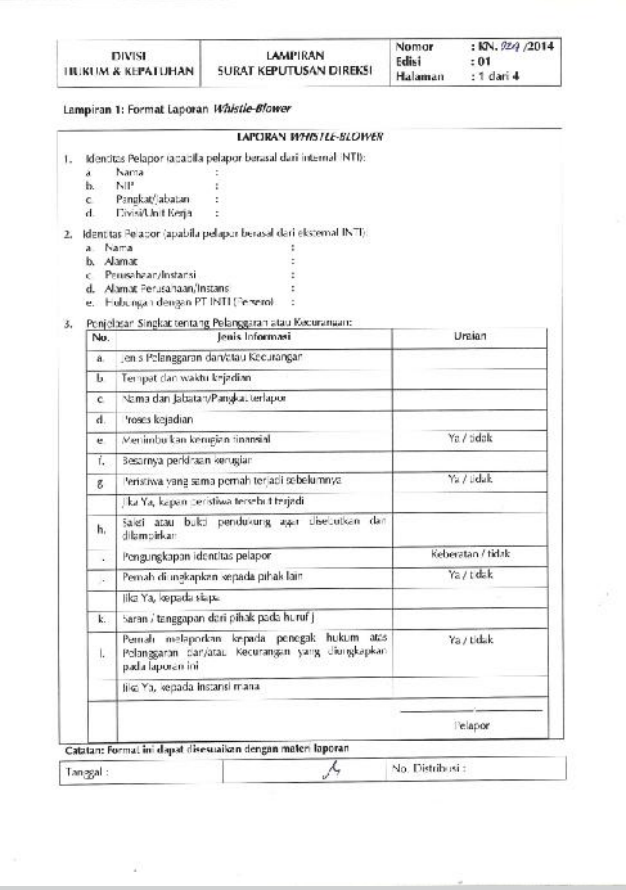

DIVISI HUKUM & KEPATUHAN	LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. /2014 Edisi : 01 Halaman : 1 dari 4

Lampiran 1: Format Laporan *Whistle-Blower*

LAPORAN *WHISTLE-BLOWER*

1. Identitas Pelapor (apabila pelapor berasal dari internal INTI):
   a. Nama :
   b. NIP :
   c. Pangkat/jabatan :
   d. Divisi/Unit Kerja :
2. Identitas Pelapor (apabila pelapor berasal dari eksternal INTI):
   a. Nama :
   b. Alamat :
   c. Perusahaan/Instansi :
   d. Alamat Perusahaan/Instansi :
   e. Hubungan dengan PT INTI (Persero) :
3. Penjelasan Singkat tentang Pelanggaran atau Kecurangan:

No.	Jenis Informasi	Uraian
a.	Jenis Pelanggaran dan/atau Kecurangan	
b.	Tempat dan waktu kejadian	
c.	Nama dan Jabatan/Pangkat terlapor	
d.	Proses kejadian	
e.	Menimbulkan kerugian finansial	Ya / tidak
f.	Besarnya perkiraan kerugian	
g.	Peristiwa yang sama pernah terjadi sebelumnya	Ya / tidak
	Jika Ya, kapan peristiwa tersebut terjadi	
h.	Saksi atau bukti pendukung agar ditelusuri dan diamankan	
.	Pengungkapan identitas pelapor	Keberatan / tidak
.	Pernah diungkapkan kepada pihak lain	Ya / tidak
	Jika Ya, kepada siapa	
k.	Saran / tanggapan dari pihak pada huruf j	
l.	Pernah melaporkan kepada penegak hukum atas Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang diungkapkan pada laporan ini	Ya / tidak
	Jika Ya, kepada instansi mana	
		Pelapor

Catatan: Format ini dapat disesuaikan dengan materi laporan

Tanggal :		No. Distribusi :

Jaminan Perlindungan Bagi Whistle-Blower

(1) Whistle-Blower mendapat jaminan perlindungan dari Tim WBS, terhitung sejak laporan diterima oleh Tim WBS sampai dengan laporan tersebut dinyatakan ditutup dan/atau selesainya proses pengungkapan laporan yang disampaikan.

(2) Jaminan perlindungan diberikan kepada Whistle-Blower bertujuan agar yang bersangkutan dapat terhindar dari intimidasi, pemerasan, ancaman dan kekerasan dari seseorang, kelompok maupun institusi yang berbadan hukum. Jaminan perlindungan dapat berupa antara lain:
   a. Memperoleh perlindungan serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
   b. Memberikan pernyataan tanpa tekanan;
   c. Mendapat penerjemah (bila perlu);
   d. Mendapatkan informasi dari perkembangan kasus;
   e. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
   f. Memperoleh penggantian biaya transportasi (bila ada) sesuai dengan kebutuhan;
   g. Mendapat nasihat/bantuan hukum.

(3) Selain ketentuan ayat (2), Perusahaan juga memberikan perlindungan kepada Whistle-Blower yang laporannya terbukti benar atas tindakan

Guarantee Whistle-Blower Protection For

(1) Whistle-blowers are guaranteed protection from WBS team, starting from the reports received by the WBS team up with the report declared closed and / or completion of the disclosure of the report submitted.

(2) Guarantee the protection given to the Whistle-Blower intended that the question may be protected from intimidation, extortion, threats and violence from a person, group or legal entity. Guarantee of protection can be, among others:
   a. Protection and free from the threat with respect to the testimony that will be, is or has been rendered;
   b. Give a statement without pressure;
   c. Obtain an interpreter (if necessary);
   d. Getting information from the development of the case;
   e. Obtain information about court decisions;
   f. Obtain reimbursement for transportation costs (if any) in accordance with the requirements;
   g. Got advice / legal assistance.

(3) In addition to the provisions of paragraph (2), the Company also provides protection to the Whistle-blowers who report proved to be true for the actions

sebagai berikut:
a. Pemecatan yang tidak adil;
b. Penurunan jabatan atau pangkat;
c. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record).

(4) Dalam hal laporan diselesaikan melalui jalur hukum di luar Perusahaan, maka jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud disini tidak berlaku, Whistle-Blower mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi Kelayakan

(1) Pelaporan yang masuk akan dievaluasi kelayakannya oleh Tim WBS dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Pada tahap ini Tim WBS melakukan pemeriksaan atas adanya Indikasi Awal atau kesesuaian kriteria Pelaporan dan membuat ringkasannya.

(2) Pada Tahap ini Tim WBS dapat meminta bukti atau keterangan tambahan dari Pelapor jika dinilai bukti atau keterangan yang disampaikan sebelumnya dinilai belum cukup.

(3) Teknik dan/atau tata cara evaluasi ditetapkan oleh Tim WBS.

(4) Apabila di dalam Pelaporan tersebut terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria Pelaporan dan dapat ditindaklanjuti, maka Tim WBS memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi.

(5) Berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direktur Utama dengan menggunakan Berita Acara sesuai format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 Kebijakan ini dapat memutuskan tindak lanjut berupa:
a. Menghentikan proses pemeriksaan, jika tidak memenuhi persyaratan Indikasi Awal; atau
b. Melanjutkan proses investigasi, jika memenuhi persyaratan Indikasi Awal.

(6) Apabila Direktur Utama memutuskan untuk menghentikan proses pemeriksaan maka Tim WBS akan mendokumentasikan data yang telah diperoleh sebagai arsip.

(7) Apabila Direktur Utama memutuskan untuk melanjutkan proses investigasi maka Tim WBS akan melakukan investigasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

as follows:
a. Unfair dismissal;
b. Demotion or rank;
c. Note that harm the personal data files (personal record files).

(4) In the event that the report be resolved through legal channels outside the company, then the guarantee of protection referred to herein does not apply, Whistle-blower protection is guaranteed in accordance with the legislation in force.

Feasibility Evaluation

(1) Reporting entry will be evaluated for feasibility by Team WBS within 14 (fourteen) working days. At this stage WBS team conducted an examination of the presence or suitability criteria Early indications Reporting and summarize.

(2) At this stage WBS team may request additional evidence or statements from Rapporteur if assessed evidence or information submitted previously considered not enough.

(3) Technical and / or evaluation procedures established by Team WBS.

(4) If the reporting contained in the Early indications or in accordance with the reporting criteria and actionable, then Team WBS provides recommendations to the President for appropriate follow up evaluation results.

(5) Based on the evaluation report referred to in paragraph (1) of this Article, Director of the use of the Minutes of the format as described in Appendix 2 of this policy may decide follow-up in the form of:

a. Stopping the process of examination, if not qualify Early indications; or
b. Continuing the investigation process, if it meets the requirements of Early indications.

(6) If the Director decides to stop the process of checking the WBS team will document the data that has been obtained as an archive.

(7) If the Director decides to proceed with the investigation of the WBS team will conduct an investigation in accordance with established procedures.

Investigasi

(1) Berdasarkan Keputusan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal 7 Kebijakan ini, Tim WBS melakukan investigasi lebih lanjut atas Indikasi awal adanya tindak Pelanggaran dan/atau Kecurangan.
(2) Pada tahap ini Tim WBS dapat meminta bukti atau keterangan tambahan yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait.
(3) Teknik dan/atau tata cara investigasi ditetapkan oleh Tim WBS.
(4) Seluruh proses Investigasi atas Pelaporan wajib dibuatkan Berita Acara dan/atau laporan serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses Investigasi.
(5) Proses Investigasi harus didokumentasikan dengan baik, sehingga jika diperlukan untuk peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas fakta, bukti, analisa, rekomendasi dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung.
(6) Laporan hasil Investigasi disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta bukti non fisiko Laporan Hasil Investigasi tidak berupa opini atau pendapat, tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil Investigasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan.
(7) Laporan Hasil Investigasi Tim WBS harus telah diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan Investigasi diterima dari/oleh Tim WBS dan kemudian dilaporkan dan dipresentasikan oleh Tim WBS kepada Direksi.
(8) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, Direksi menggunakan Berita Acara sesuai format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3
Kebijakan ini memutuskan:
   a. Menutup permasalahan yang diinvestigasi, jika tidak terbukti benar; atau
   b. Memerintahkan kepada atasan langsung Terlapor untuk melakukan proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan; jika terbukti terjadi Pelanggaran dan/atau Kecurangan; atau
   c. Jika dinilai lebih baik bagi Perusahaan, dapat meneruskan kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, apabila terbukti terkait dengan tindak pidana;
   d. Huruf b dan c harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan Hukuman Disiplin yang berlaku di Perusahaan.
(9) Bila hasil Investigasi mengindikasikan adanya tindakan kriminal, maka Direksi dapat memutuskan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
(10) Tim WBS menyampaikan laporan hasil Investigasi secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui

Investigation

(1) Based on the decision of the Director Main referred to in paragraph (6) of Article 7 of this Policy, Tim WBS conduct further investigation on the initial indications for follow Abuse and / or fraud.

(2) At this stage the team WBS may require evidence or additional information required from the parties concerned.
(3) Technical and / or procedures established by the investigation team of the WBS.
(4) Investigation into the reporting process must be made Minutes and / or report and signed by the parties involved in the investigation process.

(5) The investigation process should be well documented, so if needed for reconsideration can be easily done reviewing the facts, evidence, analysis, and recommendations are also important decisions taken during the process.

(6) Report of Investigation along with some supporting evidence that the physical evidence and evidence of non physico Report of Investigation does not form opinions or views, but in the form of a final conclusion on the results of the investigation will be used as a basis for taking action.
(7) Report of Investigation Teams WBS must have been completed within a maximum period of 90 (ninety) days since the decision to conduct investigations received from / by Tim WBS and then reported and presented by Tim WBS to the Board.

(8) Based on the report referred to in paragraph (7) of this Article, the Board of Directors Minutes using the format referred to in Annex 3
This policy is decided:

   a. Closing the investigated problems, if not proved to be true; or
   b. Ordered the immediate supervisor Reported to make the process of disciplinary punishment in accordance with applicable provisions of the Company; if there is evidence of infringement and / or fraud; or
   c. If considered better for the company, can continue to investigators for further proceedings, if shown to be associated with crime;
   d. Letter b and c must be determined in accordance with the applicable provisions of Disciplinary Sanctions in the Company.

(9) If the investigation results indicate the existence of a criminal act, then the Board of Directors may decide to follow up the matter through legal channels in accordance legislation in force,

(10) Tim WBS submit a report of investigation directly to the Board through the Commissioner if there are

Komisaris Utama jika terdapat indikasi kuat adanya Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang dilakukan oleh anggota Direksi. Komisaris Utama membuat laporan kepada Dewan Komisaris, setelah terlebih dahulu menugaskan Komite Audit untuk mengkaji ulang hasil Investigasi Tim WBS dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut.

(11) Tim WBS dapat menyampaikan laporan hasil investigasi secara langsung kepada Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat indikasi kuat adanya Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris.

(12) Prosedur Whistle-Blowing System yang diatur dalam Kebijakan ini digambarkan pada flowchart sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4 Kebijakan ini.

strong indications of violations and / or fraud committed by members of the Board of Directors. Commissioner makes a report to the Board, after first assigning the Audit Committee to review the results of investigations WBS team within 14 (fourteen) working days from the receipt of the report.

(11) Tim WBS can submit a report of the investigation directly to the Shareholders / General Meeting of Shareholders if there are strong indications of violations and / or fraud committed by members of the Board of Commissioners.

(12) Whistle-Blowing System Procedures set forth in this policy is illustrated in the flowchart as described in Appendix 4 of this Policy.

WBS System Procedures 0f Reports

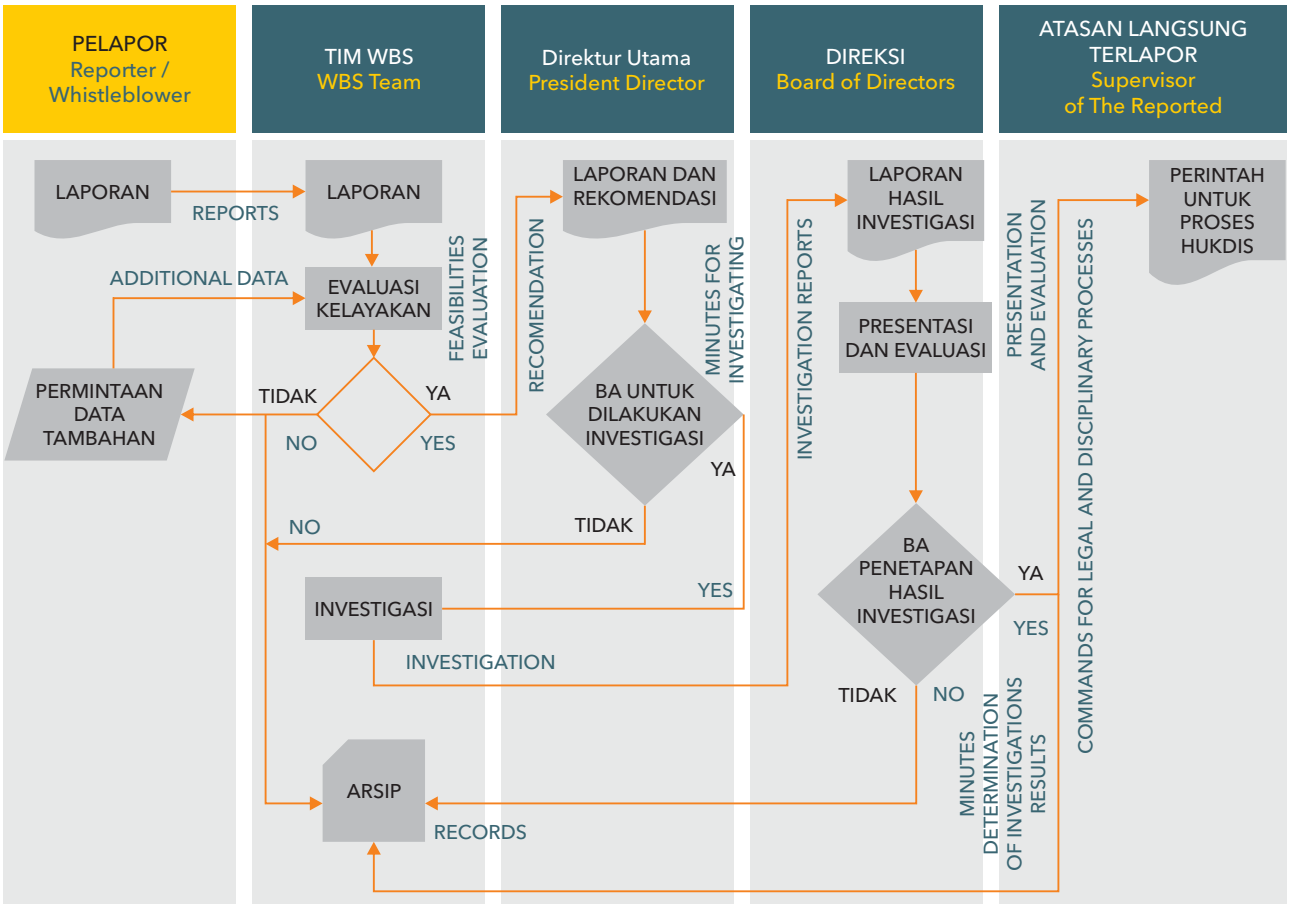

Kewenangan Untuk Menindaklanjuti Laporan

Rekomendasi Tim WBS ditindaklanjuti oleh:

a. Direksi, bila Terlapor adalah Karyawan;
b. Dewan Komisaris, bila Terlapor adalah anggota Direksi;
c. Rapat Umum Pemegang Saham, bila Terlapor adalah anggota Dewan Komisaris.

Authority To Follow up Report

Recommendation WBS Team followed by:

a. Board of Directors, if the Party is the Employee;
b. BOC, when the Party was a member of the Board of Directors;
c. General Meeting of Shareholders, if the Party is a member of the Board of Commissioners.

Kewenangan Tim WBS

Kewenangan Tim WBS terbatas pada melakukan penerimaan, evaluasi, dan investigasi atas setiap Pelaporan serta membuat laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau Direksi atau Komisaris Utama/Dewan Komisaris dan Pemegang Saham/RUPS.

Pada tahun 2014 tidak terdapat laporan pengaduan melalui saluran WBS terkait adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Karyawan Perusahaan

Authority WBS Team

WBS Team limited authority to perform reception, evaluation, and investigative reporting on each and make a report to the Director and / or the Board of Directors or the President / Board of Commissioners and Shareholders / GMS.

In 2014 there were no reports of complaints through the WBS channel related to the alleged infringement or fraud committed by employees of the Company

Bukti berita acara pembukaan kotak WBS
Evidence minutes of opening the WBS box

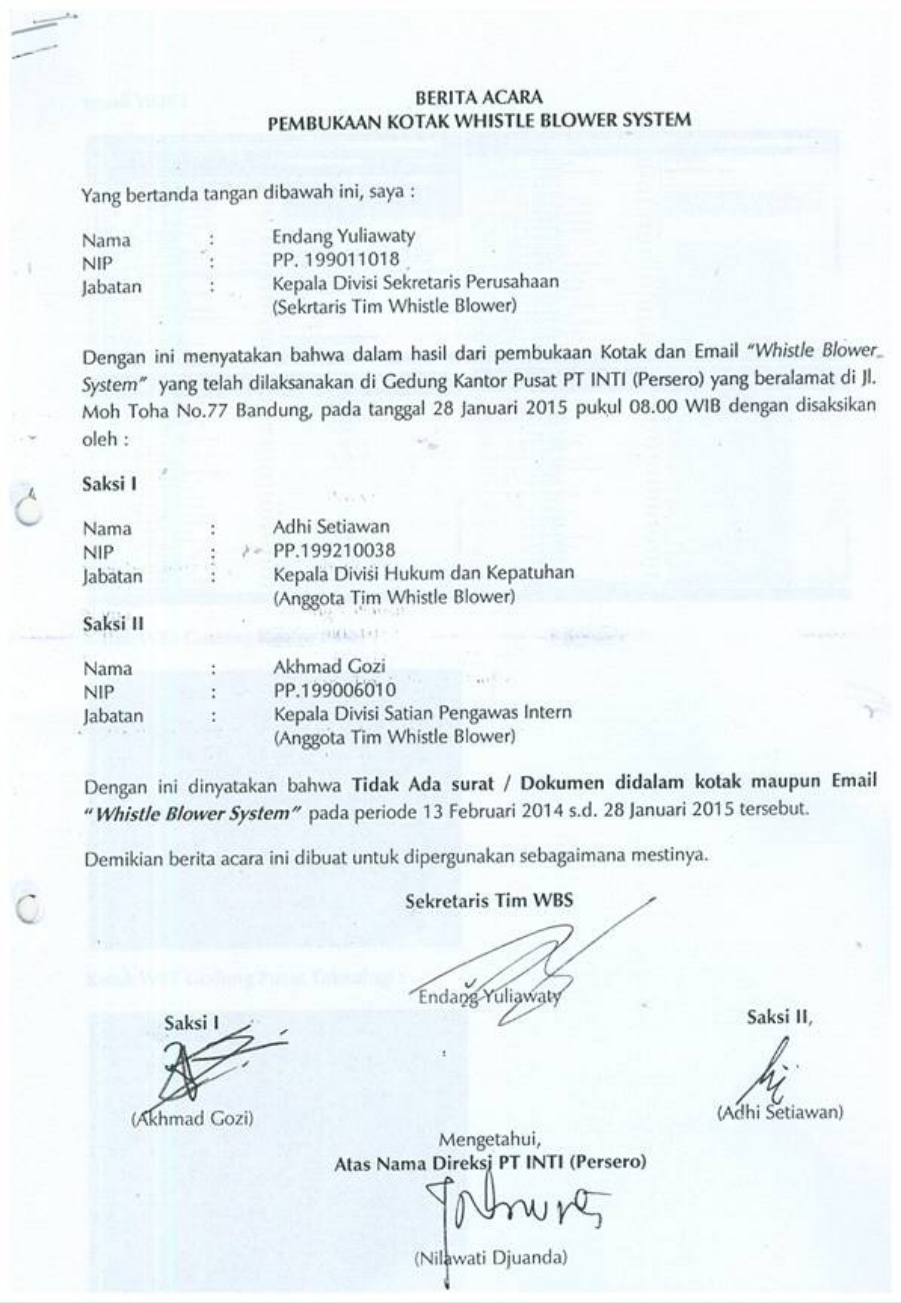

BERITA ACARA
PEMBUKAAN KOTAK WHISTLE BLOWER SYSTEM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Endang Yuliawaty
NIP : PP. 199011018
Jabatan : Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
(Sekrtaris Tim Whistle Blower)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hasil dari pembukaan Kotak dan Email *"Whistle Blower System"* yang telah dilaksanakan di Gedung Kantor Pusat PT INTI (Persero) yang beralamat di Jl. Moh Toha No.77 Bandung, pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 08.00 WIB dengan disaksikan oleh :

Saksi I

Nama : Adhi Setiawan
NIP : PP.199210038
Jabatan : Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan
(Anggota Tim Whistle Blower)

Saksi II

Nama : Akhmad Gozi
NIP : PP.199006010
Jabatan : Kepala Divisi Satian Pengawas Intern
(Anggota Tim Whistle Blower)

Dengan ini dinyatakan bahwa **Tidak Ada surat / Dokumen didalam kotak maupun Email *"Whistle Blower System"*** pada periode 13 Februari 2014 s.d. 28 Januari 2015 tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Tim WBS

Endang Yuliawaty

Saksi I

(Akhmad Gozi)

Saksi II,

(Adhi Setiawan)

Mengetahui,
Atas Nama Direksi PT INTI (Persero)

(Nilawati Djuanda)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) menyadari sepenuhnya bahwa dengan teciptanya iklim yang sehat dan mendorong kondisi saling menunjang serta menguntungkan antara swasta dan Badan Usaha Milik Negara, dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat yang ada di wilayah usaha BUMN.

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) is fully aware that the creation of a healthy climate and encourage mutual support and favorable conditions between private and state-owned enterprises, can provide positive benefits for communities in the area of business SOEs.

Pendahuluan
Preliminary

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Kontribusi perusahaan melalui kegiatan CSR diharapkan dapat memberikan yang berkesinambungan terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan sebagai bukti tanggungjawab terhadap lingkungan perusahaan. Hal ini komitmen setiap Perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan secara terpadu, dan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Saat CSR sedang menjadi primadona ibarat gadis belia yang semua orang ingin meminangnya., pemerintah melalui dinas-dinas berlomba ingin memanfaatkan dana ini untuk dijadikan solusi menyelesaikan permasalahan masyarakat yang menunggu solusi. Sejalan dengan perkembangan bisnis sekarang ini kontribusi perusahaan terhadap lingkungan semakin gencar disorot sebagai bagian dari reputasi. Pemerintah pun berlomba untuk mendapat gelontoran donasi dana csr ini. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur secara khusus mengenai CSR, diantaranya melalui UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan pasal (Pasal 74 ayat 1).

Social and Environmental Responsibility (SER) or better known as Corporate Social Responsibility (CSR). Contributions company through CSR activities is expected to provide continuous on social issues of society as evidence against the company's environmental responsibility. It is each company's commitment to build a better quality of life along with the parties concerned, especially the people around him and the social environment in which the company is located, which is done in an integrated manner, and with business activities are carried out in a sustainable manner. When CSR is becoming a prima donna like a young girl that everyone wants to ask for her hand, government through agencies vying want to utilize these funds to be used as a problesolving for completion of society who wait a solution. In line with the current business development company's contribution to the environment intensified highlighted as part of a reputation. The Government competed to get this csr donation fund. Corporate Social Responsibility is set specifically on CSR, including through the Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company which stated that the running business in the field and / or concerned with natural resources required to carry out social and environmental responsibility clause (Article 74 paragraph 1).

CSR telah menjadi kecenderungan global, seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat

CSR has become a global trend, along with the rise of public awareness of the products that are

terhadap produk-produk yang ramah lingkungan, serta kaidah-kaidah sosial maupun prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Disinilah, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) berkomitmen untuk turut serta mewujudkan dan mensukseskan terselenggaranya program Pemerintah dalam mendorong kegiatan serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan, sekaligus terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Adapun langkah guna merealisasikan komitmen ini, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) pun menggiatkan peran aktifnya dengan berusaha mendorong serta menciptakan kesempatan berusaha melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang pendanaannya dialokasikan dari penyisihan laba Perusahaan.

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) menyadari sepenuhnya bahwa dengan terciptanya iklim yang sehat dan mendorong kondisi saling menunjang serta menguntungkan antara swasta dan Badan Usaha Milik Negara, dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat yang ada di wilayah usaha BUMN.

Dalam melaksanakan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan Per-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

environmentally friendly, as well as social norms and basic principles of human rights (HAM). Here is, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) is committed to participate in realizing and the success of the implementation of the Government's program to encourage economic activity and the growth of democracy, as well as the creation of equitable development through the expansion of employment opportunities and community empowerment. The steps to realize this commitment, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) also intensified its active role in trying to support and create business opportunities through the Partnership and Community Development Program, the funding allocated from the Company's provision for income.

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) is fully aware that the creating healthy climate and encourage mutual support and favorable conditions between private and state-owned enterprises, can provide positive benefits for communities in the area of business SOEs.

In implementing the Partnership Program State-Owned Enterprises (SOEs) with the Small Business and Community Development Program, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) based on the Regulation of the Minister of SOEs No.Per-05 / MBU / 2007 dated April 27th on Partnership Program SOEs with the Small Business and Community Development Program, and Per-08/MBU/2013 date 10 September 2013 about amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No.Per- 05 / MBU / 2007 dated April 27th on Partnership Program SOEs with the Small Business and Community Development Program.

Realisasi Program CSR/ PKBL
CSR/ PKBL Realization

PROGRAM CSR - Kemitraan

Realisasi bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat lingkungan dalam pemberdayaan ekonomi diwujudkan melalui pemberian pinjaman dana bergulir sebagai tambahan modal usaha. Dana ini diperoleh dari penyisian sebagian dari laba perusahaan kemudian disalurkan kepada para mitra binaan PT. INTI (Persero). Tata cara dan persyaratan untuk program ini sudah diatur secara jelas baik melalui peraturan menteri yang kemudian diterjemahkan secara detail di internal perusahaan. Di dalam peraturan menteri telah diatur misalnya penerima manfaat betul-betul usaha kecil yang belum mampu dari sisi permodalan sehingga diharapkan dikemudian hari menjadi tangguh dan mandiri. Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk pinjaman, pinjaman khusus dan pembinaan berupa pelatihan dan promosi produk.

PT INTI (Persero) melaksanakan program ini sejak tahun 1992 dan untuk tahun 2014 menyalurkan dana kemitraan lebih dari Rp. 2,5M tersebar di wilayah Jawa Barat. Jenis usahanya pun bervariasi berupa usaha di bidang peternakan/ perikanan, pertanian, produksi, perdagangan dan jasa. Tahun 2014 sejumlah 133 mitra baru yang menandatangi kontrak sebagai binaan PKBL PT INTI (Persero).

Semester II tahun 2014, unit PKBL PT INTI (Persero) telah mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bidang Kemitraan, sebagai berikut:

Penyaluran Dana Program Kemitraan sebesar Rp.51.981.427.840,- terdiri dari :

CSR PROGRAM - Partnership

Realization of the company's concern in the environmental community economic empowerment is realized through the provision of revolving loan funds as additional capital. The funds obtained from the preliminary portion of company profits and then distributed to the partners of PT. INTI (Persero). The procedure and requirements for this program is set up clearly the ministerial regulations which then translated in detail in the company's internal. In the ministerial regulations have been set such beneficiaries actually small businesses that have not been capable of the capital which is expected later become strong and independent. Partnership Program funds disbursed in the form of loans, special loans and guidance in the form of training and promotional products.

PT INTI (Persero) implement this program since 1992 and for the year 2014 funds partnership of more than Rp. 2.5 M spread across West Java. Type of business also varied form of business in the livestock / fisheries, agriculture, production, trade and services. In 2014 some 133 new partners who signed the contract as PKBL partner PT INTI (Persero).

Second half of 2014, the CSR unit PT INTI (Persero) has been managing the Corporate Social Responsibillity Program in Partnership fields, as follows:

Funds Distribution Partnership Program for Rp.51.981.427.840, - consisting of:

(Dalam Rupiah) **PENYALURAN PINJAMAN**		**Distribution of Funds** (In Rupiah)
SEKTOR INDUSTRI	19.803.500.000	Industry sector
SEKTOR PERDAGANGAN	10.506.500.000	Trade sector
SEKTOR PERKEBUNAN	30.000.000	Plantation Sector
SEKTOR PERTANIAN	1.200.500.000	Agricultural sector
SEKTOR PETERNAKAN	1.053.500.000	Livestock Sector
SEKTOR PERIKANAN	134.000.000	Fisheries sector
SEKTOR JASA	11.748.500.000	Service Sector
SEKTOR LAINNYA	208.548.200	Other sectors
JUMLAH	44.685.048.200	The Amount
(Dalam Rupiah) **DANA PEMBINAAN**		**Cost of Training** (In Rupiah)
PELATIHAN	4.844.131.233	Training
PROMOSI PASAR	2.452.248.407	Marketing Promotion
JUMLAH	7.296.379.640	The Amount

PROGRAM CSR - Bina Lingkungan

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial merupakan wujud nyata integrasi kegiatan operasional perusahaan dengan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya terhadap seluruh stakeholders. Tanggung jawab terhadap stakeholders masyarakat dan lingkungan dapat dimplementasikan dalam bentuk kepedulian antara lain pelestarian alam, sarana ibadah, kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana prasarana, bencana alam dan pengentasan kemiskinan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

Kegiatan Peduli pendidikan,

- Pemberian bantuan dana pendidikan kepada siswa tingkat SD, SLTP, SLTA di sekitar perusahaan dilaksanakan dalam peringatan HUT-RI, bantuan dana ini lebih ditujukan kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Seleksi dilakukan oleh sekolah masing-masing.
- Pemberdayaan siswa-siswa SMP di sekitar perusahaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk Tim PASKIBRA khususnya untuk acara upacara bendera peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberdayaan ini bekerjasama Karang Taruna Kecamatan Regol yang bertindak sebagai koordinator/pelatih/penanggungjawab.

Kegiatan Menanam pohon,

Sejak pencanangan penanaman 1 milyar pohon oleh Presiden SBY, PT INTI (Persero) berkomitmen setiap tahunnya minimal menanam 1000 pohon. Program ini sebagai tanggung jawab sosial untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Tahun 2014 program ini dilakukan bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan perusahaan yang meliputi 5 Kelurahan Regol, Ciateul, Pelindung Hewan, Ciseureuh dan Ancol.

Kegiatan Pilah sampah,

Kota Bandung menghadapi permasalahan serius dalam penanganan/pengelolaan sampah. PKBL PT INTI (Persero) bekerjasama dengan pihak ke-3 melakukan Social Mapping untuk memetakan kebutuhan masyarakat di Kelurahan Pelindung Hewan. Dari hasil tersebut maka dibuatlah rencana program "Pilah sampah" yang pada akhirnya dibentuk "Bank sampah" di RW 9 sebagai projek percontohan.
Program pilah sampah ini diharapkan dapat ditingkatkan lagi dengan program lanjutannya, misalnya pemanfaatan sampah (re-used), pengomposan (re-cycle) dan kegiatan lain sebagai manfaat lain dari program pengolahan sampah. Program ini PT INTI (Psersero) bekerjasama dengan Lembaga Mandiri Daya Insani.

CSR PROGRAM - Environment Development

Corporate Social Responsibility (CSR) or social responsibility is a real form integration of the operations of the company with the values espoused by the company in its business for all stakeholders. Responsibility towards society and environment stakeholders can be implemented in the form of conservation concern, among others, places of worship, public health, education, infrastructure, natural disasters and poverty reduction.

Some of the activities that have been carried out, among others:

Care for Educational Activities,

- The provision of financial assistance to students elementary education, secondary schools around the company implemented the anniversary of the Republic of Indonesia, this financial assistance is aimed at students who are underprivileged. Selection is done by each school.
- Empowerment junior students around the company in extracurricular activities in the form of Team PASKIBRA especially for the event flag ceremony independence anniversary of the Republic of Indonesia. Youth Empowerment collaboration (Karang Taruna) Kecamatan Regol of acting as coordinator / trainer / responsible.

Tree planting activities,

Since the declaration of planting 1 billion trees by the President, PT INTI (Persero) committed annually minimal planting 1000 trees. The program as a social responsibility to maintain the balance of nature and the environment. In 2014 this program was conducted in collaboration with the community in an enterprise environment that includes 5 Kelurahan, Regol, Ciateul, Pelindung Hewan, Ciseureuh and Ancol.

Sort rubbish activities,

Bandung face serious problems in the handling / waste management. PKBL PT INTI (Persero) in collaboration with 3rd party do Social Mapping to map the needs of people in Kelurahan Pelindung Hewan. From these results we made plans the program "just trash" that eventually formed "Bank Sampah" (Garbage Bank) in RW 9 as a pilot project. Garbage sorting program is expected to be improved further by subsequent programs, for example, use of waste (re-used), composting (re-cycle) and other activities as the other benefits of waste management program. In this program, PT INTI (Persero) has been cooperated with Lembaga Mandiri Daya Insani.

Pemberdayaan Kader Posyandu,

Hasil pemetaan yang lain adalah adanya kebutuhan masarakat dalam hal Pemberdayaan Kader Posyandu. Program ini sejalan dengan program pemerintah MDGs tahun 2015. Dari hasil mapping yang kami lakukan masih banyak para kader posyandu yang belum mempunyai pemahaman/pelatihan yang cukup dalam mengelola posyandu. PT INTI (Persero) bekerjasama dengan Lembaga Rumah Yakat (RZ) mengadakan pelatihan pemberdayaan kader Posyandu selama 6 bulan di Posyandu RW 04 dan posyandu RW 09 (kelurahan Ancol).

Empowerment Cadres of Posyandu

Results of mapping the other is the need for their community in terms of empowerment Kader Posyandu. The program is in line with government programs MDGs by 2015. The results of the mapping that we do still many Posyandu cadres who do not have the understanding / training sufficient to manage posyandu. PT INTI (Persero) in cooperation with Lembaga Rumah Zakat (RZ) held training empowerment Posyandu cadres for 6 months in Posyandu RW 04 and Posyandu RW 09 (Ancol).

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT),
Program Posyandu yang dilakukan di setiap RW, mempunyai nilai sangat strategis karena diharapkan dapat memantau secara dini semua anak balita di negeri ini dalam hal kebutuhan imunisasi, gizi dan pertumbuhannya. Kenyataan di lapangan anggaran Posyandu ini pada umumnya sangat kecil dan jauh dari cukup. Oleh karena itu INTI berinisiatif membantu program PMT kepada beberapa Posyandu di RW 09 Kel. Pelindung Hewan, RW 04, 05, 09 Kel. Cigereleng, RW 05 kel. Ciateul.

Feeding Program (PMT),
Posyandu program which conducted in each RW, have a strategic value because it is expected to monitor the early stage of all children under five in this country in terms of the need for immunization, nutrition and growth. Fact the field this Posyandu budgets are generally very small and far from enough. Therefore INTI get initiative to helping PMT program to some Posyandu in RW 09 Pelindung Hewan, RW 04, 05, 09 Cigereleng, RW 05 Ciateul.

Perbaikan Sarana dan Prasarana,
Bantuan ini diberikan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah, rumah ibadah, gerobak sampah dan lain-lain.

Infrastructures Maintenance,
This assistance is provided in the form of school facilities and infrastructure repair, house of worship, wheelie bins and others.

Penyaluran Dana Bina Lingkungan sebesar Rp.1.851.403.498,- terdiri dari:

Distribution of Environment Development Fund for Rp.1.851.403.498, - consisting of:

(Dalam Rupiah) **DANA BINA LINGKUNGAN**		**Environment Funds** (In Rupiah)
BENCANA ALAM	103.592.935	Natural Disasters
SARANA UMUM	412.895.800	General Facilities
SARANA IBADAH	318.250.000	Means of Worship
KESEHATAN MASYARAKAT	246.822.011	Public Health
PELESTARIAN ALAM	111.714.500	Conservation
PENDIDIKAN & PELATIHAN	113.350.000	Education & Training
PENGENTASAN KEMISKINAN	19.046.000	Poverty Care
BUMN PEDULI	525.732.252	SOE Cares
JUMLAH	1.851.403.498	The Amount

Perkembangan jumlah dana yang dikelola

Jumlah akumulasi dana yang diterima dari alokasi penyisihan laba BUMN Pembina sebesar Rp.19.876.405.173,- terdiri dari program Kemitraan sebesar Rp.18.261.877.321,- dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp.1.614.527.852,-.

The number of funds managed

Total accumulation of funds received from the preliminary allocation of SOE profits of Rp.19.876.405.173,- consisting of the Partnership program for Rp.18.261.877.321,- and Environment Development Program of Rp.1.614.527.852,-.

Perkembangan jumlah mitra binaan

Jumlah Pengusaha Kecil yang telah dibina oleh PKBL PT INTI (Persero) adalah 3.065 Mitra Binaan dengan jumlah kontrak perjanjian pinjaman 4.416 kontrak, dirinci sesuai dengan bidang atau sektor usaha sebagai berikut:

The number of trained partners

Number of Small Entrepreneurs who have been nurtured by PKBL PT INTI (Pesrsero) is 3065 Partners with contract number 4416 loan agreement contract, specified in accordance with the field or the following business sectors:

SEKTOR USAHA	JUMLAH I The Amount	Business Sector
SEKTOR INDUSTRI	2243	Industry Sector
SEKTOR JASA	1024	Service Sector
SEKTOR PERDAGANGAN	722	Trade Sector
SEKTOR PERIKANAN	57	Fisheries Sector
SEKTOR PERTANIAN	145	Agricultural Sector
SEKTOR PETERNAKAN	194	Livestock Sector
SEKTOR LAINNYA	4	Other Sectors

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan PKBL, beserta tindakan yang diambil untuk mengatasi kendala

a. Penyaluran Pinjaman untuk Provinsi di luar Jawa Barat, khususnya Jawa Tengah

Masalah:
PKBL PT INTI (Persero) mempunyai masalah dalam hal penyaluran ke daerah di luar Jawa Barat, khususnya Jawa Tengah, karena tidak mempunyai kantor cabang di Jawa Tengah sehingga dampaknya mitra binaan jarang termonitor disebabkan biaya operasional yang tinggi.

Tindakan yang diambil untuk mengatasi kendala:
Tidak menerima lagi mitra binaan yang baru untuk daerah di luar Jawa Barat, untuk binaan yang masih aktif, PT INTI (Persero) tetap melakukan pembinaan sampai yang bersangkutan merasa cukup dan atau mengundurkan diri sebagai mitra binaan PT INTI (Persero).

Problems encountered in the management of PKBL, as well as measures taken to overcome obstacles

a. Distribution of Loans to outside West Java Province, especially Central Java Province

The Problem:
Partnership PT INTI (Persero) is problematic in terms of employment in the region of outside West Java, especially Central Java, because it has no branches in Central Java that impact the partners rarely monitored due to high operational costs.

Measures taken to overcome obstacles:
No longer accept partners who are new to the area of outside West Java, for inmates who are still active, PT INTI (Persero) remains concerned to provide guidance to feel pretty and or resign as the partners of PT INTI (Persero).

b. Piutang Macet

Masalah:
Tingginya angka piutang macet sebesar Rp.676.990.000,- dan piutang bermasalah sebesar Rp.4.707.189.733,- sehingga pemerataan dalam penyaluran dana kemitraan belum optimal mengingat dananya masih tertahan pada debitur yang macet.

Tindakan yang diambil untuk mengatasi kendala:
- Menetapkan target hasil penagihan langsung ke lokasi Mitra Binaan sebesar minimal 150 % dari biaya operasional yang dikeluarkan. Mengirim surat penagihan secara rutin kepada Mitra Binaan yang macet dan bermasalah.
- Menugaskan staf unit PKBL untuk memonitoring piutang macet dan berkomunikasi melalui telepon serta mencatat hasil penagihannya pada lembar pemantauan piutang macet.

Saran-saran yang dianggap perlu dalam pengelolaan PKBL ke depan Mengingat tingkat kebutuhan dana untuk program bina lingkungan bagi masyarakat sekitar perusahaan sangat tinggi, sementara tingkat kemampuan finansial unit PKBL untuk program tersebut sangat minim, maka diharapkan adanya sinergi BUMN untuk program tersebut.

b. Receivables Loss

The Problem:
The high rate of bad debt amounting to Rp.676.99 million, - and problematic receivables amounting to Rp.4,707,189,733, - so the equity in the distribution of partnership funds is not optimal given the debtor's funds are still stuck in the traffic jam.

Measures taken to overcome obstacles:
- Setting targets billing results directly to the location of Partners for a minimum of 150% of the operating costs incurred. Send a letter to the collection regularly jammed Partners and problematic.
- Assign staff units of PKBL for bad debt monitoring and communicating by phone and record the results on a sheet of monitoring the collection of bad debt.

The suggestions that are considered necessary in the future PKBL management Considering the cost for environmental development program for communities around the company is very high, while the level of financial capability PKBL units for the program was minimal, it is expected that there is the synergy of the program among State Owned Enterprises.

Jumlah akumulasi dana yang diterima dari alokasi penyisihan laba BUMN Pembina sebesar **Rp.19.876.405.173,-** terdiri dari program Kemitraan sebesar Rp.18.261.877.321,- dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp.1.614.527.852,-.

Total accumulation of funds received from the preliminary allocation of SOE profits of **Rp.19.876.405.173,-** consisting of the Partnership Program for Rp.18.261.877.321,- and Environment Development Program of Rp.1.614.527.852,-.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Consolidated Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk Tahun yang berakhir
31 Desember 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
• Laporan Auditor Independen	
• Pernyataan Direksi	
• Laporan Keuangan Konsolidasian	
• Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
• Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	3
• Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
• Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
• Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6 – 70
• Informasi Tambahan	
• Laporan Posisi Keuangan – Entitas Induk Saja	71 – 72
• Laporan Laba Rugi Komprehensif – Entitas Induk Saja	73
• Laporan Perubahan Ekuitas - Entitas Induk Saja	74
• Laporan Arus Kas - Entitas Induk Saja	75

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

R-227/INTI-kps/AES03/II/2015

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan sistem pengendalian intern. Laporan keuangan konsolidasian, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan sistem pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan sistem pengendalian intern berdasarkan audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuagan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu audit juga mencakup pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap kontrak dan pasal-pasal tertentu pada peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

HEAD OFFICE :
The Royal Palace
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A - C 29
Jakarta Selatan 12810 - Indonesia
Phone : 62 21 831 3861 (hunting)
Fax : 62 21 831 3871
E-mail : central.mail@kanaka.co.id
Website : www.kanaka.co.id

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian yang disebutkan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan asumsi bahwa Perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Seperti yang diuraikan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp265,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sehingga menyebabkan saldo rugi (defisit) per 31 Desember 2014 sebesar Rp177,5 milyar. Kerugian ini telah secara signifikan melemahkan posisi keuangan dan kemampuan Perusahaan dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga telah diungkapkan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan konsolidasian. Manajemen yakin bahwa dengan rencana-rencana tersebut Perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang berasal dari kondisi tersebut.

Hal Lain

Laporan kami atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern, disampaikan secara terpisah kepada manajemen Perusahaan dalam laporan kami No. RO-051/INTI-kps/AES03/II/2015 dan RO-050/INTI-kps/AES03/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015.

Andy Eldes, Ak., CPA, CA
NRAP.0207

17 Februari 2015

Ref. R-227/INTI-kps/AES02/II/2015

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
PERNYATAAN DIREKSI

Kami Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013.

2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar.

   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 17 Februari 2015

METERAI TEMPEL 1AF34ACF584404276 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Tikno Sutisna
Direktur Utama

Nilawati Djuanda
Direktur Keuangan

Nilawati Djuanda
PJS. Direktur Operasi & Teknik

Tikno Sutisna
PJS. Direktur Marketing

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat :
Jl. Moch. Toha No. 77
Bandung 40253
Tlp : (62-22) 5201501 (10 Saluran)
Fax : (62-22) 5202444
E-mail : info@inti.co.id

Kantor Cabang Jakarta :
Gedung Setiabudi 2, Lantai 2, Suite 201
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan
Jakarta 12920
Tlp : (62-21) 52900829
Fax : (62-21) 52900826

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2014	2013
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2d,2f,4	45.668.364.932	118.932.027.544
Piutang usaha	2d,2h,2z,3b,5	55.202.969.529	105.564.739.182
Piutang lain-lain	2h,2z,3b,6	85.539.248	105.742.973
Persediaan	2k,3c,7	404.427.005.401	483.154.830.069
Pajak dibayar dimuka	2s,19b	30.495.494.681	124.696.061.994
Beban dibayar dimuka dan uang muka	2l,8	12.728.980.441	16.723.574.913
Aset lancar lainnya	2i,2m,9	971.733.757.313	789.961.274.361
Jumlah aset lancar		**1.520.342.111.544**	**1.639.138.251.036**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	2o,10	31.949.592.628	40.601.266.554
Penyertaan jangka panjang	2n,2z,11	21.442.972.842	21.442.972.842
Properti investasi	2q,12	1	1
Aset tak berwujud	2p,13	53.196.270.922	93.717.673.438
Aset pajak tangguhan	2s,19	77.785.454.921	27.625.113.617
Aset lain-lain	2t,14	153.148.109	138.148.046
Jumlah aset tidak lancar		**184.527.439.422**	**183.525.174.498**
JUMLAH ASET		**1.704.869.550.966**	**1.822.663.425.534**

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2014	2013
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2d,2z,15	319.790.784.921	629.309.943.427
Utang bank	2z,17	549.479.377.581	455.890.349.023
Utang pajak	2s,19a	2.984.025.909	4.871.561.484
Provisi masa garansi	20	8.746.094.717	8.268.267.185
Pendapatan diterima dimuka	2w,21	6.633.998.444	12.871.845.779
Beban yang masih harus dibayar	2w,22	132.184.998.686	163.549.315.791
Pinjaman MTN	2z,18	395.000.000.000	40.000.000.000
Utang lain-lain	2z,16	45.319.512.763	2.673.248.166
Jumlah liabilitas jangka pendek		**1.460.138.793.021**	**1.317.434.530.855**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan pasca kerja	2u,3a,23	62.938.375.700	55.168.901.122
Pendapatan ditangguhkan - hak pakai lahan	2w,24	5.467.749.997	7.889.250.000
Jumlah liabilitas jangka panjang		**68.406.125.697**	**63.058.151.122**
JUMLAH LIABILITAS		**1.528.544.918.719**	**1.380.492.681.977**
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham			
Modal dasar - 1.000.000 saham. Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh 350.000 saham	26	350.000.000.000	350.000.000.000
Saldo laba (rugi):			
Telah ditentukan penggunaannya :			
Cadangan umum	28	76.951.536.537	72.877.032.550
Cadangan tujuan	28	11.542.719.796	11.542.719.796
Belum ditentukan penggunaannya :			
Laba (rugi) tahun berjalan		(265.959.747.241)	4.074.503.987
Ekuitas yang dapat diartribusikan kepada pemilik entitas induk		**172.534.509.092**	**438.494.256.333**
Kepentingan non pengendali	25	3.790.123.156	3.676.487.224
JUMLAH EKUITAS		**176.324.632.248**	**442.170.743.557**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**1.704.869.550.966**	**1.822.663.425.534**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2014	2013
PENDAPATAN	2w,29	817.889.789.314	1.466.790.301.402
BEBAN POKOK PENJUALAN	2w,29	(790.849.869.105)	(1.245.678.413.301)
LABA KOTOR		**27.039.920.209**	**221.111.888.101**
Beban usaha			
Beban penjualan	2w,30	(23.684.390.414)	(24.229.665.013)
Beban umum dan administrasi	2w,31	(91.209.266.432)	(92.469.525.787)
Beban pengembangan	2w,32	(7.456.908.144)	(6.780.218.014)
		(122.350.564.990)	**(123.479.408.814)**
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM BEBAN PENDANAAN		**(95.310.644.781)**	**97.632.479.287**
Beban pendanaan	2w,33	(96.294.463.665)	(22.464.716.664)
LABA (RUGI) USAHA SETELAH BEBAN PENDANAAN		**(191.605.108.446)**	**75.167.762.623**
Pendapatan (beban) lain-lain :			
Pendapatan lain-lain	2x,34	22.006.813.879	16.096.204.299
Beban lain-lain	2x,35	(105.415.766.193)	(66.711.512.175)
		(83.408.952.314)	**(50.615.307.876)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**(275.014.060.760)**	**24.552.454.747**
Pendapatan (beban) pajak penghasilan			
Pajak kini - non final	2s,19c	(840.689.663)	(4.692.982.158)
Pajak kini - final	2s,19c	(40.151.702.190)	(21.973.870.973)
Pajak tangguhan	2s,19c	50.160.341.304	6.414.753.023
		9.167.949.451	**(20.252.100.108)**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**(265.846.111.309)**	**4.300.354.639**
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya		-	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		**(265.846.111.309)**	**4.300.354.639**
Jumlah laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		(265.959.747.241)	4.074.503.987
Kepentingan non pengendali	2b, 25	113.635.932	225.850.652
		(265.846.111.309)	**4.300.354.639**
Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk		(265.959.747.241)	4.074.503.987
Kepentingan non pengendali	2b, 25	113.635.932	225.850.652
		(265.846.111.309)	**4.300.354.639**

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

	Catatan	Jumlah yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk					Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas bersih
		Modal	Saldo laba			Jumlah		
			Telah ditentukan penggunaannya		Belum ditentukan penggunaannya			
			Cadangan umum	Cadangan tujuan				
Saldo per 01 Januari 2013		**350.000.000.000**	**56.695.295.623**	**11.542.719.796**	**16.331.736.927**	**434.569.752.346**	**3.450.636.572**	**438.020.388.917**
Pembagian laba 2012 :	26							
Pembentukan cadangan umum		-	16.181.736.927	-	(16.181.736.927)	-	-	-
Dividen		-	-	-	(150.000.000)	(150.000.000)	-	(150.000.000)
Laba komprehensif 2013		-	-	-	4.074.503.987	4.074.503.987	225.850.652	4.300.354.639
Saldo per 31 Desember 2013		**350.000.000.000**	**72.877.032.550**	**11.542.719.796**	**4.074.503.987**	**438.494.256.333**	**3.676.487.224**	**442.170.743.556**
Pembagian laba 2013 :	26							
Pembentukan cadangan umum		-	4.074.503.987	-	(4.074.503.987)	-	-	-
Rugi komprehensif 2014		-	-	-	(265.959.747.241)	(265.959.747.241)	113.635.932	(265.846.111.309)
Saldo per 31 Desember 2014		**350.000.000.000**	**76.951.536.537**	**11.542.719.796**	**(265.959.747.241)**	**172.534.509.092**	**3.790.123.156**	**176.324.632.248**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

	2014	2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (rugi) sebelum pajak konsolidasian	(275.014.060.760)	24.552.454.747
Penyesuaian atas unsur-unsur yang tidak mempengaruhi arus kas :		
Penyusutan aset tetap	9.300.510.298	11.120.703.397
Penyisihan piutang usaha	15.017.917.421	3.817.887.490
Penyisihan persediaan	(758)	4.427.971.759
Amortisasi beban tangguhan	6.245.790.324	5.888.142.484
Beban imbalan pasca kerja	13.943.102.995	14.210.680.570
Amortisasi pendapatan tangguhan - sewa lahan	(2.421.500.002)	(1.210.750.000)
Beban penurunan nilai - SMP BBM	63.466.059.379	-
Beban lainnya	-	235.056.192
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	(169.462.181.102)	63.042.146.639
Perubahan modal kerja		
Penurunan (kenaikan) aset lancar:		
Piutang usaha	35.343.852.234	133.323.673.947
Piutang lain-lain	20.203.725	3.126.926.980
Persediaan	78.727.825.426	(152.365.434.311)
Pajak dibayar dimuka	(44.386.002.365)	(99.133.481.753)
Beban dibayar dimuka	3.994.594.473	(7.503.532.225)
Aset lancar lainnya	(181.772.482.952)	(661.937.831.991)
Kenaikan (penurunan) liabilitas jangka pendek:		
Utang usaha	(309.519.158.506)	516.155.586.358
Utang pajak	(1.887.535.574)	(3.560.639.333)
Provisi masa garansi	477.827.532	3.312.216.804
Pendapatan diterima dimuka	(6.237.847.335)	(11.208.222.307)
Beban yang masih harus dibayar	(31.364.317.106)	44.941.254.093
Utang lain-lain	42.646.264.597	(150.902.407)
	(583.418.956.954)	(171.958.239.507)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(40.992.391.853)	(29.749.242.924)
Penerimaan kelebihan pembayaran pajak PPN	138.586.569.678	7.666.987.148
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(485.824.779.130)**	**(194.040.495.283)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(863.197.877)	(10.681.570.857)
Kenaikan beban ditangguhkan	(29.190.447.187)	(82.571.143.289)
Aset lain-lain	199.361.441	1.379
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(29.854.283.623)**	**(93.252.712.767)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Perolehan utang bank	93.589.028.558	249.974.062.225
Pinjaman Jangka Menengah MTN	355.000.000.000	40.000.000.000
Pembayaran imbalan pasca kerja	(6.173.628.417)	(6.675.071.759)
Pembagian laba	-	(150.000.000)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**442.415.400.141**	**283.148.990.466**
Penurunan bersih kas dan setara kas	**(73.263.662.612)**	**(4.144.217.584)**
Kas dan setara kas awal tahun	**118.932.027.544**	**123.076.245.127**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**45.668.364.932**	**118.932.027.544**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("Perusahaan") dan Entitas Anak (bersama-sama disebut "Grup") adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan akta Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. No.322 tertanggal 30 Desember 1974 selaku notaris pengganti Abdul Latief, SH. notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan akta Notaris Abdul Latief, SH. No. 56 tertanggal 14 Maret 1975 di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. Y. A. 5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 97, Tambahan Berita Negara nomor 712/1975 tanggal 5 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H. Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. No. 30 tanggal 19 Juli 2012 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-40994.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 27 Juni 2012.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

a. Produksi:

1. Alat/perangkat/suku cadang bidang telekomunikasi, elektronika, informatika, komputer, printer, proyektor, multimedia, input device, alat penyimpan data, networking product, perangkat sistem informasi navigasi, control, instrumentasi, penginderaan jauh, signaling, meteorologi, geofisika, klimatologi, hidrologi, radio, cuaca, pembangkit tenaga listrik, energi baru dan terbarukan, perhubungan, serta;
2. Seluruh produk yang berkaitan dengan alat/perangkat/suku cadang tersebut angka 1 huruf a ayat ini, termasuk namun tidak terbatas pada piranti lunak.

b. Perdagangan:

1. Menyalurkan/mendistribusikan dan memasarkan produk-produk tersebut pada huruf a baik hasil produk sendiri maupun hasil produksi pihak lain;
2. Melakukan pemasokan di bidang telematika, yang terdiri dari teknologi informasi, komunikasi multimedia, telekomunikasi, navigasi, kontrol dan instrumentasi, penginderaan jauh, telekomunikasi darat dan/atau satelit (transmisi, jaringan, teknologi dan sistem informasi, networking, sistem pemancar dan penerima radio dan televisi, kontrol & instrumen), perangkat keras (komputer, printer, proyektor multimedia, input device, alat penyimpan data, networking product, accessories & supplies, perangkat sistem informasi khusus), konten (content distance learning, konten program televisi, konten program multimedia, konten program portal), aplikasi (aplikasi komputer, aplikasi komunikasi, aplikasi telemetrik, aplikasi GIS, aplikasi GPS), alat teknik pendidikan (peraga dan visualisasi) dan lainnya;
3. Melakukan pemasokan di bidang perhubungan, yang terdiri dari alat/peralatan/suku cadang radio telekomunikasi & elektronika, navigasi darat, navigasi laut, navigasi udara, signaling, meteorologi, geofisika, klimatologi, hidrologi, radio cuaca dan lainnya;
4. Melakukan pemasokan di bidang kelistrikan/energi, yang terdiri dari alat/peralatan/suku cadang serta perlengkapan listrik untuk pembangkit listrik, gardu induk dan gardu distribusi, jaringan transmisi dan jaringan distribusi, instalasi pabrik, instalasi bangunan umum lainnya;

1. UMUM *(lanjutan)*

5. Melakukan perdagangan umum termasuk namun tidak terbatas pada ekspor dan impor, bertindak sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

c. Jasa:

1. Melakukan seluruh kegiatan jasa/jasa pendukung yang berkaitan dengan bidang usaha produksi dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pemborongan dan/atau pemeliharaan dan lainnya;
2. Melakukan jasa perakitan alat/perangkat/suku cadang yang berkaitan dengan bidang usaha produksi dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini dan lainnya;
3. Melakukan instalasi, test seluruh produk yang berkaitan dengan bidang usaha produksi dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini dan lainnya;
4. Desain dan perekayasaan pada seluruh yang berkaitan dengan bidang usaha produksi dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini dan lainnya;
5. Pelayanan purna jual, dukungan teknik pada seluruh produk yang berkaitan dengan bidang usaha produksi dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini dan lainnya;
6. Manage service, seat management;
7. Penelitian dan Pengembangan;
8. Konsultansi dan/atau perencanaan;
9. Manajemen proyek;
10. Pendidikan dan Pelatihan;
11. Kerjasama dan penyewaan infrastruktur telekomunikasi dan/atau elektronika dan/atau informatika dan/atau pembangkit tenaga listrik dan/atau energi baru dan terbarukan dan/atau perhubungan dan lainnya;
12. Pelaksana konstruksi di bidang sipil, mekanikal dan elektrikal yang terkait dengan bidang usaha perdagangan pada huruf b di atas dan lainnya;
13. Pengangkutan/transportasi, yang terdiri dari angkutan barang darat, angkutan barang laut, angkutan barang udara, angkutan multimoda, peluncuran satelit, pengepakan, ekspedisi dan pengurusan kepabeanan, jasa bongkar muat barang dan lainnya.

d. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan antara lain dalam bentuk kerjasama dan/atau penyewaan aset, lahan, gedung, gudang, ruang perkantoran, bengkel, dan properti lainnya serta kerjasama dan/atau penyewaan mesin-mesin, alat ukur dan peralatan produksi lainnya.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 30 Desember 1974. Perusahaan berdomisili di Jawa Barat dengan kantor pusat berkedudukan di Jl. Moch. Toha No. 77, Bandung, Jawa Barat.

1. UMUM *(lanjutan)*

b. Entitas anak

1) Perusahaan bersama-sama dengan PT PINDAD (Persero) mendirikan PT Inti Pindad Mitra Sejati (IPMS) yang bergerak dibidang industri, perdagangan dan jasa dengan akta Notaris Nining Puspitaningtyas, SH. No. 31 tanggal 26 Juli 2004 di Bandung. PT IPMS berlokasi di kawasan PT PINDAD (Persero) di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 517, Kota Bandung 40284, Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan saat ini modal PT IPMS telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp19.500.582.000, yang terdiri dari penyertaan modal Perusahaan sebesar Rp16.800.582.000 (86,15%) dan PT PINDAD (Persero) sebesar Rp2.700.000.000 (13,85%).

Berikut ringkasan informasi laporan keuangan PT IPMS posisi 31 Desember 2014:

	Konsolidasi	PT IPMS	%
Aset	1.704.869.550.966	103.501.722.492	6,07%
Liabilitas	1.528.544.918.719	79.015.057.951	5,17%
Laba (Rugi)	(265.846.111.309)	820.728.449	

2) Perusahaan mendirikan PT INTI KONTEN INDONESIA (INTENS) yang bergerak dibidang IT dan Konten berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-10.AH.02-Tahun 2010 tanggal 9 Februari 2010, tentang Akta Pendirian PT Inti Konten Indonesia dengan akta Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, nomor. 52 tanggal 11 Mei 2010. PT Inti Konten Indonesia berlokasi di Kawasan PT INTI (Persero) di Jalan Moch. Toha No. 77, Bandung, Jawa Barat. Modal telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp10.000.000.000 yang terdiri dari 10.000.000 lembar saham dengan penyertaan modal Perusahaan sebanyak 9.999.999 lembar dan PT WIDYA BHAKTI INTI (WBI) sebanyak 1 lembar. Dengan demikian laporan keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dikonsolidasikan dengan laporan keuangan PT Inti Konten Indonesia.

Berikut ringkasan informasi laporan keuangan PT INTENS posisi 31 Desember 2014:

	Konsolidasi	PT INTENS	%
Aset	1.704.869.550.966	26.253.856.102	1,54%
Liabilitas	1.528.544.918.719	21.723.025.665	1,42%
Laba (Rugi)	(265.846.111.309)	(11.303.440.885)	

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan mengkonsolidasikan laporan keuangan entitas anak yang dimilki secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan kepemilikan mayoritas.

1. UMUM *(lanjutan)*

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan

Berdasarkan KEPMEN BUMN Nomor: SK-142/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT INTI (Persero) tanggal 14 Februari 2013 serta Pengangkatan Sekretaris Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT INTI Nomor KEP-002/DEKOM/INTI/IV/2014 tanggal 1 April 2014, maka Susunan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Soleman B. Ponto
Komisaris	: Djoko Agung Harijadi
Komisaris	: Slamet Effendy Yusuf
Komisaris	: Nuning Sri Rejeki Wulandari
Sekretaris Komisaris	: Legia Irmawati

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK-277/MBU/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi, susunan Direksi Perusahaan per 28 Pebruari 2014 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Tikno Sutisna
Direktur Keuangan	: Andy K. Saputra
Direktur Pemasaran	: Adiaris
Direktur Operasi	: Dayu Padmara Rengganis

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK-56/MBU/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi, susunan Direksi Perusahaan per 23 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Tikno Sutisna
Direktur Keuangan	: Nilawati Djuanda
Direktur	: Adiaris

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KN.013/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Struktur Organisasi Perusahaan, susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Tikno Sutisna
Direktur Keuangan	: Nilawati Djuanda
Direktur Operasi dan Teknik	: Adiaris
Direktur Marketing (PJS)	: Tikno Sutisna

1. UMUM *(lanjutan)*

Perusahaan memberikan kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi berupa gaji/tunjangan sebesar Rp3.682.470.000 dan Rp3.588.420.000 untuk tahun buku 2014 dan 2013, dengan rincian sebagai berikut:

	2014	2013
Gaji	2.279.700.000	2.222.700.000
Tunjangan		
- THR	189.975.000	189.975.000
- Santunan purna jabatan	521.775.000	507.525.000
- Tunjangan biaya transportasi	143.820.000	143.820.000
- Tunjangan perumahan dan utilitas	547.200.000	524.400.000
Jumlah	**3.682.470.000**	**3.588.420.000**

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebanyak 754 dan 723 orang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Interpretasi baru/revisi berikut yang berlaku 1 Januari 2014, tidak mempunyai dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

. ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan
. ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

Standar Baru revisi yang telah diterbitkan, berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

. PSAK 1 (Revisi 2013): Penyajian Laporan Keuangan
. PSAK 4 (Revisi 2013): Laporan Keuangan Tersendiri
. PSAK 15 (Revisi 2013): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
. PSAK 24 (Revisi 2013): Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti
. PSAK 65 (Revisi 2013): Laporan Keuangan Konsolidasian
. PSAK 66 (Revisi 2013): Pengaturan Bersama
. PSAK 67 (Revisi 2013): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
. PSAK 68 (Revisi 2013): Pengukuran Nilai Wajar
. PSAK 46 (Revisi 2014): Pajak Penghasilan
. PSAK 48 (Revisi 2014): Penurunan Nilai Aset
. PSAK 50 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: "Penyajian"
. PSAK 55 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: "Pengakuan dan Pengukuran"
. PSAK 60 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: "Pengungkapan"
. ISAK 26 (Revisi 2014): Penilaiaan Kembali Derivatif Melekat

Perusahaan masih mengevaluasi dan menentukan dampaknya terhadap Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan prinsip kesinambungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual serta konversi harga perolehan historis, kecuali bila dinyatakan secara khusus dalam akun yang bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan kedalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

c. Prinsip konsolidasi

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan dan entitas anak telah mengadopsi PSAK 4 (Revisi 2009) “Laporan Keuangan Konsolidasian” dan “Laporan Keuangan Tersendiri”, dan diterapkan secara retrospektif.

Laporan Keuangan Konsolidasian meliputi Laporan Keuangan Perusahaan dan semua entitas anak dimana Perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kemampuan mengendalikan sebanyak lebih besar dari 50% (lima puluh persen) kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti pengendalian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

Pengendalian juga ada ketika Perusahaan memiliki kurang dari 50% (lima puluh persen) kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

a. Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai dengan perjanjian investor lain;
b. Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar dan perjanjian;
c. Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
d. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada saat konsolidasi. Laporan keuangan entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasi sejak tanggal pelepasannya.

Laporan keuangan tersendiri induk perusahaan saja disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Jika Perusahaan menyusun Laporan Keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan, maka Perusahaan mencatat investasi pada entitas anak pada nilai perolehan.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak serta pembukuannya diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Berikut adalah kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan:

Mata uang	Per 31 Desember 2014	Per 31 Desember 2013
USD 1	Rp12.440	Rp12.189

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

e. Transaksi pihak-pihak berelasi

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan dan entitas anak mengadopsi PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif.

Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi PSAK 7 (Revisi 2010), mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi.

f. Kas dan setara kas

Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro (*demand deposits*). Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Setara kas dapat berupa deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan dan dibatasi penggunaannya.

- Deposito jangka waktu 3 bulan dan 12 bulan
  Deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatas penggunaannya diklasifikasikan sebagai "Deposito Berjangka Waktu 3 sampai dengan 12 Bulan".

- Deposito yang dijaminkan
  Deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya. Deposito Berjangka ini diklasifikasikan sebagai "Deposito Yang Dijaminkan".

h. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Piutang ragu-ragu dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

Penyisihan piutang ragu-ragu mencerminkan estimasi terbaik Perusahaan dan entitas anak atas jumlah kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang. Beban penyisihan tersebut dicatat sebagai bagian dari laporan keuangan konsolidasian di pos pendapatan atau beban lain-lain.

Perusahaan dan entitas anak menentukan penyisihan piutang ragu-ragu yang dibentuk atas evaluasi manajemen berdasarkan pengalaman penghapusan pada masa lampau. Perhitungan penyisihan atas saldo piutang dilakukan berdasarkan data piutang per kastemer. Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi penyisihan piutang ragu-ragunya per tahun.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

Saldo piutang dihapuskan dari laporan posisi keuangan setelah semua cara penagihan dilakukan namun kemungkinan tertagihnya sangat kecil.

Piutang lain-lain disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebagai jumlah piutang lain-lain yang diharapkan dapat diterima. Untuk menutup kemungkinan timbulnya kerugian akibat adanya piutang lain-lain yang tak tertagih, terhadap piutang lain-lain yang diragukan pembayarannya dilakukan penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain pada pos Laporan Posisi Keuangan dan sebagai beban lain-lain tahun berjalan dalam pos Laba Rugi Komprehensif.

Dalam hal terdapat saldo piutang lain-lain yang sudah pasti tidak dapat ditagihkan, maka Perusahaan dan entitas anak melakukan penyisihan sebesar 100% (seratus persen) dari saldo piutang yang bersangkutan.

i. Tagihan bruto pemberi kerja

Tagihan bruto pemberi kerja merupakan tagihan Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi dengan jumlah kerugian yang diakui dan termin. Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode prosentase penyelesaian yang dinyatakan dalam Berita Acara Progres Fisik (BAPF) yang belum diterbitkan fakturnya karena perbedaan antara tanggal berita acara progress fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal posisi keuangan.

Kewajiban bruto pemberi kerja

Kewajiban bruto pemberi kerja merupakan kewajiban Perusahaan yang berasal dari selisih pendapatan yang dihitung berdasakan progres fisik pekerjaan kontrak dengan pembayaran, dimana nilai pembayaran lebih besar dari pendapatannya.

j. Jaminan yang diberikan

Jaminan yang diberikan diakui dan dicatat pada saat terjadinya, sebesar nilai yang tercantum pada Bukti Pengeluaran Keuangan.

k. Persediaan

Persediaan terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, barang setengah jadi, bahan tambahan, jasa proyek dalam penyelesaian, barang dalam kirim dan *trade in trade off* / TITO.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak maju (*moving average method*).

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode tejadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Setiap penilaian baru dilakukan atas nilai realisasi bersih pada setiap periode berikutnya.

l. Pembayaran dimuka dan beban dibayar dimuka

Pembayaran di muka diakui dan dicatat pada saat pengeluaran kas/bank.

Beban dibayar di muka dibebankan dengan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaatnya.

m. Pendapatan yang masih harus diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai tanggal pelaporan belum diterima Perusahaan, dan dapat dipastikan Perusahaan akan menerima manfaat ekonomi dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih.

n. Penyertaan jangka panjang

a. Penyertaan pada entitas asosiasi

Penyertaan pada entitas asosiasi dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% dicatat dengan metode ekuitas apabila mempunyai pengaruh yang signifikan. Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar nilai biaya perolehan dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian Perusahaan atas laba atau rugi entitas asosiasi , diakui setelah tanggal perolehan hingga tanggal berakhirnya pengaruh signifikan tersebut. Bagian Perusahaan atas laba atau rugi entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi Perusahaan. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga diperlukan jika terdapat perubahan dalam proporsi bagian Perusahaan atas entitas asosiasi yang timbul dari pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi.

Jika bagian Perusahaan atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Paling tidak disetiap akhir tahun Perusahaan mengevaluasi nilai yang tercatat penyertaannya pada entitas asosiasi apakah terdapat kemungkinan penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

Jika terjadi, Perusahaan dan entitas anak menghitung nilai penurunan sebagai selisih antara nilai entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya dan mengakui nilai perkiraan bagian dari laba (rugi) entitas asosiasi dalam Laporan Keuangan komprehensif Konsolidasian.

Penyertaan pada Perseroan dengan kepemilikan kurang dari 20% diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya.

b. Penyertaan lainnya

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 20% dinyatakan sebesar nilai wajarnya sesuai dengan teknik-teknik penilaian yang diijinkan pada PSAK 55 (Revisi 2010): Instrumen keuangan: Pengukuran. Jika nilai wajarnya tidak tidak bisa ditentukan maka penyertaan tersebut dinyatakan sebesar nilai perolehan.

o. Aset tetap dan penyusutan

a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
b. Diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode.

Biaya perolehan aset harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan; dan
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Biaya perolehan (*cost*) adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat diatribusikan ke aset saat pertama kali diakui. Biaya perolehan terdiri dari:

a. Harga perolehannya, termasuk bea impor, pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan;
b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan manajemen, seperti biaya penyiapan lahan dan instalasi aset tetap, biaya pengujian aset tetap, biaya imbalan kerja dan komisi profesional.

Suku cadang utama dan peralatan memenuhi kriteria aset tetap kalau diperkirakan akan menggunakan aset tersebut lebih dari satu periode. Biaya perawatan sehari-hari aset tetap terutama terdiri biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil dibebankan sebagai biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

Perusahaan dan entitas anak menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya, yaitu:

Jenis Aset Tetap	Taksiran masa manfaat
Tanah	Tidak ada batasan
Bangunan & emplasemen	20 - 25 Tahun
Mesin dan instalasi	10 - 16 Tahun
Alat ukur & perkakas kerja	4 - 5 Tahun
Alat pengolah data	4 - 5 Tahun
Aset tetap yang disewakan	3 - 5 Tahun
Inventaris kantor dan gudang	4 - 5 Tahun
Alat angkutan dan kendaraan	4 Tahun

Batasan mengenai biaya perolehan minimum yang dapat diperlakukan sebagai penambahan nilai aset tetap ditetapkan persatuan/ unit sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Perolehan minimum
Tanah	Tidak ada batasan
Bangunan & emplasemen	Rp50.000.000
Mesin dan instalasi	Rp10.000.000
Alat ukur & perkakas kerja	Rp5.000.000
Alat pengolah data	Rp5.000.000
Inventaris kantor dan gudang	Rp2.500.000
Aset tetap yang disewakan	Tidak ada batasan
Alat angkutan dan kendaraan	Tidak ada batasan

Setelah diakui sebagai aset, suatu aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan, masa manfaat, nilai residu yang digunakan untuk aset direview minimal setiap akhir tahun.

Aset tetap dalam pembangunan diakui sebesar harga perolehan dan belum disusutkan hingga pembangunan selesai, dan kemudian direklasifikasi menjadi aset tetap terkait. Selama masa pembangunan sampai dengan aset siap digunakan, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi karena usang, rusak atau sebab lainnya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan disusutkan dengan nilai buku per unit 1 (satu) rupiah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

p. Aset tak berwujud

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan dan Entitas Anak telah mengadopsi PSAK 19 (Revisi 2010), "Aset Tak Berwujud", dan diberlakukan secara prospektif.

Aset tak berwujud terdiri dari beban pengembangan ditangguhkan, *software* dan hak atas kekayaan intelektual.

Pengeluaran untuk riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai beban ditangguhkan.

Beban pengembangan diakui pada saat terjadinya sebesar harga perolehannya.

Beban pengembangan tangguhan diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat 4 - 10 tahun, yang dimulai pada saat produk atau proses tersedia untuk dijual atau digunakan.

Produk yang dikembangkan dinyatakan usang atau tidak dapat dijual, atau tidak memiliki nilai ekonomis dimasa depan, maka amortisasi dibebankan sebesar 100% dari nilai beban pengembangan yang ditangguhkan.

Merk yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui saat terjadinya sebesar harga perolehannya.

Perusahaan menilai apakah masa manfaat suatu aset tak berwujud terbatas atau tidak terbatas (tidak ada batas yang terlihat saat ini) atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi Perusahaan. Aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi.

Aset tak berwujud dicatat sesuai harga perolehan dikurangi amortisasi.
Aset tak berwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat 5 sampai dengan 10 tahun.

q. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau *lesee* / penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

- Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

PSAK 13 mengijinkan penggunaan nilai wajar (*fair value method*) atau model biaya (*cost method*) dalam mengukur properti investasi setelah pengakuan awal. Perusahaan mengukur properti investasi dengan menggunakan metode biaya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi.

r. Hibah Pemerintah

Hibah pemerintah yang terkait dengan aset, termasuk hibah non moneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset.

Perusahaan dan entitas anak telah menerapkan metode pengakuan hibah sebagai penghasilan tangguhan yang diakui dalam laba rugi dengan dasar sistematis selama umur manfaat aset.

s. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan dakui dengan menggunakan *Balance Sheet Liability Method* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal posisi keuangan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak dimasa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika pengajuan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

t. Aset lain-lain

Aset Tetap Non Operasional (ATNO) adalah aset tetap yang tidak digunakan lagi karena rusak atau usang, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dipindahkan sebagai aktiva lain-lain. Aset Non Operasional tersebut kecuali Aset Non Operasional bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dihapusbukukan dari Laporan Keuangan setelah mendapat tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penghapusbukuan dicatat dalam Laporan Laba Rugi tahun terjadinya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

u. Imbalan kerja

1. Imbalan kerja jangka pendek
   Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

2. Imbalan kerja jangka panjang (pensiun)
   Berdasarkan PKB antara Perusahaan dan Serikat Pekerja, pada akhir masa kerjanya, karyawan akan memperoleh imbalan manfaat pasti berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang dihitung sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

   Perusahaan menyelenggarakan program Pensiun Manfaat Pasti dan Iuran Pasti untuk karyawan.
   Untuk Program Pensiun Iuran Pasti, kontribusi Perusahaan yang terhutang diakui sebagai beban pada periode berjalan.

   Perusahaan mengakui Kewajiban Imbalan Manfaat Pasti sesuai dengan PSAK 24 Revisi 2010 "Imbalan Kerja" yang dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pensiun setelah disesuaikan dengan laba atau rugi aktuaria dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris *independen* dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit"*.

   Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan sebagaimana saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

   Laba atau rugi aktuaria yang timbul dari adanya penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi aktuaria, yang melebihi nilai tertinggi antara 10% (sepuluh persen) dari nilai kini dari kewajiban imbalan pasti atau 10% (sepuluh persen) dari nilai wajar aset program dibebankan atau dikreditkan terhadap laba rugi komprehensif konsolidasian selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan tersebut. Biaya jasa lalu diakui jika telah menjadi hak (*vested*) atau diamortisasi selama periode *vesting* .

   Pembayaran kepada karyawan pada saat dilakukan pemutusan hubungan kerja akan mengurangi jumlah kewajiban imbalan manfaat pasti yang telah dibentuk.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

v. Provisi masa garansi

Provisi masa garansi diakui dan dicatat pada akhir periode akuntansi yang jumlahnya ditetapkan maksimal sebesar 2% dari hasil penjualan peralatan, yang hingga tanggal penutupan buku belum diterbitkan BAST-2 (Berita Acara Serah Terima ke-2).

w. Pendapatan dan beban

Perusahaan dan entitas anak mengadopsi PSAK 23 (Revisi 2010), "Pendapatan", dan PSAK 34 (Revisi 2010) "Kontrak Konstruksi".

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal Perusahaan selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.

Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut.

Jika barang atau jasa yang dipertukarkan tersebut sifat dan nilainya serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan.

Jika barang dijual dan jasa yang diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang dialihkan. Ketika nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.

1. Penjualan Barang

Untuk penjualan barang (material dan atau peralatan) yang bukan bersifat sistem, didasarkan pada Berita Acara Penerimaan Barang atau dokumen yang setara yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:

a. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;

b. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

c. Jumlah Pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
d. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut; dan
e. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

2. Penjualan Barang dan Jasa (*system*) diluar konstruksi

Penjualan Barang dan Jasa (sistem) diluar konstruksi diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang setara yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
b. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat akan mengalir kepada
c. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

3. Konstruksi

Pendapatan konstruksi diakui menggunakan metode persentase penyelesaiaan jika seluruh syarat dibawah ini dipenuhi:

a. Tingkat presentase ditetapkan berdasarkan nilai bagian fisik yang telah dibangun;
b. Penyelesaian bagian fisik yang telah dibangun dan dibuktikan dengan Berita Acara atau dokumen lain yang setara yang ditandatangani kedua belah pihak;
c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak akan mengalir ke entitas;
d. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

4. Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari asset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Beban diakui pada saat terjadinya transaksi.

x. Pendapatan komprehensif lain.

Komponen pendapatan komprehensif lain antara lain:
1. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
2. Aset keuangan tersedia untuk dijual;
3. Lindung nilai arus kas;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

4. Keuntungan revaluasi aset tetap;
5. Keuntungan/ kerugian aktuarial dari program pensiun manfaat pasti;
6. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi;
7. Pajak penghasilan terkait.

Komponen pendapatan komprehensif disajikan sebelum pajak terkait.

y. Sewa

Sejak 1 Januari 2012, Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011), yang efektif berlaku untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

Berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2007), "Sewa", klasifikasi sewa sebagai Sewa Pembiayaan atau Sewa Operasi didasarkan pada substansi dan bukan pada bentuk kontraknya. Aset Sewa Pembiayaan diakui didasarkan pada substansi dan bukan pada bentuk kontraknya. Aset Sewa Operasi diakui jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sewa Pembiayaan diakui sebagai aset dan Liabilitas pada laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar Aset Sewa atau jika lebih rendah, Nilai Kini Pembayaran Sewa Minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Perusahaan dan entitas anak ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai Aset. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan Liabilitas. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo Liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Jumlah tersusutkan dari aset sewaan dialokasikan pada setiap periode akuntansi selama perkiraan masa penggunaan dengan dasar yang sistematis dan konsisten dengan kebijakan penyusutan aset yang dimiliki. Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapat hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka perkiraan masa penggunaan aset adalah umur manfaat aset tersebut. Jika tidak, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai Sewa Operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

z. Instrumen keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50, "Instrumen Keuangan: Penyajian" dan PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" berlaku untuk Laporan Keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010, secara prospektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

1) Aset keuangan

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan *non-derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan Piutang meliputi, antara lain Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Aset Keuangan Lancar lainnya, dan Aset Keuangan Tidak Lancar lainnya.

c) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan *non-derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intens positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- Investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- Investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

d) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah Aset Keuangan *Non-Derivatif* yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai Pinjaman yang diberikan dan Piutang, Investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, Aset Keuangan tersedia untuk dijual diakui pada Nilai Wajarnya ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, Aset Keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya sampai dengan dihentikan pengakuannya. Laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas hingga terealisasi. Laba rugi yang telah direalisasi dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus.

Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari surat berharga yang tersedia untuk dijual yang dicatat sebagai penyertaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

2) Liabilitas keuangan

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek.

Tidak ada kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diperdagangkan.

b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain, hutang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman dan obligasi.

3) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah nettonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah dakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

4) Penentuan dan pengukuran nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan referensi nilai pasar kuotasian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi,tanpa dikurangi biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang diijinkan oleh PSAK 55 seperti: menggunakan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*Arm's Length Market Transaction*), mengacu nilai wajar instrumen lain yang serupa, analisa arus kas yang didiskontokan, Model Penetapan Harga Opsi (*Option Pricing Model*) atau metode penilaian lainnya.

Jika tidak ada data yang tersedia yang digunakan dalam teknik penilaian, maka instrumen keuangan dinyatakan sebesar nilai perolehan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

5) Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan dan entitas anak mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan *("loss event")* yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila *loss event* tersebut dapat diperkirakan secara handal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan. Arus kas masa depan ini yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Perusahaan dan entitas anak tidak mendiskontokan arus kas yang berasal dari piutang jangka pendek, apabila pengaruh pendiskontoan tersebut tidak material.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

6) Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Perusahan dana entitas anak menghentikan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuanagn tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain. Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

7) Instrumen keuangan derivatif dan aktifitas lindung nilai

Instrumen keuangan *derivatif* pada awalnya diakui di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehannya dan selanjutnya dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Metode untuk mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung pada sifat dari objek yang dilindungi nilainya. Perusahaan mengelompokkan *derivatif* sebagai (1) instrumen lindung nilai terhadap nilai wajar suatu aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen sah yang belum diakui (lindung nilai atas nilai wajar) atau (2) instrumen lindung nilai transaksi yang diperkirakan akan terjadi (lindung nilai arus kas).

Perubahan nilai wajar *derivatif* yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai atas nilai wajar, yang efektif, dicatat di dalam laporan laba rugi interim, bersama dengan perubahan yang terjadi pada nilai wajar aset dan liabilitas yang dilindungi nilainya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI TERPENTING *(lanjutan)*

Perubahan nilai wajar *derivatif* yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, yang efektif, diakui sebagai bagian dari ekuitas, khususnya pada akun cadangan nilai wajar. Jumlah yang ditangguhkan di ekuitas kemudian dialihkan ke laporan laba rugi interim dan diklasifikasikan sebagai pendapatan atau beban pada periode yang sama dengan periode ketika transaksi yang diperkirakan akan terjadi yang dilindungi nilainya mempengaruhi laporan laba rugi interim.

Perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif yang tidak memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi interim.

Ketika instrumen lindung nilai berakhir atau dijual, atau tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang ada di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat transaksi yang dijanjikan atau diperkirakan diakui dalam laporan laba rugi interim. Apabila suatu transaksi yang diperkirakan akan terjadi atau yang sudah dijanjikan tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah dicatat di bagian ekuitas dialihkan ke dalam laporan laba rugi interim.

Pada saat awal terjadinya transaksi, Perusahaan membuat dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aset dan liabilitas tertentu atau dengan komitmen tertentu atau transaksi yang diperkirakan akan terjadi. Perusahaan juga melakukan dokumentasi atas penilaian, apakah pada saat dilakukan transaksi lindung nilai dan saat berlakunya lindung nilai tersebut, *derivatif* yang digunakan pada transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (*offsetting*) perubahan nilai wajar atau arus kas suatu unsur yang dilindungi nilainya.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Perusahaan dan entitas anak membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan pertimbangan akuntansi mempengaruhi:

- Penerapan kebijakan akuntansi;
- Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama tahun pelaporan.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(lanjutan)*

Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan di bawah ini.

a. Imbalan Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuaria berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Perusahaan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan danentitas anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja.

b. Provisi penurunan nilai piutang

Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi adanya bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran.

c. Provisi penurunan nilai persediaan

Provisi persediaan usang dan bergerak lambat diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

d. Provisi masa pemeliharaan

Atas penjualan peralatan kepada kastemer,selama satu tahun semenjak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima-1 atau dalam masa garansi, perusahan mencadangkan beban masa pemeliharaan sebesar maksimal 2% dari nilai peralatan. Manajemen menganggap estimasi masa garansi sebesar maksimal 2% tersebut cukup untuk menutupi klaim dari kastemer.

4. KAS DAN SETARA KAS

a. Kas yang tidak dibatasi penggunaannya:

	2014	2013
Kas	**639.824.481**	**1.697.298.844**
Bank		
Pihak berelasi		
Rupiah:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2.201.965.571	180.839.280
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	517.275.182	409.093.922
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	16.749.647.010	1.162.935.327
PT Bank BRI Syariah	482.375.284	309.587.591
	19.951.263.047	**2.062.456.120**
Mata uang asing:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2014: USD 1.704,23; 2013: USD 23.486,66)	21.200.621	286.278.898
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2014; USD 554.716,67; 2013: USD 678.043,66)	6.900.675.374	8.264.674.172
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014: USD 38.359,22; 2013: 18.343,57)	472.600.713	223.589.799
	7.394.476.708	**8.774.542.869**
Pihak ketiga		
Rupiah:		
Deutsche Bank	19.038.064	3.718.000
Bank DKI	230.000	680.000
	19.268.064	**4.398.000**
Mata uang asing:		
Deutsche Bank (2014: USD 13.145,71; 2013: USD 22.190,64)	163.532.632	270.481.711
Jumlah bank	**27.528.540.451**	**11.111.878.700**
Deposito berjangka		
Rupiah:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	13.000.000.000	33.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2.000.000.000	40.500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	3.500.000.000
	15.000.000.000	**77.000.000.000**
Mata uang asing:		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2014: USD 0 ; 2013: USD 650.000)	-	7.922.850.000
	-	**7.922.850.000**
Jumlah	**15.000.000.000**	**84.922.850.000**

4. KAS DAN SETARA KAS *(lanjutan)*

b. Kas yang dibatasi penggunaannya

Deposito dijaminkan:

PT BNI (Persero) Tbk. merupakan jaminan PK INTI-BNI sebesar 5% dari nilai plafon dengan rincian sebagai berikut:

Rupiah:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	9.200.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2.500.000.000	6.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	6.000.000.000
Jumlah deposito yang dijaminkan	**2.500.000.000**	**21.200.000.000**
Jumlah deposito	**17.500.000.000**	**106.122.850.000**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**45.668.364.932**	**118.932.027.544**
Kisaran jangka waktu deposito	1 Hari - 7 Hari	1 Bulan
Kisaran suku bunga deposito:		
- Dalam mata uang Rupiah	5,5%	9,75%

5. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan Customer:

	2014	2013
i) Sudah difaktur:		
Pihak berelasi	5.842.023.490	1.571.744.837
Pihak ketiga	35.893.773.220	65.913.606.554
	41.735.796.710	**67.485.351.391**
ii) Belum difaktur:		
Pihak berelasi	22.086.000	1.011.831.449
Pihak ketiga	32.368.145.004	40.972.697.106
	32.390.231.004	**41.984.528.555**
Jumlah	**74.126.027.714**	**109.469.879.947**
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	(18.923.058.186)	(3.905.140.765)
Jumlah piutang usaha - bersih	**55.202.969.529**	**105.564.739.182**

Piutang usaha pihak-pihak berelasi tertentu disajikan bersih setelah memperhitungkan kewajiban Perusahaan dan entitas anak kepada pihak yang sama berdasarkan hak untuk melakukan saling hapus yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Piutang dagang proyek TITO senilai Rp1.239.227.048,75 telah digunakan sebagai obyek jaminan fidusia untuk pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai dengan tanggal 8 Nopember 2014.

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan Mata Uang:

	2014	2013
Rupiah	73.718.381.354	66.025.650.578
USD		
(2014:USD 32.769,00; 2013:USD 1.803.021,42)	407.646.360	43.444.229.369
	74.126.027.714	**109.469.879.947**
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	(18.923.058.186)	(3.905.140.765)
Jumlah piutang usaha - bersih	**55.202.969.529**	**105.564.739.182**

c. Berdasarkan umur:

Rincian umur piutang usaha sudah difaktur yang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Dibawah 1 tahun	38.238.125.087	56.222.892.154
1 tahun sampai 2 tahun	1.241.326.299	10.210.483.603
Lebih dari 2 tahun sampai 3 tahun	2.150.935.182	126.646.998
Lebih dari 3 tahun sampai 4 tahun	-	884.828.494
Lebih dari 4 tahun	105.410.142	40.500.142
Jumlah	**41.735.796.710**	**67.485.351.391**

6. PIUTANG LAIN-LAIN

d. Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu

	2014	2013
Saldo awal	3.905.140.765	87.253.274
Penambahan (pengurangan)	15.017.917.421	3.817.887.491
Saldo akhir	**18.923.058.186**	**3.905.140.765**

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan piutang tak tertagih cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang usaha.

	2014	2013
PT Maleo Emtiga	20.561.765.997	20.561.765.997
Piutang Tenant	61.182.200	101.841.000
Lainnya	24.357.048	3.901.973
	20.647.305.245	**20.667.508.970**
Dikurangi: Penyisihan piutang PT Maleo Emtiga	(20.561.765.997)	(20.561.765.997)
Jumlah	**85.539.248**	**105.742.973**

7. PERSEDIAAN

	2014	2013
Barang Jadi	225.525.953.256	192.003.241.238
Barang Setengah Jadi Produksi	134.545.014	2.064.872.964
Jasa Proyek Dalam Penyelesaian	111.233.272.359	106.093.626.157
Barang Dalam Kirim	48.465.395.575	161.016.810.698
Persediaan *Trade In Trade Off* (TITO)	8.668.408.793	4.081.695.384
WIP	7.885.657.236	4.137.497.419
Bahan baku	3.409.393.446	9.425.318.910
Bahan Tambahan	1.508.415.423	1.010.819.525
	406.831.041.102	**479.833.882.295**
Entitas anak	2.023.936.058	7.748.919.533
Jumlah	**408.854.977.160**	**487.582.801.828**
Dikurangi: Penurunan nilai persediaan	(4.427.971.759)	(4.427.971.759)
Jumlah persediaan - bersih	**404.427.005.401**	**483.154.830.069**

Tahun 2014

Persediaan yang terletak di Jl. Moch.Toha No. 77 diasuransikan terhadap resiko kerugian "Property All Risk" dan "Gempa Bumi Indonesia" dengan jangka waktu pertanggungan mulai 07 Agustus 2014 sampai 07 Agustus 2015, total nilai pertanggungan Rp44.797.249.974,75.

Berdasarkan Akta No. 04, tanggal 03 Maret 2014 mengenai Addendum Pemberian Jaminan Fidusia, Persediaan barang yang berasal dari Proyek TITO SP#9 dan SP#10 per 27 Pebruari 2014, menjadi Objek Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp442.500.000.000 untuk menjamin Pelunasan Hutang MTN INTI Tahun 2014 Seri A dan MTN INTI Tahun 2014 Seri B.

Berdasarkan Akta No. 23, tanggal 07 Oktober 2014 mengenai Pemberian Jaminan Secara Fidusia, Persediaan barang yang berasal dari Proyek TITO SP#9 dan SP#10 per 06 Oktober 2014, menjadi Objek Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp120.000.000.000 untuk menjamin Hutang berdasarkan penerbitan Medium Term Notes (MTN) INTI Tahun 2014 Seri C.

Tahun 2013

Persediaan yang terletak di Jl. Moch. Toha No. 77 diasuransikan kepada PT Jasindo terhadap resiko "Gempa Bumi Indonesia", nilai total pertanggungan Rp75.085.429.414 dengan jangka waktu 07 Agustus 2013 sampai dengan 07 Agustus 2014.

Persediaan tertentu diikat secara fidusia sebagai jaminan atas pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

8. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

	2014	2013
Uang muka pembelian Entitas Anak	12.728.980.441	16.723.574.913
Jumlah	**12.728.980.441**	**16.723.574.913**

9. ASET LANCAR LAINNYA

	2014	2013
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	971.550.016.742	780.305.060.921
Deposit sewa gedung	177.225.501	218.597.300
Pend YMH Diterima - Proyek	-	9.279.852.072
Pend YMH Diterima - Bunga Deposito	6.515.069	157.764.068
Jumlah	**971.733.757.313**	**789.961.274.361**

Tagihan bruto kepada pemberi kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan selisih antara biaya yang terjadi, ditambah (dikurang) laba (rugi) yang diakui, dan termin penagihan atas kontrak-kontrak yang diakui berdasarkan persentase penyelesaian sampai dengan tanggal posisi keuangan sebagai berikut:

	2014	2013
Beban kontrak kumulatif	1.157.266.857.661	683.701.051.516
Laba (rugi) kumulatif yang diakui	92.528.814.320	159.652.627.531
	1.249.795.671.981	843.353.679.047
Penerbitan termin kumulatif	(278.245.655.239)	(63.048.618.126)
Jumlah tagihan bruto	**971.550.016.742**	**780.305.060.921**

9. ASET LANCAR LAINNYA *(lanjutan)*

Rincian tagihan bruto kepada pemberi kerja atas pekerjaan kontrak konstruksi dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Pihak berelasi - Telkom:		
Project TITO - SP#4	85.965.880.889	62.585.474.242
Project TITO - SP#5	118.041.026.489	100.918.962.878
Project TITO - SP#6	112.834.356.867	77.929.959.678
Project TITO - SP#7	121.610.149.246	85.779.625.142
Project TITO - SP#8	164.389.381.709	135.528.718.450
Project TITO - SP#9	107.719.060.581	81.646.741.321
Project TITO - SP#10	238.284.671.596	178.146.378.227
Project TITO - SP#11	-	1.324.670.636
Project FTTH1	4.122.408.714	43.585.013.027
Project FTTH2	18.583.080.650	12.859.517.320
Jumlah	**971.550.016.742**	**780.305.060.921**

10. ASET TETAP

Tahun 2014

	2013	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	2014
Harga perolehan:					
Tanah	1.454.826.365	-	-	-	1.454.826.365
Bangunan dan emplasemen	40.486.475.234	-	-	-	40.486.475.234
Mesin dan instalasi	9.876.328.263	47.800.000	-	-	9.924.128.263
Alat ukur dan perkakas kerja	44.738.758.222	150.000.000	-	(3.800.000)	44.884.958.222
Inventaris kantor dan gudang	6.093.374.119	142.955.250	(4.500.000)	-	6.231.829.369
Alat olah data	14.087.108.849	65.871.335	(845.509.470)	-	13.307.470.714
Kendaraan	2.754.554.776	-	-	-	2.754.554.776
Alat olah data yang disewakan	12.852.723.151	-	(12.852.723.151)	-	-
Tower disewakan	1.475.897.753	-	-	-	1.475.897.753
	133.820.046.732	406.626.585	(13.702.732.621)	(3.800.000)	120.520.140.696
Akumulasi penyusutan:					
Bangunan dan emplasemen	27.263.241.398	1.310.498.811	-	-	28.573.740.209
Mesin dan instalasi	4.391.200.959	783.711.145	-	-	5.174.912.104
Alat ukur dan perkakas kerja	31.598.635.744	4.561.872.811	-	-	36.160.508.555
Inventaris kantor dan gudang	5.697.508.234	187.138.578	-	-	5.884.646.812
Alat olah data	9.835.488.028	1.178.398.893	(631.147.966)	-	10.382.738.955
Kendaraan	2.560.772.118	172.699.313	(4.499.999)	-	2.728.971.431
Alat olah data yang disewakan	11.946.148.819	906.574.332	(12.852.723.151)	-	-
Tower disewakan	960.710.878	199.616.417	-	-	1.160.327.295
	94.253.706.178	9.300.510.299	(13.488.371.116)	-	90.065.845.360
Jumlah	39.566.340.555	(8.893.883.714)	(214.361.505)	(3.800.000)	30.454.295.336
AT dalam Pembangunan:					
Minilab FTTX INTI	1.025.750.000	279.151.279	-	-	1.304.901.279
Entitas Anak	9.176.000	181.220.013	-	-	190.396.013
Total Aset	40.601.266.555	(8.433.512.422)	(214.361.505)	(3.800.000)	31.949.592.628

Beban penyusutan 31 Desember 2014 dialokasikan ke beban pokok penjualan sebesar Rp3.227.103.656, beban administrasi dan umum sebesar Rp2.187.931.617, beban penjualan sebesar Rp2.952.460.284, dan beban pengembangan sebesar Rp42.845.579.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada potensi penurunan atas nilai aset tetap oleh karena itu tidak diperlukan cadangan penurunan nilai aset pada tahun 2014 dan 2013.

10. ASET TETAP *(lanjutan)*

Tahun 2013

	2012	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	2013
Harga perolehan:					
Tanah	1.454.826.365	-	-	-	1.454.826.365
Bangunan dan emplasemen	39.855.830.234	630.645.000	-	-	40.486.475.234
Mesin dan instalasi	7.036.328.263	2.840.000.000	-	-	9.876.328.263
Alat ukur dan perkakas kerja	40.987.494.913	4.155.286.797	(404.023.488)	-	44.738.758.222
Inventaris kantor dan gudang	5.948.749.119	145.750.000	(1.125.000)	-	6.093.374.119
Alat olah data	11.806.997.300	2.914.135.449	(634.023.900)	-	14.087.108.849
Kendaraan	2.754.554.776	-	-	-	2.754.554.776
Alat olah data yang disewakan	12.772.163.539	-	-	80.559.612	12.852.723.151
Tower disewakan	1.556.457.365	-	-	(80.559.612)	1.475.897.753
	124.173.401.874	10.685.817.246	(1.039.172.388)	-	133.820.046.732
Akumulasi penyusutan:					
Bangunan dan emplasemen	25.959.379.295	1.303.862.103	-	-	27.263.241.398
Mesin dan instalasi	3.678.363.447	712.837.512	-	-	4.391.200.959
Alat ukur dan perkakas kerja	27.435.370.663	4.567.288.547	(404.023.466)	-	31.598.635.744
Inventaris kantor dan gudang	5.529.806.113	168.827.120	(1.124.999)	-	5.697.508.234
Alat olah data	9.458.033.620	1.011.478.256	(634.023.847)	-	9.835.488.029
Kendaraan	1.935.326.223	625.445.895	-	-	2.560.772.118
Alat olah data yang disewakan	8.358.174.369	3.587.974.450	-	-	11.946.148.819
Tower disewakan	778.549.051	182.161.827	-	-	960.710.878
	83.133.002.781	12.159.875.710	(1.039.172.312)	-	94.253.706.179
Jumlah	41.040.399.094	(1.474.058.464)	(76)	-	39.566.340.554
AT dalam Pembangunan:					
Minilab FTTX INTI	-	1.025.750.000	-	-	1.025.750.000
Entitas Anak	-	9.176.000	-	-	9.176.000
Total Aset	41.040.399.094	(439.132.464)	(76)	-	40.601.266.554

Tanah dan bangunan tertentu diikat secara fidusia sebagai jaminan atas pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tahun 2014

Aset tetap Perusahaan di Jl. Moch.Toha No. 77 diasuransikan terhadap resiko kerugian "Property All Risk" dan "Indonesia Earthquake" dengan jangka waktu pertanggungan mulai 11 Maret 2014 sampai 11 Maret 2015, total nilai pertanggungan Rp44.538.636.169.

10. ASET TETAP *(lanjutan)*

Bangunan serta sarana dan prasarana Perusahaan di Jl. Moch Toha No.77 diasuransikan terhadap resiko kerugian "Property All Risk" dan "Gempa Bumi Indonesia" dengan jangka waktu pertanggungan mulai 07 Agustus 2014 sampai 07 Agustus 2015, total nilai pertanggungan Rp9.432.483.068,75.

Tahun 2013

Aset tetap Perusahaan di Jl. Moch.Toha No. 225 diasuransikan terhadap resiko kerugian "Property All Risk" dan "Indonesia Earthquake" dengan jangka waktu pertanggungan mulai 07 Februari 2013 sampai 07 Februari 2014, total nilai pertanggungan Rp74.287.364.200.

Aset Perusahaan berupa bangunan, instalasi listrik, plumbing, dan lain-lain di Jl. Moch. Toha No. 77 diasuransikan terhadap resiko kerugian "Property All Risk" dan "Indonesia Earthquake" dengan jangka waktu pertanggungan mulai 11 Maret 2013 sampai 11 Maret 2014, total nilai pertanggungan Rp45.658.014.552.

Bangunan serta sarana dan prasarana Perusahaan di Jl. Moch. Toha No.77 diasuransikan terhadap resiko kerugian "Property All Risk" dan "Gempa Bumi Indonesia" dengan jangka waktu pertanggungan mulai 07 Agustus 2013 sampai 07 Agustus 2014, total nilai pertanggungan Rp10.345.561.125.

	2014	2013
PT Asuransi Jasindo		
Indonesia Earthquake	44.538.636.169	130.290.939.877
Property All Risk	44.538.636.169	130.290.939.877

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

Tahun 2014

	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan/ (Pelepasan)	Bagian laba /(rugi)	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi					
kepemilikan langsung					
Metode ekuitas					
PT Inti Pisma Internasional	22,0%	78.479.123	-	-	78.479.123

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG *(lanjutan)*

kepemilikan langsung					
Metode biaya					
PT Maleo Emtiga		30.000.000.000	-	-	30.000.000.000
PT Bangtelindo	2,65%	250.000.000	-	-	250.000.000
PT Smart Telecom	0,06%	12.666.450.312	-	-	12.666.450.312
Jumlah		**42.994.929.435**	**-**	**-**	**42.994.929.435**
Dikurangi:					
Penyisihan penurunan nilai					
PT Maleo Emtiga		(30.000.000.000)	-	-	(30.000.000.000)
PT Inti Pisma Internasional		(78.479.123)	-	-	(78.479.123)
PT Bangtelindo		(250.000.000)	-	-	(250.000.000)
PT Smart Telecom		(10.551.560.312)	-	-	(10.551.560.312)
Penyisihan penurunan nilai		**(40.880.039.435)**	**-**	**-**	**(40.880.039.435)**
Jumlah		**2.114.890.000**	**-**	**-**	**2.114.890.000**
Kepemilikan tidak langsung					
Metode Ekuitas					
PT Mitra Bhakti Inti Perdana	32,0%	1.203.239.150	-	-	1.203.239.150
PT Inti Global Optical Comm.	25,0%	6.600.000.000	-	-	6.600.000.000
PT International Serat Optik	33,0%	1.650.000.000	-	-	1.650.000.000
		9.453.239.149	**-**	**-**	**9.453.239.149**
Metode Biaya					
Premier Tel. Int. Ltd.	9,0%	9.024.843.694	-	-	9.024.843.694
PT JK Inet	17,0%	850.000.000	-	-	850.000.000
		9.874.843.693	**-**	**-**	**9.874.843.693**
Jumlah		**21.442.972.842**			**21.442.972.842**

Tahun 2013

	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan/ (Pelepasan)	Bagian laba /(rugi)	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi					
kepemilikan langsung					
Metode ekuitas					
PT Inti Pisma Internasional	22,0%	78.479.123	-	-	78.479.123

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG *(lanjutan)*

kepemilikan langsung					
Metode biaya					
PT Maleo Emtiga		30.000.000.000	-	-	30.000.000.000
PT Bangtelindo	2,65%	250.000.000	-	-	250.000.000
PT Smart Telecom	0,06%	12.666.450.312	-	-	12.666.450.312
Jumlah		**42.994.929.435**	**-**	**-**	**42.994.929.435**
Dikurangi:					
Penyisihan penurunan nilai					
PT Maleo Emtiga		(30.000.000.000)	-	-	(30.000.000.000)
PT Inti Pisma Internasional		(78.479.124)	-	-	(78.479.123)
PT Bangtelindo		(250.000.000)	-	-	(250.000.000)
PT Smart Telecom		(10.551.560.312)	-	-	(10.551.560.312)
Penyisihan penurunan nilai		**(40.880.039.437)**	**-**	**-**	**(40.880.039.435)**
Jumlah		**2.114.889.999**	**-**	**-**	**2.114.890.000**
Kepemilikan tidak langsung					
Metode Ekuitas					
PT Mitra Bhakti Inti Perdana	32,0%	1.203.239.150	-	-	1.203.239.150
PT Inti Global Optical Comm.	25,0%	-	6.600.000.000	-	6.600.000.000
PT International Serat Optik	33,0%	-	1.650.000.000	-	1.650.000.000
		1.203.239.150	**8.250.000.000**	**-**	**9.453.239.149**
Metode Biaya					
Premier Telecomunication Int.Ltd.	9,0%	9.024.843.694	-	-	9.024.843.694
PT JK Inet	17,0%	-	850.000.000	-	850.000.000
		9.024.843.694	**850.000.000**	**-**	**9.874.843.694**
Jumlah		**10.228.082.844**	**9.100.000.000**	-	**21.442.972.842**

a. PT Bangtelindo

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo) berdiri sejak tahun 1995 dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, jasa instalasi, sarana telekomunikasi, sistem jaringan kabel bawah tanah. Kepemilikan saham pada Bangtelindo telah mengalami dilusi dari sebelumnya 4% menjadi 2,65% sejak bulan Juli 2007.

Pada tahun buku 2013 PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia (Bangtelindo) membukukan laba setelah pajak sebesar Rp4.953.677.738,2 . Deviden yang telah disetor sebesar Rp33.417.700.

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG *(lanjutan)*

b. PT Smart Telecom

PT Smart Telecom (sebelumnya bernama PT Indoprima Mikroselindo/Primasel) didirikan pada tahun 1996 dan keikutsertaan Perusahaan dilatarbelakangi oleh keberhasilan Perusahaan dalam menguasai dan mengembangkan sistem telekomunikasi cordless dengan teknologi PHS. Kepemilikan Perusahaan pada PT Smart Telecom menurun menjadi sebesar 0,06% setelah para investor lainnya menambah setoran modalnya.

c. PT Inti Pisma International (PT IPI)

Pada tahun 2005 Perusahaan memiliki investasi saham di PT Inti pisma International (IPI), suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi CDMA, GSM dan lain-lain, dengan kepemilikan 22%.

d. PT Premier Telecommunication International (PT PTI)

Premier Telecommunication International Ltd (PTI) adalah perusahaan yang berdiri di bawah Undang Undang Hongkong (Hongkong Law) dengan Nomor Legal: 1434890. PTI adalah sebuah perusahaan yang focus pada perancangan dan integrasi Handset CDMA, GSM/GPRS dilengkapi dengan pengembangan aplikasinya.

PTI berdiri dan beroperasi sejak tahun 2009 dengan berkantor di Shenzen China dengan pusat manufaktur di Shenzen dan Bandung.

Sebelum sebagian sahamnya diakuisisi oleh INTENS, 100% saham PTI dimiliki oleh PT Konten Indonemedia Pratama (KIP) yang merupakan distributor dan pemegang merk Handphone IMO.

Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan untuk jual beli saham yang dilegalisir oleh Notaris Afrison, SH M.Kn, dengan No: Leg/01/2010 tanggal 17 Desember 2010, INTENS membeli saham PTI dengan jumlah antara 9% - 30% dengan harga Rp9.000.000.000.

e. PT Mitra Bhakti Inti Perdana (PT MBIP)

Merupakan penyertaan saham INTENS pada MBIP dengan kepemilikan awal di 2011 sebesar 80% atau sebanyak 1.044 lembar saham. Pada bulan Desember 2011 dilakukan penjualan sebanyak 783 lembar saham atau 60% saham yang dimiliki INTENS kepada PT Media Sosialita Utama sehingga kepemilikan akhir INTENS menjadi sebesar 20%.

Berdasarkan RUPS tanggal 25 Oktober 2012 telah disetujui pembelian kembali saham dari PT Media Sosialita Utama sebanyak 40% oleh INTENS. Dari persetujuan, realisasi modal disetor pada tahun 2012 sebesar Rp600 juta atau sebanyak 157 lembar saham dari 522 saham yang ditawarkan, sehingga kepemilikan akhir INTENS menjadi sebesar 32%.

f. PT JK Inet

Sesuai dengan Akta Notaris Haryati, SH., M.Kn No. 05 tanggal 19 April 2013, IPMS (entitas anak) memiliki saham pada PT JK Inet sebanyak 850.000 lembar saham dengan nilai nominal @ Rp1.000 dengan persentase kepemilikan 17% dari jumlah 5.000.000 lembar saham.

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG *(lanjutan)*

g. PT Inti Global Optical Communication

Sesuai dengan Akta Notaris Ashari Koerniawan SH., M.Kn No. 4 tanggal 11 Februari 2013, IPMS (entitas anak) memiliki saham pada PT Inti Global Optical Communication sebanyak 6.600.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 saham atau sebesar Rp6.600.000.000 dengan persentase kepemilikan 25% dari jumlah 26.400.000 lembar saham.

h. PT International Serat Optik

Sesuai dengan Akta Notaris Ashari Koerniawan SH., M.Kn No. 13 tanggal 22 April 2013, IPMS (entitas anak) memiliki saham pada PT International Serat Optik sebanyak 1.650.000 lembar saham dengan nilai nominal @Rp1.000 dengan persentase kepemilikan 33% dari jumlah 5.000.000 lembar saham PT International Serat Optik.

12. PROPERTI INVESTASI

Penambahan penyertaan tidak langsung oleh entitas anak (IPMS) pada tahun 2013 kepada PT JK Inet, PT Inti Global Optical Communication, dan PT International Serat Optik dengan total sebesar Rp9.100.000.000 dilakukan dengan inbreng hak pakai lahan selama periode tertentu, yang dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan - hak pakai lahan.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai investasi.

	2014	2013
Tanah hibah eks PT BPIS	2.525.930.925	2.525.930.925
Dikurangi: Amortisasi dan penurunan nilai	(2.525.930.924)	(2.525.930.924)
Jumlah	**1**	**1**

13. ASET TAK BERWUJUD

	2014	2013
Produk Pengembangan	14.271.617.247	14.207.467.247
Lisensi Radar	2.000.000.000	2.000.000.000
Software	19.111.708.687	19.111.708.687
	35.383.325.934	**35.319.175.934**
Aset Dalam Pembangunan, terdiri dari:		
Pembangkit Listrik Tenaga Arus Air Laut	1.000.000.000	1.000.000.000
KWH meter (MLPB Prima)	1.476.067.020	1.101.921.090
POS SPBU	2.496.623.936	2.351.453.801
Lainnya (< 1 Milyar)	1.528.840.153	1.148.106.027
	6.501.531.109	**5.601.480.918**
Aset Dalam Pembangunan SMP BBM Pertamina	101.520.925.538	73.294.678.542
	108.022.456.647	**78.896.159.460**
Dikurangi: Amortisasi aset tak berwujud	(26.743.452.280)	(20.497.661.956)
Dikurangi: Penurunan nilai aset SMP BBM Pertamina	(63.466.059.379)	-
Jumlah	**53.196.270.922**	**93.717.673.438**

Aset SMP BBM Pertamina merupakan proyek Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMP BBM) di Pertamina (Catatan 36). Pembangunan infrastruktur SMP BBM ini telah lolos uji fungsi sebanyak 173 SPBU di wilayah DKI Jakarta dimana untuk 140 SPBU diantaranya telah diterbitkan Berita Acara Mulai Operasi (BAMOP) dan 33 sisanya sedang dalam proses penerbitan BAMOP. Dengan diterbitkannya BAMOP ini maka secara umum Perusahaan dapat mengakui pendapatan berdasarkan jumlah liter tersalur yang tercatat di sistem. Namun demikian, saat ini Proyek ini sedang dievaluasi keberlanjutannya oleh PT Pertamina sehubungan dengan diterbitkannya Perpres No. 191 tahun 2014 antara lain mengatur mengenai penghapusan subsidi BBM (Catatan 36). Hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas proyek tersebut.

Nilai tercatat aset dalam pembangunan SMP BBM yang dikapitalisasi sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp101,5 milyar. Untuk tujuan posisi keuangan, nilai tersebut telah diturunkan nilainya ke nilai estimasi yang dapat dipulihkan *(estimated recoverable amount)* sebesar Rp38,1 milyar. Nilai yang dapat dipulihkan ini akan dievaluasi kembali seiring dengan kesepakatan lanjutan dengan pihak PT Pertamina. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dibebankan ke laporan laba rugi.

14. ASET LAIN-LAIN

	2014	2013
Aset tetap non operasional (ATNO)	18.769.524.041	18.105.430.406
Dikurangi: Penyusutan ATNO	(18.616.375.932)	(17.967.282.360)
Jumlah	**153.148.109**	**138.148.046**

Aset tetap non operasional (ATNO) adalah aset tetap yang tidak dapat digunakan lagi dalam operasional Perusahaan dan entitas anak.

15. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok bahan baku, suku cadang dan jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2014	2013
Utang Dalam Negeri		
Rupiah:		
PT Huawei Tech Investment	-	202.186.540.647
Vendor lainnya	216.664.946.303	172.645.468.224
	216.664.946.303	**374.832.008.872**
Mata Uang Asing:		
PT Huawei Tech Investment (2013:USD16.587.623)	-	202.186.540.647
Vendor lainnya (2014:USD 5.405.573,83; 2013: USD 755.786)	67.245.338.444	9.212.277.504
	67.245.338.444	**211.398.818.152**
	283.910.284.746	**586.230.827.024**
Utang Luar Negeri		
Mata Uang Asing:		
Vendor Lainnya (2014: USD 2.884.284,58; 2013: USD 3.489.500,29)	35.880.500.175	43.079.116.403
	319.790.784.921	**629.309.943.427**

16. UTANG LAIN-LAIN

	2014	2013
Utang akru PPh final	31.787.170.922	-
Utang Bunga Pinjaman Bank	11.685.516.636	963.457.184
Jaminan yang diterima	497.141.924	422.186.924
Program Bina Lingkungan	400.000.000	200.000.000
Karyawan	391.499.177	66.323.945
Utang kepada Mitra	215.851.805	-
Bonus dan Tantiem	-	500.000.000
	44.977.180.464	**2.151.968.053**
Entitas anak	342.332.299	521.280.113
Jumlah	**45.319.512.763**	**2.673.248.166**

17. UTANG BANK

	2014	2013
Perusahaan		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	112.555.450.193	27.696.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	378.210.878.939	368.908.827.939
	490.766.329.132	**396.604.827.939**
Entitas Anak		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	17.271.497.702	18.677.603.289
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	31.839.225.233	30.753.945.731
PT Bank BRI Syariah	9.602.325.514	9.853.972.064
	58.713.048.449	**59.285.521.084**
Jumlah	**549.479.377.581**	**455.890.349.023**

Perusahaan

- **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
  Berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 22 Mei 2014 tentang perpanjangan dan penurunan perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi, BRI memberikan fasilitas Kredit Modal kerja Konstruksi plafond kepada Perusahaan dengan plafond maksimum sebesar Rp150.000.000.000, dan jangka waktu terhitung sejak penandatanganan akad kredit sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 dengan jaminan tanah dan bangunan tertentu di Jl. Moch. Toha No. 225, persediaan yang dibiayai dari fasilitas kredit menurut akta. Tingkat suku bunga 11% /tahun.

17. UTANG BANK *(lanjutan)*

- **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**
  Pada tanggal 09 Nopember 2011, berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 03, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Modal Kerja Line dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tujuan kredit adalah untuk keperluan tambahan modal kerja Trade In Trade Off (TITO). Perubahan terakhir dengan Addendum I (Pertama) atas Perubahan atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional Nomor: CRO.KP/310/KMK/11, berdasarkan Akta Nomor 1200 tanggal 30 Mei 2013 Nomor: CRO.KP/123/KMK/13 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit. Limit kredit sebesar Rp400.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun terhitung sejak 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2014 dan tingkat suku bunga sebesar 10% / tahun. Agunan Non Fixed Asset berupa persediaan dan piutang proyek yang telah diikat secara fidusia minimum sebesar 150% dari limit fasilitas kredit. Berdasarkan Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor IBG.IB1/D03.002/SPPK/2014 Tanggal 05 Nopember 2014, Perihal Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Kredit (SPPK), menyatakan bahwa perpanjangan jangka waktu satu tahun terhitung 09 Nopember 2014 sampai dengan 08 Nopember 2015.

Entitas Anak

- **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
  Merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh PT IPMS dari Bank BNI, yang terus diperpanjang sejak diterimanya fasilitas. Perpanjangan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 037/KPS/PK/2009 KMK RC Terbatas - Maks. Rp15.000.000.000 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 038/KPS/PK/2009 KMK RC Terbatas - Maks. Rp5.000.000.000 tanggal 24 September 2013, bahwa ketersediaan plafond kedua perjanjian kredit tersebut berlaku selama 12 bulan sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan 02 Agustus 2014. Tingkat suku bunga sebesar 11,5% / tahun.

- **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
  Merupakan Kredit Modal Kerja Konstruksi yang diperoleh PT IPMS yang diperpanjang berdasarkan Surat Penawaran Kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bandung Asia Afrika Nomor B.1407/KC-VI/ADK/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 dengan nilai plafond sebesar Rp34.300.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan 30 Maret 2014. Tingkat suku bunga sebesar 10,5% /tahun.

- **PT Bank BRI Syariah**
  Merupakan fasilitas pembiayaan yang digunakan oleh PT Inti Konten Indonesia sebagai modal kerja pembiayaan proyek, antara lain Trade In Trade Off (TITO) dan Sistem Monitoring dan Pengendalian bahan Bakar Minyak (SMP BBM). Berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan tanggal 27 September 2013 Nomor: 261/KC-SNR/SP3-AO/IX/2013 dari PT Bank BRI Syariah dibuat Akta Addendum III Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah) Nomor: 07 Tanggal 07 Oktober 2013 Fasilitas Plafon Pembiayaan bersifat Revolving dengan jumlah total setinggi-tingginya Rp30.000.000.000 dengan jangka waktu maksimal 12 bulan sejak akad ditandatangani. Objek bagi hasilnya adalah gross revenue usaha nasabah.

18. PINJAMAN MTN *(MEDIUM TERM NOTE)*

	2014	2013
Pinjaman MTN (Medium Term Note)	395.000.000.000	40.000.000.000
Jumlah	**395.000.000.000**	**40.000.000.000**

Pada tanggal 30 Desember 2013, sesuai dengan Akta No. 270 tanggal 30 Desember 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerbitan Medium Term Notes (MTN) INTI tahun 2013 dengan PT Mandiri Securitas (Arranger) dengan nilai pokok MTN sebesar Rp40 milyar, dengan bunga 9,75% per tahun yang dibayar setiap 3 bulan dengan pembayaran bunga pertama pada tanggal 30 Maret 2014, untuk jangka waktu 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada 9 Januari 2015. Arranger fee atas penerbitan MTN tersebut adalah sebesar 2,25% dan biaya profesi penunjang lainnya (atau sebesar Rp920.000.000), yang dibayar mengurangi jumlah proceeds yang diterima Perusahaan. Pada tanggal 3 Januari 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian penerbitan Medium Term Notes (MTN) INTI tahun 2014 Seri A dengan Mandiri Securitas (Arranger), dengan nilai pokok MTN sebesar Rp135 milyar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% per tahun yang dibayar setiap 3 bulan, yang pembayaran bunga pertamanya dilakukan pada tanggal 3 April 2014, dan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan MTN tanggal 3 Juli 2015. Arranger fee atas penerbitan MTN Inti tahun 2014 Seri A ini adalah 0,75% dari pokok MTN dan biaya-biaya profesi penunjang lainnya (atau sebesar Rp1.225.954.545). MTN Inti tahun 2014 Seri A ini menggantikan MTN Inti tahun 2013 yang dipercepat pelunasannya pada tanggal 3 Januari 2014. Atas penerbitan MTN tersebut Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa persediaan TITO SP#9 dan SP#10.

Pada tanggal 14 Pebruari 2014 dengan Akta no.52, Perusahaan menandatangani penerbitan Medium Term Notes (MTN) INTI II Tahun 2014 dengan Mandiri Securitas (Arranger) dengan nilai pokok MTN sebesar 100 milyar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 11 % per tahun yang dibayar setiap tiga bulan, pembayaran bunga pertamanya dilakukan tanggal 14 Mei 2014 dan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok MTN tanggal 24 Pebruari 2015.

Pada tanggal 03 Maret 2014 dengan Akta no.01, Perusahaan menandatangani penerbitan Medium Term Notes (MTN) INTI Tahun 2014 seri B (MTN Seri B) dengan Mandiri Securitas (Arranger) dengan nilai pokok MTN sebesar 160 milyar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5 % per tahun yang dibayar setiap tiga bulan, pembayaran bunga pertamanya dilakukan tanggal 03 April 2014 dan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok MTN tanggal 03 Juli 2015.

18. PINJAMAN MTN *(MEDIUM TERM NOTE)* *(lanjutan)*

Pada tanggal 08 Oktober 2014 dengan Akta no.21, Perusahaan menandatangani penerbitan Medium Term Notes (MTN) INTI Tahun 2014 seri C (MTN Seri C) dengan Mandiri Securitas (Arranger) dengan nilai pokok MTN sebesar 80 milyar, dengan bunga MTN sebesar 11,25 % per tahun yang dibayar setiap tiga bulan, pembayaran bunga pertamanya dilakukan tanggal 08 Januari 2014 dan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok MTN tanggal 18 Oktober 2015.

19. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	2014	2013
Perusahaan:		
PPh Pasal 23/26 Wapu	157.168.767	395.476.956
PPh Pasal 4 Ayat 2 Wapu	405.098.114	379.195.129
PPh Pasal 21/26 Wapu	168.564.045	747.381.048
	730.830.926	**1.522.053.133**
Entitas Anak	2.253.194.983	3.349.508.351
Jumlah	**2.984.025.909**	**4.871.561.484**

b. Pajak dibayar dimuka

Perusahaan:		
PPh pasal 28A - tahun 2014	4.492.242.526	-
PPh pasal 28A - tahun 2013	4.625.790.428	4.625.790.428
PPN Masukan, bersih	13.219.767.617	116.531.465.548
	22.337.800.571	**121.157.255.976**
Entitas Anak	8.157.694.110	3.538.806.018
Jumlah	**30.495.494.681**	**124.696.061.994**

c. Manfaat/(beban) pajak penghasilan

Perusahaan		
- Pajak kini	-	(3.149.581.523)
- Pajak tangguhan	50.142.744.930	5.727.641.736
- Pajak final - atas pendapatan tahun ini	(14.546.041.724)	(21.490.871.117)
- Pajak final - atas pendapatan tahun sebelumnya	(25.081.383.847)	-
	10.515.319.359	**(18.912.810.904)**

19. PERPAJAKAN *(lanjutan)*

Entitas Anak		
- Pajak kini	(840.689.663)	(1.543.400.635)
- Pajak tangguhan	17.596.374	687.111.288
- Pajak final	(524.276.619)	(482.999.856)
	(1.347.369.908)	**(1.339.289.203)**
Jumlah beban pajak penghasilan	**9.167.949.451**	**(20.252.100.107)**

d. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan menurut laporan laba (rugi) komersial dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut:

	2014	**2013**
Laba (rugi) konsolidasian sebelum pajak	(275.014.060.760)	24.552.454.747
Rugi (laba) sebelum pajak - entitas anak dan eliminasi	9.135.342.527	(2.757.400.998)
Laba (rugi) sebelum pajak - Perusahaan	**(265.878.718.233)**	**21.795.053.749**
Beda waktu		
Penyisihan piutang tak tertagih	10.495.381.987	222.814.784
Penyisihan persediaan usang	-	3.008.499.192
Utang masa garansi	477.827.532	3.877.601.462
Penyusutan aset tetap	(6.051.850.421)	5.147.978.876
Amortisasi beban tangguhan	3.502.137.092	3.222.801.318
Kewajiban imbalan kerja	7.737.239.578	7.430.871.311
Beban penurunan nilai SMP BBM	63.466.059.379	-
Jumlah beda waktu	**79.626.795.147**	**22.910.566.942**
Beda tetap		
Penghasilan yang telah dikenakan PPh final		
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro	(5.459.655.460)	(6.999.781.513)
Pendapatan jasa konstruksi	(479.814.237.165)	(695.175.746.479)
Pendapatan sewa	(5.611.204.767)	(5.799.114.454)
Alokasi beban atas pendapatan yang telah dikenakan PPh final	537.210.937.804	653.999.302.989
Beban yang tidak dapat dikurangkan ke pajak	18.981.898.101	21.868.044.857
Jumlah beda tetap	**65.307.738.512**	**(32.107.294.600)**
Taksiran laba fiskal sebelum kompensasi rugi	(120.944.184.574)	12.598.326.092
Kompensasi rugi fiskal	-	-
Laba (rugi) fiskal tahun berjalan	**(120.944.184.574)**	**12.598.326.092**

19. PERPAJAKAN *(lanjutan)*

Perhitungan lebih bayar (kurang bayar) PPh Badan Perusahaan tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Beban pajak kini	-	(3.149.581.523)
Dikurangi: Pajak dibayar dimuka		
- PPh Pasal 25	624.751.444	632.390.564
- PPh Pasal 22 Impor	2.109.576.000	4.733.084.000
- PPh Pasal 22 Dalam Negeri	475.281.749	302.016.140
- PPh Pasal 23	1.282.633.333	2.107.881.247
PPh Pasal 28A (PPh Pasal 29)	**4.492.242.526**	**4.625.790.428**

e. Pajak tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara pelaporan komersial dan pajak pada tarif pajak 25% untuk tahun 2014 dan untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun 2014

		Dibebankan ke laba/rugi		
	2013	Terpulihkan	Terpulihkan dan efek perubahan	2014
Perusahaan:				
Penyisihan piutang usaha	77.517.015	2.623.845.497	-	2.701.362.512
Penyisihan piutang lain – lain	5.140.441.499	-	-	5.140.441.499
Penyisihan persediaan usang	1.106.992.940	-	-	1.106.992.940
Penurunan nilai penyertaan	2.720.009.859	-	-	2.720.009.859
Perbedaan penyusutan aset tetap	1.709.290.563	(1.512.962.605)	-	196.327.958
Amortisasi beban tangguhan	449.761.160	875.534.273	-	1.325.295.433
Amortisasi atas biaya masa garansi	2.067.062.787	119.456.883	-	2.186.519.670
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.766.040.906	1.934.309.894	-	15.700.350.800
Penurunan nilai SMP BBM	-	15.866.514.845	-	15.866.514.845
Rugi fiskal	-	30.236.046.144	-	30.236.046.144
	27.037.116.729	50.142.744.931	-	**77.179.861.660**
Entitas anak	587.996.888	17.596.374		605.593.261
Aset pajak tangguhan	**27.625.113.617**	50.160.341.304	-	**77.785.454.921**

19. PERPAJAKAN *(lanjutan)*

Tahun 2013

	2012	Dibebankan ke laba/rugi: Terpulihkan	Dibebankan ke laba/rugi: Terpulihkan dan efek perubahan	2013
Perusahaan:				
Penyisihan piutang usaha	21.813.319	55.703.696	-	77.517.015
Penyisihan piutang lain – lain	5.140.441.499	-	-	5.140.441.499
Penyisihan persediaan usang	354.868.142	752.124.798	-	1.106.992.940
Penurunan nilai penyertaan	2.720.009.859	-	-	2.720.009.859
Perbedaan penyusutan aset tetap	422.295.844	1.286.994.719	-	1.709.290.563
Amortisasi beban tangguhan	(355.939.170)	805.700.330	-	449.761.160
Amortisasi atas biaya masa garansi	1.097.662.423	969.400.365	-	2.067.062.787
Liabilitas imbalan pasca kerja	11.908.323.078	1.857.717.828	-	13.766.040.906
	21.309.474.993	**5.727.641.736**	-	**27.037.116.729**
Entitas Anak	135.941.793	452.055.094	-	587.996.888
Aset pajak tangguhan	**21.445.416.786**	**6.179.696.831**		**27.625.113.617**

f. Pemeriksaan pajak

Tahun 2014

Perusahaan menerima Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember - Desember 2013 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00009/SKPPKP/WPJ.19/KP.0303/2014 Tanggal 07 Maret 2014 dengan nilai Rp112.940.139.343.

Perusahaan menerima Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni - Juni 2014 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00022/SKPPKP/WPJ.19/KP.0303/2014 Tanggal 05 September 2014 dengan nilai Rp25.646.430.335.

Tahun 2013

Dalam Bulan April Tahun 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) masa pajak tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

- SKP Lebih Bayar No. 0029/406/11/051/13 atas PPh Badan tahun 2011 sebesar Rp7.777.881.330.
- SKP Kurang Bayar No. 00238/207/11/051/13 atas PPN barang dan jasa masa pajak agustus tahun 2011 dengan pokok sebesar Rp4.240.360.

19. PERPAJAKAN *(lanjutan)*

- SKP Kurang Bayar No. 00237/207/11/051/13 atas PPN barang dan jasa masa pajak Juli tahun 2011 dengan pokok sebesar Rp33.992.884.
- SKP Kurang Bayar No. 00236/207/11/051/13 atas PPN barang dan jasa masa pajak Januari tahun 2011 dengan pokok sebesar Rp71.218.938.
- SKP Kurang Bayar No. 00239/207/11/051/13 atas PPN barang dan jasa masa pajak September tahun 2011 dengan pokok sebesar Rp1.442.000.

Perusahaan menerima SKP tersebut dan atas lebih bayar setelah diperhitungkan dengan kurang bayar pajak lainnya (SKPKB PPN) sebesar Rp110.894.182 telah diterima oleh perusahaan sebesar Rp7.666.987.148 pada tanggal 29 April 2013.

Dalam Bulan Juni tahun 2013, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) pemeriksaan pajak rampung masa pajak tahun 2008, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Tagihan Pajak No. 001/110/08/051/13 atas PPN DN masa Januari 2008 dengan pokok sebesar Rp390.892.562 dan sanksi administrasi sebesar Rp195.446.281
- Surat Tagihan Pajak No. 002/110/08/051/13 atas PPN DN masa Pebruari 2008 dengan pokok sebesar Rp667.264.688 dan sanksi administrasi sebesar Rp333.632.344
- Surat Tagihan Pajak No. 003/110/08/051/13 atas PPN DN masa Maret 2008 dengan pokok sebesar Rp57.067.758 dan sanksi administrasi sebesar Rp28.533.879
- Surat Tagihan Pajak No. 004/110/08/051/13 atas PPN DN masa April 2008 dengan pokok sebesar Rp281.954.198 dan sanksi administrasi sebesar Rp140.977.099
- Surat Tagihan Pajak No. 005/110/08/051/13 atas PPN DN masa Mei 2008 dengan pokok sebesar Rp222.041.122 dan sanksi administrasi sebesar Rp111.020.561
- Surat Tagihan Pajak No. 006/110/08/051/13 atas PPN DN masa Juni 2008 dengan pokok sebesar Rp51.558.188 dan sanksi administrasi sebesar Rp25.779.094
- Surat Tagihan Pajak No. 007/110/08/051/13 atas PPN DN masa Juli 2008 dengan pokok sebesar Rp57.369.098 dan sanksi administrasi sebesar Rp28.684.549
- Surat Tagihan Pajak No. 008/110/08/051/13 atas PPN DN masa Agustus 2008 dengan pokok sebesar Rp175.367.628 dan sanksi administrasi sebesar Rp87.683.814
- Surat Tagihan Pajak No. 009/110/08/051/13 atas PPN DN masa September 2008 dengan pokok sebesar Rp62.291.550 dan sanksi administrasi sebesar Rp31.145.775
- Surat Tagihan Pajak No. 010/110/08/051/13 atas PPN DN masa September 2008 dengan pokok sebesar Rp149.482.826 dan sanksi administrasi sebesar Rp74.741.413
- Surat Tagihan Pajak No. 011/110/08/051/13 atas PPN DN masa September 2008 dengan pokok sebesar Rp8.952.112 dan sanksi administrasi sebesar Rp4.476.056

Perusahaan menerima SPT tersebut dan atas kurang bayar PPN DN telah dilunasi pembayarannya, dan selisih dengan nilai tercatatnya telah dikoreksi ke laba-rugi tahun berjalan.

20. PROVISI MASA GARANSI

	2014	2013
Jumlah	**8.746.094.717**	**8.268.267.185**

Merupakan cadangan yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya biaya pemeliharaan selama masa garansi. Berdasarkan evaluasi manajemen, pada tahun 2014 dan 2013 cadangan masa garansi ditetapkan sebesar maksimal 2% dari penjualan peralatan. Manajemen yakin bahwa cadangan tersebut cukup untuk mengantisipasi terjadinya klaim beban garansi dari para pelanggan.

21. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	2014	2013
Uang Muka Penjualan Telkom	-	1.299.540.487
Uang Muka Penjualan Swasta	2.481.396.775	5.335.686.230
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	3.469.402.677	5.145.451.775
	5.950.799.452	**11.780.678.492**
Uang muka penjualan - Entitas Anak	623.433.358	1.031.401.653
Pendapatan Diterima Dimuka - Entitas Anak	59.765.634	59.765.634
Jumlah	**6.633.998.444**	**12.871.845.779**

22. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Merupakan beban-beban yang harus dibayar atas pembelian, jasa produksi dan biaya operasional lainnya yang totalnya pada 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	2014	2013
Beban yang harus dibayar Perusahaan	108.050.571.137	121.388.935.699
Beban yang harus dibayar Entitas Anak	24.134.427.549	42.160.380.092
Jumlah	**132.184.998.686**	**163.549.315.791**

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menyediakan imbalan pasca kerja untuk seluruh karyawan tetapnya sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT INTI (Persero). Penilaian aktuaria atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dilakukan oleh perusahaan Konsultan Aktuaria dengan menggunakan metode "projected unit credit". Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing adalah 670 karyawan dan 665 karyawan. Mulai 1 Oktober 2010, Perusahaan juga menyediakan imbalan pasca kerja untuk program pensiun dipercepat, sesuai dengan peraturan Perusahaan. Liabilitas imbalan pasca kerja tahun 2014 dan 2013 ini terdiri dari:

	2014	2013
- Program imbalan pasca kerja sesuai PKB	62.801.403.200	55.128.337.541
- Program pensiun dipercepat	136.972.500	40.563.581
	62.938.375.700	**55.168.901.122**

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaria:

a. Program imbalan pasca kerja sesuai PKB
Rekonsiliasi aset dan Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan:

	2014	2013
Nilai kini Liabilitas imbalan kerja	91.653.889.965	87.776.060.507
Nilai wajar aset program	-	-
	91.653.889.965	87.776.060.507
Nilai yang belum diakui atas:		
- Biaya jasa masa lalu – non vested	(804.123.792)	(1.060.179.599)
- Kerugian (keuntungan) aktuaria	(28.048.362.973)	(31.546.979.786)
Total liabilitas atas program imbalan pasca kerja	**62.801.403.200**	**55.168.901.122**

Rekonsiliasi atas perubahan Liabilitas bersih selama periode berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan:

	2014	2013
Liabilitas bersih - awal tahun	55.128.337.541	47.369.254.680
Biaya selama tahun berjalan	13.456.594.689	14.434.154.618
Pembayaran imbalan pasca kerja	(5.783.529.030)	(6.675.071.757)
Total liabilitas atas program imbalan pasca kerja	**62.801.403.200**	**55.128.337.541**

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA *(lanjutan)*

Biaya imbalan kerja karyawan yang dibebankan pada laporan laba rugi:

	2014	2013
Biaya jasa kini	3.899.332.794	3.857.050.785
Biaya bunga	6.556.157.432	4.953.420.908
Laba rugi aktuarial	2.745.048.656	5.367.627.118
Amortisasi biaya jasa lalu (non vested)	256.055.807	256.055.807
Jumlah	**13.456.594.689**	**14.434.154.618**

b. Program pensiun dipercepat

Liabilitas bersih awal tahun	40.563.581	264.037.631
Biaya selama tahun berjalan	96.408.919	131.675.656
Pembayaran imbalan tahun berjalan	-	(355.149.706)
Total liabilitas atas program pensiun dipercepat (b)	**136.972.500**	**40.563.581**
Total liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan (a+b)	**62.938.375.700**	**55.168.901.122**

Asumsi aktuarial utama yang digunakan untuk perhitungan adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Tingkat bunga	8%	8%
Tingkat pertumbuhan gaji	8%	8%
Tingkat cacat	0,01%	0,01%
Tingkat pengunduran diri	1%	1%
Usia pensiun normal	55 Tahun	55 Tahun
Tabel mortalitas	AMT 1949 (Modified)	CSO 1980

24. PENDAPATAN TANGGUHAN

Terkait dengan penerapan dini PSAK 61 (Revisi 2010): "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Hibah Pemerintah", atas hak pakai bangunan dari PT INTI (Persero) diakui sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi sebagai pendapatan seiring dengan pengakuan amortisasi bebannya. Sehingga saldo pendapatan tangguhan 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Hibah lahan dan / atau bangunan	7.889.250.000	9.100.000.000
Dikurang: Amortisasi pendapatan yang diakui	(2.421.500.003)	(1.210.750.000)
Jumlah	**5.467.749.997**	**7.889.250.000**

25. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Merupakan hak PT PINDAD atas aset bersih dan laba komprehensif pada PT Inti Pindad Mitra Sejati (PT IPMS) dan hak PT Widya Bhakti INTI atas aset bersih pada PT Inti Konten Indonesia (INTENS) dengan perhitungan sebagai berikut:

	2014	2013
Nilai tercatat awal	3.676.487.223	3.450.636.571
Bagian laba bersih tahun berjalan	113.635.932	225.850.653
Jumlah	**3.790.123.156**	**3.676.487.224**

Kepentingan non pengendali Widya Bhakti INTI atas aset bersih pada PT INTENS dengan kepemilikan sebesar 0,00001% dianggap nol.

26. MODAL SAHAM

Pada tanggal 23 Juni 2006 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui peningkatan Modal Dasar dari Rp500 Milyar menjadi sebesar Rp1.000 Milyar, serta modal ditempatkan dan disetor dari Rp175 Milyar menjadi sebesar Rp350 Milyar. RUPS menyetujui peningkatan Modal Disetor tersebut diambil dari pos Cadangan Umum. Jumlah lembar saham dan komposisi pemegang saham per 31 Desember 2014 dan 2013 menjadi sebagai berikut:

	Jumlah	Prosentase Kepemilikan (%)	2013
Negara Republik Indonesia	**350.000**	**100%**	**350.000.000.000**

27. MODAL DONASI DAN PENDAPATAN TANGGUHAN

	2014	2013
Hibah tanah dari PT BPIS yang dilikuidasi	2.525.930.925	2.525.930.925
Hibah peralatan dari Siemens AG	320.946.075	320.946.075
	2.846.877.000	**2.846.877.000**
Reklasifikasi ke Pendapatan tangguhan	2.846.877.000	2.846.877.000
Jumlah	**-**	**-**

Modal donasi yang berasal dari PT BPIS merupakan modal hibah yang didasari oleh:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2002 tentang penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu yang didalamnya termasuk Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.
2. Berita Acara Hibah tanah milik PT BPIS (dalam likuidasi) tanggal 17 September 2004 seluas 49.601 m2 yang terletak di Blok D1 Kavling BPIS di Komplek Kemayoran.
3. Surat Menteri BUMN No. S-842/MBU/2004 tanggal 16 September 2004, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia mendapat bagian 5% dari luas tanah milik PT BPIS (dalam proses likuidasi) tersebut.

Terkait dengan penerapan PSAK 61 (Revisi 2010): "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Hibah Pemerintah", modal donasi tersebut direklasifikasi sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi sebagai pendapatan seiring dengan pengakuan amortisasi bebannya. Saldo pendapatan tangguhan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Hibah tanah dari PT BPIS yang dilikuidasi	2.525.930.925	2.525.930.925
Hibah peralatan dari Siemens AG	320.946.075	320.946.075
	2.846.877.000	**2.846.877.000**
Dikurang: Amortisasi pendapatan yang diakui	(2.846.877.000)	(2.846.877.000)
Jumlah	**-**	**-**

28. CADANGAN UMUM DAN CADANGAN TUJUAN

Akun ini merupakan cadangan umum dan cadangan tujuan yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Perseroaan Terbatas No. 40/2007 dan akta Pendirian Perusahaan pasal 27. Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir akun ini adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Cadangan umum:		
Saldo awal pada awal tahun	72.877.032.550	56.695.295.623
Pembentukan cadangan umum	4.074.503.987	16.181.736.927
Saldo akhir cadangan umum	**76.951.536.537**	**72.877.032.550**
Cadangan tujuan:		
Saldo awal pada awal tahun	11.542.719.796	11.542.719.796
Pembagian laba tahun berjalan	-	-
Saldo akhir cadangan tujuan	**11.542.719.796**	**11.542.719.796**

Tahun 2014

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) tahunan tahun buku 2013 tanggal 19 Maret 2014, Keputusan RUPS menetapkan Laba Bersih tahun buku 2013 sebesar Rp4.074.503.987 seluruhnya sebagai cadangan.

Tahun 2013

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) tahunan tahun buku 2012 No. Ris-26/D2.MBU/2013 yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2013, keputusan RUPS menetapkan laba bersih tahun buku 2012 sebesar Rp16.331.736.927 sebagai berikut:

- Pembagian Deviden sebesar Rp0
- Alokasi Program Bina Lingkungan sebesar Rp150.000.000
- Pembentukan Cadangan umum sebesar Rp16.181.736.927

29. PENDAPATAN, BEBAN POKOK DAN LABA KOTOR

	2014	2013
Pendapatan Usaha:		
Penjualan Barang	657.962.513.418	1.092.307.722.269
Penjualan Jasa	138.520.433.204	350.041.934.142
Entitas Anak	21.406.842.692	24.440.644.991
	817.889.789.314	1.466.790.301.402

29. PENDAPATAN, BEBAN POKOK DAN LABA KOTOR *(lanjutan)*

Beban Pokok Penjualan:		
Penjualan Barang	692.158.313.022	1.110.122.879.556
Penjualan Jasa	83.935.133.150	130.188.176.323
Entitas Anak	14.756.422.934	5.367.357.422
	790.849.869.105	1.245.678.413.301
Laba Kotor:		
Penjualan Barang	(34.195.799.604)	(17.815.157.287)
Penjualan Jasa	54.585.300.054	219.853.757.819
Entitas Anak	6.650.419.758	19.073.287.569
	27.039.920.209	221.111.888.101

Rincian beban pokok penjualan berdasarkan sifat beban:

	2014	2013
Pemakaian Barang Jadi	436.158.335.607	829.340.506.462
Sub Kontrak	141.556.778.960	208.699.615.353
Perdin Langsung	8.271.970.822	16.721.025.545
Bahan Tambahan	4.740.768.646	4.552.569.617
Tenaga Kerja Tidak Langsung	35.294.110.839	30.908.229.138
Administrasi dan rumah tangga	12.916.157.034	12.997.393.500
Pemeliharaan dan perbaikan	12.954.615.163	18.758.440.576
Penyusutan	3.227.103.656	5.660.513.532
Pengangkutan	20.288.635.697	26.752.905.106
Sewa	35.382.601.207	62.620.244.842
Kesejahteraan Pegawai	4.827.722.425	4.447.080.107
Beban lain-lain	60.474.646.116	18.852.532.101
Entitas anak	14.756.422.934	5.367.357.422
	790.849.869.105	1.245.678.413.301

Mulai tahun 2013 Perusahaan memutuskan untuk mengubah kebijakan pengakuan pendapatan khususnya untuk proyek konstruksi sesuai PSAK 34: Kontrak Konstruksi (Revisi 2010).

Karakteristik transaksi proyek TITO memenuhi kriteria untuk mengakui pendapatan berdasarkan PSAK 34: Kontrak Konstruksi dengan menggunakan metode presentase penyelesaian. Proyek TITO memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Telkom sebagai pelanggan memiliki kemampuan untuk menegosiasi secara khusus agar aktivitas pembangunan fiber optic dapat memenuhi kebutuhan khususnya.

29. PENDAPATAN, BEBAN POKOK DAN LABA KOTOR *(lanjutan)*

- Proyek TITO merupakan kombinasi dari berbagai aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan sebagai infrastruktur sarana komunikasi.

- Konfigurasi proyek terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan yang penyelesaian membutuhkan waktu cukup lama, estimasi penyelesaian Migrasi FTTH membutuhkan waktu sekitar 11-12 bulan selain dikarenakan migrasi FTTH sampai ke rumah pelanggan , masalah perijinan dan perubahan design dari kastemer merupakan kendala penyelesaian.

Berdasarkan kriteria diatas, perubahan kebijakan pengakuan pendapatan untuk proyek TITO yang bersifat konstruksi adalah dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas Perusahaan.

Presentase penyelesaian dibuktikan dengan Berita acara Progres Fisik yang disetujui dan ditandatangani Telkom dan INTI.

Pendapatan dan beban yang diakui serta progres penyelesaian atas project TITO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2014			
	Pendapatan	Beban pokok	Laba (rugi)	% penyelesaaian
Project TITO - SP#4	31.483.734.239	(34.274.736.636)	(2.791.002.397)	52,38%
Project TITO - SP#5	62.627.780.004	(67.321.979.327)	(4.694.199.323)	61,61%
Project TITO - SP#6	34.632.718.220	(31.299.191.122)	3.333.527.098	41,02%
Project TITO - SP#7	61.330.362.675	(77.521.016.296)	(16.190.653.621)	46,84%
Project TITO - SP#8	56.836.009.885	(70.984.733.192)	(14.148.723.308)	45,71%
Project TITO - SP#9	47.024.100.481	(50.034.386.239)	(3.010.285.758)	40,36%
Project TITO - SP#10	106.937.205.024	(110.226.972.953)	(3.289.767.929)	43,18%
Project TITO - SP#11	-	-	-	100,00%
Project FTTH1	(1.055.408.162)	(17.881.339.761)	(18.936.747.923)	97,46%
Project FTTH2	12.830.482.607	(20.226.442.657)	(7.395.960.050)	88,93%
Jumlah penjualan Project TITO	412.646.984.974	(479.770.798.184)	(67.123.813.211)	

29. PENDAPATAN, BEBAN POKOK DAN LABA KOTOR *(lanjutan)*

	Tahun 2013			
	Pendapatan	Beban pokok	Laba (rugi)	% penyelesaaian
Project TITO - SP#4	77.433.910.640	(63.189.380.676)	14.244.529.964	32,65%
Project TITO - SP#5	116.624.170.035	(98.231.643.858)	18.392.526.177	36,70%
Project TITO - SP#6	77.929.959.678	(56.756.356.451)	21.173.603.227	26,22%
Project TITO - SP#7	92.568.825.541	(76.034.455.771)	16.534.369.770	23,58%
Project TITO - SP#8	135.528.718.450	(110.347.856.704)	25.180.861.746	28,98%
Project TITO - SP#9	81.813.999.596	(67.014.481.394)	14.799.518.202	19,86%
Project TITO - SP#10	193.748.389.329	(156.805.215.212)	36.943.174.117	23,36%
Project TITO - SP#11	3.339.941.244	(2.778.206.210)	561.735.034	100,00%
Project FTTH1	51.506.247.214	(46.678.703.888)	4.827.543.326	73,90%
Project FTTH2	12.859.517.320	(5.864.751.351)	6.994.765.969	25,35%
Jumlah penjualan Project TITO	843.353.679.047	(683.701.051.516)	159.652.627.531	

30. BEBAN PENJUALAN

	2014	2013
Tenaga kerja tidak langsung	13.071.798.051	12.988.833.644
Administrasi dan rumah tangga	4.413.102.342	5.795.191.448
Penyusutan aset tetap	2.952.460.284	2.684.073.639
Kesejahteraan pegawai	1.406.707.960	1.613.744.583
Pemeliharaan dan perbaikan	924.585.392	633.206.258
Uji Coba Lapangan	380.498.222	50.872.094
Kehumasan	374.947.033	177.680.795
Sertifikasi Produk	124.774.600	65.713.340
Amortisasi	25.516.530	28.891.531
Konsultan	10.000.000	4.545.454
Seminar dan pelatihan	-	186.912.227
Jumlah	**23.684.390.414**	**24.229.665.013**

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2014	2013
Tenaga kerja tidak langsung	48.183.218.246	45.407.651.558
Administrasi dan rumah tangga	18.182.826.643	19.711.249.937
Kesejahteraan pegawai	6.979.169.706	8.622.799.586
Pemeliharaan dan perbaikan	6.294.251.367	5.617.100.120
Amortisasi	4.876.712.517	4.368.767.073
Penyusutan aset tetap	2.187.931.617	2.721.521.193
Kehumasan	1.214.337.798	686.628.208
Seminar dan pelatihan	997.202.284	2.825.927.127
Konsultan	932.769.182	1.051.586.592
Pajak	752.571.220	682.270.848
Kualitas	608.275.852	774.023.545
Jumlah	**91.209.266.432**	**92.469.525.787**

32. BEBAN PENGEMBANGAN

	2014	2013
Tenaga kerja tidak langsung	4.036.417.298	3.966.902.759
Administrasi dan rumah tangga	1.339.721.405	931.840.229
Amortisasi	1.171.015.493	1.171.015.488
Kesejahteraan pegawai	573.954.271	357.366.276
Pemeliharaan dan perbaikan	292.954.098	219.018.816
Penyusutan aset tetap	42.845.579	61.387.244
Seminar dan pelatihan	-	72.687.202
Jumlah	**7.456.908.144**	**6.780.218.014**

33. BEBAN PENDANAAN

	2014	2013
Beban bunga pinjaman bank - *Perusahaan*	91.294.070.665	19.162.768.987
Beban bunga pinjaman bank - *Entitas Anak*	5.000.393.000	3.301.947.677
Jumlah	**96.294.463.665**	**22.464.716.664**

Beban pendanaan merupakan beban bunga pinjaman Perusahaan dan entitas anak. Beban bunga yang dikapitalisasi kedalam proyek TITO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rpnil dan Rp17.180.517.577 atau 0% dan 76,5% dari total beban bunga.

34. PENDAPATAN LAIN-LAIN

	2014	2013
Bunga Deposito dan Jasa Giro	5.564.785.370	7.104.808.370
Optimalisasi Asset	3.871.088.367	3.185.900.288
Laba Selisih Kurs	3.304.657.731	-
Reimburse Listrik & Tlp Tenant	1.484.132.635	1.303.662.355
Klaim asuransi	412.330.832	21.400.000
Denda dan diskon	164.727.146	862.194.853
Selisih Pembayaran Utang Piutang	71.129.881	-
Penurunan Nilai Persediaan	758	-
Lainnya	7.133.961.159	3.618.238.433
Jumlah	**22.006.813.879**	**16.096.204.299**

35. BEBAN LAIN-LAIN

	2014	2013
Penurunan Nilai Aset SMP BBM (Catatan 13)	63.466.059.379	-
Imbalan Pasca Kerja	13.943.102.995	14.210.680.570
Penurunan Nilai Piutang Ragu-ragu	15.022.535.434	3.817.887.490
Denda keterlambatan	7.782.576.544	3.945.954.840
Selisih pembayaran hutang / piutang	-	324.677.303
Rugi Selisih Kurs	-	38.907.221.451
Lainnya	5.201.491.841	5.505.090.521
Jumlah	**105.415.766.193**	**66.711.512.175**

36. PERIKATAN-PERIKATAN

1. Dalam rangka mewujudkan penghematan energi listrik nasional, pada tanggal 26 Agustus 2008 Perusahaan juga telah melakukan kerjasama dengan PLN. Perusahaan berpartisipasi dalam hal demand side management yang meliputi penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan PLN antara lain KWH Meter Digital, Advance Metering Infrastructure dan inovasi produk lampu hemat energi dengan menggunakan LED.

   Kerjasama tersebut telah ditindaklanjuti dengan kontrak Pekerjaan Pembangunan PLTS 80 KWP di:

   a Pulau Buku Limau Lokasi Unit Layanan Tanjung Pandan, kontrak nomor: 019.Pj/611/AI/W.BABEL/2013 tanggal 26 April 2013, jadwal masa pemeliharaan selesai pada tahun 2014.

   b. Pulau Celagen Lokasi Area Bangka, kontrak nomor: 020.Pj/611/AI/W.BABEL/2013 tanggal 26 April 2013, jadwal masa pemeliharaan selesai pada tahun 2014.

36. PERIKATAN-PERIKATAN *(lanjutan)*

2. Pada tanggal 15 Oktober 2009 Perusahaan bersama dengan PT RSI (Rohde & Schwarz Indonesia) menandatangani kerjasama di bidang Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Nasional yang meliputi penyediaan produk utama (main product), penyediaan produk pendukung (supporting facilities), marketing, kontrak dengan Dirjen Postel, Project Manajement, Project Implementation dan pembiayaan pekerjaan.

   Kerjasama tersebut telah ditindaklanjuti dengan kontrak:

   a. Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR):

      - Tahap Pertama, kontrak Nomor 731/DJPT.4/KOMINFO/5/2009, tanggal 22 Mei 2009, telah selesai pada tanggal 10 Desember 2011.
      - Tahap Kedua, kontrak Nomor 1120/DJPT.4/KOMINFO/6/2010, tanggal 25 Juni 2010, telah selesai pada tanggal 23 Desember 2013.
      - Tahap Ketiga, kontrak Nomor 739/DJSDPPI.4/KOMINFO/07/2011, tanggal 5 Juli 2011, jadwal selesai masa pemeliharaan tanggal 24 Desember 2014.

   b. Pemeliharaan dan Operasional Sistem Informasi Manajemen Spektrum, dengan nomor kontrak 17A/DJSDPPI.4/KOMINFO/01/2012, tanggal 24 Januari 2012, telah selesai pada tanggal 24 Januari 2013.

3. Dalam rangka kegiatan pengembangan dan rekayasa dibidang IT & Komunikasi untuk peningkatan daya saing industri, peningkatan pemanfaatan bersama sumber daya yang dimiliki dan pengaturan aspek bisnis, teknis dan komersialisasi hasil inovasi bidang IT dan Komunikasi, pada tanggal 3 Nopember 2009 telah ditandatangani kerja sama dengan BPPT No. 40/KB/BPPT-INTI/XI/2009 untuk penerapan dan komersialisasi inovasi BPPT Kerja sama tersebut meliputi pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil inovasi yang telah ada, penelitian dan pengembangan teknologi baru, pendidikan dan latihan, bantuan teknis dan bidang-bidang lain lainnya yang dipandang perlu. Kerjasama ini akan berakhir pada tanggal 3 Nopember 2014.

   Pada tanggal 19 September 2014, ditandatangi Perjanjian Kerjasama dengan BPPT Nomor 49/PKS/BPPT-PT.INTI/2014. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian.

4. Dalam rangka sinergi BUMN Perusahaan telah melakukan kerjasama (B to B) dengan PT Telkom pada tanggal 14 April 2010, dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama (MOU) antara PT Inti dengan PT Telkom dalam rangka percepatan program transformasi bisnis PT Telkom, melalui modernisasi jaringan akses guna peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kemampuan industri lokal perangkat telekomunikasi. Secara khusus, tujuan kerja sama ini adalah untuk modernisasi jaringan akses PT Telkom dari bahan tembaga menjadi serat optik yang dicanangkan untuk 4 sampai 5 tahun kedepan. Kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga melalui Optimalisasi Aset jaringan Kabel Tembaga dengan Pola Trade In/Trade Off Nomor: K.TEL.395/HK.810/ITS-00/2010 pada tanggal 30 Desember 2010. Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatagani dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2015.

36. PERIKATAN-PERIKATAN *(lanjutan)*

Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Induk dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2011, Amandemen Kedua pada tanggal 30 Agustus 2012, Amandemen Ketiga pada tanggal 30 September 2013, dan terakhir dengan Amandemen Keempat pada tanggal 4 Juni 2014. Sesuai dengan perjanjian, atas pekerjaan ini Perusahaan akan memperoleh imbalan sebesar nilai kabel tembaga yang diloloskan dengan formulasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak.

5. Pada tanggal 28 Agustus 2013 telah ditandatangani perjanjian nomor 15/C00000/2013-S3 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT INTI (Persero) mengenai Pekerjaan Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMP BBM) dengan jangka waktu perjanjian tanggal 2 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2018. SMP BBM merupakan penerapan teknologi informasi di SPBU yang memiliki kemampuan mendaftar konsumen (kendaraan), mencatat transaksi pembelian, melakukan proses komputasi pembatasan pembelian, mengirimkan ke Data Center, dan membuat pelaporan. SMP BBM ditujukan untuk memenuhi kebutuhan PT Pertamina (Persero) sebagai bagian dari pelayanan pelanggan sekaligus melaksanakan penugasan dari pemerintah terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi. Adapun lingkup pekerjaan meliputi Pengembangan Sistem SMP BBM, Implementasi/Operasi SMP BBM, serta Management Proyek dan Management Kualitas. Atas pekerjaan ini Perusahaan akan menerima fee atas jumlah liter BBM yang disalurkan melalui SMP BBM yang tercatat di DC Pertamina (throughput). Throughput fee yang berlaku terdiri dari throughput fee selama masa pengoperasian SMP BBM sebesar Rp17,58/ liter. Selanjutnya pada Masa Pengendalian BBM, selain throughput fee, Perusahaan akan menerima tambahan pendapatan sebesar Rp591.000.000.000 sesuai dengan kontrak.

   Pada tanggal 16 Februari 2015, sesuai dengan surat dari PT Pertamina No. 054/F10000/2015-S3 tanggal 16 Februari 2015, sehubungan dengan dikeluarkannya Perpres No. 191 tahun 2014, pihak PT Pertamina sedang mengevaluasi kelanjutan proyek SMP BBM termasuk pilihan untuk menghentikan proyek SMP BBM.

6. Pada tanggal 12 September 2014 telah ditandatangani Perjanjian Nomor: 12/SP/PF.III-17/PLTS-PEMDA/PPKF-L/DJE/IX/2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Lainnya, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dan PT INTI mengenai Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Kontrak berlaku sejak 12 September 2014 sampai dengan 30 Desember 2014, dengan masa pemeliharaan selama enam bulan.

36. PERIKATAN-PERIKATAN *(lanjutan)*

7. Fasilitas Kredit Bank

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Akta No. 08 tanggal 22 Mei 2014 tentang Perpanjangan dan Suplesi Perjanjian Kredit Modal Kerja Impor (KMKI) (Interchangeble Fasilitas PJI/L/C). BRI memberikan fasilitas Modal Kerja Impor dengan plafond semula sebesar Rp300.000.000.000 menjadi sebesar Rp400.000.000.000 termasuk didalamnya Fasilitas Trust Receipt yang semula sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp100.000.000.000. Tujuan penggunaan fasilitas PJI adalah untuk menjamin pembukaan L/C impor dan atau SKBDN atas pembelian barang/bahan baku yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek, fasilitas KMKI dipergunakan untuk mem-backup fasilitas PJI dan menampung LC/SKBDN (Rupiah dan Valas), baik jenis LC/SKBDN berupa Sight dan atau usance (LC/SKBDN) yang telah jatuh tempo, sedangkkan fasilitas Trust Receipt (TR) dipergunakan untuk menampung LC/SKBDN import (Valas) baik sight maupun usance yang telah jatuh tempo. Jangka waktu atas fasilitas tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31-03-2015.

Akta No. 09 tanggal 22 Mei 2014 tentang Perpanjangan Perjanjian Plafond Bank Garansi. BRI memberikan fasilitas dengan menerbitkan Bank Garansi untuk kepentingan Pihak Ketiga atau "Terjamin", dalam bentuk Contingent, dengan jumlah plafond tidak melebihi Rp50.000.000.000. Bank Garansi dipergunakan sebagai jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan ataupun jaminan lainnya serta jaminan kepabeanan atas proyek-proyek yang diperoleh. Jangka Waktu atas fasilitas bank garansi adalah 12 bulan, terhitung mulai tanggal 22-05-2014 sampai dengan 31-03-2015.

Akta No. 10 tanggal 22 Mei 2014 tentang Perpanjangan dan Penurunan Perjanjian Kredit Modal Konstruksi. BRI memberikan fasilitas Kredit Modal kerja Konstruksi (KMK Konstruksi) dengan plafon semula sebesar Rp250.000.000.000 menjadi sebesar Rp150.000.000.000 dalam bentuk kredit line dengan pseudo R/C transaksional sesuai proyek dan pembayaran termijn. Fasilitas KMK Konstruksi ini digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha fabrikasi dan jasa konstruksi untuk proyek yang diperoleh. Jangka waktu atas fasilitas KMK Konstruksi sampai dengan tanggal 31-03-2015.

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kridit dan risiko likuiditas.

Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh Divisi Keuangan dibawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi.

(a) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaski yang yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dollar Amerika Serikat.

Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk penempatan deposito dan pembelian/penjualan valas dengan menggunakan produk-produk forex (Today, Tom, Spot, Forward) yang tersedia pada bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk Perusahaan melalui negosiasi dengan tetap memperhatikan nilai tukar, premium swap/swap/swap discount/swap point.

Per tanggal 31 Desember 2014, jika rupiah melemah terhadap dolar sebesar 10% dan semua variabel lain tetap, laba setelah pajak dan pendapatan komprehensif lain untuk tahun berjalan akan lebih rendah sebesar Rp11.426.402.583. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar sebesar 10% dan semua variabel lain tetap, laba setelah pajak dan pendapatan komprehensif lain untuk tahun berjalan akan lebih tinggi sebesar Rp11.426.402.583.

Berikut adalah posisi saldo dalam mata uang asing per 31 Desember 2014:

	Valas	Equivalen (Rp)
	USD	
Aset		
Kas dan setara kas	13.145,71	163.532.632
Piutang usaha	32.769,00	407.646.360
Liabilitas		
Utang usaha	8.289.858,41	103.125.838.619
Utang bank	941.267,38	11.408.160.646
Utang bersih (aset - liabilitas)	**(9.185.211,08)**	**(113.962.820.272)**

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN *(lanjutan)*

(b) Risiko suku bunga

Resiko suku bunga atas nilai wajar atau arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman bank jangka pendek.

Kebijakan Perusahaan terkait dengan risiko suku bunga adalah melakukan pinjaman dengan suku bunga yang ditetapkan pada Perjanjian Kredit, dengan jatuh tempo sesuai umur proyek dan bunga dihitung dari saldo pinjaman. Perusahaan mengevaluasi perbandingan suku bunga dari pinjaman bank jangka pendek sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan dipasar.

Terdapat perubahan tingkat suku bunga pinjaman Bank BRI semula 10% naik menjadi 11% pada tahun 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2014, jika suku bunga naik 10% dan semua variabel lainnya tetap, laba setelah pajak dan pendapatan komprehensif lain tahun berjalan akan lebih rendah sebesar Rp5.020.218.742. Sebaliknya, jika suku bunga turun 10% dan semua variabel lainnya tetap, laba setelah pajak dan pendapatan komprehensif lain tahun berjalan akan lebih tinggi sebesar Rp5.020.218.742.

(c) Risiko kredit

Tabel dibawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan:

	31 Desember 2014
Kas dan setara kas	45.668.364.932
Aset keuangan tersedia untuk dijual	2.114.890.000
Piutang usaha dan piutang lain-lain	55.288.508.777
Aset lancar lainnya	971.727.242.244
Penyertaan jangka panjang	19.328.082.842
Jumlah	**1.094.127.088.795**

Keterangan:

- Piutang lain-lain: Piutang tenant
- Aset lancar lainnya: Jaminan yang diberikan, Pendapatan YMH Diterima (TITO dan bunga deposito)
- Penyertaan jangka panjang: Saham PT GOC, PT POT, PT JK NET, Premier Telecomunication Int. LTD (PTI), PT Mitra Bakti Inti Perdana

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN *(lanjutan)*

Perusahaan relatif aman terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain, sebagai berikut:

Piutang usaha relatif aman dari risiko kredit yaitu piutang dari PT Telkom, PT Nokia Solutions and Networks dan PT Huawei Tech Investment.

Piutang lain-lain pun relatif aman dari risiko kredit karena berasal dari piutang tenant.

Risiko kredit yang timbul dari piutang dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan piutang usaha.

Rincian umur piutang usaha yang tidak mengalami penurunan nilai dapat dilihat pada Catatan 5.

(d) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Perusahaan secara berkala bulanan, triwulanan dan tahunan melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, antara lain rasio likuiditas, rasio debt equity terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian kredit.

	Dalam 1 Tahun	1 - 2 Tahun	2 - 5 Tahun
Utang usaha	319.790.784.921	-	-
Utang bank	549.479.377.581	-	-
Pinjaman MTN	395.000.000.000	-	-
BYMHD	132.184.998.686	-	-
	1.396.455.161.188	**-**	**-**

-

38. KELANGSUNGAN USAHA

Perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp265,8 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sehingga menyebabkan saldo rugi (defisit sebesar Rp177,5 milyar). Kerugian ini telah secara signifikan melemahkan posisi keuangan dan kemampuan Perusahaan untuk melangsungkan kegiatan usahanya. Rencana-rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian proyek TITO:
   a. Penyelesaian sisa pekerjaan pembangunan, khususnya proses repair, uji terima, rekonsiliasi dan kemudian penerbitan Berita Acara Serah Terima 1 (BAST-1) yang kemudian akan digunakan sebagai dasar penagihan ke TELKOM, diperkirakan pembangunan proyek TITO akan dapat dituntaskan pada bulan Juli 2015;
   b. Penyelesaian pekerjaan IKR dan migrasi yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2015; dan
   c. Percepatan penyelesaian dokumen yang diperlukan sebagai dasar uji terima, rekonsiliasi dan penerbitan BAST-1 sehingga INTI dapat melakukan penagihan ke TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga dananya dapat digunakan untuk menambah pembiayaan proyek.
2. Penyelesaian proyek SMP BBM:
   a. Melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan SMP BBM pada SPBU yang telah dibangun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak;
   b. Menghentikan sementara pembangunan SMP BBM pada SPBU diluar wilayah DKI Jakarta; dan
   c. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pimpinan PT Pertamina (Persero) agar dalam hal PT Pertamina (Persero) menghentikan proyek SMP BBM, dilakukan dengan menggunakan ketentuan kontrak yang tepat dan tidak merugikan Perusahaan.
3. Mengembangkan bisnis baru dalam bidang: *1) ICT Infrastructure, 2) Smart System, 3) Smart Applications, 4) Smart Services, 5) ICT Consumer, 6) Smart Defense.*
4. Penambahan pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara yang akan digunakan untuk 3 bidang, yaitu: pertahanan kemananan, maritim, dan infrastruktur pita lebar;
5. Peningkatan kinerja melalui program strategis Perusahaan sebagai berikut:
   a. Peningkatan operasional ekselen yang meliputi pengelolaan material (material management) yang lebih baik, pengelolaan proyek (project management) yang berkualitas, serta edukasi mitra usaha untuk peningkatan kualitasnya;
   b. Pengelolaan modal kerja dengan lebih baik yang meliputi percepatan perputaran modal kerja melalui perolehan proyek dengan *turnover* yang cepat, perbaikan *payable turnover* dan menjaga kolektivibilitas pada tingkat yang menguntungkan, serta perolehan sumber pendanaan yang manarik bagi Perusahaan berupa penambahan PMN dan/atau pola-pola *vendor financing* ;
   c. Peningkatan produktivitas karyawan melalui peningkatan kompetensi SDM, pembangunan budaya Perusahaan, peningkatan kualitas proses dan sistem kerja, pemberdayaan teknologi informasi, serta pembangunan mekanisme *knowledge management.*

Manajemen yakin, bahwa dengan upaya-upaya tersebut Perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang berasal dari kondisi tersebut.

39. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Berikut perubahan-perubahan aset dan liabilitas Perusahaan yang tidak mempengaruhi arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014	2013
Kenaikan investasi oleh entitas anak yang disetor dengan inbreng hak pakai lahan	-	9.100.000.000

40. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Tidak ada peristiwa penting setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan tahun buku 2014.

41. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 yang diselesaikan pada tanggal 17 Februari 2015.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA - INDUK PERUSAHAAN SAJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

	2014	2013
ASET		
ASET LANCAR		
Kas setara kas	41.938.920.260	115.724.594.311
Piutang usaha	33.562.264.255	87.469.535.316
Piutang lain-lain	2.886.392.158	2.927.050.958
Persediaan	396.262.727.936	475.405.910.536
Pajak dibayar dimuka	22.337.800.571	121.157.255.976
Beban dibayar dimuka dan uang muka	-	-
Aset lancar lainnya	971.728.482.311	789.914.627.560
Jumlah Aset Lancar	**1.468.716.587.491**	**1.592.598.974.657**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap	26.864.509.620	34.293.007.641
Penyertaan jangka panjang	28.915.472.000	28.915.472.000
Properti investasi	1	1
Aset tak berwujud	53.104.229.384	93.461.085.688
Aset pajak tangguhan	77.179.861.659	27.037.116.729
Aset lain-lain	15.001.442	1.379
Jumlah Aset Tidak Lancar	**186.079.074.106**	**183.706.683.438**
JUMLAH ASET	**1.654.795.661.596**	**1.776.305.658.095**

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA - INDUK PERUSAHAAN SAJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

	2014	2013
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	357.574.341.933	702.202.682.987
Utang bank	490.766.329.132	396.604.827.939
Utang pajak	730.830.925	1.522.053.133
Provisi masa garansi	8.746.078.684	8.268.251.152
Pendapatan diterima dimuka	5.950.799.452	11.780.678.492
Beban yang masih harus dibayar	108.050.571.137	121.388.935.700
Pinjaman MTN	395.000.000.000	40.000.000.000
Utang lain-lain	44.977.180.464	2.172.423.128
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**1.411.796.131.727**	**1.283.939.852.531**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan pasca Kerja	62.801.403.200	55.064.163.622
Pendapatan ditangguhkan - hak pakai lahan	6.090.407.400	7.830.523.800
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**68.891.810.600**	**62.894.687.422**
JUMLAH LIABILITAS	**1.480.687.942.327**	**1.346.834.539.953**
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:		
Modal saham		
Modal dasar - *1.000.000 Saham.*		
Nilai nominal Rp. 1.000.000 - per saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 350.000 saham	350.000.000.000	350.000.000.000
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya :		
Cadangan umum	67.928.398.347	65.046.155.501
Cadangan tujuan	11.542.719.796	11.542.719.796
Belum ditentukan penggunaannya :		
Laba Tahun Berjalan	(255.363.398.874)	2.882.242.845
Ekuitas yang dapat diartribusikan kepada pemilik entitas induk:	**174.107.719.269**	**429.471.118.142**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.654.795.661.596**	**1.776.305.658.095**

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA - INDUK PERUSAHAAN SAJA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

	2014	2013
PENDAPATAN	796.482.946.622	1.442.349.656.411
BEBAN POKOK PENJUALAN	(776.093.446.172)	(1.240.311.055.879)
LABA KOTOR	**20.389.500.450**	**202.038.600.532**
Beban Usaha		
Beban Penjualan	(22.213.086.022)	(22.827.458.900)
Beban Umum dan Administrasi	(85.996.990.173)	(86.998.096.853)
Beban Pengembangan	(7.456.908.144)	(6.780.218.014)
	(115.666.984.339)	**(116.605.773.767)**
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM BEBAN PENDANAAN	**(95.277.483.889)**	**85.432.826.765**
Beban pendanaan	(91.294.070.665)	(19.162.768.987)
LABA (RUGI) USAHA SETELAH BEBAN PENDANAAN	**(186.571.554.554)**	**66.270.057.778**
Pendapatan (Beban) lain-lain :		
Pendapatan lain-lain	18.349.406.587	13.999.659.551
Beban lain-lain	(97.656.570.266)	(58.474.663.579)
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain	**(79.307.163.679)**	**(44.475.004.028)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	**(265.878.718.232)**	**21.795.053.750**
Beban/pendapatan pajak penghasilan		
Pajak kini	-	(3.149.581.523)
Pajak tangguhan	50.142.744.930	5.727.641.736
Pajak final	(39.627.425.571)	(21.490.871.117)
	10.515.319.359	**(18.912.810.904)**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**(255.363.398.874)**	**2.882.242.845**
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	**(255.363.398.874)**	**2.882.242.845**

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA - INDUK PERUSAHAAN SAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

		Saldo laba			
		Telah ditentukan penggunaannya			
	Modal saham	Cadangan umum	Cadangan tujuan	Belum ditentukan penggunaannya	Ekuitas bersih
Saldo per 01 Januari 2013	**350.000.000.000**	**50.991.798.271**	**11.542.719.796**	**14.204.357.231**	**426.738.875.297**
Pembagian laba 2012:					
Pembentukan cadangan	-	14.054.357.231	-	(14.054.357.231)	-
Program Bina Lingkungan	-			(150.000.000)	(150.000.000)
Laba komprehensif 2013	-			2.882.242.845	2.882.242.845
Saldo per 31 Desember 2013	**350.000.000.000**	**65.046.155.501**	**11.542.719.796**	**2.882.242.845**	**429.471.118.142**
Pembagian laba 2013:					
Pembentukan cadangan	-	2.882.242.845	-	(2.882.242.845)	-
Rugi komprehensif 2014				**(255.363.398.874)**	**(255.363.398.873)**
Saldo per 31 Desember 2014	**350.000.000.000**	**67.928.398.347**	**11.542.719.796**	**(255.363.398.874)**	**174.107.719.269**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA - INDUK PERUSAHAAN SAJA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

	2014	2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (rugi) sebelum pajak	(265.878.718.232)	21.795.053.750
Penyesuaian atas unsur-unsur yang tidak mempengaruhi arus kas :		
Penyusutan aset tetap	7.970.005.467	10.178.082.101
Penyisihan piutang usaha	15.017.917.421	222.814.784
Penyisihan persediaan	(758)	3.008.499.192
Amortisasi beban tangguhan	6.017.094.112	5.555.174.092
Amortisasi pendapatan tangguhan - sewa lahan	-	(870.058.200)
Beban imbalan pasca kerja	16.500.000.000	14.105.943.070
Beban penurunan nilai - SMP BBM	63.466.059.379	-
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	(156.907.642.611)	53.995.508.789
Perubahan modal kerja		
Penurunan (kenaikan) aset lancar:		
Piutang usaha	38.889.353.640	137.180.623.292
Piutang lain-lain	40.658.800	(40.732.232)
Persediaan	79.143.183.358	(151.960.640.251)
Pajak dibayar dimuka	(39.767.114.273)	(97.704.604.822)
Beban dibayar dimuka	-	1.330.772.970
Aset lancar lainnya	(181.813.854.751)	(661.936.365.990)
Kenaikan (penurunan) kewajiban jangka pendek:		
Utang usaha	(344.628.341.054)	569.812.309.618
Utang pajak	(791.222.207)	(3.703.677.211)
Provisi masa garansi	477.827.532	3.877.601.462
Pendapatan diterima dimuka	(5.829.879.040)	(11.041.475.887)
Beban yang masih harus dibayar	(13.338.364.563)	24.038.245.059
Hutang lain-lain	42.804.757.336	(130.794.219)
	(581.720.637.833)	(136.283.229.422)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(39.627.425.571)	(29.266.243.068)
Penerimaan kelebihan pembayaran pajak PPN	138.586.569.678	7.666.987.148
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(482.761.493.726)**	**(157.882.485.342)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(594.075.279)	(4.798.603.132)
Kenaikan beban ditangguhkan	(29.126.297.187)	(82.558.541.836)
Pendapatan sewalahan JV	(1.740.116.400)	-
Aset lain-lain	37.567.770	(76)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(31.422.921.096)**	**(87.357.145.045)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Perolehan utang bank	94.161.501.193	218.180.158.000
Pinjaman MTN	355.000.000.000	40.000.000.000
Realisasi imbalan pasca kerja	(8.762.760.422)	(6.675.071.760)
Pembagian laba	-	(150.000.000)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**440.398.740.771**	**251.355.086.240**
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(73.785.674.051)	6.115.455.854
Kas dan setara kas awal tahun	115.724.594.311	109.609.138.457
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**41.938.920.260**	**115.724.594.311**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

LAPORAN TAHUNAN 2014
annual report

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat
Head Office
Jl. Moh. Toha No 77 Bandung 40253, INDONESIA
Tel: +62-22-5201501
Fax: +62-22-5202444

Kantor Cabang
Branch Office
Plaza Setiabudi 2, 2nd Floor, Suite 201-202
Jl. Rasuna Said Kav 62 Kuningan, Jakarta 12920, INDONESIA
Tel: +62-21-52900829
Fax: +62-21-52900826

E-mail : info@inti.co.id
Http://www.inti.co.id